



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang menelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- b. bahwa untuk menelaraskan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rancangan Perubahannya;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari arah tematik pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 periode ketiga dan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan dan Program Strategis Nasional serta pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2022.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-----------|---|
| BAB I. | Pendahuluan; |
| BAB II. | Gambaran Umum Kondisi Daerah; |
| BAB III. | Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangari Dearah; |
| BAB IV. | Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; |
| BAB V. | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; |
| BAB VI. | Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; |
| BAB VII. | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; |
| BAB VIII. | Penutup. |

Pasal 4

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 selanjutnya menjadi :

- (1) pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- (2) pedoman penyelarasan prioritas pembangunan tahun 2022 Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dan.
- (3) pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi penambahan subkegiatan baru pada KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (2) Penambahan subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 8

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2022 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD 2022 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

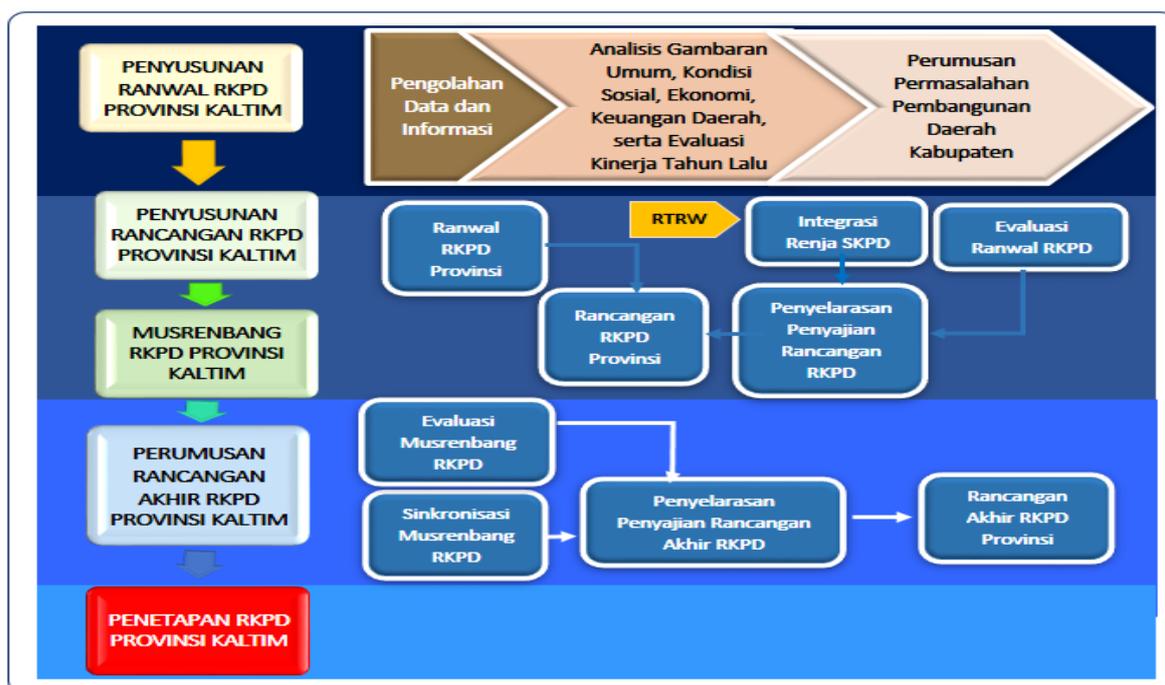
Dokumen RKPD Tahun 2021 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat

Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Tahun 2022 akan difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia, daya saing investasi, daya saing infrastruktur disertai tata kelola pemerintahan berbasis informasi dan teknologi, dalam rangka menyambut lokasi Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Memperhatikan fokus-fokus pembangunan dimaksud, maka RKPD Tahun 2022 mengusung tema “*Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam rangka menyambut IKN*”.



Gambar I.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 6 (enam) tahapan yang dapat dilihat pada Gambar I.1, yakni sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur; dan
6. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.2.1 Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), serta;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

1.2.2 Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

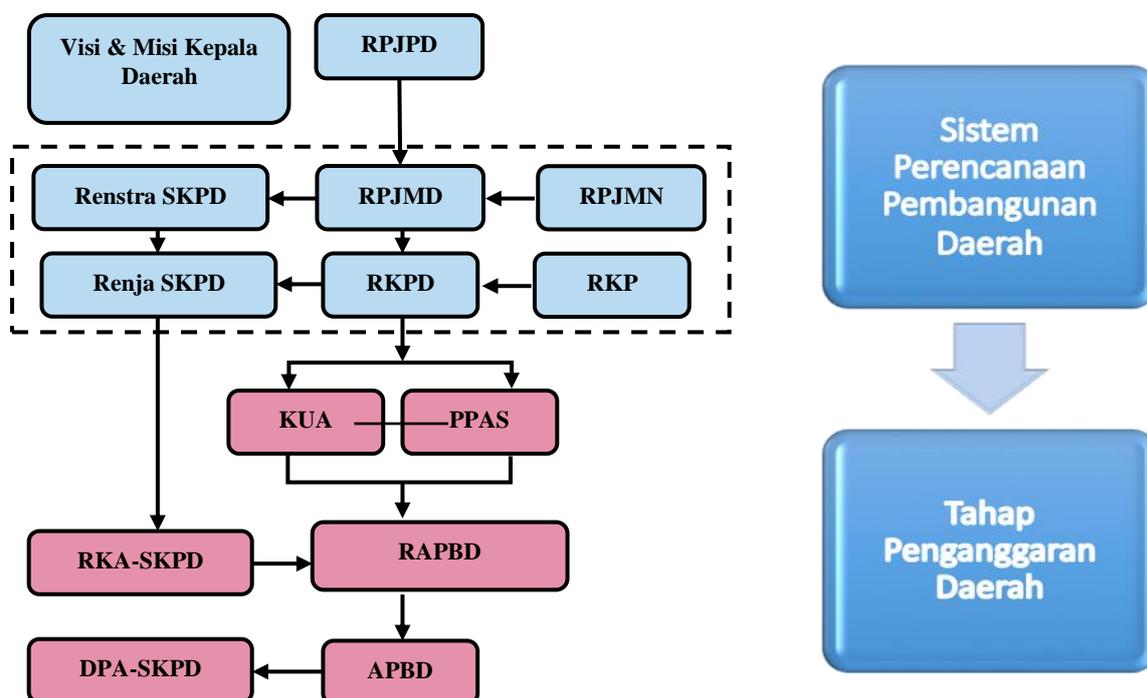
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan
19. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada :

- a. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPJMD 2019-2023 tahun keempat, yaitu penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta penyalarsan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota;
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu penyalarsan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2022.



Gambar I.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Selanjutnya RKPD 2022 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja -PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan daerah di Tahun 2022. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, yaitu :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini.
- BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas yang tertuang harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VIII Penutup
Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.
- LAMPIRAN Lampiran 1

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Lampiran 2

Daftar Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokir) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

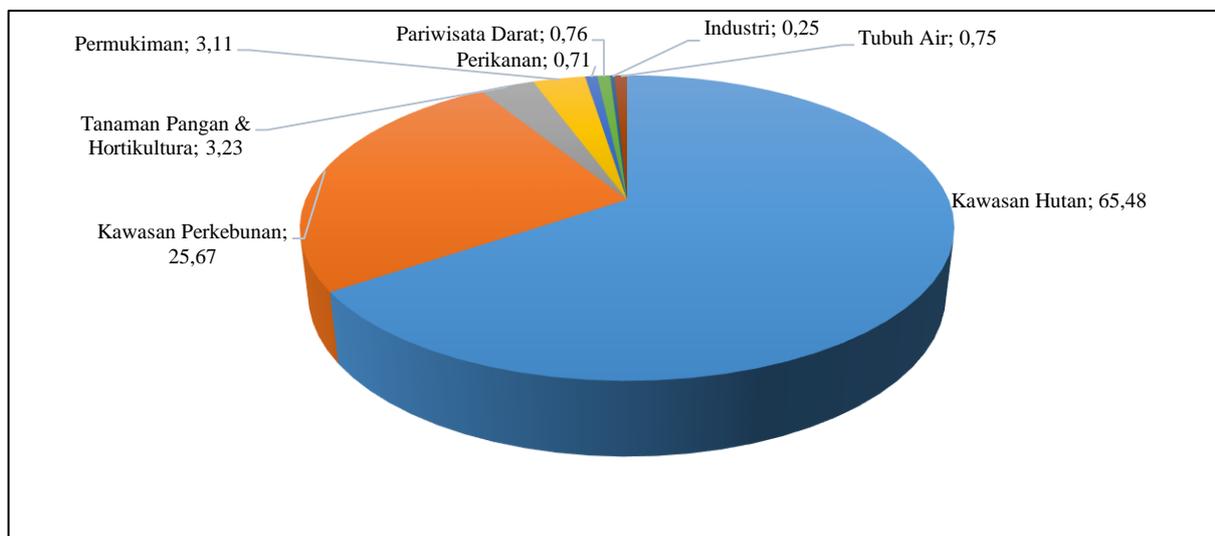
2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT)

dan 119° 00° Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

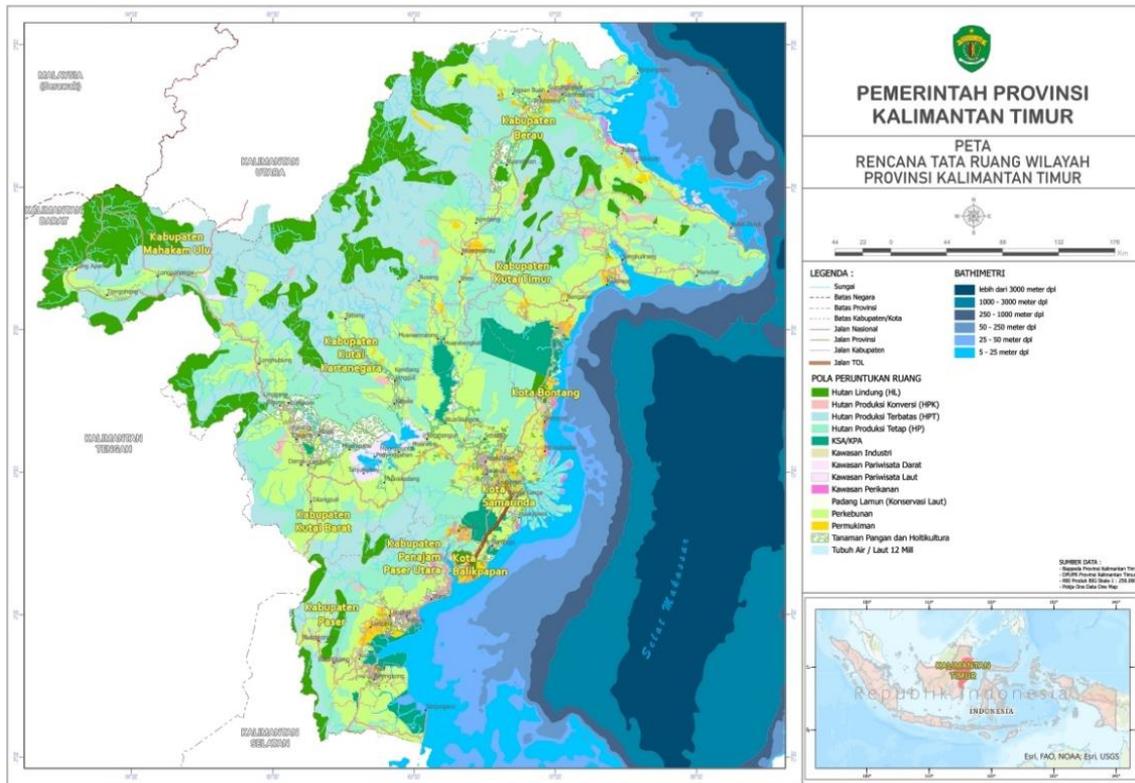
Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.



Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2016

Gambar II.1

Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2035



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

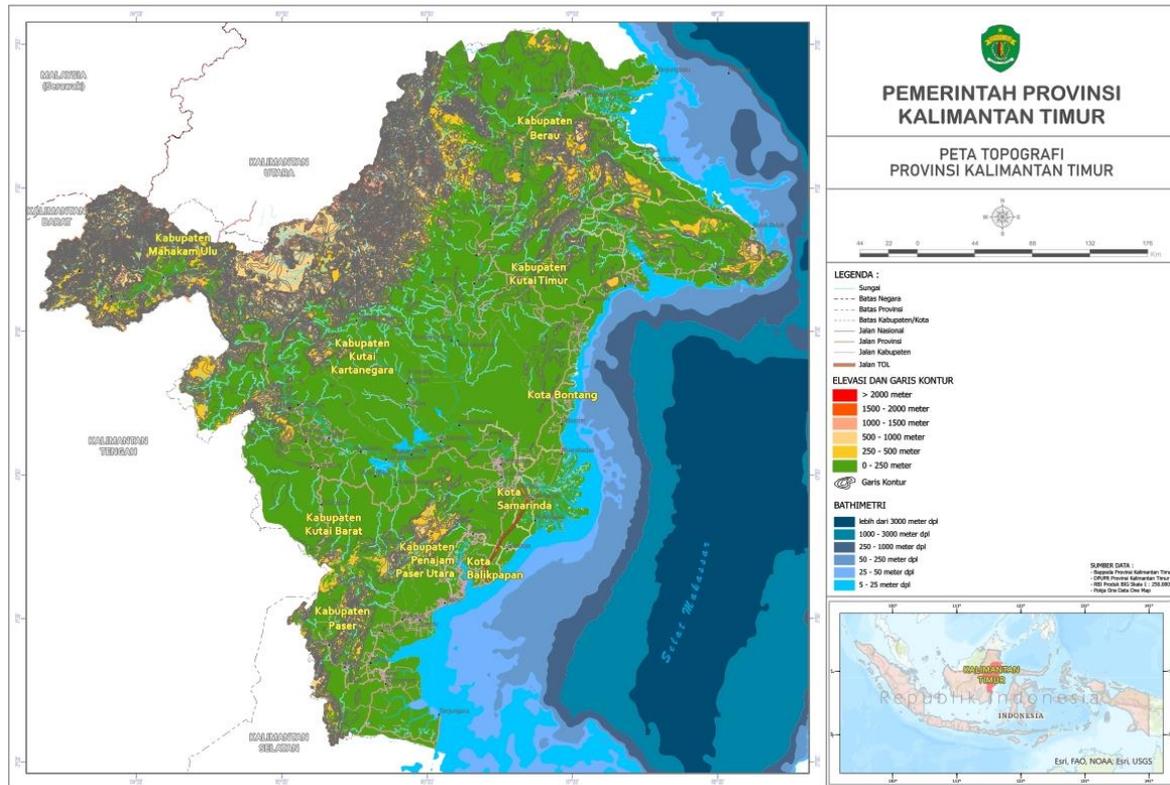
Gambar II.2

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebesar 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95,758 Ha (0,75%).

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen,

terdapat dibagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya

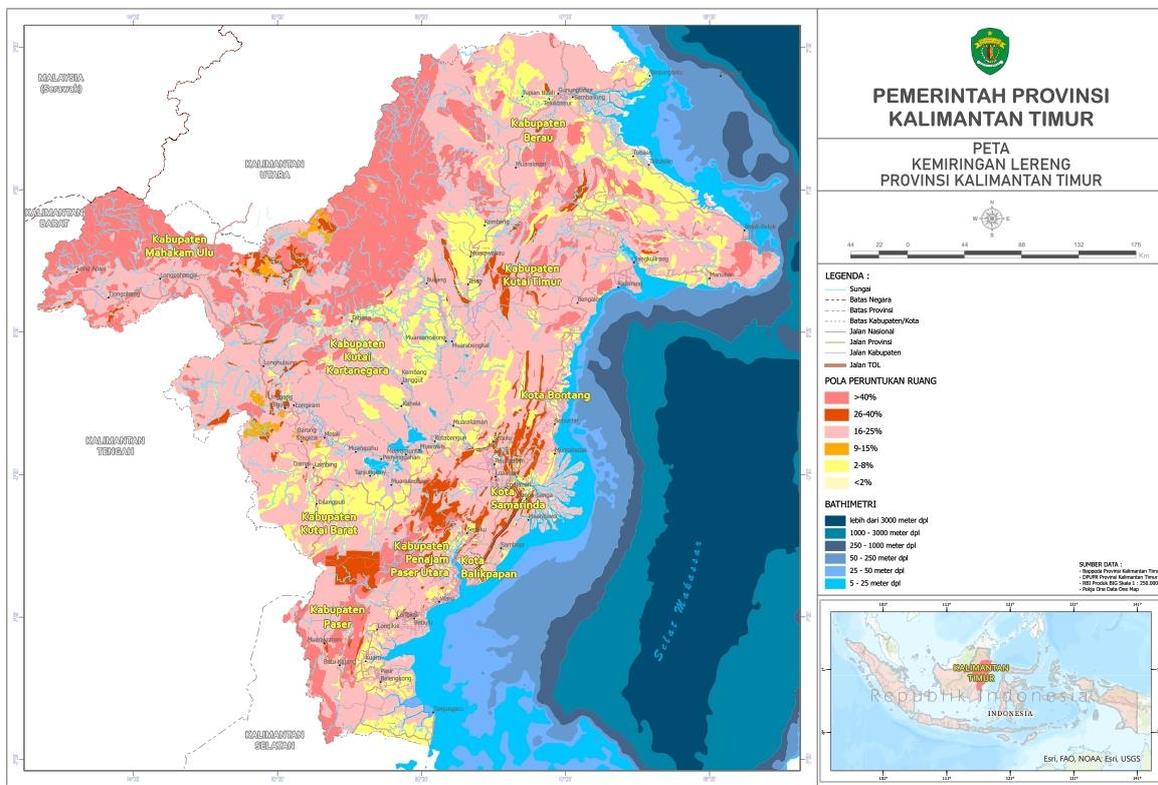


suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.3
Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

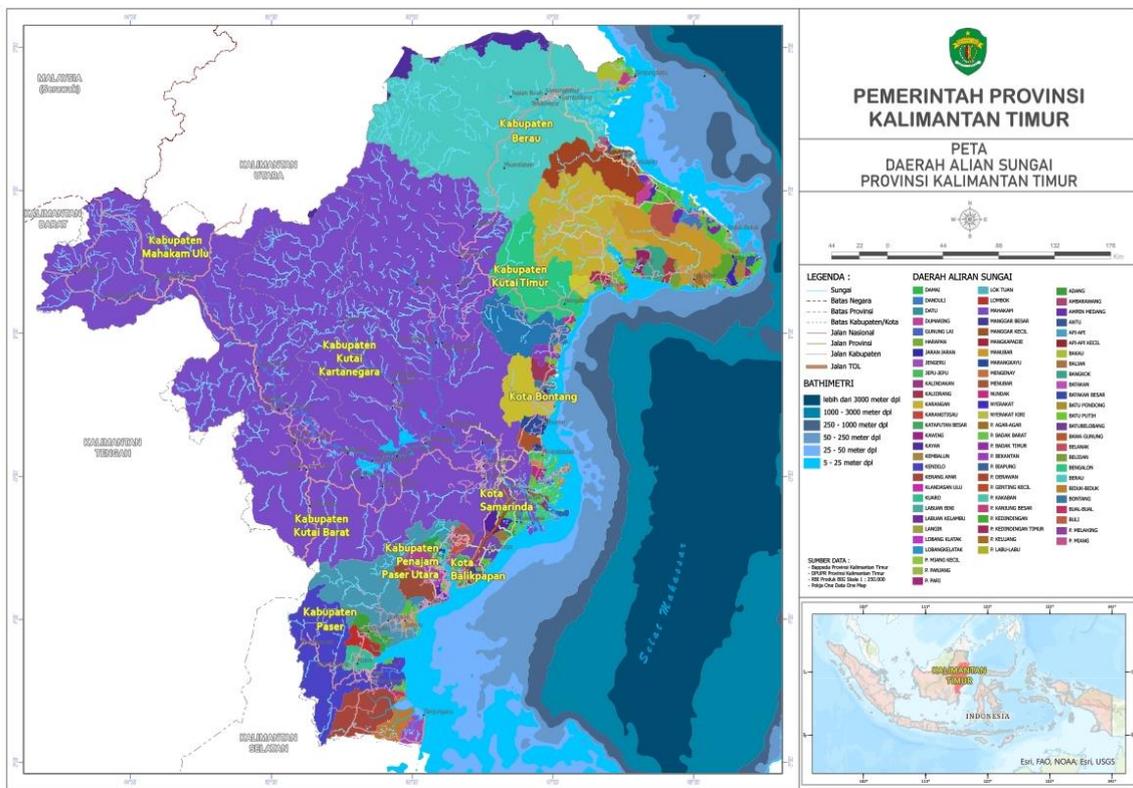


Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.4

Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada diwilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam, Gunung Batuayan, Sungai Bahan, Sungai Bani, Sungai Kayan, Sungai Senyuir, Sungai Sesayap, Sungai Telen dan Sungai Wahan.

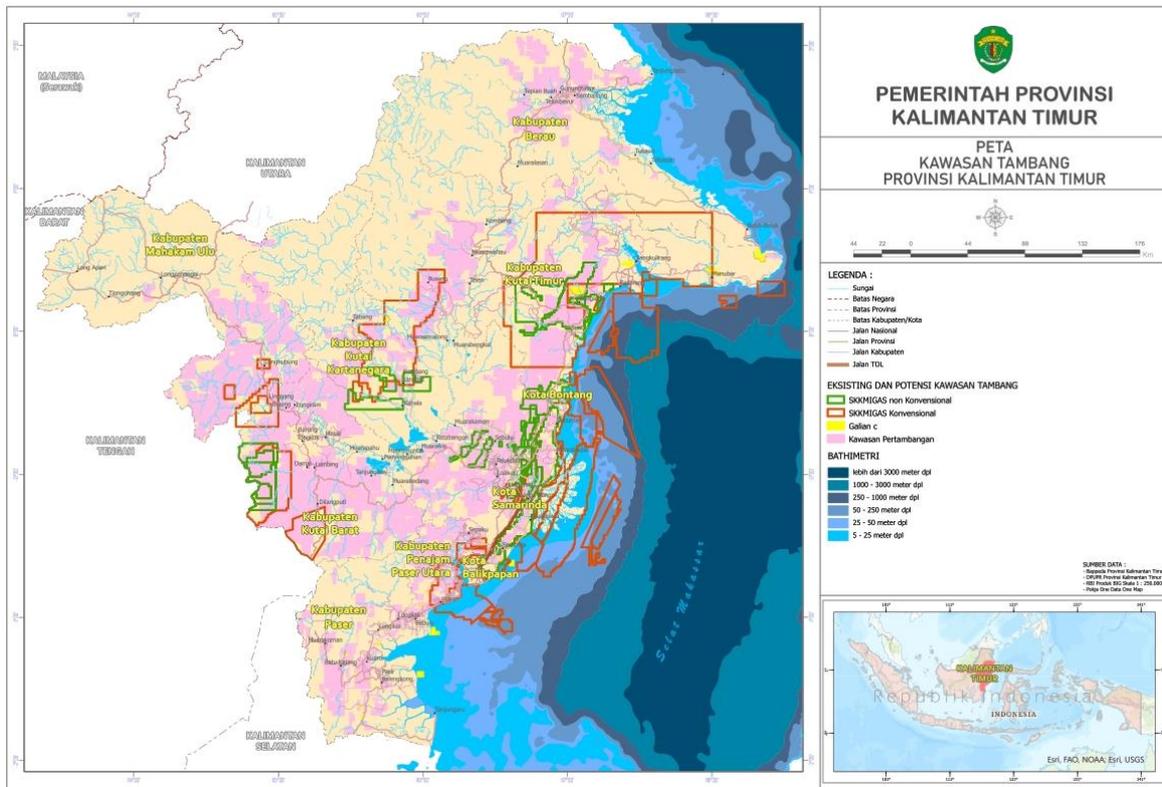


Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.5

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar II.6.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.6

Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel II.1

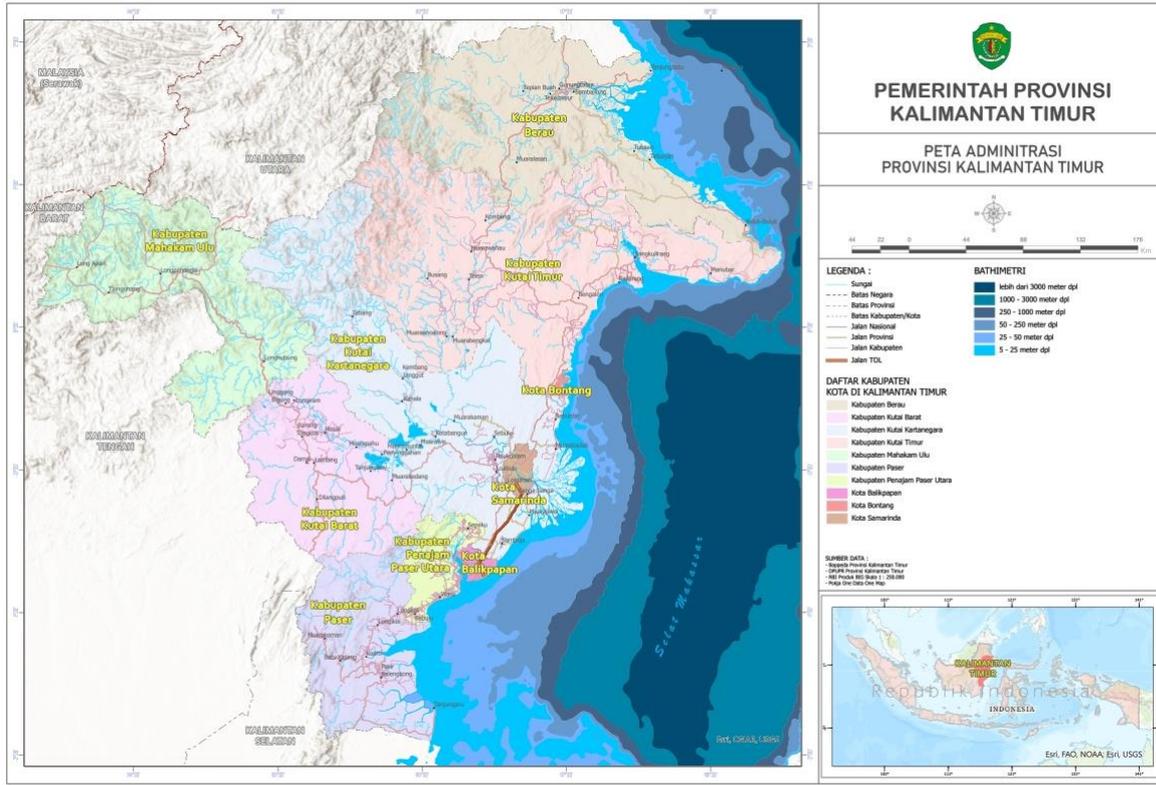
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.109.696	10	144
2	KUBAR	1.370.992	16	194
3	KUKAR	2.598.808	18	237
4	KUTIM	3.105.171	18	141
5	Berau	2.173.519	13	110
6	PPU	292.373	4	54
7	MAHULU	1.944.941	5	50
8	Balikpapan	51.225	6	34
9	Samarinda	71.653	10	59

10	Bontang	16.314	3	15
Kalimantan Timur		12.734.692	103	1.038

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar II.7.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.7

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

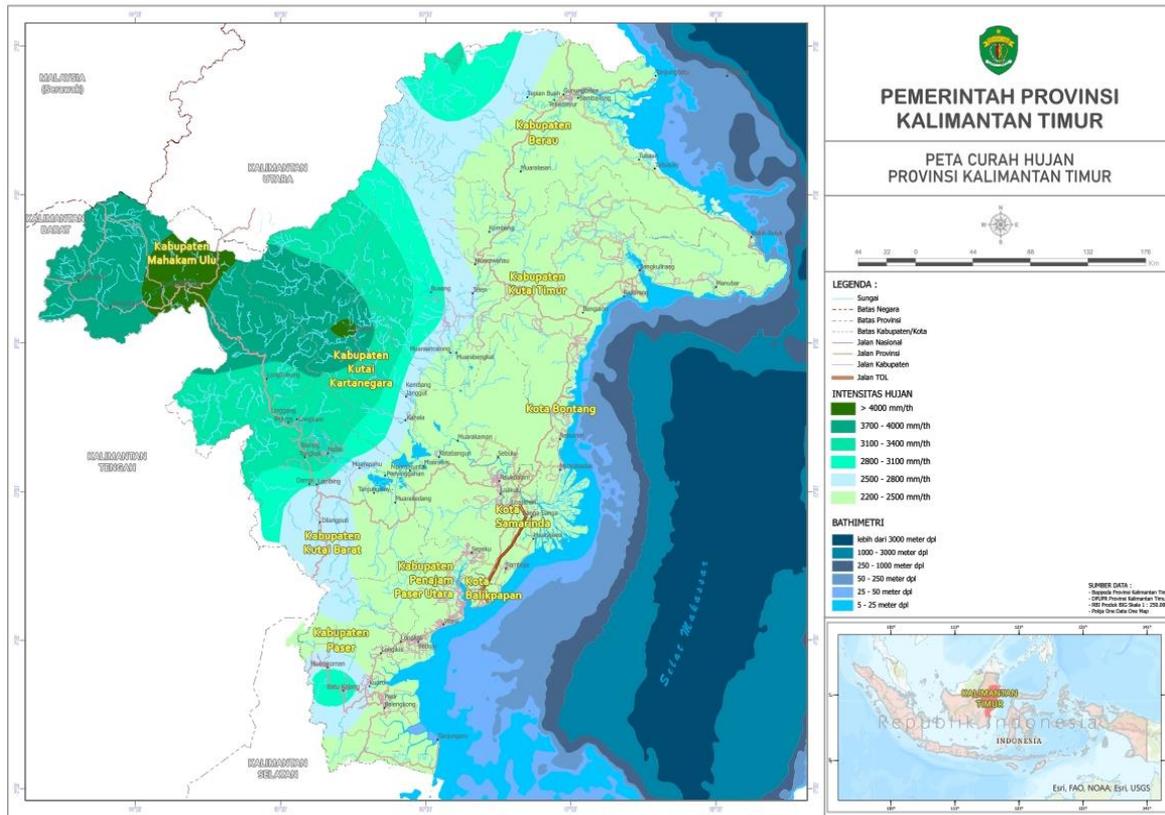
Tabel II.2

Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	22,80	25,20	21,60
	- Maksimum	35	32	36,40
2	Kelembaban (%)	80	88	80
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.012	1.011,8	1.012,4

4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	5,00	7,00
5	Curah Hujan (mm)	1.970	3.674,20	2.437,9
6	Penyinaran Matahari (%)	50	51	54

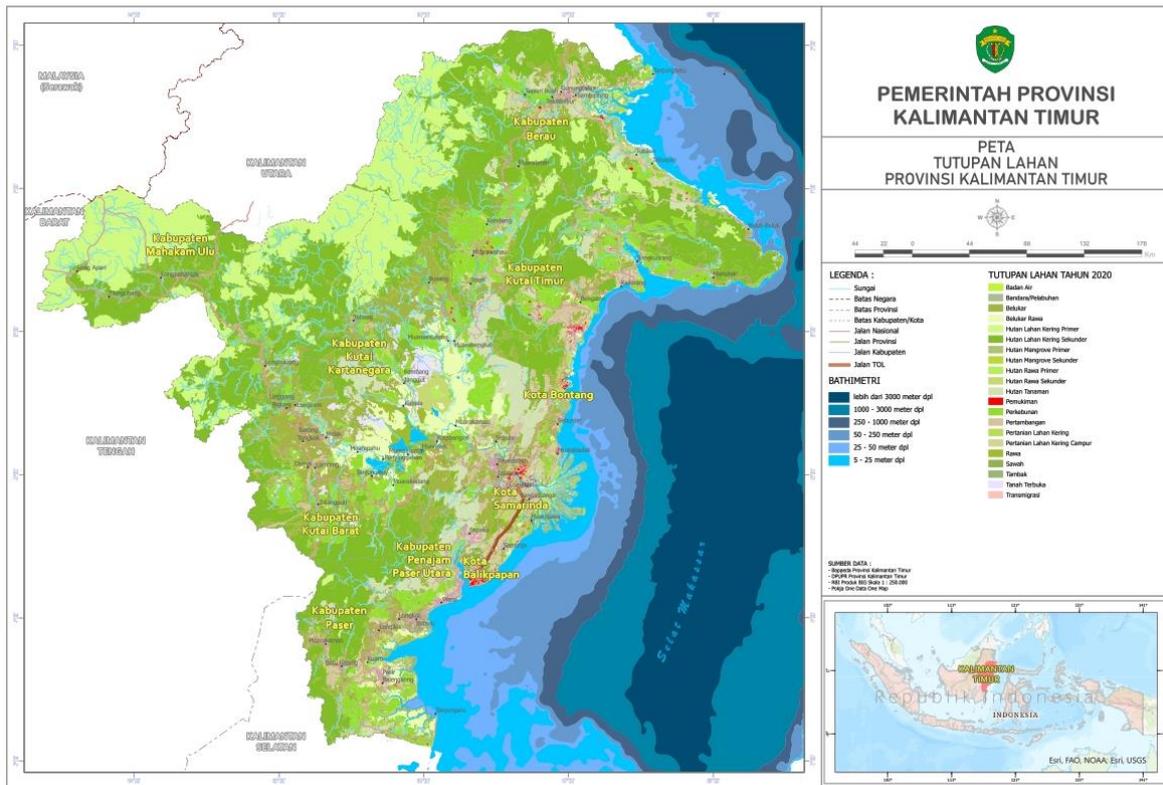
Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2021



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.8
Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur

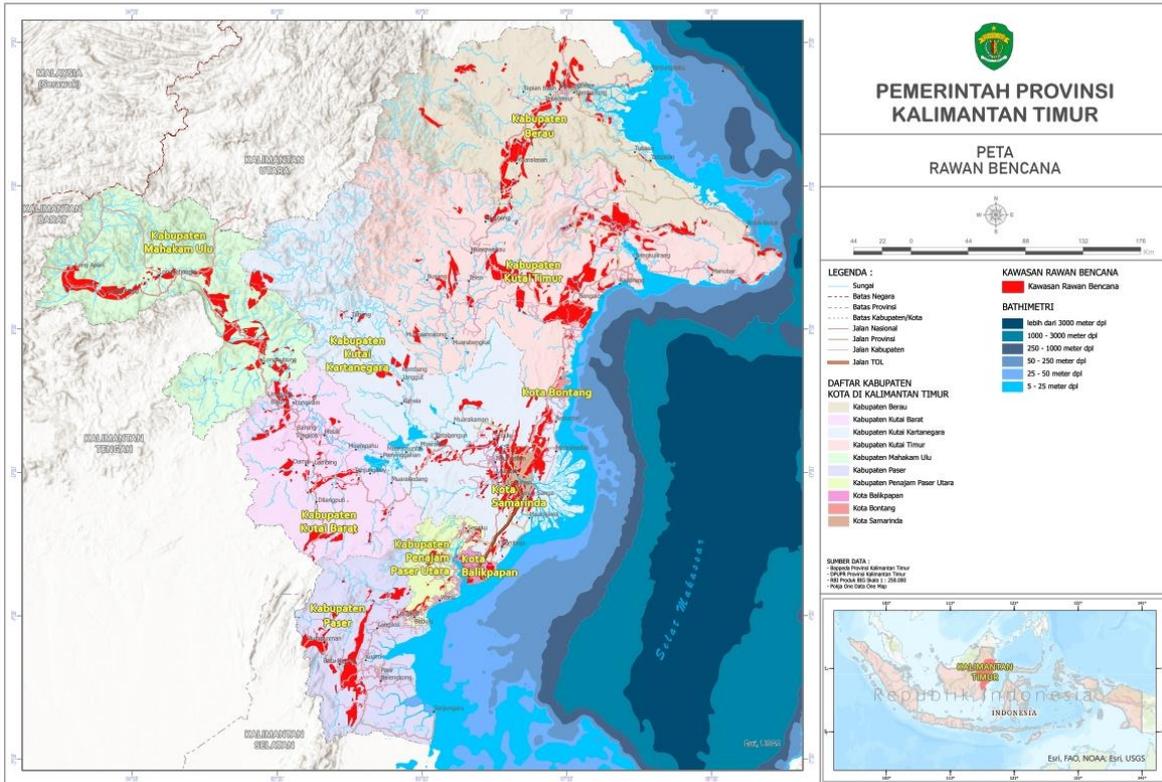
Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar II.9 dibawah ini.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.9
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



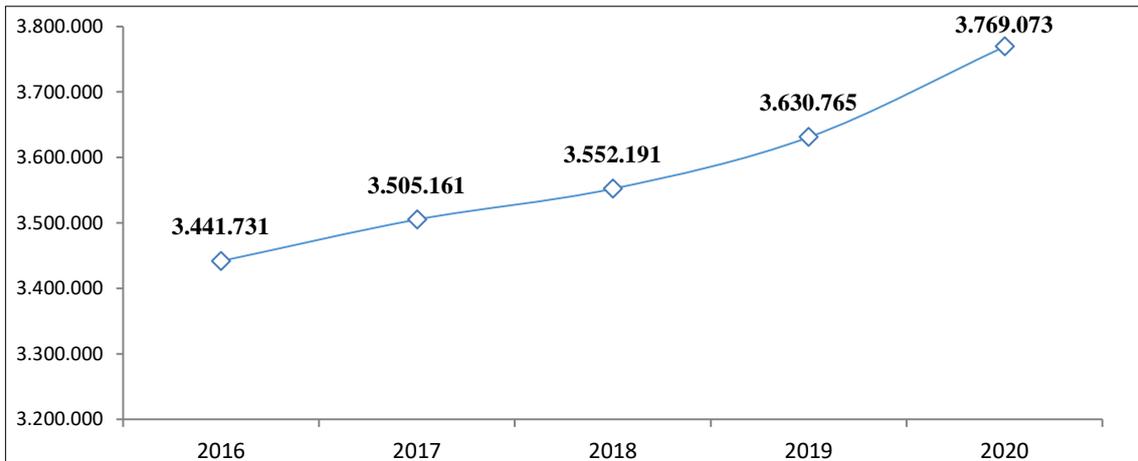
Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.10

Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu dasar perhitungan Indeks Risiko Bencana yaitu diperlukannya Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan perhitungan baru akan menyusun dokumen kajian pada tahun 2020 dan rencana pada tahun 2021 sehingga belum bisa menyajikan data Indeks Risiko Bencana 5 tahun terakhir. Adapun Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh BNPB Pusat adalah Indeks Risiko Bencana Tahun 2013 dimana Provinsi Kalimantan Timur memiliki indeks 165 dengan kategori tinggi.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 3.630.765 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.769.073 jiwa pada tahun 2020.

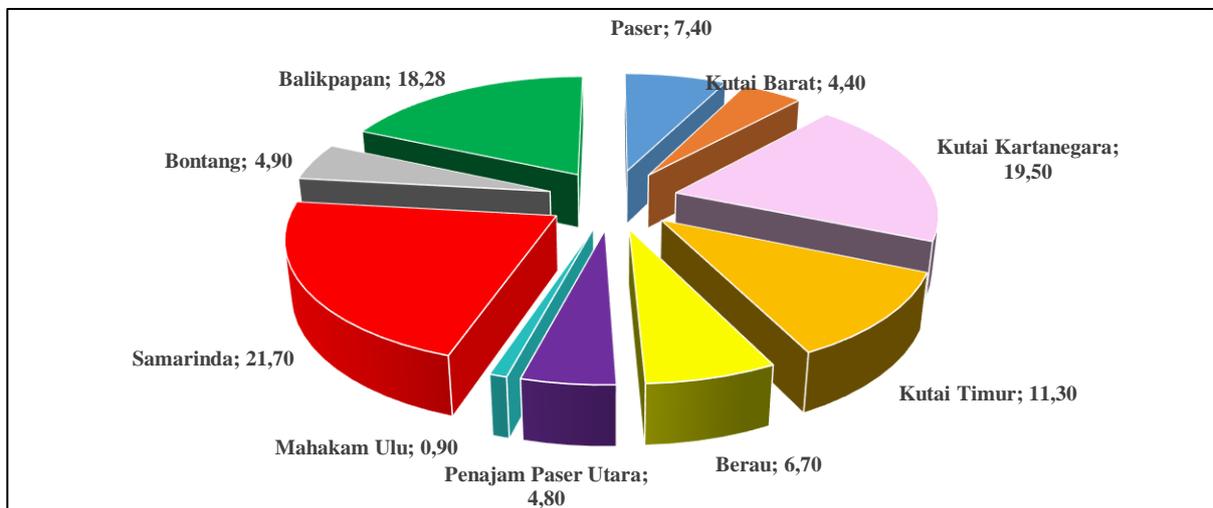


Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.11

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,70 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,90%) Kabupaten Penajam Paser Utara (4,80%), Kabupaten Kutai Barat (4,40%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,90%).



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.12
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Laju pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,83 persen selama lima tahun sejak tahun 2016 – 2020. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya hingga mencapai 7,50 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,42 persen.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk (2016-2020) (%)
1	Paser	248.037	255.648	259.417	265.148	277.401	2,26
2	KUBAR	158.085	160.000	162.200	164.048	165.938	2,35
3	KUKAR	662.481	674.759	677.755	696.784	734.485	2,08
4	KUTIM	415.553	418.625	420.760	422.905	424.334	0,42
5	Berau	211.512	221.836	224.654	232.189	251.439	3,52
6	PPU	166.055	168.012	170.475	173.671	181.349	1,78
7	MAHULU	24.381	26.938	28.833	30.321	35.010	7,50
8	Balikpapan	618.128	633.196	649.806	670.505	697.079	2,43
9	Samarinda	763.729	769.632	778.883	793.576	817.254	1,36
10	Bontang	173.770	176.515	179.408	181.618	184.784	1,24
	Kalimantan Timur	3.441.731	3.505.161	3.552.191	3.630.765	3.769.073	1,83

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.360,82 per km². Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,80 per km².

Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29,60 per km².

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

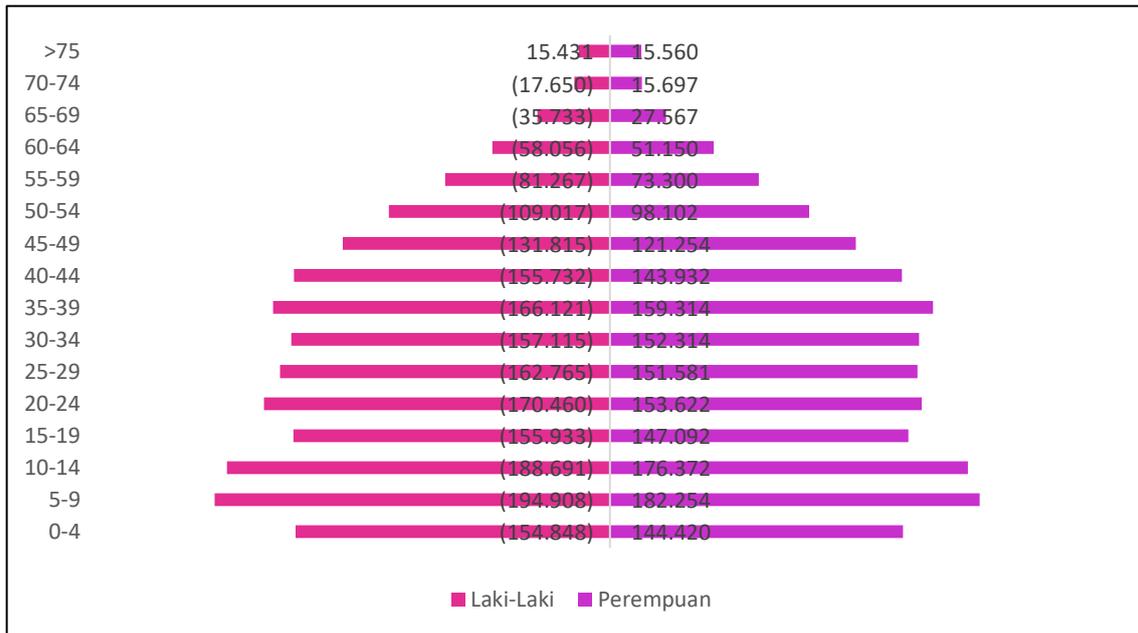
Tabel II.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	143.998	133.403	277.401	107,94	25,00
2	KUBAR	86.912	79.026	165.938	109,98	12,10
3	KUKAR	382.702	351.783	734.485	108,79	28,26
4	KUTIM	226.969	197.365	424.334	115,00	13,67
5	Berau	133.482	117.957	251.439	113,16	11,57
6	PPU	93.955	87.394	181.349	107,51	62,03
7	MAHULU	18.676	16.334	35.010	114,34	1,80
8	Balikpapan	356.643	340.436	697.079	104,76	1.360,82
9	Samarinda	416.182	401.072	817.254	103,77	1.140,57
10	Bontang	96.023	88.761	184.784	108,18	1.132,67
Kalimantan Timur		1.955.542	1.813.531	3.769.073	107,83	29,60

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,98 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 tercatat sebesar 44,97 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.13

Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,14 persen jika dibanding dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,16 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,88 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 1,82 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 17,95 persen jika dibanding dengan tahun 2016 sebesar 18,95 persen, dan untuk usia 19-24 tahun dimana kategori usia ini adalah merupakan penentu keberhasilan dalam rangka mencetak para generasi muda Kalimantan Timur dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal, pada tahun 2020 kategori penduduk usia 19-24 tahun ada peningkatan menjadi sebesar 70,17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 69,76 persen. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan yaitu sebesar 70,56 persen.

Secara umum, rata-rata usia dari 7-24 tahun persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu menjadi sebesar 26,25 persen jika dibanding dengan tahun 2016 yaitu 25,70 persen. Hal ini menggambarkan bahwa jenjang pendidikan dari usia dini sampai dengan dewasa telah memenuhi target yang ingin dicapai. Namun demikian angka tersebut terjadi kenaikan yang perlu diwaspadai, terlebih capaian tersebut masih di bawah angka Nasional.

Tabel II.5

Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020

Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki					
7-12	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03
13-15	2,08	0,54	1,52	1,43	1,34
16-18	18,32	17,49	19,94	17,84	19,17
19-24	70,16	68,80	67,55	71,64	69,98
7-24	26,25	25,07	25,48	26,62	27,32
Perempuan					
Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	0,00	0,00	0,00	0,13	0,26
13-15	1,55	1,05	0,12	0,48	0,43
16-18	19,70	19,50	16,05	18,40	16,66
19-24	71,01	70,47	72,30	67,62	70,38
7-24	25,11	24,23	24,96	24,19	25,10
Laki-Laki + Perempuan					
Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14
13-15	1,82	0,78	0,86	0,98	0,88
16-18	18,95	18,50	18,07	18,10	17,95
19-24	70,56	69,55	69,78	69,76	70,17
7-24	25,70	25,67	25,23	25,45	26,25

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel II.6

Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020

Tidak / Belum Pernah Bersekolah					
Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020

7-12	0,46	0,33	0,24	0,16	0,12
13-15	0,00	0,44	0,25	0,19	0,05
16-18	0,24	0,18	0,38	0,09	0,17
19-24	0,56	0,41	0,38	0,35	0,12
7-24	0,38	0,35	0,31	0,21	0,12
Masih Bersekolah					
Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	99,54	99,67	99,67	99,68	99,73
13-15	98,18	98,79	98,89	98,83	99,07
16-18	80,81	81,32	81,55	81,81	81,88
19-24	28,88	30,04	29,84	29,89	29,71
7-24	73,92	74,97	74,46	74,34	73,63
Tidak Bersekolah Lagi					
Kelompok Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	0,00	0,00	0,00	0,16	0,14
13-15	1,82	0,78	0,86	0,98	0,88
16-18	18,95	18,50	18,07	18,10	17,95
19-24	70,56	69,55	69,78	69,76	70,17
7-24	25,70	24,67	25,23	25,45	26,25

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat baik dari komposisi dengan migas, non migas, serta non migas dan batubara. Adapun kenaikan terus terjadi dari tahun 2016 hingga 2019 dimana nilai PDRB dengan migas Tahun 2019 tercatat sebesar Rp 652,16 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 539,49 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 310,70 triliun. Namun pada tahun 2020 terjadi anomali dimana

karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor, maka terjadi penurunan nilai PDRB migas hingga menjadi sebesar Rp 607,32 triliun, nilai PDRB non migas menjadi sebesar Rp 506,05 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara meningkat menjadi sebesar Rp 314,80 triliun.

Tabel II.7

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2016	508.880.236	400.847.613	243.496.746
2017	591.903.487	476.190.332	267.249.474
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	652.158.057	539.448.590	310.699.091
2020	607.320.779	506.051.630	314.803.175

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Aktivitas perekonomian Kalimantan Timur utamanya dipengaruhi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan. Hal inilah yang menjadikan perekonomian Kalimantan Timur mengalami kontraksi karena gejolak perekonomian global. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan mencapai 41,43 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 251,60 triliun di tahun 2020 dimana nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 297,37 triliun dan kontribusi sebesar 45,60 persen.

Tabel II.8

Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.847.437 (8,22)	47.211.914 (7,98)	50.147.994 (7,89)	51.567.377 (7,91)	53.282.041 (8,77)
B	Pertambangan dan Penggalian	219.761.313 (43,19)	275.822.162 (46,60)	296.725.329 (46,69)	297.371.390 (45,60)	251.602.430 (41,43)
C	Industri Pengolahan	104.969.947 (20,63)	112.075.372 (18,93)	115.272.211 (18,14)	116.204.903 (17,82)	114.773.791 (18,90)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	232.812 (0,05)	280.204 (0,05)	315.059 (0,05)	344.961 (0,05)	385.175 (0,06)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	236.985 (0,05)	273.473 (0,05)	288.891 (0,05)	307.667 (0,05)	326.368 (0,05)
F	Konstruksi	42.120.580 (8,28)	46.876.979 (7,92)	53.500.578 (8,42)	58.472.319 (8,97)	57.866.112 (9,53)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.254.179 (5,55)	32.018.022 (5,41)	35.227.602 (5,54)	38.245.238 (5,86)	39.228.073 (6,46)
H	Transportasi dan Pergudangan	18.860.329 (3,71)	21.242.090 (3,59)	22.990.716 (3,62)	24.172.248 (3,71)	22.245.473 (3,66)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.851.073 (0,95)	5.448.930 (0,92)	6.106.132 (0,96)	6.691.563 (1,03)	6.413.495 (1,06)
J	Informasi dan Komunikasi	6.628.931 (1,30)	7.375.629 (1,25)	7.988.163 (1,26)	8.708.382 (1,34)	9.346.481 (1,54)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.762.586 (1,72)	9.032.358 (1,53)	9.717.119 (1,53)	10.216.630 (1,57)	10.484.899 (1,73)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
L	Real Estate	4.869.798 (0,96)	5.218.431 (0,88)	5.574.934 (0,88)	5.768.853 (0,88)	5.845.848 (0,96)
M,N	Jasa Perusahaan	1.116.074 (0,22)	1.215.392 (0,21)	1.299.480 (0,20)	1.346.710 (0,21)	1.330.660 (0,22)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.807.578 (2,32)	11.658.604 (1,97)	12.337.921 (1,94)	13.019.826 (2,00)	12.750.866 (2,10)
P	Jasa Pendidikan	8.215.109 (1,61)	9.081.381 (1,53)	10.107.377 (1,59)	10.995.564 (1,69)	11.724.048 (1,93)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.191.964 (0,63)	3.506.039 (0,59)	3.905.167 (0,61)	4.289.673 (0,66)	5.318.271 (0,88)
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.153.541 (0,62)	3.566.508 (0,60)	3.994.008 (0,63)	4.434.754 (0,68)	4.396.749 (0,72)
PDRB		508.880.237 (100,00)	591.903.487 (100,00)	635.498.680 (100,00)	652.158.057 (100,00)	607.320.779 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Tabel II.9

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016-2020

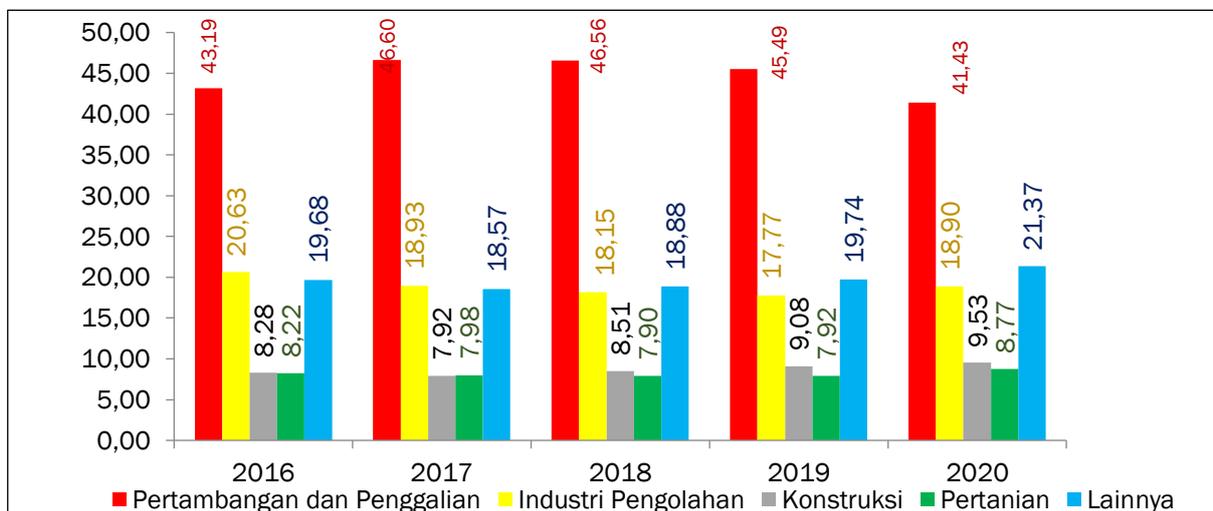
Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.839.398 (6,11)	30.261.400 (6,68)	32.140.165 (6,92)	33.396.194 (6,86)	33.020.515 (6,98)
B	Pertambangan dan Penggalian	212.649.630 (48,44)	216.447.124 (47,81)	218.686.722 (47,06)	233.762.253 (48,03)	223.264.386 (47,22)

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
C	Industri Pengolahan	93.740.627 (21,35)	96.364.829 (21,28)	96.797.539 (20,83)	96.824.494 (19,89)	94.146.617 (19,91)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	223.396 (0,05)	238.533 (0,05)	261.834 (0,06)	284.529 (0,06)	317.498 (0,07)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	201.725 (0,05)	218.601 (0,05)	224.574 (0,05)	235.440 (0,05)	247.872 (0,05)
F	Konstruksi	29.510.455 (6,72)	31.211.245 (6,89)	33.754.000 (7,26)	35.682.996 (7,33)	35.228.575 (7,45)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.129.065 (5,04)	23.948.480 (5,29)	25.678.998 (5,53)	27.025.570 (5,55)	27.276.567 (5,77)
H	Transportasi dan Pergudangan	12.384.342 (2,82)	13.184.391 (2,91)	13.937.815 (3,00)	14.264.273 (2,93)	13.466.985 (2,85)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.463.694 (0,79)	3.753.586 (0,83)	4.080.239 (0,88)	4.340.118 (0,89)	4.109.294 (0,87)
J	Informasi dan Komunikasi	6.483.808 (1,48)	6.989.140 (1,54)	7.295.360 (1,57)	7.795.537 (1,60)	8.338.485 (1,76)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.572.947 (1,50)	6.525.584 (1,44)	6.751.780 (1,45)	6.966.068 (1,43)	7.137.991 (1,51)
L	Real Estate	3.901.891 (0,89)	4.032.550 (0,89)	4.227.269 (0,91)	4.316.690 (0,89)	4.351.113 (0,92)
M,N	Jasa Perusahaan	824.638 (0,19)	853.812 (0,19)	896.170 (0,19)	914.126 (0,19)	889.671 (0,19)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.837.738 (1,79)	7.565.604 (1,67)	7.941.460 (1,71)	8.252.791 (1,70)	7.925.153 (1,68)
P	Jasa Pendidikan	5.929.254	6.328.422	6.780.283	7.036.310	7.250.320

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
		(1,35)	(1,40)	(1,46)	(1,45)	(1,53)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.325.816 (0,53)	2.492.457 (0,55)	2.691.435 (0,58)	2.864.486 (0,59)	3.428.051 (0,72)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.185.410 (0,50)	2.326.151 (0,51)	2.548.786 (0,55)	2.750.363 (0,57)	2.665.793 (0,56)
PDRB		439.003.832 (100,00)	452.741.908 (100,00)	464.694.427 (100,00)	486.712.237 (100,00)	472.864.886 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,43 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.14
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (persen)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 8,04 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan

yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

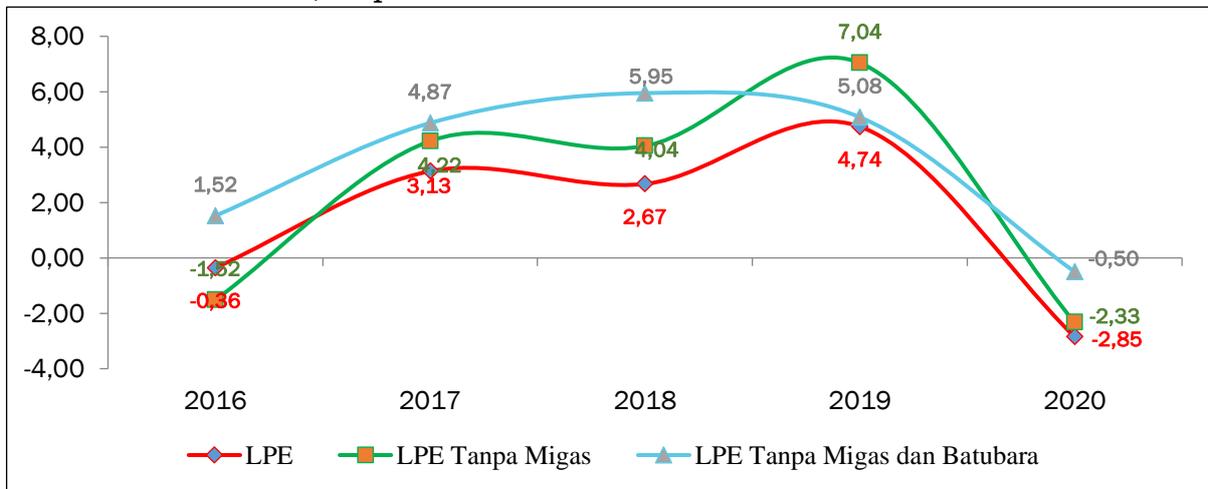
Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 6,46 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi hingga negatif 0,36 persen pada tahun 2016, namun perlahan mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 3,13 persen, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,22 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 4,87 persen. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir sebesar 4,74 persen. Laju pertumbuhan ekonomi non migas melesat cukup tajam hingga 7,04 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,08 persen.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,85 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non

migas mengalami kontraksi sebesar 2,33 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,50 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif di seluruh lapangan usaha. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,67 persen. Kemudian disusul Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 7,91 persen, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,43 persen, Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 6,89 persen, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,86 persen, dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 6,37 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawah 6 persen. Namun hal sebaiknya terjadi pada tahun 2020 dimana terlihat pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan tertinggi diciptakan oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,67 persen. Kemudian disusul Lapangan Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 11,59 dan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,96 persen. Sedangkan Lapangan Usaha lainnya tumbuh di bawahnya bahkan mengalami kontraksi (negatif).

Tabel II.10

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (persen)

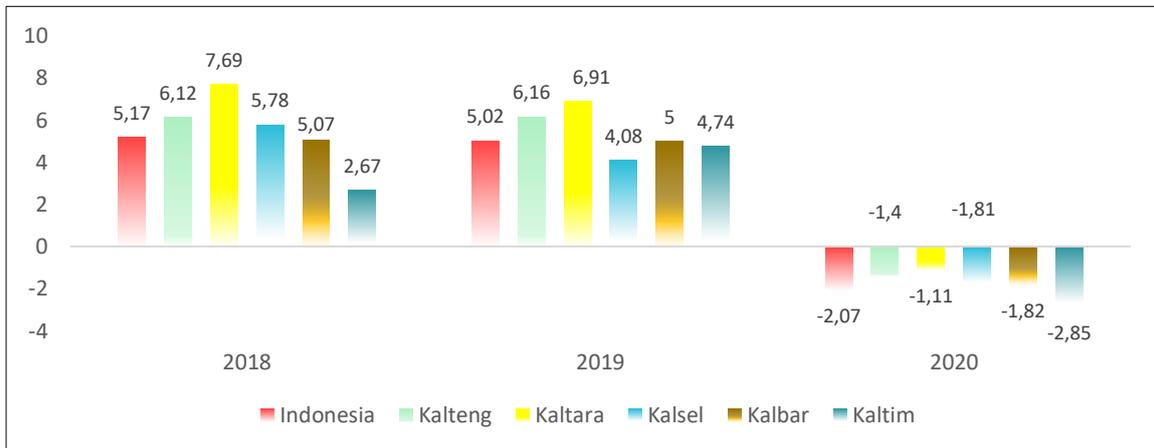
Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,46	5,66	6,14	3,91	(1,12)
B	Pertambangan dan Penggalian	(3,52)	1,79	1,07	6,89	(4,58)
C	Industri Pengolahan	5,46	2,80	0,69	0,03	(2,77)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,32	6,78	9,76	8,67	11,59
E	Pengadaan Air	6,57	8,37	3,22	4,84	6,58
F	Konstruksi	(3,86)	5,76	7,91	5,71	(1,27)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,20	8,22	7,16	5,24	0,93
H	Transportasi dan Pergudangan	3,05	6,46	5,80	2,34	(5,59)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,79	8,37	8,70	6,37	(5,32)
J	Informasi dan Komunikasi	7,45	7,79	4,38	6,86	6,96
K	Jasa Keuangan	1,84	(0,72)	4,05	3,17	2,47
L	<i>Real Estate</i>	(0,83)	3,35	4,83	2,12	0,80
M,N	Jasa Perusahaan	(4,25)	3,54	4,96	2,00	(2,68)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(3,27)	(3,47)	3,11	3,92	(3,97)
P	Jasa Pendidikan	7,06	6,73	7,73	3,78	3,04

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,31	7,16	8,05	6,43	19,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,81	6,44	9,02	7,91	(3,07)
Laju Pertumbuhan Ekonomi		(0,38)	3,13	2,67	4,74	(2,85)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Beberapa hal yang menjadi catatan pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi hampir pada seluruh sektor. Lapangan usaha dengan penurunan terbesar yaitu Lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha Akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Jika dibandingkan secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 secara *year on year* (YoY) menempatkan Kalimantan Utara dengan kontraksi pertumbuhan terendah dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 1,11 persen, lalu diikuti Kalimantan Tengah sebesar 1,40 persen, Kalimantan Selatan sebesar 1,81 persen, Kalimantan Barat sebesar 1,82 persen dan Kalimantan Timur sebesar 2,85 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.16

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)

Tabel II.11

Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	91.536,85	96.807,32	102.584,20	109.767,66	111.183,75
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.439,03	2.629,57	2.958,20	3.238,86	3.250,20
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.578,34	21.596,79	23.760,62	26.298,93	26.163,83

4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	144.654,38	154.503,23	173.474,79	187.939,11	187.118,74
5	Perubahan Inventori	1.922,89	1.757,93	1.613,95	722,91	2.555,08
6	Net Ekspor Barang & Jasa	244.748,75	314.608,65	331.106,93	324.190,59	277.049,17
PDRB		508.880,24	591.903,49	635.498,68	652.158,06	607.320,78

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2016-2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun.

Tabel II.12

Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17,99	16,36	16,26	16,79	18,31
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,48	0,44	0,47	0,50	0,54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,63	3,65	3,73	4,03	4,31
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,43	26,10	27,25	28,72	30,81
5	Perubahan Inventori	0,38	0,30	0,25	0,11	0,42
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	48,10	53,15	52,10	49,71	45,62

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016-2020 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II.13
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,56	2,58	3,14	3,15	(0,44)
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(4,04)	4,89	8,57	6,77	(1,28)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(13,03)	(9,79)	7,91	7,70	(2,02)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(6,04)	2,75	7,54	4,79	(1,54)
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	3,76	4,28	0,17	5,17	(4,60)
PDRB		(0,38)	3,13	2,64	4,74	-2,85

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,85 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,60 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -2,02 persen. Selain memiliki kontribusi tertinggi, Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa juga mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang mengindikasikan bahwa penurunan nilai PDRB Kalimantan Timur baik dari sisi nilai maupun pertumbuhannya dikarenakan kegiatan ekspor barang dan jasa.

Tabel II.14
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Miliar Rp)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	32.755,5 2	33.137,6 5	34.362,05	35.72,32	34.736,71
2	KUBAR	18.468,1 6	19.139,8 6	20.108,76	21.248,75	20.628,18
3	KUKAR	117.035, 58	118.943, 99	121.509,4 8	126.160,1 7	120.556,6 0
4	KUTIM	83.771,6 9	86.520,2 5	88.582,49	95.660,74	92.585,57
5	Berau	25.461,3 7	26.227,2 9	26.769,40	28.270,78	27.322,32
6	PPU	6.351,93	6.506,89	6.590,45	6.762,54	6.604,22
7	MAHULU	1.524,14	1.589,55	1.675,32	1.767,25	1.762,69
8	Balikpapan	73.221,4 6	76.032,0 8	79.807,11	83.678,77	83.097,89

9	Samarinda	39.744,7 2	41.274,9 7	43.323,57	45.485,74	45.000,47
10	Bontang	42.835,5 1	43.073,0 6	41.316,22	40.423,39	39.309,21

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kontribusinya pada tahun 2020 mencapai 25,56 persen dengan nilai PDRB lebih dari 120 trilyun rupiah. Selain itu, dominasi perekonomian Kalimantan Timur juga dikontribusi oleh perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing berkontribusi sebesar 19,63 persen dan 17,62 persen. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Tabel II.15

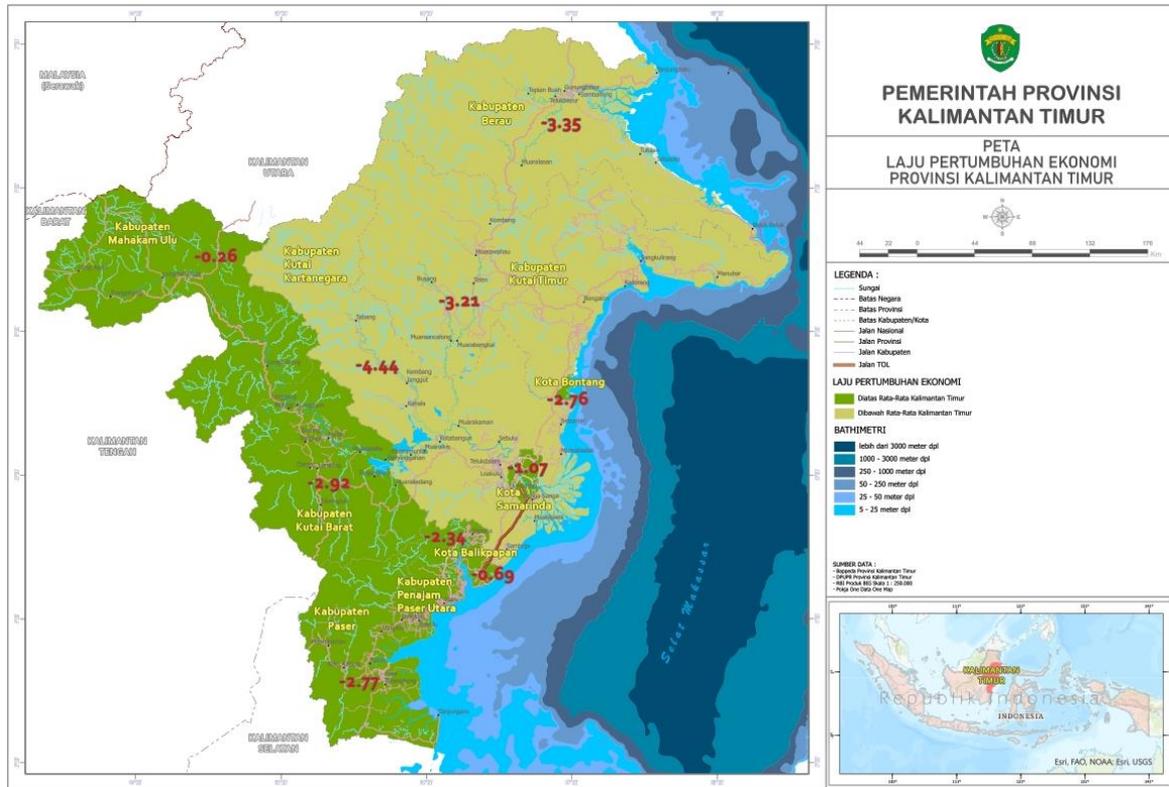
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	-4,98	1,17	3,69	3,97	-2,77
2	KUBAR	-0,83	3,64	5,06	5,67	-2,92
3	KUKAR	-1,97	1,63	2,16	3,83	-4,44
4	KUTIM	-1,08	3,28	2,38	7,99	-3,21
5	Berau	-1,70	3,01	2,07	5,61	-3,35
6	PPU	-0,47	2,44	1,28	2,61	-2,34
7	MAHULU	3,41	4,29	5,40	5,49	-0,26
8	Balikpapan	4,92	3,84	4,97	4,85	-0,69
9	Samarinda	0,56	3,85	4,96	4,99	-1,07
10	Bontang	-1,39	0,55	-4,08	-2,16	-2,76

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab turunnya kinerja ekonomi adalah adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan mobilitas tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, terdapat penurunan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dan kemudian diikuti penurunan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

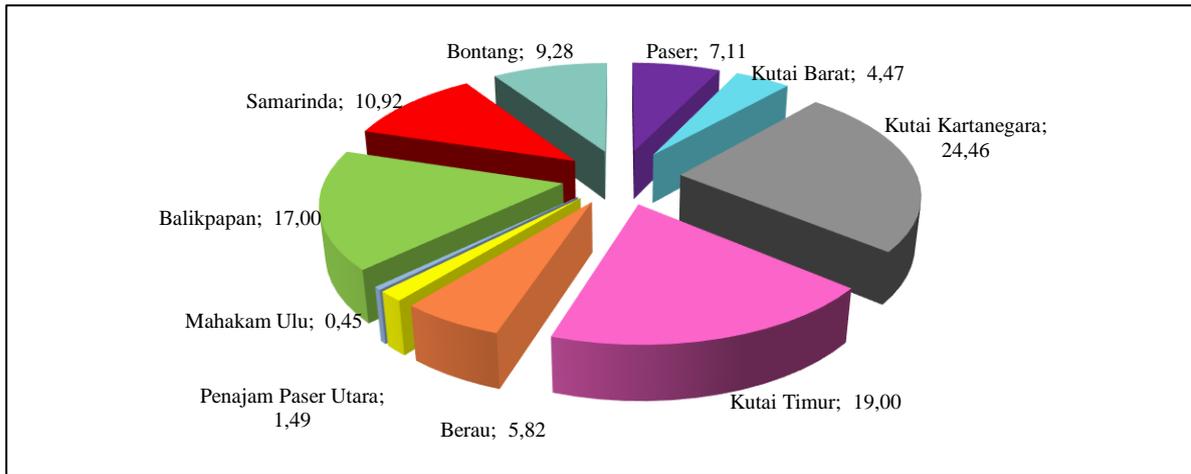
Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami kontraksi. Kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif cukup signifikan adalah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar minus 4,44 persen. Sementara itu, ekonomi Kabupaten Kutai Timur dan Berau masing-masing terkontraksi sebesar 3,21 persen dan 3,35 persen. Wilayah kabupaten/kota lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif dibawah 3 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.17
Distribusi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten/Kota Tahun 2020

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 24,46 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 19 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 17 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 15 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.18

Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Pada tahun 2020, terdapat 6 (enam) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 77,74 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II.16

Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	67,97	Pertanian	12,48	Industri	5,84
KUBAR	Pertambangan	45,50	Pertanian	14,88	Konstruksi	12,11

KUKAR	Pertambangan	59,81	Pertanian	14,92	Konstruksi	8,56
KUTIM	Pertambangan	77,74	Pertanian	9,16	Industri	3,55
Berau	Pertambangan	56,43	Pertanian	11,64	Perdagangan	6,51
PPU	Pertambangan	25,83	Pertanian	21,96	Industri	16,46
MAHULU	Pertanian	75,18	Pertambangan	6,76	Konstruksi	6,48
Balikpapan	Industri	47,28	Konstruksi	16,53	Transportasi	9,85
Samarinda	Konstruksi	21,23	Perdagangan	17,09	Pertambangan	10,94
Bontang	Industri	79,60	Konstruksi	6,59	Perdagangan	3,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 73,41 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 64,91 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau dan Penajam Paser Utara. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian adalah Kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.17

Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,74	PMTB	18,92	K. Ruta	14,43
KUBAR	PMTB	38,84	Net Ekspor	34,97	K. Ruta	17,32
KUKAR	Net Ekspor	45,05	PMTB	38,62	K. Ruta	12,90

KUTIM	Net Ekspor	71,56	PMTB	18,87	K. Ruta	7,17
Berau	Net Ekspor	58,03	PMTB	23,19	K. Ruta	13,81
PPU	K. Ruta	42,83	PMTB	38,00	K. Pemerintah	12,32
MAHULU	Net Ekspor	33,10	PMTB	28,87	K. Ruta	24,21
Balikpapan	PMTB	42,28	Net Ekspor	28,92	K. Ruta	25,11
Samarinda	K. Ruta	45,37	PMTB	41,13	K. Pemerintah	12,97
Bontang	Net Ekspor	73,79	PMTB	13,14	K. Ruta	10,66

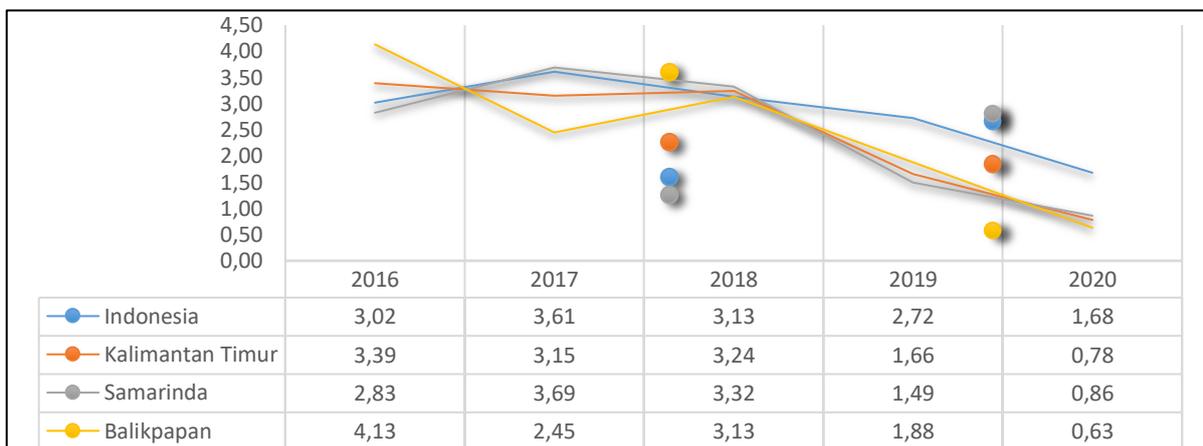
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak enam kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Kutai Barat dan Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi *share* sebesar 38,84 persen dan 42,28 persen. Sementara itu, perekonomian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Samarinda didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan *share* masing-masing 42,83 persen dan 45,37 persen.

Kabupaten/kota yang porsi tersebarnya merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 73,39 persen. Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser juga memiliki *share* Net Ekspor yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 71,56 persen dan 62,74 persen. Sementara itu, Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu memiliki nilai *share* Net Ekspor masing-masing sebesar 58,03 persen, 45,05 persen dan 33,10 persen.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, hingga mencapai 0,78 persen pada tahun 2020. Tentu saja selain karena pengendalian inflasi yang cukup baik karena tahun 2019 pun sudah mencapai 1,66 persen, kondisi ini juga terpengaruh dari menurunnya daya beli masyarakat pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19 termasuk didalamnya perubahan cara pembelian barang kebutuhan pokok masyarakat. Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok kesehatan dan kelompok perumahan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.19

Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

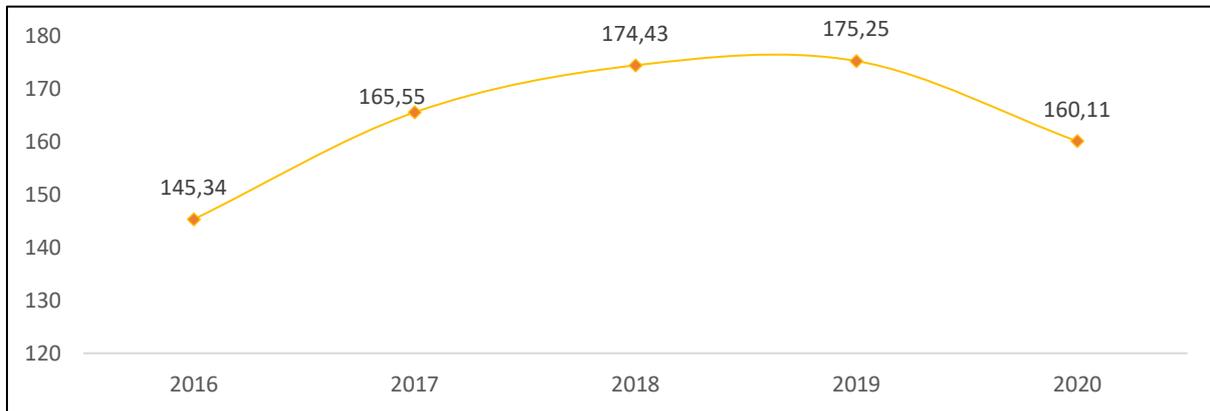
Namun demikian penurunan inflasi tertahan oleh kenaikan harga dari kelompok sandang, kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, kelompok makanan jadi, kelompok kesehatan dan kelompok perumahan.

Kota Balikpapan pada tahun 2020 mengalami inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya menjadi 0,63 persen, dan lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 0,86 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 0,78 persen.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRBnya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016-2019 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 175,65 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.20

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2020 yakni di Kota Bontang sebesar Rp 312,15 juta, Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 296,16 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 185,65 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 55,70 juta dan Kota Samarinda sebesar Rp 75,04 juta.

Tabel II.18

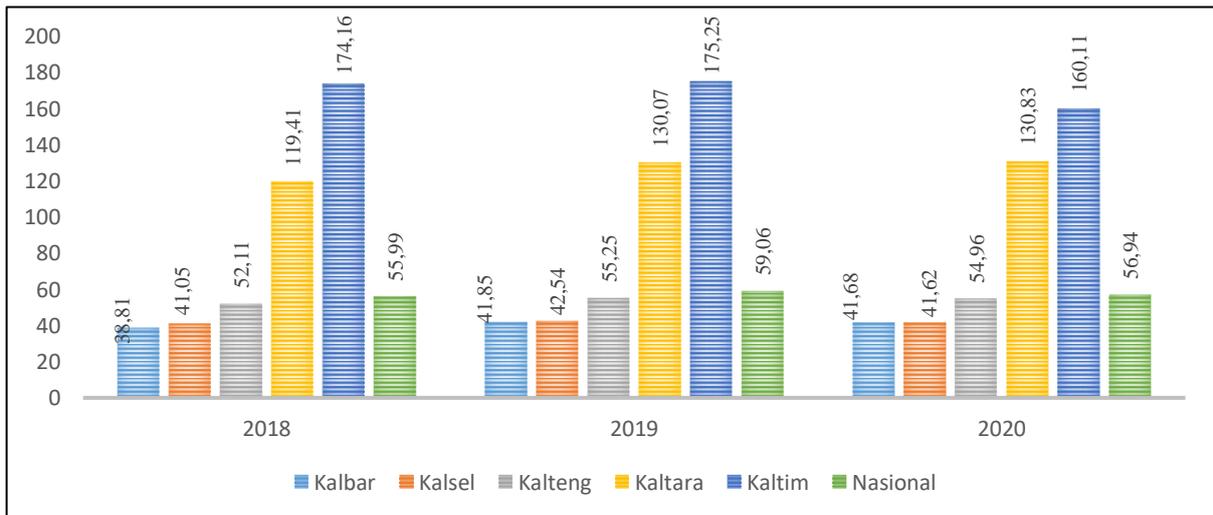
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Rp Ribu)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	139.005,28	160.296,47	172.444,45	168.508,96	148.633

2	KUBAR	150.513,1 9	175.425,4 7	191.344,9 5	195.009,0 8	183.844
3	KUKAR	173.968,1 1	198.406,8 4	210.484,4 4	207.015,4 2	185.649
4	KUTIM	285.338,3 2	346.117,4 2	353.304,3 5	355.546,8 3	296.160
5	Berau	143.437,2 5	161.633,7 0	166.166,9 8	168.113,8 3	148.897
6	PPU	49.241,18	53.774,37	55.531,98	56.474,76	55.699
7	MAHULU	82.108,10	88.868,89	95.323,49	103.061,6 4	104.603
8	Balikpapa n	128.124,6 3	137.916,4 7	148.758,7 3	156.276,6 7	155.977
9	Samarinda	63.560,52	69.291,63	74.489,27	78.566,95	75.036
10	Bontang	331.035,9 6	345.145,8 5	338.383,9 0	329.049,6 6	312.145

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2020 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 160,11 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan yang tertinggi di tingkat nasional. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.21

PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan
Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah)

D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,10 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga meningkat menjadi

sebanyak 230,26 ribu jiwa dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 219,92 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 662.302 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan fenomena nasional ini disebabkan adanya Pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh negatif pada beberapa lapangan usaha. Beberapa kondisi dilakukan dalam menghadapi pandemi ini seperti pengurangan pegawai, penurunan omzet, hingga pembatasan produksi. Adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Tabel II.19

Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212,92	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220,17	6,19
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230.260	6,10

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan Maret 2020 antara daerah perkotaan dan perdesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan, tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan. Tiga jenis komoditi terbesar yang sama yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Berikut adalah jenis komoditi penyusun garis kemiskinan makanan untuk daerah perkotaan secara berturut-turut adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan dan gula pasir. Sedangkan di daerah pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan dan daging ayam ras. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada

Tabel II.20 terkait persentase komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan menurut daerah.

Tabel II.20

Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Menurut Daerah Tahun 2020

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	24,06	Beras	24,82
2	Rokok Kretek Filter	17,96	Rokok Kretek Filter	22,13
3	Telur ayam ras	6,98	Telur ayam ras	6,54
4	Daging ayam ras	5,53	Gula Pasir	4,58
5	Mie Instan	4,20	Mie Instan	4,29
6	Gula Pasir	3,43	Daging Ayam Ras	3,70
7	Tongkol/Tuna/Cakalangan	3,26	Bawang merah	2,80
8	Kue basah	2,99	Kue Basah	2,39
9	Bawang Merah	2,72	Tempe	2,27
10	Tempe	2,36	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,18

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2020 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,44 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,57 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, progress positif selalu ditunjukkan dari hasil program pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 menimpa.

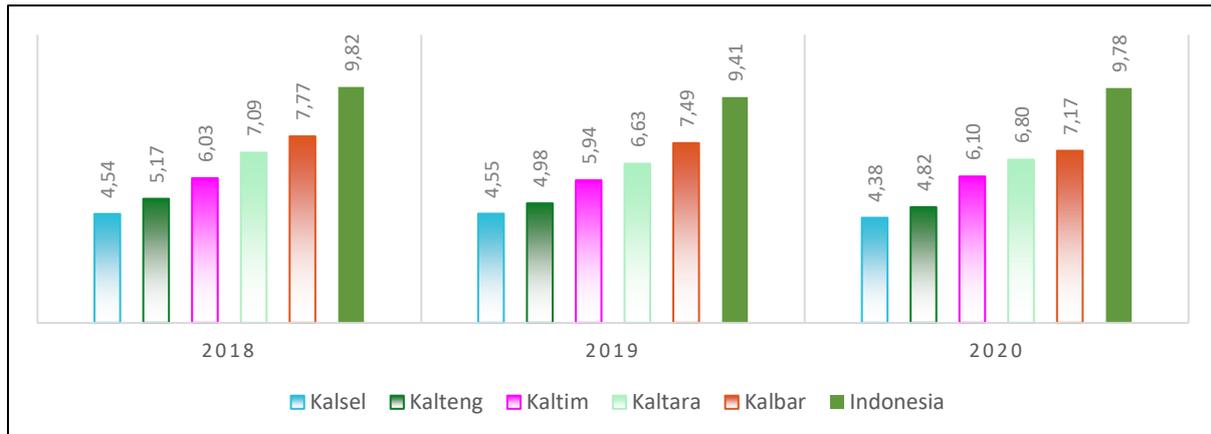
Tabel II.21

Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (persen)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	8,68	9,28	9,03	8,95	9,23
2	KUBAR	8,65	8,72	9,15	9,09	9,29
3	KUKAR	7,63	7,57	7,41	7,20	7,31
4	KUTIM	9,16	9,29	9,22	9,48	9,55
5	Berau	5,37	5,41	5,04	5,04	5,19
6	PPU	7,49	7,63	7,40	7,18	7,36
7	MAHULU	10,65	11,29	11,62	11,25	11,44
8	Balikpapan	2,81	2,82	2,64	2,42	2,57
9	Samarinda	4,72	4,77	4,59	4,59	4,76
10	Bontang	5,18	5,16	4,67	4,22	4,38

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan Barat menurun



sebanyak 0,25 poin, sementara Kalimantan Timur meningkat sebanyak 0,50 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 10,19 persen.

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.22

Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 58.420 jiwa, Kota Samarinda sebanyak 41.920 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.980 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan dunia, termasuk Kalimantan Timur memberikan dampak peningkatan kemiskinan di Kalimantan Timur. Secara global diprediksi bahwa 420 – 580 juta orang akan menjadi miskin, sedangkan secara Nasional diperkirakan angka kemiskinan akan meningkat menjadi 9,39 persen. Angka kemiskinan di Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan akibat pelemahan ekonomi di sektor pariwisata, transportasi, perdagangan dan beberapa sektor terdampak

COVID-19 lainnya. Berkenaan dengan ini maka upaya untuk menumbuhkan perekonomian pasca COVID-19 perlu untuk mendapatkan perhatian serius.

Tabel II.22

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (jiwa)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	23.170	25.300	25.140	25.450	26.770
2	KUBAR	12.650	12.800	13.490	13.450	13.780
3	KUKAR	55.820	56.570	56.560	56.340	58.420
4	KUTIM	30.170	31.950	33.020	35.310	36.980
5	Berau	11.470	11.860	11.330	11.620	12.300
6	PPU	11.660	12.000	11.760	11.520	11.930
7	MAHULU	2.880	3.070	3.250	3.190	3.260
8	Balikpapan	17.550	17.860	17.010	15.780	17.020
9	Samarinda	38.950	40.010	39.230	39.800	41.920
10	Bontang	8.600	8.750	8.100	7.470	7.910

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada periode September 2019 – Maret 2020. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,991 pada keadaan September 2019 menjadi 1,015 pada keadaan Maret 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,242 menjadi 0,240 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2020, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,664 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,743. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,157 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,412. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

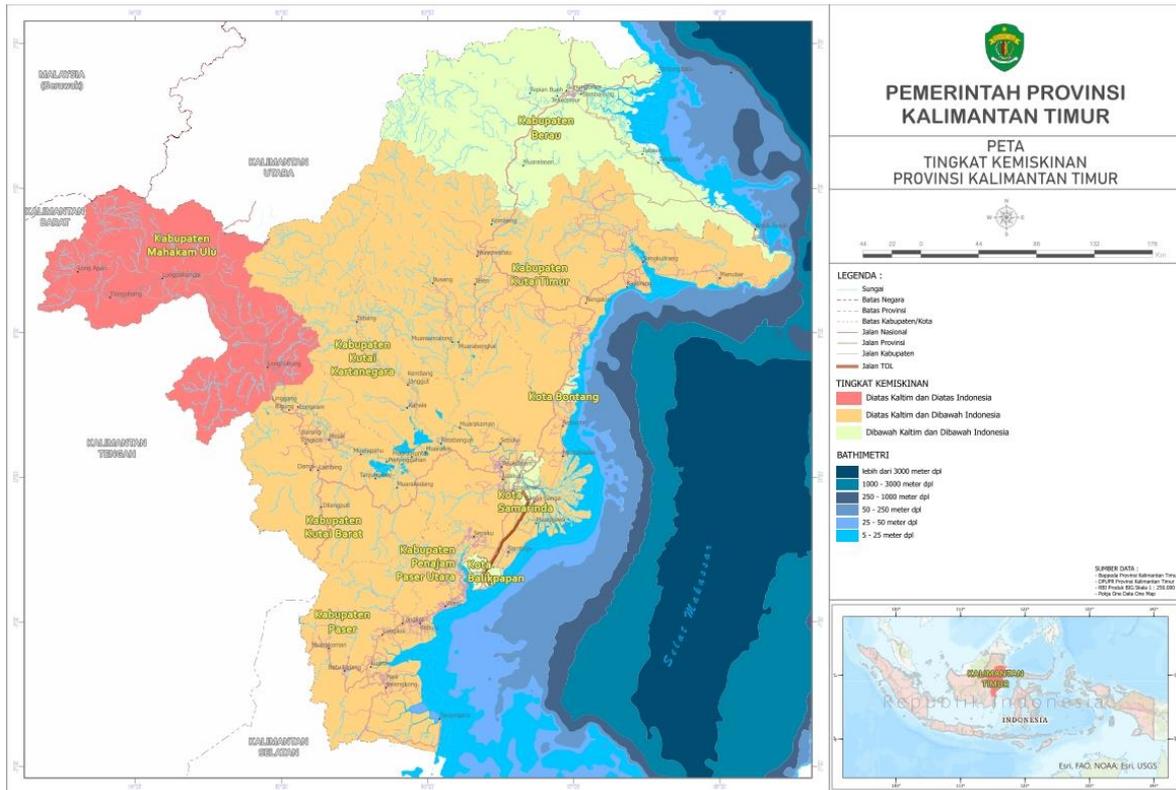
Tabel II.23

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di Kalimantan Timur Menurut Daerah,
September 2019 – Maret 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2019	0,612	1,778	0,991
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
September 2019	0,127	0,482	0,242

Maret 2020	0,157	0,412	0,240
------------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

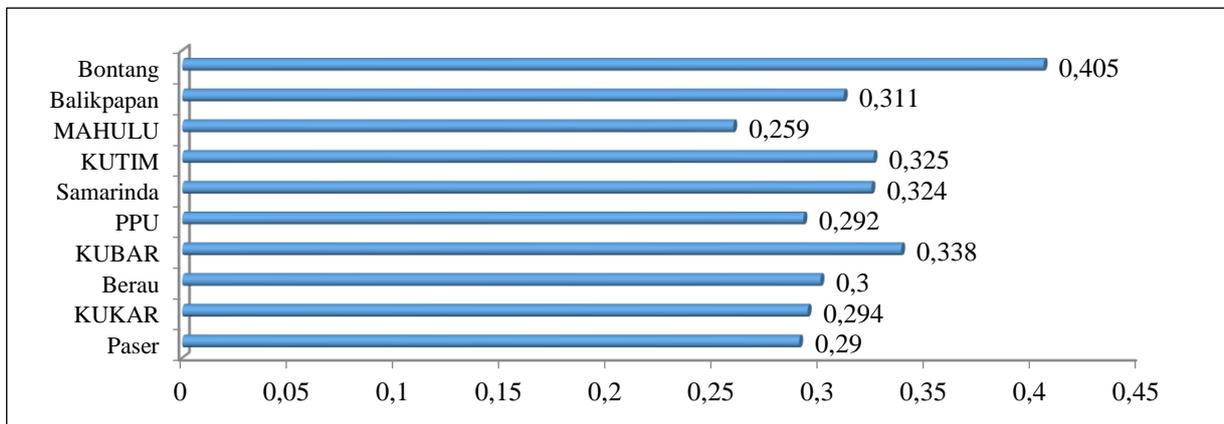


Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.23

Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gинinya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara,



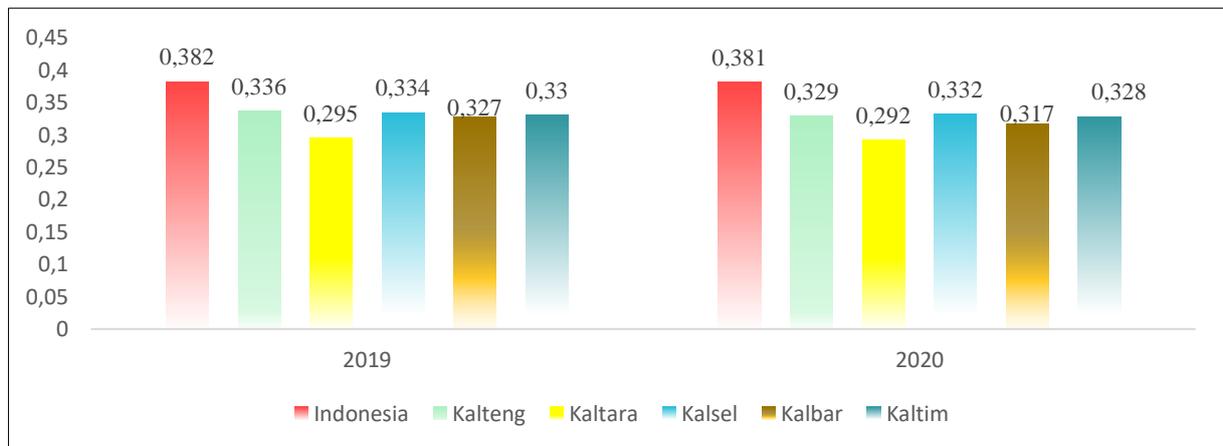
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,259. Kota Bontang memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,405.

Sumber : BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.24

Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Indeks Gini Kalimantan Timur yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan angka ketimpangan menjadi 0,328. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,330. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,300. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,32-0,35. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,381 pada tahun 2020. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.25

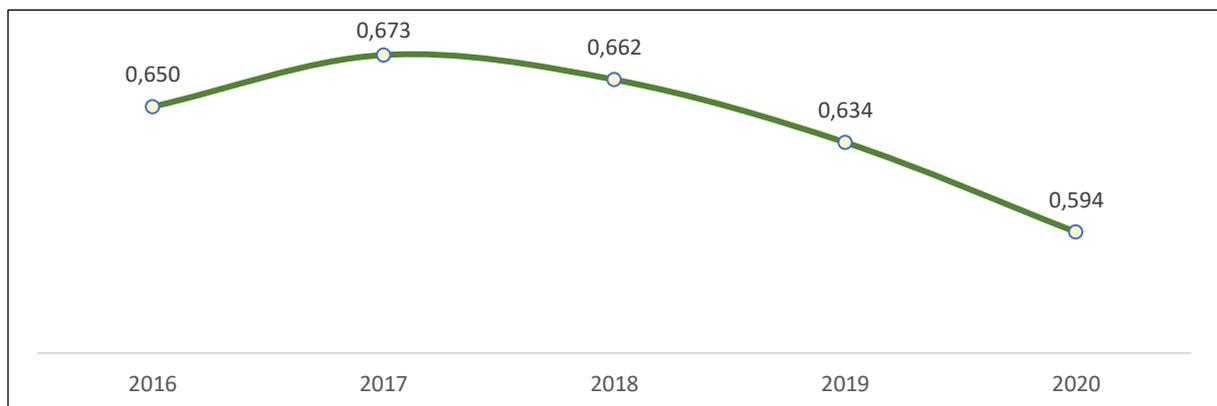
Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2019-2020

E. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.

Dampak utama dari ketimpangan pembangunan adalah timbulnya masalah sosial di masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dampak tersebut merupakan muncul akibatnya kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah yang kinerja pembangunan tidak cukup baik. Tingginya angka pengangguran di suatu wilayah cenderung akan diikuti oleh terjadinya kemiskinan. Pada akhirnya, kemiskinan yang terjadi di masyarakat pada suatu wilayah akan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia generasi berikutnya, karena kesulitan untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan akibat rendahnya pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun. Pada tahun 2020, Indeks Williamson antar provinsi di Pulau Kalimantan sebesar 0,594. Jika dibandingkan angka Indeks Williamson tahun 2019 yang sebesar 0,634, maka angka tersebut mengalami sedikit penurunan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.26

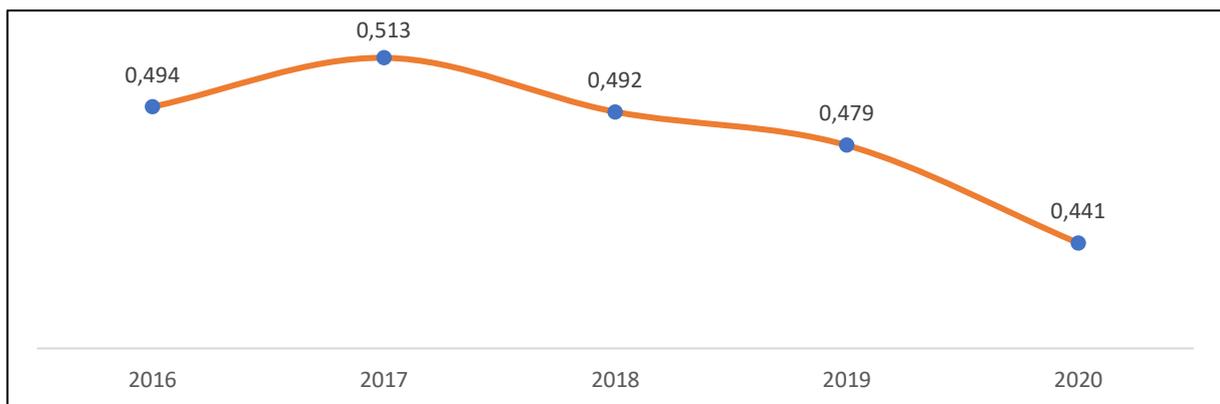
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Regional Kalimantan Tahun 2016-2020

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional

Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Pada tahun 2020, Kalimantan Timur memegang 48,46 persen perekonomian di pulau Kalimantan, disusul Kalimantan Barat yang menyumbang 17,08 persen perekonomian, sedangkan Kalimantan Utara hanya menyumbang 8,02 persen. Sedangkan jika dilihat dari PDRB per kapita, Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita yang tertinggi yakni mencapai 160,11 juta rupiah, sedangkan PDRB per kapita di Kalimantan Barat hanya seperempat dari PDRB per kapita Kalimantan Timur, yakni hanya sebesar 41,68 juta rupiah.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40 - 0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.27

Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai

Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

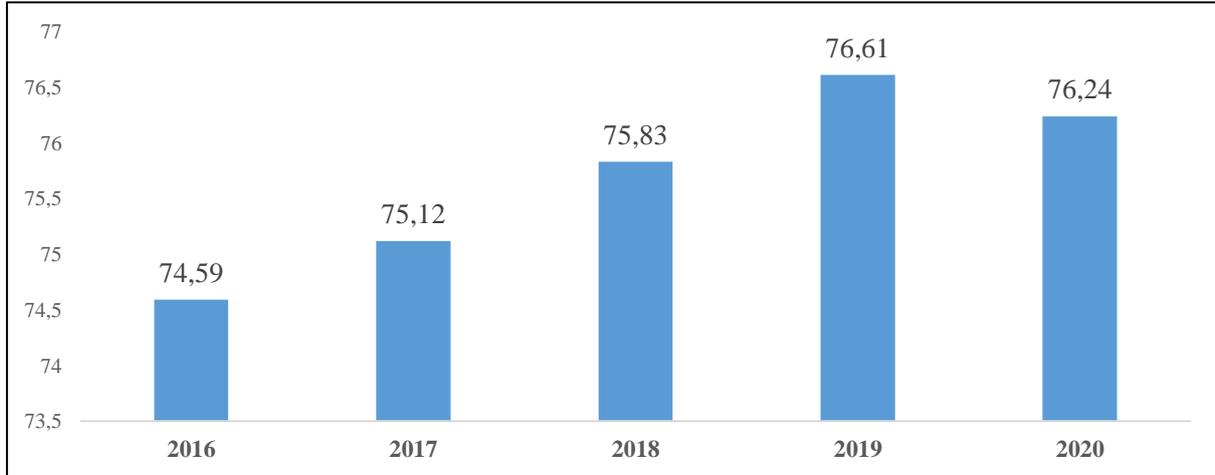
Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Indeks Pembangunan Gender dan Indek Desa Membangun.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode 2010-2019, angka IPM Kalimantan Timur secara konsisten mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan

pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Meskipun begitu, capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.28

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Penurunan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2020, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi turun. Kabupaten/Kota yang mengalami kecepatan penurunan terbesar adalah Kabupaten Mahakam Ulu, sebesar 0,73 persen atau turun 0,49 poin dari 67,58 di tahun 2019 menjadi 67,09 di tahun 2020. Selain Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur juga mengalami penurunan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 0,49 poin dari 73,49 di tahun 2019 menjadi 73,00 di tahun 2020. Selain itu, jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 67,66 – 71,94. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi menyebar di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak negatif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.

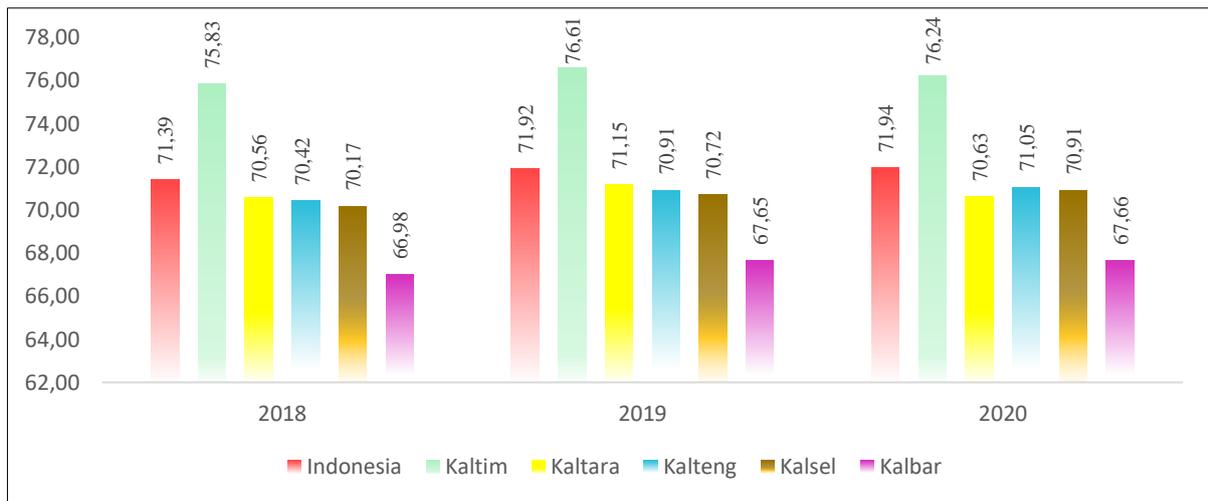
Tabel II.24

Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	71,00	71,16	71,61	72,29	72,04

2	KUBAR	69,99	70,18	70,69	71,63	71,19
3	KUKAR	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59
4	KUTIM	71,10	71,91	72,56	73,49	73,00
5	Berau	73,05	73,56	74,01	74,88	74,71
6	PPU	69,96	70,59	71,13	71,64	71,41
7	MAHULU	65,51	66,09	66,67	67,58	67,09
8	Balikpapan	78,57	79,01	79,81	80,11	80,01
9	Samarinda	78,91	79,46	79,93	80,20	80,11
10	Bontang	78,92	79,47	79,86	80,09	80,02

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

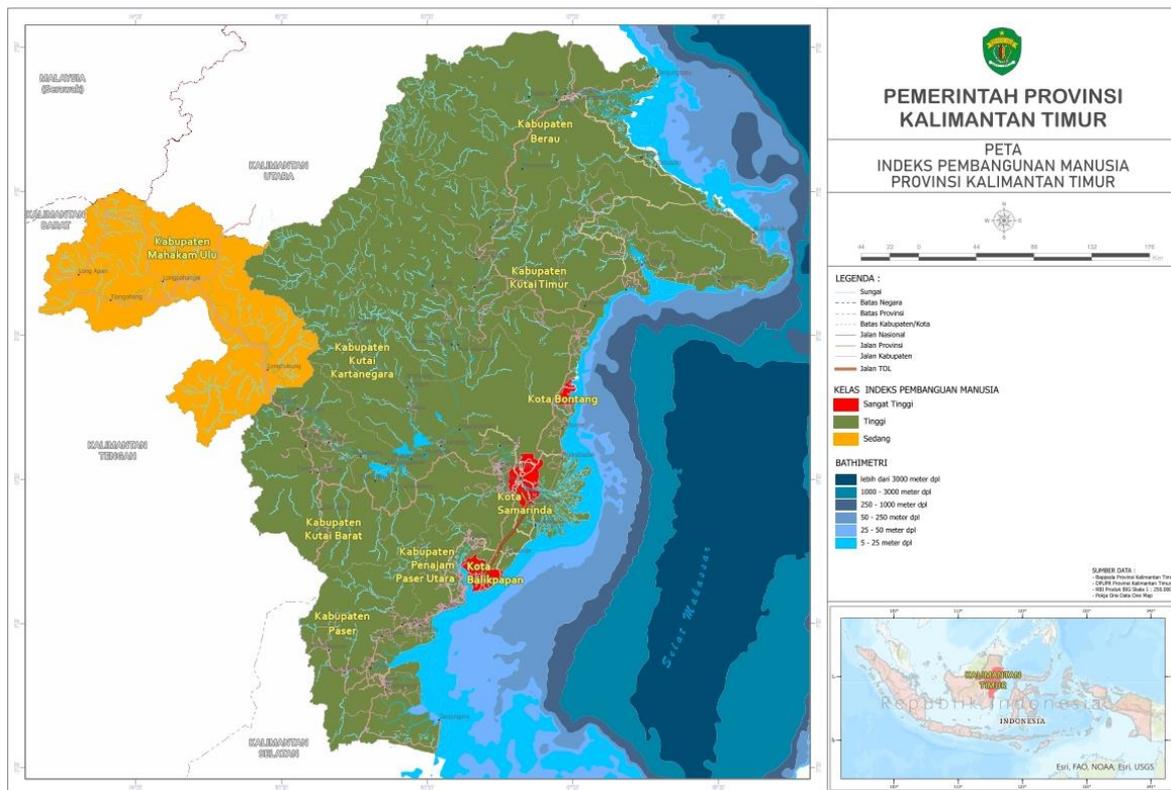
Gambar II.29

Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2020 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding

penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.30

Pola Spasial Status Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2020

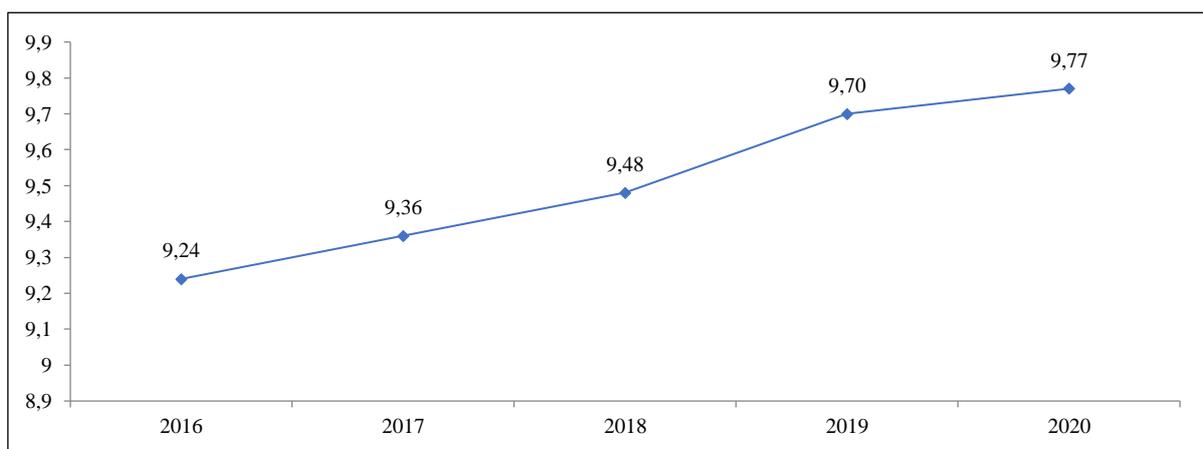
Pada tahun 2020 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki status IPM “Tinggi”, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur dengan status “Sedang”, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status “Rendah” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status “Sangat Rendah”.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk akan memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang pendidikan:

1) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun terakhir 2020 mencapai 9,77 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2020 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.31

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (Tahun)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-

rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Bontang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,79 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 7,97 tahun pada tahun 2020. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih belum cukup untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dimana masih perlu waktu yang lama untuk mewujudkannya. Meskipun begitu, capaian ini patut di apresiasi karena terus meningkatkan progress layanan pendidikan bagi masyarakat Kaltim.

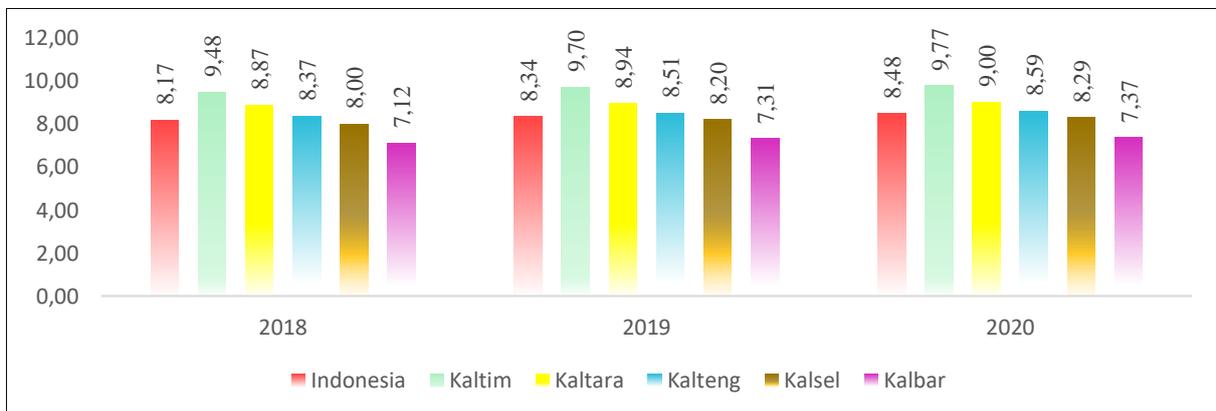
Tabel II.25

Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (tahun)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	8,19	8,2	8,22	8,54	8,55
2	KUBAR	8,03	8,06	8,07	8,34	8,47
3	KUKAR	8,71	8,83	8,84	9,10	9,22
4	KUTIM	8,72	9,06	9,08	9,18	9,19
5	Berau	8,78	8,96	8,98	9,25	9,52
6	PPU	7,6	7,95	8,03	8,16	8,28
7	MAHULU	7,37	7,68	7,69	7,89	7,97
8	Balikpapan	10,54	10,55	10,65	10,67	10,68
9	Samarinda	10,33	10,34	10,46	10,47	10,48
10	Bontang	10,39	10,7	10,72	10,73	10,79

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,77 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,48 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,00 tahun dan 8,59 tahun.

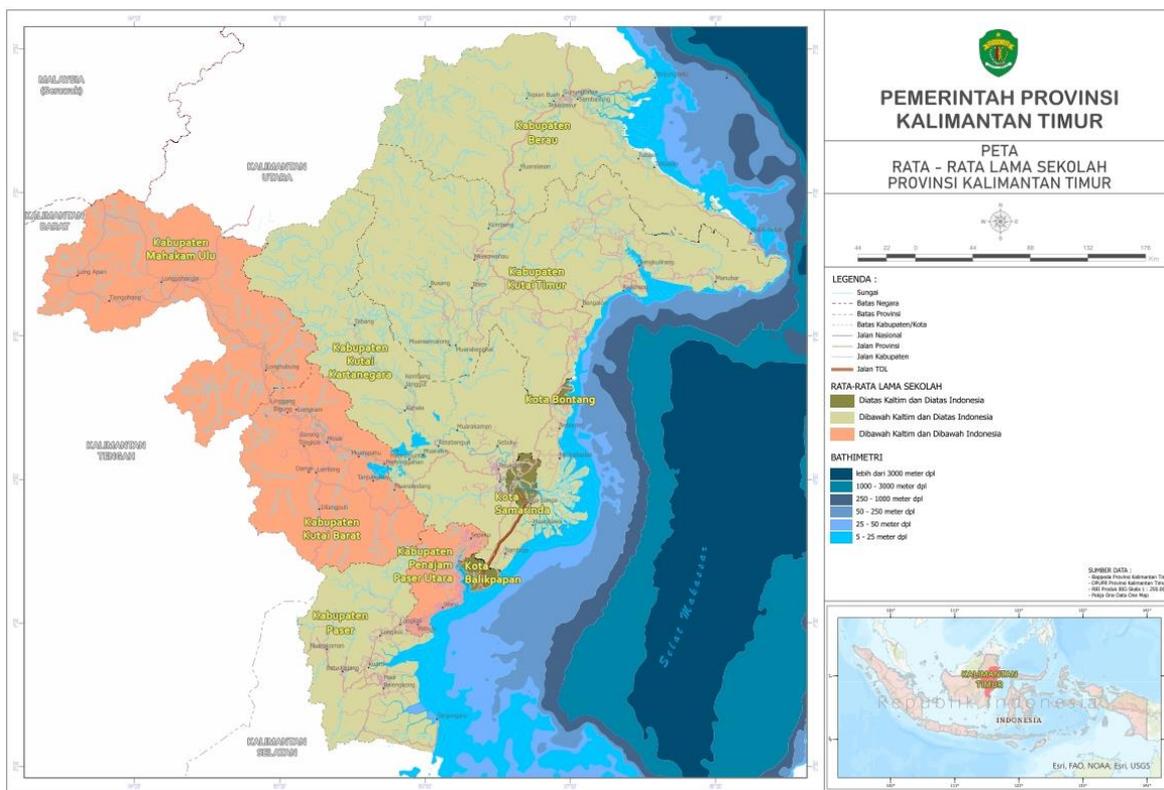


Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.32

Rata-rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

Pola spasial capaian Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2020 menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

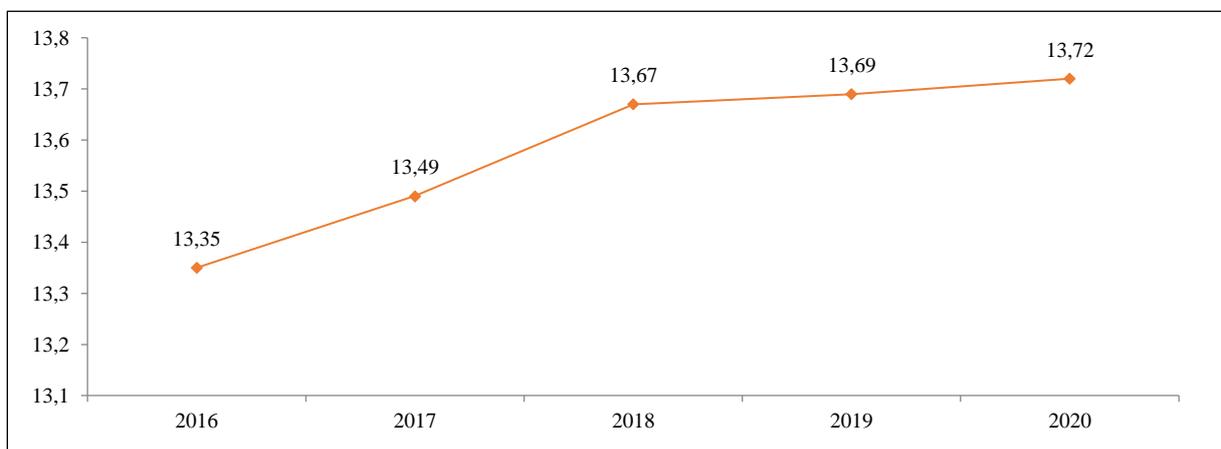
Gambar II.33

Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020

2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,72 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan

lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.34

Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (Tahun)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 14,89 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,51 tahun pada tahun 2020 merupakan capaian harapan lama sekolah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tabel II.26

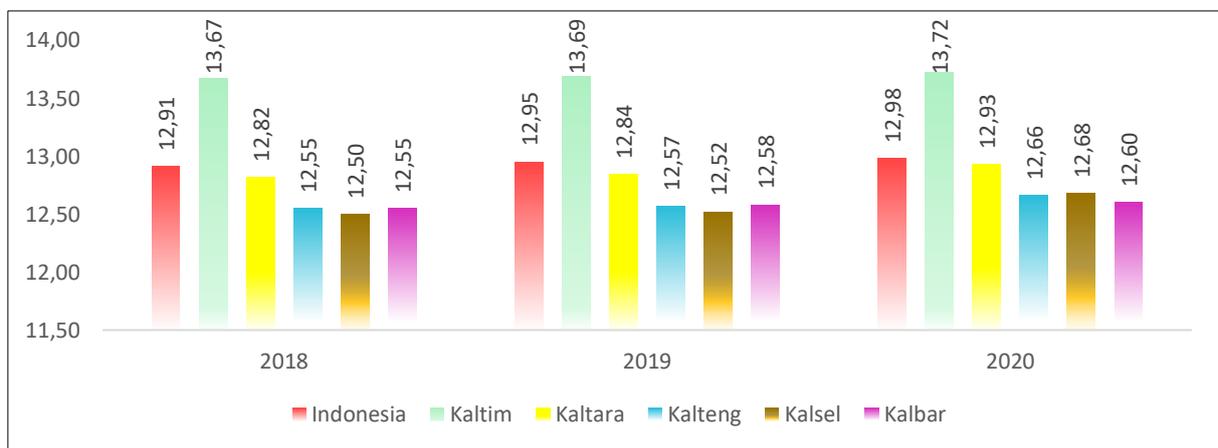
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (tahun)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	12,96	12,98	12,99	13,00	13,10
2	KUBAR	12,75	12,82	12,88	12,89	12,90
3	KUKAR	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59
4	KUTIM	12,44	12,48	12,65	12,78	12,89
5	Berau	13,18	13,29	13,3	13,31	13,32
6	PPU	12,46	12,53	12,54	12,55	12,56
7	MAHULU	12,42	12,47	12,48	12,50	12,51

8	Balikpapan	13,59	13,75	14,12	14,13	14,14
9	Samarinda	14,23	14,64	14,66	14,70	14,89
10	Bontang	12,79	12,88	12,89	12,90	13,03

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2016-2020) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.



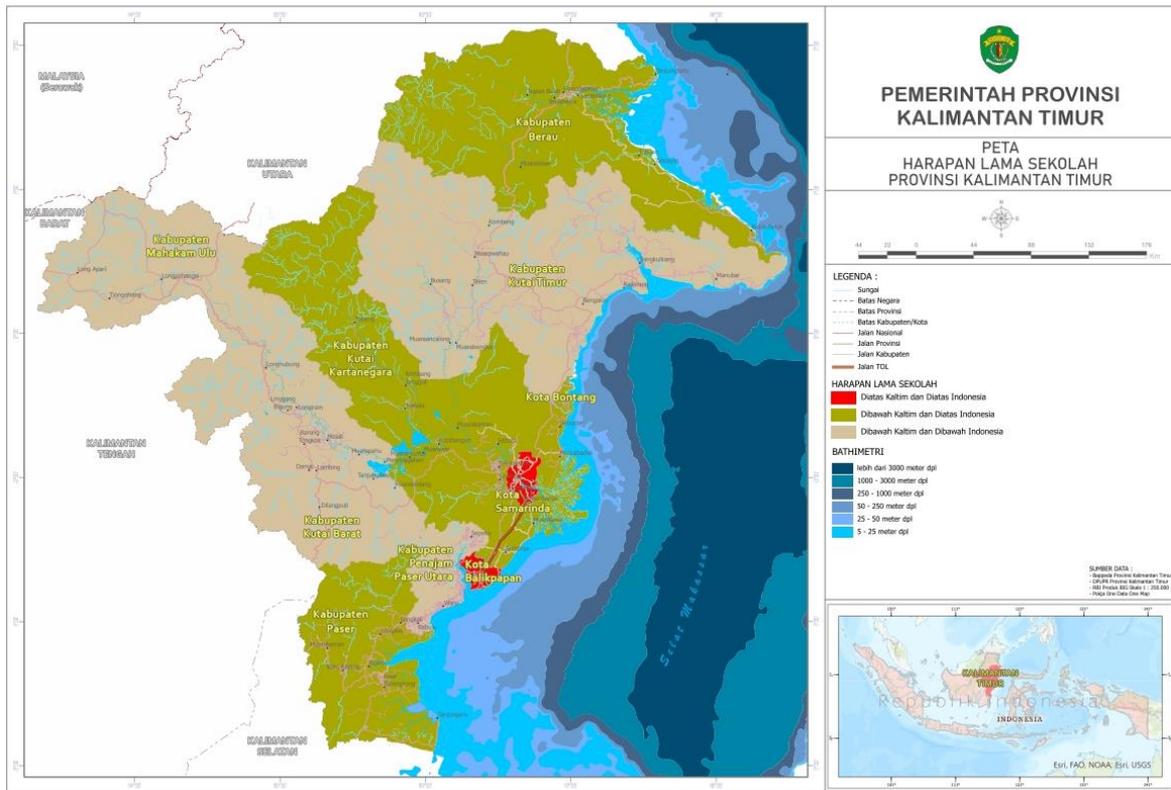
Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.35

Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.

Pola spasial capaian Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2020 menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam Pendidikan formal pada waktu tertentu.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.36

Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020

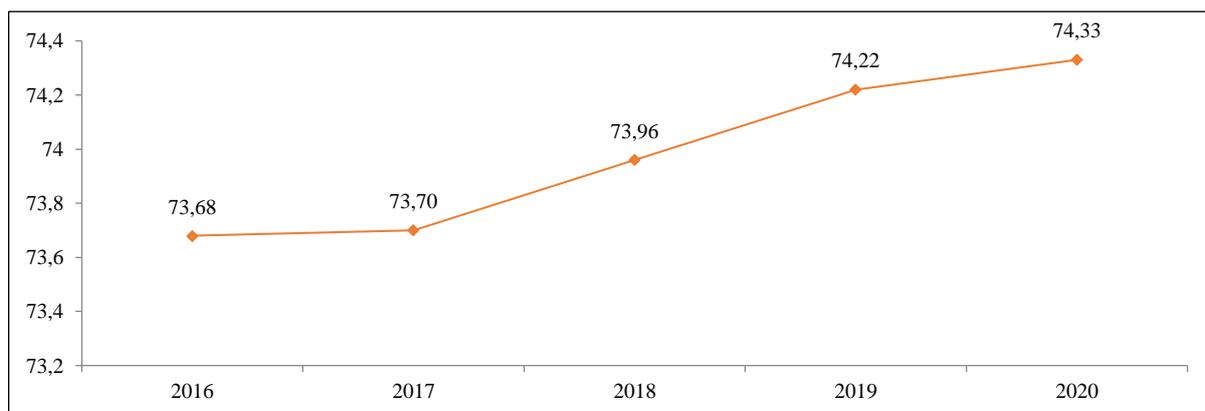
C. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat. Berikut beberapa indikator kinerja pembangunan daerah pada bidang kesehatan :

1) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Umur Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2019 mencapai 74,22 tahun dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 74,33 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 73,72 tahun.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.37

Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup mencapai 74,49 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,41 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

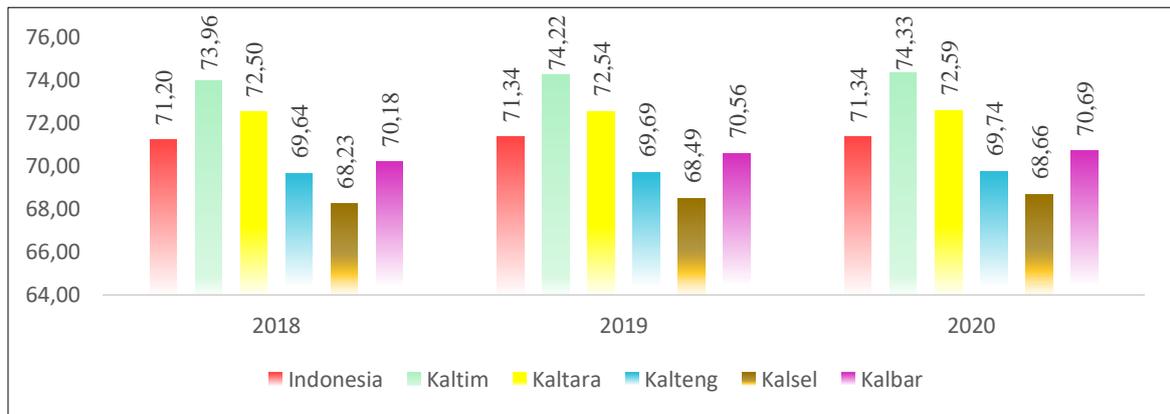
Tabel II.27

Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (tahun)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	72,02	72,05	72,28	72,52	72,62
2	KUBAR	72,28	72,37	72,57	72,79	72,86
3	KUKAR	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34
4	KUTIM	72,45	72,51	72,76	73,03	73,16
5	Berau	71,37	71,44	71,68	71,94	72,06
6	PPU	70,8	70,82	71,05	71,30	71,41
7	MAHULU	71,19	71,25	71,56	71,90	72,10
8	Balikpapan	73,96	73,97	74,18	74,41	74,49
9	Samarinda	73,68	73,71	73,93	74,17	74,27
10	Bontang	73,71	73,72	73,94	74,18	74,28

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,34 tahun. Namun laju pertumbuhan tertinggi lima tahun terakhir terjadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

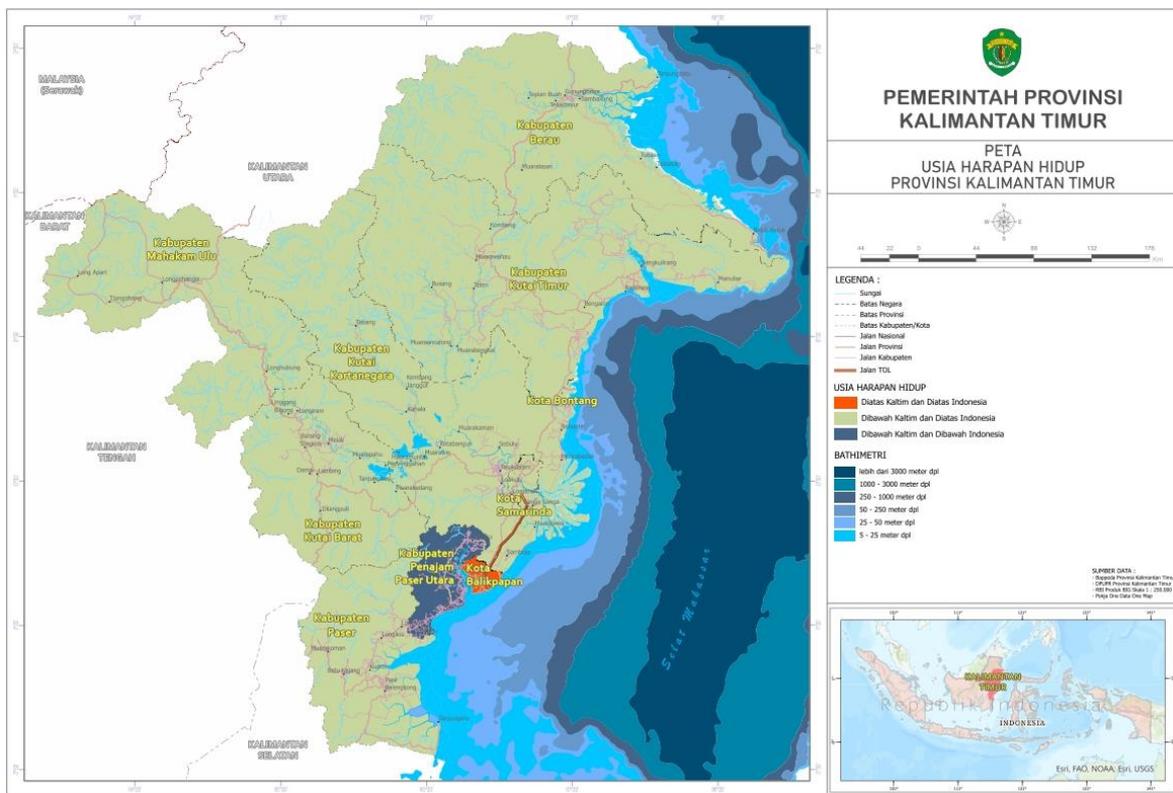


Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.38

Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia (Tahun)

Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup kabupaten/kota tahun 2020 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara,



menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.

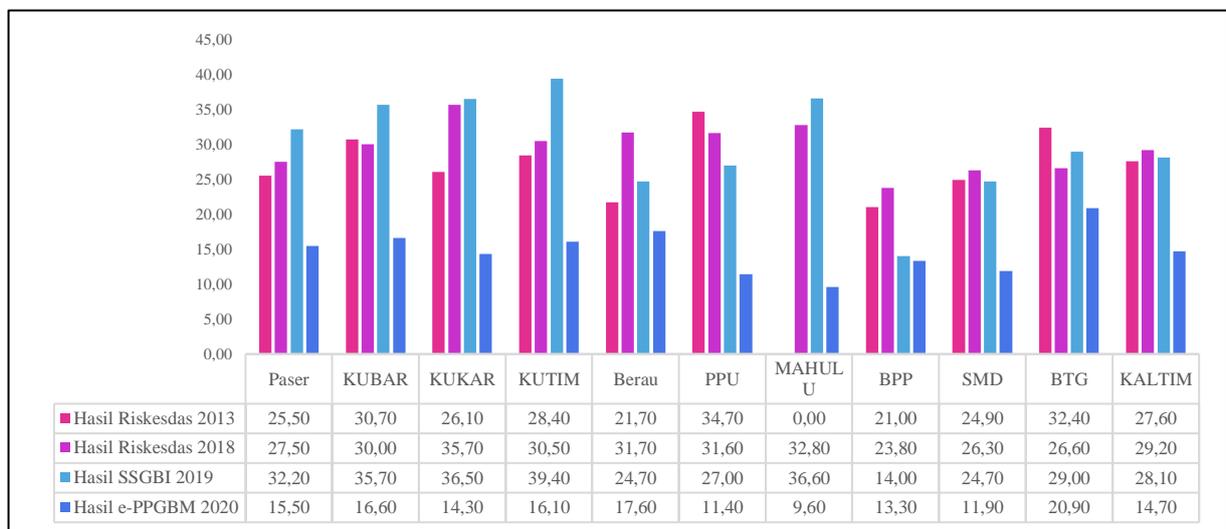
Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.39

Pola Spasial Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2020

2) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Trend Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017 – 2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0 – 11) bulan sudah mengalami penurunan.



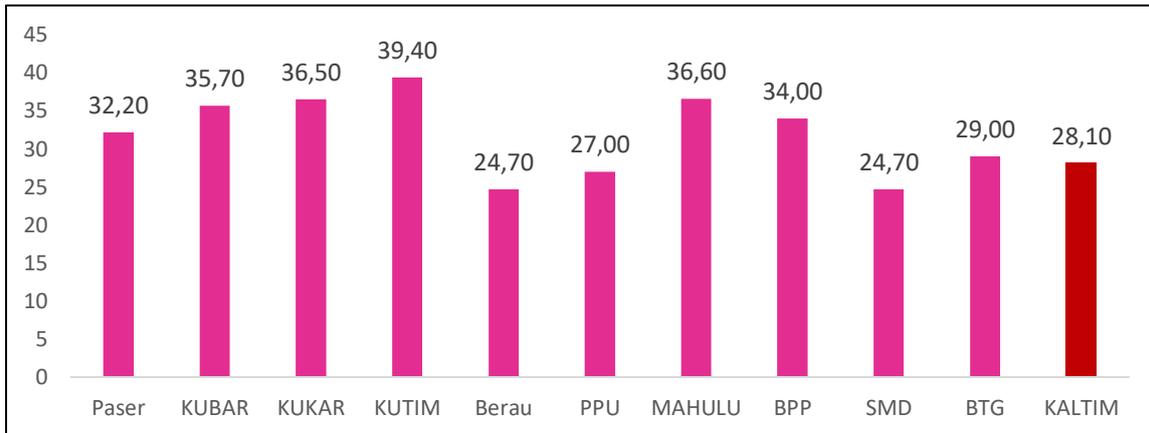
Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.40

Tren Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, 2018-2020

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 Provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah

apabila <20 persen. Rata-rata prevalensi stunting menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kota Balikpapan sudah mencapai 14 persen.



Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2021

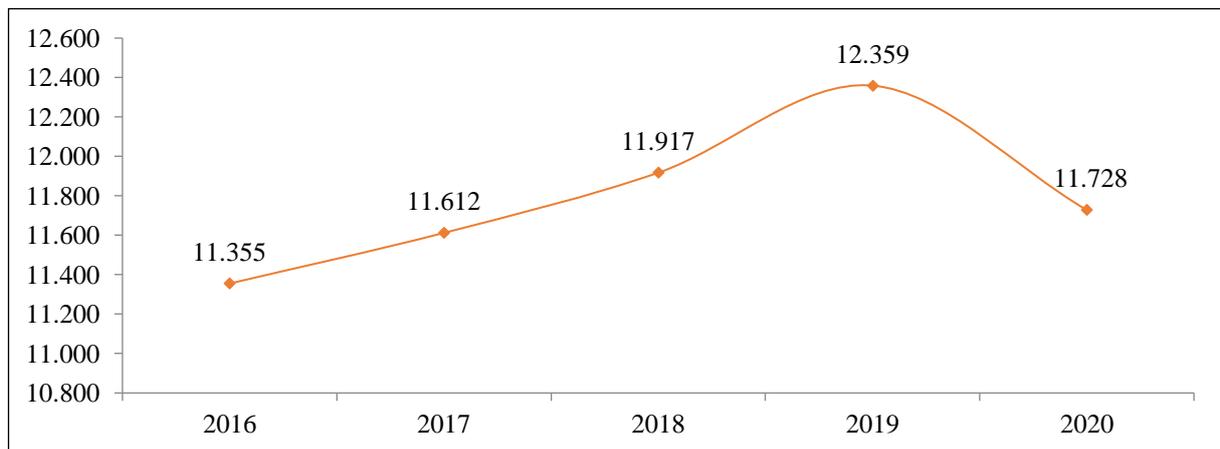
Gambar II.41

Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 berdasarkan Hasil Survei SSGBI

Angka Kematian Ibu dan Stunting merupakan *Major Project* sedangkan Angka Kematian Bayi dan Wasting merupakan Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Sejak tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Timur memiliki 2 lokus yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahun 2020 bertambah 2 lokus yaitu pada Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menjadi 4 lokus, sementara tahun 2021 bertambah 2 lokus lagi yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dan pada Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah lokus stunting. Hasil Riskesdas tahun 2018 angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 29,20 persen sementara Hasil SGGBI tahun 2019 sebesar 28,10 persen dan hasil ePPGBM sebesar 14,70 persen dari 36,62 persen yang diukur. Untuk wasting sendiri hasil Riskesdas 2018 sebesar 7,60 persen dan dari ePPGBM 7,2 persen dari target 9 persen. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka Percepatan Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.

D. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pada tahun 2020, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 11,73 juta per tahun, atau berkurang Rp 631 ribu dibandingkan tahun 2019. Maka, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 2,33 persen per tahun. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang



menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena imbas negatif pada perekonomian masyarakat.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.42

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (Ribuan Rp)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 16.278 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 7.524 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, penurunan pengeluaran per kapita menggambarkan penurunan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang masuk di tahun 2020.

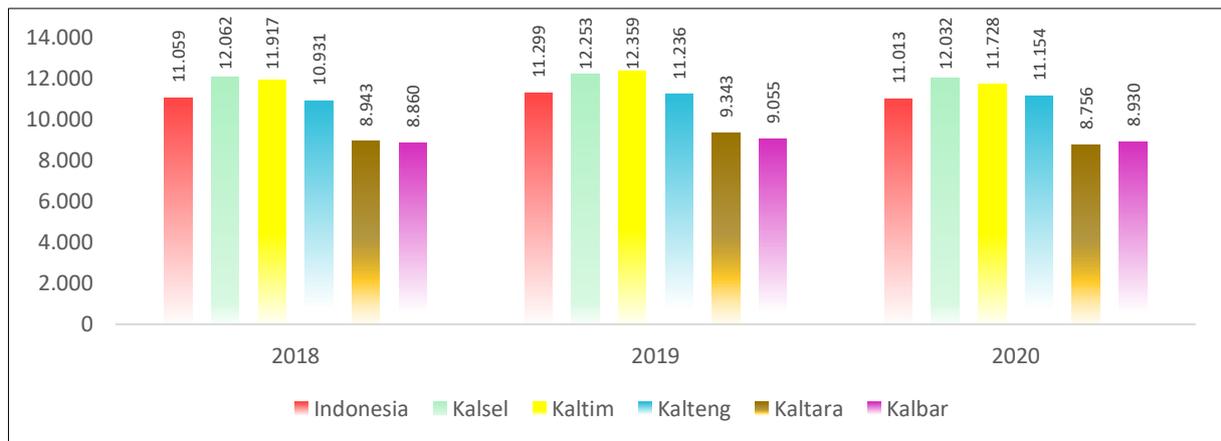
Tabel II.28

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	10.171	10.280	10.605	10.767	10.344
2	KUBAR	9.492	9.532	9.849	10.338	9.712
3	KUKAR	10.593	10.692	10.959	11.152	10.720
4	KUTIM	9.960	10.273	10.614	11.196	10.485
5	Berau	11.675	11.843	12.207	12.726	12.018
6	PPU	11.019	11.126	11.492	11.750	11.231
7	MAHULU	7.281	7.364	7.653	8.008	7.524
8	Balikpapan	13.883	14.254	14.557	14.791	14.549
9	Samarinda	14.010	14.175	14.466	14.613	14.135
10	Bontang	16.157	16.271	16.698	16.843	16.278

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2020, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.43
 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
 Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribuan Rupiah)

E. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, tidak merinci menurut jenis kelamin. Oleh sebab itu, IPM masih belum menjelaskan disparitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, UNDP

merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun



2010, terjadi perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.44

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (tahun)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 85,60 menjadi 85,98 di tahun 2019. Namun menurun di tahun 2020 menjadi 85,70. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG.

Tabel II.29

Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (tahun)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	-	69,78	70,64	71,41	71,15
2	KUBAR	-	83,30	83,52	83,84	83,87
3	KUKAR	-	78,54	78,83	79,14	78,90
4	KUTIM	-	75,48	76,03	76,51	76,26
5	Berau	-	87,77	87,92	87,93	87,61
6	PPU	-	86,31	86,34	86,22	86,39
7	MAHULU	-	79,82	80,18	80,89	80,98

8	Balikpapan	-	89,74	89,76	89,71	89,65
9	Samarinda	-	89,26	89,42	89,41	89,27
10	Bontang	-	86,44	86,61	86,72	86,87
Kalimantan Timur		85,60	85,96	85,63	85,98	85,70

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,65 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 71,15 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

F. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II.30

Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (tahun)

No	KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	-	62,07	62,76	66,20	65,66
2	KUBAR	-	62,63	63,68	61,14	60,60
3	KUKAR	-	55,07	56,44	63,74	61,43
4	KUTIM	-	53,71	55,72	56,35	53,77
5	Berau	-	49,85	50,55	57,66	57,91
6	PPU	-	50,30	50,02	50,36	49,75
7	MAHULU	-	74,12	76,04	80,61	80,41
8	Balikpapan	-	65,52	66,33	69,11	68,97
9	Samarinda	-	70,84	69,61	66,29	70,65

10	Bontang	-	45,44	46,36	51,99	51,97
	Kalimantan Timur	56,93	56,64	57,53	65,65	65,54

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terus mengalami peningkatan dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 80,41 sedangkan Penajam Paser Utara memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 49,75 yang artinya bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

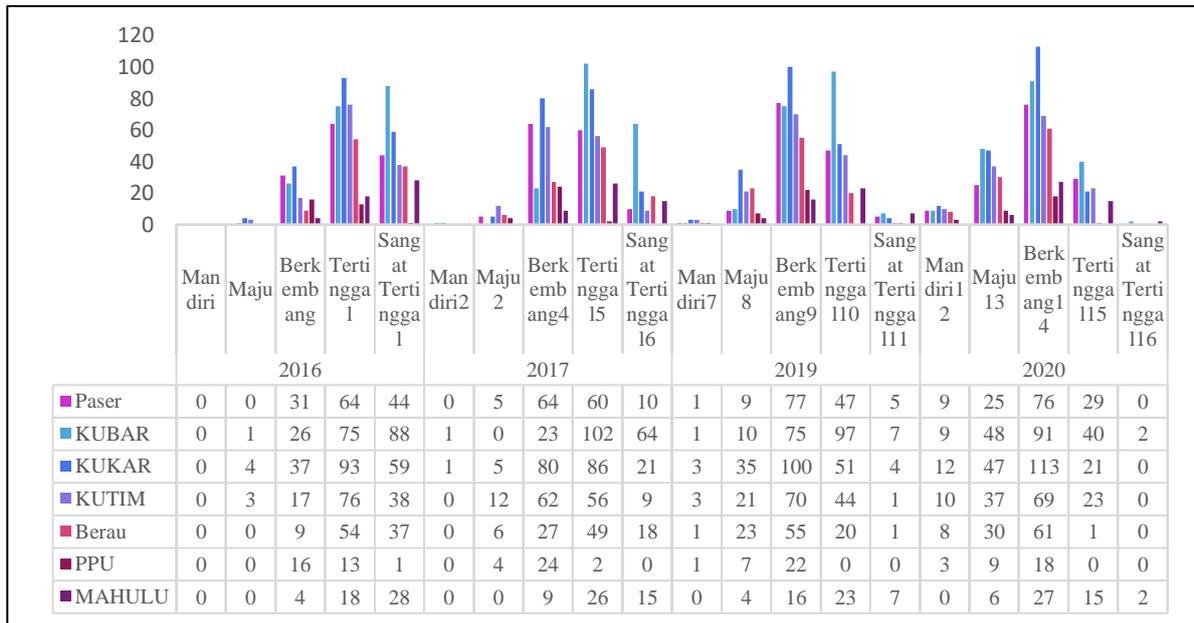
G. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ($IDM > 0.8155$), Desa Maju ($0.7072 < IDM \leq 0.8155$), Desa Berkembang ($0.5989 < IDM \leq 0.7072$), Desa Tertinggal ($0.4907 < IDM \leq 0.5989$) dan Desa Sangat Tertinggal ($IDM \leq 0.4907$). Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Oleh karena itu pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar pada desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Pada tahun 2020, dari 1.038 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur, 841 desa yang tersebar di tujuh kabupaten di Kalimantan Timur masih terdapat 4 Desa sangat tertinggal yaitu 2 desa di Kutai Barat dan 2

Desa di Mahakam Ulu dan 129 desa tertinggal, hanya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak memiliki Desa Tertinggal.

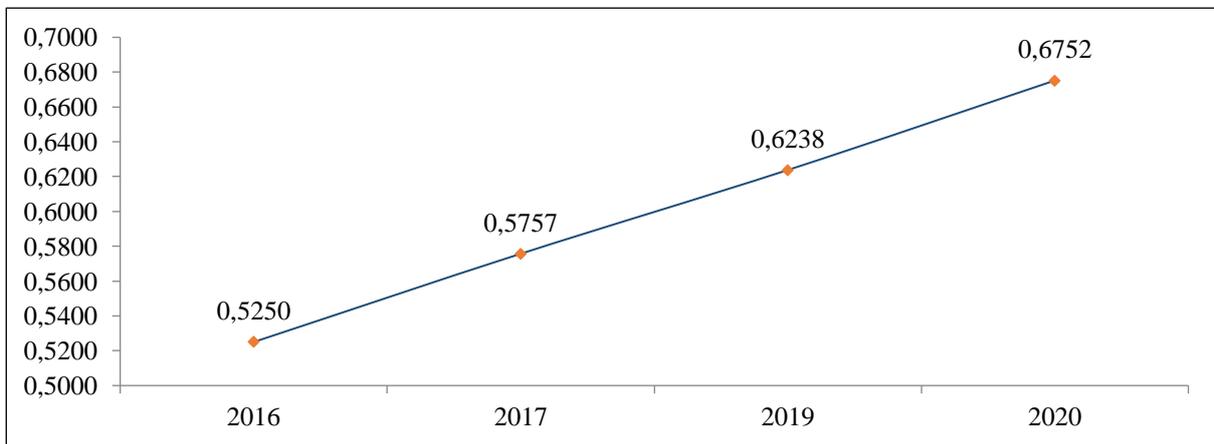


Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.45

Perkembangan Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan indeks 0,5250 pada tahun 2016 status tertinggal menjadi status berkembang pada tahun 2020 dengan indeks mencapai 0,6752. Dari 33 Provinsi di Indonesia, Kalimantan Timur



menempati Peringkat ke 9 di bawah Provinsi Bali dan Provinsi DI Yogyakarta yang menempati peringkat Pertama dan Kedua dengan Status IDM Maju. Sedangkan Provinsi Papua menjadi satu-satunya Provinsi dengan status IDM Sangat Tertinggal. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil.

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.46

Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020
Indeks Desa Membangun 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 mencapai Indeks Desa Membangun 0,6181 dengan status Berkembang, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Status Maju dengan indeks sebesar 0,7085.

Tabel II.31

Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 – 2020

No	Kab/Kota	2016	2017	2019	2020
1	Paser	0,5368	0,5856	0,6092	0,6664
2	KUBAR	0,5018	0,5233	0,5900	0,6660
3	KUKAR	0,5337	0,5815	0,6415	0,6846
4	KUTIM	0,5349	0,6037	0,6378	0,6782
5	Berau	0,5130	0,6097	0,6539	0,6999
6	PPU	0,6045	0,6505	0,6905	0,7085
7	MAHULU	0,4969	0,5352	0,5862	0,6181
Kalimantan Timur		0,5250	0,5757	0,6238	0,6752

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2021

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada program pengembangan nilai – nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel II.32

Karya Budaya Benda dan tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur yang Telah Dipatenkan Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda	Peringkat
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Alat Musik Genikng Suliikng Dewa	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar	Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
2.	KUKAR	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Tari Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu	Nasional Nasional Nasional Nasional		
3.	Paser	Tari Ngarang	Nasional		

4.	Provinsi			1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkuliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang	
----	----------	--	--	--	--

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2021

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 611 Cagar Budaya, 9 Museum, 437 Komunitas Budaya, 57 Tenaga Budaya, dan 205 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel II.33

Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/Tradisi
1	Paser	96	1	58	0	6
2	KUBAR	12	1	81	25	19
3	KUKAR	132	2	69	25	0
4	KUTIM	57	0	7	4	7
5	Berau	167	3	7	0	0
6	PPU	17	0	24	3	7
7	MAHULU	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	55	1	29	0	29
9	Samarinda	28	1	122	87	0
10	Bontang	0	0	40	4	0
Kalimantan Timur		611	9	437	157	205

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2020

Dalam hal pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mencapai 52,78. Namun capaian IPK ini masih dibawah capaian IPK Nasional yaitu sebesar 53,74. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Pendidikan dengan nilai 73,85, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai (76,82) dan dimensi budaya literasi dengan nilai 66,13.

Tabel II.34

Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	26,60	30,55
Pendidikan	73,85	69,67
Ketahanan Sosial Budaya	76,82	72,84
Warisan Budaya	29,96	41,11
Ekspresi Budaya	33,86	36,57
Budaya Literasi	66,13	55,03
Gender	49,99	54,97
IPK	52,78	53,74

Sumber: KEMENDIKBUD, 2019

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka diperlukan sinergitas antar lembaga terkait di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

B. Olahraga

Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumberdaya manusia baik kepemudaan dan keolahragaan. Dalam pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur terus dilakukan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, mengingat pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di berbagai bidang.

Untuk mengukur kapasitas pemuda dalam pembangunan ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menggambarkan kapasitas

pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2018 IPP Propinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 52,17 pada tahun 2015 menjadi 54,83 pada tahun 2018. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 8 secara nasional menurun dari peringkat tahun 2015 yang menduduki peringkat 6. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja dari dibawah 1 persen di tahun 2015 menjadi hampir 8 persen ditahun 2018.

Tabel II.35

Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan 2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Domain : Pendidikan	70,00	73,33	73,33	73,33
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,70	10,81	10,92	10,72
2. APK Sekolah Menengah	94,55	95,32	95,52	94,35
3. APK PT	28,44	31,60	35,58	35,64
Domain : Kesehatan dan Kesejahteraan	77,50	70,00	67,50	72,50
1. Angka Kesakitan Pemuda	5,81	4,83	6,15	5,37
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	0,47	0,97	1,37	0,93
3. Pemuda Merokok	22,09	22,59	20,80	20,80
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	0,80	4,82	7,99	7,99
Domain : Lapangan dan Kesempatan Kerja	30,00	65,00	40,00	35,00
1. Pemuda Berwirausaha	0,24	1,41	0,40	0,24
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	17,05	16,29	15,78	15,21
Domain : Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	40,00	40,00	43,33
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Masyarakat	77,25	77,25	77,25	70,55
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	3,63	3,63	3,63	4,87
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	6,21	6,21	6,21	5,12
Domain : Gender dan Diskriminasi	43,33	43,33	46,67	50,00
1. Angka Perkawinan Usia Anak	14,78	14,85	13,90	11,54
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	42,28	40,35	44,83	44,39

Uraian	2015	2016	2017	2018
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	23,99	23,82	24,21	25,29
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim	52,17	58,33	53,50	54,83
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	48,67	50,83	49,33	51,50

Sumber: BAPPENAS, 2021

Sedangkan dalam pembangunan keolahragaan, setelah sukses meraih peringkat lima besar pada PON XIX Tahun 2016, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam event berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Tabel II.36

Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	107
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	42	45	45
Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.050	1.087	1.109	1.109
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97	101	102	105	105
Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	161	161
Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	63	63	63

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2021

Tabel II.37

Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	-	-	-	15,04	15,04
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,95	0,92	0,96	1,03	1,06
1.3	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20,63	18,93	18,1 4	17,82	18,90
1.4	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,53	0,55	0,56	0,63
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,32	0,30	0,31	0,33	0,36
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,43	4,50	4,34	4,33	4,94
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,54	1,45	1,48	1,52	1,67
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,34	1,16	1,17	1,12	1,13
2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,24	9,36	9,48	9,70	9,77
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,35	13,49	13,6 7	13,69	13,72
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,68	73,70	73,9 6	74,22	74,33
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.1	Persentase /Jumlah sekolah mengembang- kan budaya lokal (%)	-	-	17	77	150
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	-	-	0,36	10	35

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi masa depan dalam rangka menumbuhkan insan yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tangguh, oleh karenanya masyarakat harus mengakses pelayanan pendidikan lebih baik. Dengan demikian Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni menggambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan.

Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur pada jenjang usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun terus mengalami kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat. Sedangkan APS pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin menurun partisipasi sekolahnya.

Tabel II.38

Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Sekolah					
Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	99,54	99,67	99,76	99,68	99,73
13-15	98,18	98,79	98,89	98,21	99,07

16-18	80,81	81,32	81,55	82,07	81,88
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	110,04	108,07	108,02	106,84	105,75
SLTP	95,28	91,46	92,57	91,03	92,17
SLTA	95,38	99,51	96,08	94,96	95,23
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	97,13	97,43	98,40	98,41	98,44
SLTP	79,20	79,58	79,68	80,42	81,28
SLTA	67,92	68,23	68,43	68,55	69,00

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,75. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,75 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun bersekolah ditingkat SD.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Dari tabel diatas terlihat bahwa, APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari keningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur.

Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi

siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel II.39

Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.653	355.154	23.076	15,39	214,85
Swasta	242	62.752	3.476	18,05	259,31
MI	133	28.103	1.633	17,21	211,30
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	442	127.805	8.603	14,86	289,15
Swasta	215	33.088	2.366	13,98	153,90
MTs	164	29.745	2.286	13,01	181,37
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	142	65.424	3.907	16,75	460,73
Swasta	80	12.593	957	13,16	157,41
MA	66	10.119	861	11,75	153,32
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	87	51.872	3.184	16,29	596,23
Swasta	129	29.263	1.935	15,12	226,84

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Pada tahun 2020, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

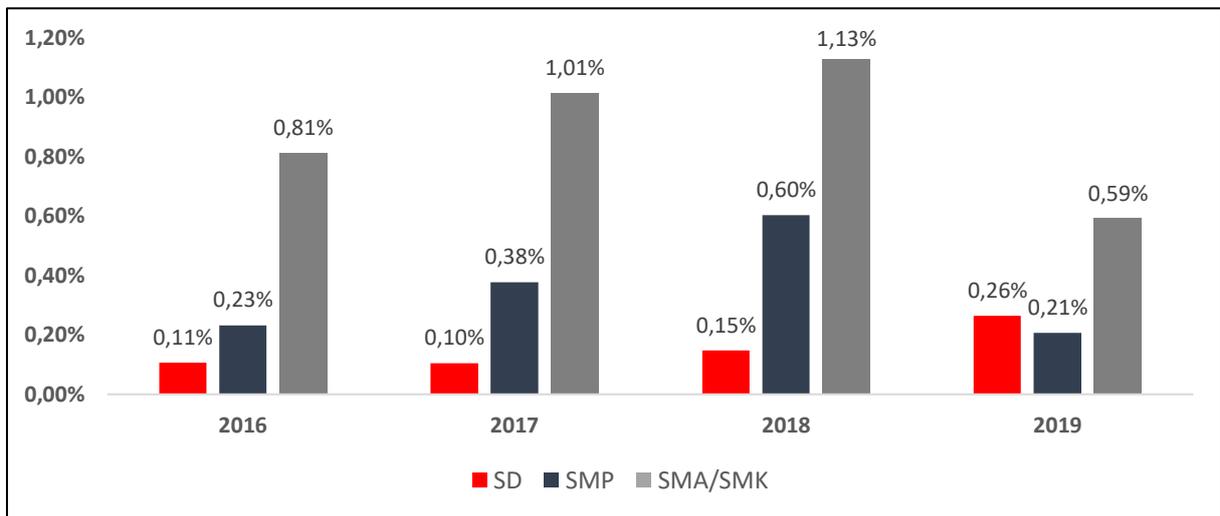
Tabel II.40

Jumlah Sekolah Yang Tersebar di 10 Kabupaten/Kota Negeri dan Swasta pada Jenjang Pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 2020

No	KAB / KOTA	Sekolah Menengah atas (SMA)			Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			Sekolah Luar Biasa (SLB)		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
1	Paser	17	13	4	12	4	8	1	1	0
2	KUBAR	22	17	5	14	7	7	1	1	0
3	KUKAR	51	35	16	43	17	26	5	1	4
4	KUTIM	22	21	1	25	13	12	3	1	2
5	Berau	19	15	4	14	8	6	1	1	0
6	PPU	10	7	3	10	6	4	1	1	0
7	MAHULU	7	4	3	2	0	2	1	1	0
8	Balikpapan	25	9	16	33	6	27	4	1	3
9	Samarinda	42	18	24	52	22	30	13	1	12
10	Bontang	11	3	8	14	4	10	6	1	5
Total		226	142	84	219	87	132	36	10	26

Sumber: KEMDIKBUD, 2021

Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1.108 pada tahun 2020 di semua jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK), sudah cukup rendah, walaupun untuk jenjang Pendidikan menengah atas/kejuruan di tahun 2017 dan 2018 sempat berada di atas 1 persen, namun pada tahun 2019 angka putus sekolah di jenjang ini kembali turun menjadi 0,59 persen. Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah sebesar 0,59 persen pada tahun 2019 antarlain disebabkan karena pada wilayah tertentu (wilayah terpencil) di beberapa Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur tidak memenuhi standar untuk dibangun unit sekolah baru. Selain itu, ada sebagian kecil masyarakat usia sekolah yang lebih memilih bekerja membantu orang tua daripada melanjutkan sekolah.



Sumber: KEMDIKBUD, 2021

Gambar II.47

Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2015-2019 (persen)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2020, jumlah mahasiswa mencapai 92.857 dengan jumlah dosen sebanyak 4.122 orang.

Tabel II.41

Indikator Perguruan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Kategori	Jumlah Perguruan Tinggi	Jumlah Tenaga Pendidik	Jumlah Mahasiswa
Negeri	5	1.809	40.398
Swasta	49	2.313	52.459

Jumlah	54	4.122	92.857
--------	----	-------	--------

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat, baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan peningkatan berbagai pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkualitas. Berbagai upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukannya penyempurnaan pada beberapa program pembangunan kesehatan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran untuk menggunakan fasilitas kesehatan resmi, hingga terkait pola hidup sehat di masyarakat. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

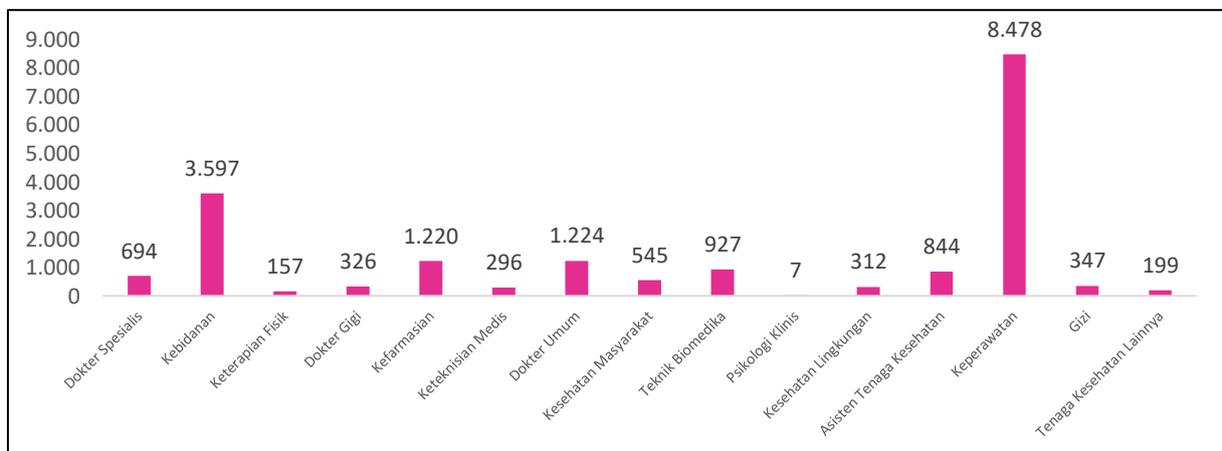
Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan beban berat dalam menangani dampak akibat pandemi COVID-19, dimana perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak COVID-19, perlu adanya reformasi di bidang kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular, pelayanan kesehatan dan surveilans. Sehingga pasca COVID-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular.

Tabel II.42
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No	Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit Umum	44	44	54	53	57
2	Rumah Sakit Swasta	16	16	19	19	22
3	Dokter Umum	1.035	1.114	1.010	1.024	1.106
4	Dokter Gigi	323	320	309	314	320
5	Dokter Spesialis	583	678	503	597	649
6	Perawat	7.178	6.662	7.823	6.524	7.510
7	RS Bersalin	10	10	15	9	7
8	Puskesmas	180	186	186	187	187
9	Puskesmas Pembantu	669	714	716	716	730
10	Pedagang Besar Farmasi	47	47	48	49	52
11	Apotek	524	524	637	704	759
12	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	90,12	88,2	96,34	96,39	97,46

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis



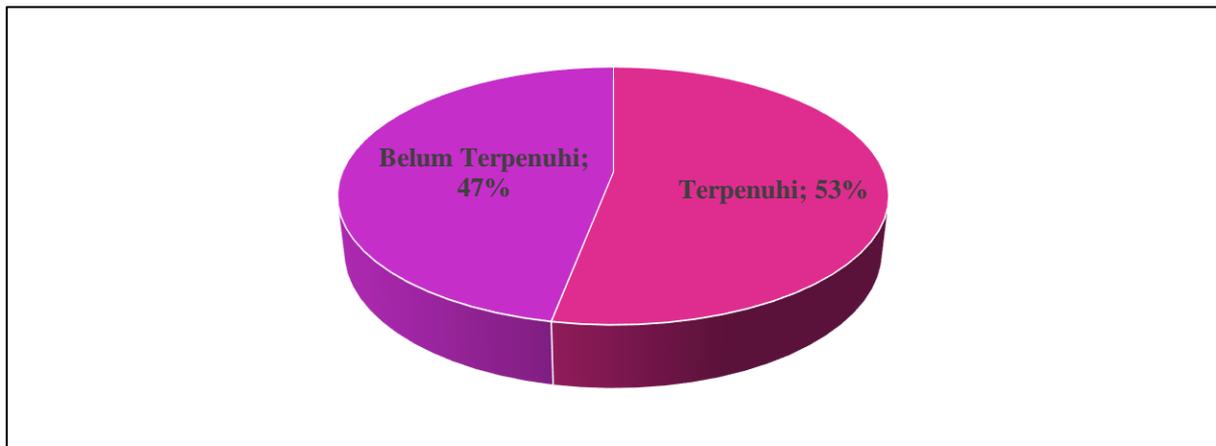
(Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.48

Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.49

Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

Tabel II.43

Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan
3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur

KAB/KOTA	Jumlah RSUD	Nama RSUD
Berau	1	RSUD Talisayan
Samarinda	2	RSUD Inche Abdoel Moeis
		RSUD KORPRI Prov KALTIM
KUKAR	1	RSUD Dayaku Raja
KUTIM	1	RSUD Sangkulirang
MAHULU	2	RS Gerbang Sehat MAHULU
		RS Nawacita Datah Dave
Paser	1	RS Pratama Batu Engau
PPU	1	RS Pratama PPU
Total	9	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2021

C. Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) bagi PMKS dan PSKS.

Tabel II.44

Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

Jumlah PMKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS	Orang	247.167	243.459	n/a	251.234	251.234
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	n/a	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	0,01	0,01	0	0,01	0,01

Jumlah PMKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	78.690	76.000	78.387	78.387	81.247
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Orang	43.018	75,696	n/a	1.052	1.143
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	54,67	99,6	0	1,34	1,4
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	n/a	46.510	n/a	46.510	46.510
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	28.539	38.187	n/a	100	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebanyak 243.459 orang menjadi 251.234 orang pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebanyak 7.775 orang. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peningkatan jumlah PMKS ini harus diiringi dengan peningkatan penanganan PMKS menuju hidup yang lebih baik. Jumlah PMKS juga tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dimana rinciannya dapat dilihat pada tabel II.45 berikut.

Tabel II.45

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1,841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	379	-	679	-	2,981	-	95	-	164	-	489	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	192	-	1,017	-	608	-	240	-	54	-	851	-
9	Penyandang Disabilitas	673	-	947	-	1,294	-	281	-	1,824	-	696	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4	-	51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8	-	55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1,091	-	180	-	1,990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-
18	Korban Trafficking	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2,807	591	169	43	5,950	1,267	981	214	47,301	9,748	1,211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2,477	412	3,288	612	781	192	25,304	5,941	1,011	214
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14,704	3,114	20,114	3,193	14,248	3,101	12,047	3,012	12,678	2,870	13,647	3,291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1,697	378

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
JUMLAH		22.572	3.876	27,082	3,648	35,452	4,980	15,015	3,418	88,571	18,586	20,530	4,170

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

Tabel II.45 Lanjutan

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Anak Balita Terlantar	-	77	-	128	-	78	-	-
2	Anak Terlantar	-	193	-	1,471	-	193	-	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	-	172	-	442	-	43	-	18
4	Anak Jalanan	-	16	-	-	-	51	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	-	35	-	872	-	43	-	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	-	139	-	187	-	56	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	147	-	587	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	-	71	-	756	-	178	-	-
9	Penyandang Disabilitas	-	469	-	1,326	-	383	-	-

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	75	-	19	-	17	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	-	4	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-	44	-	-	-	-	-	-
16	Orangr Dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	31	-	159	-	160	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	-	2	-	4	-	4	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migram Bermasalah Sosial	-	52	-	-	-	34	-	-
21	Korban Bencana Alam	287	-	-	712	154	869	196	-
22	Korban Bencana Sosial	214	422	106	392	98	377	95	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	27	-	29	-	48
24	Fakir Miskin	3,193	14,248	3,101	12,047	3,012	12,678	2,870	13,647

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	337	-	-	-	581	-	11
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	72	27	1,697
JUMLAH		12.969	2.624	19.631	3.357	7.077	1.338	2.335	513

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah dari sektor pekerjaan umum salah satunya adalah terkait dengan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas.

Mengacu pada Target Nasional dalam RPJMN 2020-2024, target capaian akses air minum layak di tahun 2024 adalah 100 persen, yang terdiri didalamnya persentase akses air minum aman sebesar 15 persen. Permasalahan dalam pencapaian target tersebut dirasakan ketika capaian daerah aktual saat ini masih rendah, terutama terkait capaian pelayanan air minum perpipaan.

Tabel II.46
Fasilitas dan Pelayanan Penduduk Terlayani Air Minum Perpipaan

No	KAB/KOTA	Sambungan Rumah (SR)					Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Paser	18.743	19.050	19.050	21.551	23.599	24,21	38,29	38,29	37,16	43,79
2	KUBAR	9.987	10.012	10.012	11.009	9.565	34,25	34,35	34,35	34,24	28,84
3	KUKAR	69.942	68.035	68.035	73.203	67.017	63,25	63,39	63,39	58,68	49,52
4	KUTIM	20.656	15.945	15.945	20.122	30.335	31,67	33,13	33,13	15,43	38,08
5	Berau	16.120	16.517	16.517	23.738	18.101	44,34	44,70	44,70	81,59	54,87
6	PPU	5.339	5.470	5.470	7.845	10.399	14,19	15,87	15,87	34,79	30,13
7	MAHULU	n/a	n/a	n/a	1.554	1.656	n/a	n/a	n/a	12,00	22,49
8	Balikpapan	95.781	97.243	97.243	100.927	100.163	76,50	76,98	76,98	79,05	77,79
9	Samarinda	137.135	146.225	146.225	158.901	158.900	90,96	95,46	95,46	99,29	85,28
10	Bontang	22.970	23.999	23.999	22.953	28.464	84,37	87,05	87,05	51,10	97,96
Jumlah		360.996	396.673	402.496	441.803	448.199	51,7	51,5	54,3	54,59	62,64

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, dimana sejak tahun 2017 sebesar 51,5 persen sampai pada tahun 2019 hanya mengalami peningkatan sebesar ± 3 persen menjadi 54,59 persen dan di tahun 2020 meningkat tajam menjadi 62,64 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya program/kegiatan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, pemerintah provinsi dan juga oleh kabupaten/kota (melalui APBD II). Hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah telah mulai menjadikan sektor penyediaan air minum menjadi salah satu program prioritas daerah dan nasional.

Namun dalam upaya pemenuhan layanan air minum saat ini, mulai ditemui kendala terkait terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian menjadikan upaya pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM menjadi kurang optimal. Idealnya penyelenggaraan SPAM, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kehandalan air baku yang sangat besar, sementara di daerah lain diprediksi akan mengalami kesulitan air baku. Beberapa daerah yang diperkirakan mengalami defisit air baku di masa depan meliputi beberapa daerah yang saat ini hanya mengandalkan sumber air baku yang berasal dari tanah, dengan tanpa alternatif sumber air baku lain, seperti air permukaan (DAS, danau dan mata air).

Melihat permasalahan diatas, dalam rangka peningkatan capaian akses air minum untuk seluruh masyarakat, maka kedepan akan diperlukan upaya untuk pemerataan akses terhadap sumber air baku yang potensial dimanfaatkan secara bersama. Upaya tersebut akan berjalan melalui skema penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota atau Regional (SPAM Regional). Terdapat beberapa potensi SPAM Regional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dan akan potensial direalisasikan dengan skema kerjasama daerah, melalui Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah, Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Tabel II.47

Potensi Penyelenggaraan SPAM Regional di Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur

No	Potensi Spam Regional	KAB/KOTA Terlibat	Kebutuhan	Sumber Air Baku	
			Kapasitas L/Det	Nama	Kapasitas

1	KUKAR- Bontang	KAB. KUKAR, Kota Bontang	450	Bendung Marangkayu	450 l/det
2	KUTIM- Bontang	KAB. KUTIM, Kota Bontang	150	Waduk Ex Tambang Indominco	> 100 L/DET (Masih Dalam Kajian)
3	PPU – Balikpapan	KAB. PPU, Kota Balikpapan	- (Masih Dalam Kajian)	Waduk Sepaku Semoi, Waduk Sepaku	> 2.000 l/det
4	KUKAR – Balikpapan	KAB. KUKAR, Kota Balikpapan	- (Masih Dalam Kajian)	Waduk Batu Lepek	5.000 l/det
5	Paser – Balikpapan	KAB. Paser, Kota Balikpapan	- (Masih Dalam Kajian)	Waduk Lambakan	12.000 l/det

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2020

Untuk Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata kehilangan air *Non Revenue Water* (NRW) Distribusi berdasarkan data Audit BPKP Tahun Buku 2019 yaitu sebesar 22,70 persen. Dengan kapasitas produksi rata-rata sebesar 7.347,79 l/dt, kapasitas distribusi sebesar 6.805,98 l/dt dan kapasitas terjual 4.821,59 l/dt.

Tabel II.48
Rekapitulasi Kehilangan Air Rata-Rata Kab/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Jumlah Unit	Kap Terpasang (l/dt)	Kap Produksi (l/dt)	Kap Distribusi (l/dt)	Kap Terjual (l/dt)	Idle Capacity (l/dt)	Kehilangan Air (%)
1	Paser	8	360	307,00	290,43	179,57	59,00	22,16
2	KUBAR	12	298	212,00	189,00	151,90	90,00	12,73
3	KUKAR	33	1.667	1.532,00	1.376,00	923,00	135,00	33,00
4	KUTIM	17	640	427,60	421,30	322,10	212,40	12,29
5	Berau	18	548	442,50	374,00	344,00	130,00	17,54
6	PPU	5	340	134,00	134,00	124,00	206,00	25,76
7	MAHULU	12	157	47,00	47,00	47,00	110,00	-
8	Balikpapan	10	1.490	1.252,00	1.169,25	852,84	211,00	34,38
9	Samarinda	13	2.425	2.587,00	2.404,17	1.534,56	80,00	33,55
10	Bontang	4	470	406,69	400,74	341,62	63,31	12,93
	Kalimantan Timur	132	8.395	7.347,79	6.805,98	4.821,59	1.296,71	22,70

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2020

Kehilangan air tertinggi terdapat di PDAM Kota Samarinda sebanyak 33,55 persen dan di Kota Balikpapan sebanyak 34,38 persen sedangkan kehilangan air terendah terdapat di PDAM Kota Bontang sekitar 12,93 persen dan PDAM Kabupaten Berau sebesar 17,54 persen. Penyebab kehilangan air pada umumnya disebabkan oleh adanya kebocoran pipa jaringan distribusi yang telah tua, dan belum akuratnya pencatatan meter water pelanggan, masih banyaknya *water meter* pelanggan yang rusak dan belum dilakukan peneraan *water meter* pelanggan. Pada umumnya PDAM telah berupaya untuk menurunkan NRW distribusi dengan melakukan penggantian *water meter* pelanggan yang rusak secara bertahap.

E. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kemampuan kehidupan masyarakat sekaligus mengindikasikan daya saing sumber daya manusia suatu wilayah. Kualitas penduduk yang bekerja dapat dilihat dari kelompok umur dan tingkat pendidikan. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, berimbas pada pergeseran komposisi angkatan kerja menurut umur. Program wajib belajar 9 tahun telah menggeser angkatan kerja usia muda lebih banyak yang bersekolah, dampaknya mengurangi proporsi tenaga kerja usia muda.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diasumsikan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, karena semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan, maka nilai tambah sebagai imbalan yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Tabel II.49

Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD ke Bawah	470.608	443.488	477.106	482.844	493.889
		(29,76)	(28,79)	(29,43)	(28,51)	(29,18)
2	SMP	278.802	236.959	260.843	273.257	267.721
		(17,63)	(15,38)	(16,09)	(16,14)	(15,82)
3	SMA/SMK	600.455	593.161	609.994	659.047	643.105
		(37,97)	(38,50)	(37,63)	(38,92)	(37,99)

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
4	Diploma I/II/III	70.398	68.636	64.291	57.174	64.507
		(4,45)	(4,45)	(3,97)	(3,38)	(3,81)
5	Universitas/ DIV	160.976	198.431	208.735	221.159	223.574
		(10,18)	(12,88)	(12,88)	(13,06)	(13,21)
Kalimantan Timur		1.581.239	1.540.675	1.620.969	1.693.481	1.692.796
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III. Masih tingginya proporsi penduduk pada kelompok tamatan SD ke bawah untuk usia bekerja perlu menjadi perhatian serius oleh Provinsi Kalimantan Timur, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah ini. Pada tahun 2020 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 29,18 persen meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 28,51 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,38 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 3,81 persen.

Tabel II.50

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tinggi berdasar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2019

No	KAB/KOTA	SMA/SMK			Diploma/Universitas		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Paser	34.244	35.740	39.940	15.981	16.325	14.888
		29,67	27,69	30,38	13,85	12,65	11,32
2	KUBAR	18.598	19.590	22.592	6.070	7.601	8.553
		28,31	26,97	32,80	9,24	10,46	12,42
3	KUKAR	121.146	119.976	128.560	38.307	44.946	43.730
		37,76	35,60	36,18	11,94	13,34	12,31
4	KUTIM	56.497	60.335	70.942	22.272	20.426	21.588
		35,70	35,52	39,91	14,07	12,02	12,15
5	Berau	34.925	36.398	40.825	11.843	11.184	13.557
		36,45	35,50	38,76	12,36	10,91	12,87
6	PPU	19.086	20.372	20.077	6.661	7.691	5.585
		29,20	28,81	28,57	10,19	10,88	7,95
7	MAHULU	4.172	4.371	3.589	1.522	1.697	1.047

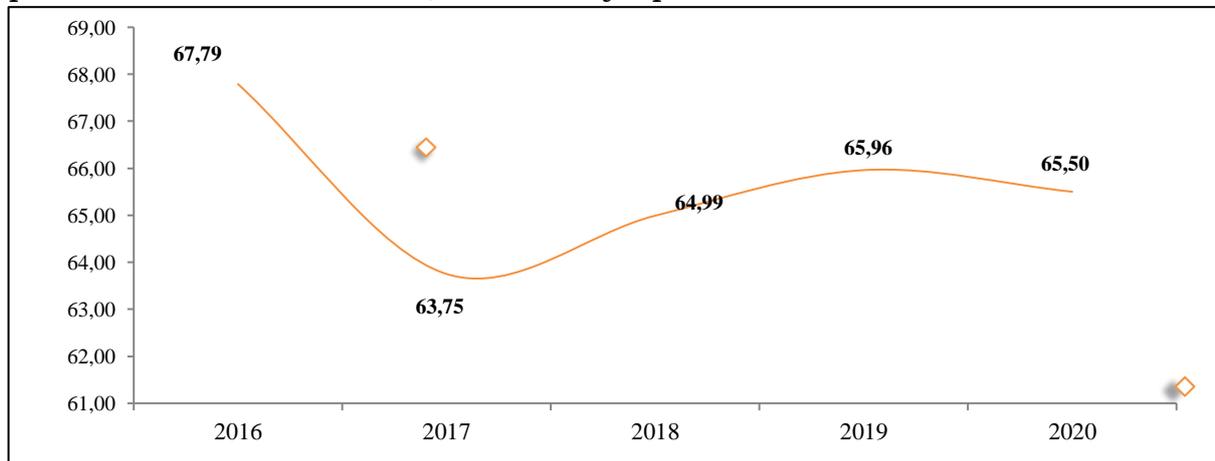
No	KAB/KOTA	SMA/SMK			Diploma/Universitas		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
		32,18	30,89	28,22	11,74	11,99	8,23
8	Balikpapan	123.11	131.09	146.83	71.439	70.634	60.319
		9	7	8			
9	Samarinda	46,01	46,77	48,79	26,70	25,20	20,04
		160.68	157.91	165.73	80.294	79.300	98.779
10	Bontang	5	0	6			
		43,37	42,80	41,10	21,67	21,49	24,50
		20.689	36.718	37.090	12.678	15.905	16.102
		30,34	50,27	47,00	18,59	21,78	20,41

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Balikpapan memiliki lebih banyak Pekerja yang lulusan SMA/SMK dan Diploma/Perguruan Tinggi yang dimana pada tahun 2019 mencapai 48,79 persen di Kota Balikpapan, 41,10 persen di Kota Samarinda dan 47 persen di Kota Bontang lulusan SMA/SMK. Dengan tingginya pekerja lulusan SMA/SMK di Kota tersebut diharapkan kualitas tenaga kerja tersebut semakin baik, sehingga dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 67,79 persen pada tahun 2016 menjadi 64,99 persen pada tahun 2018. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangnya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

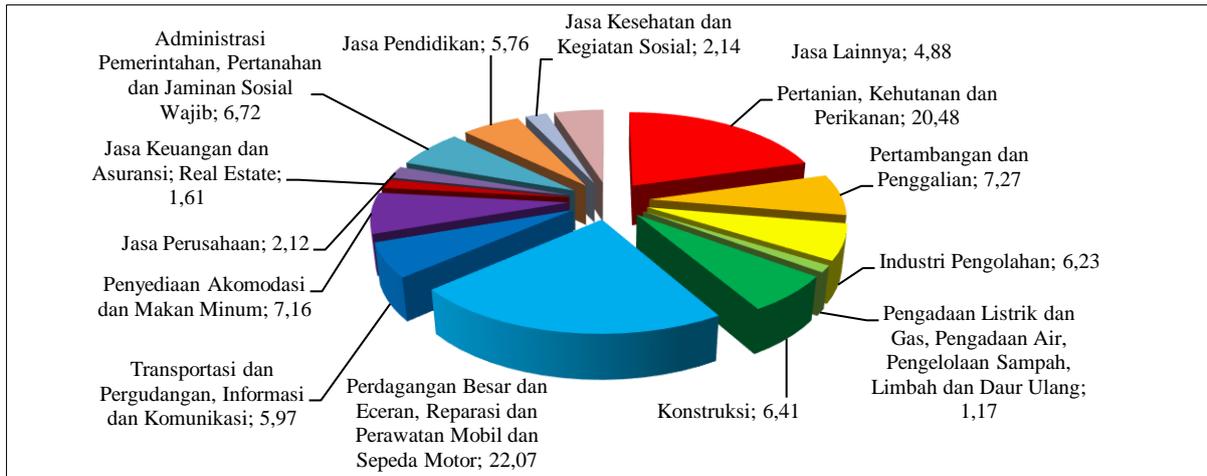
Tingkat partisipasi angkatan kerja Kalimantan Timur mengalami penurunan di tahun 2020, sebelumnya pada tahun 2019 TPAK Kalimantan



Timur sebesar 65,96 persen, mengalami penurunan sebesar 0,46 persen di tahun 2020 menjadi 65,50 persen.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.51
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Tahun 2020, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 22,07 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 20,48 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mencapai 1,17 persen.

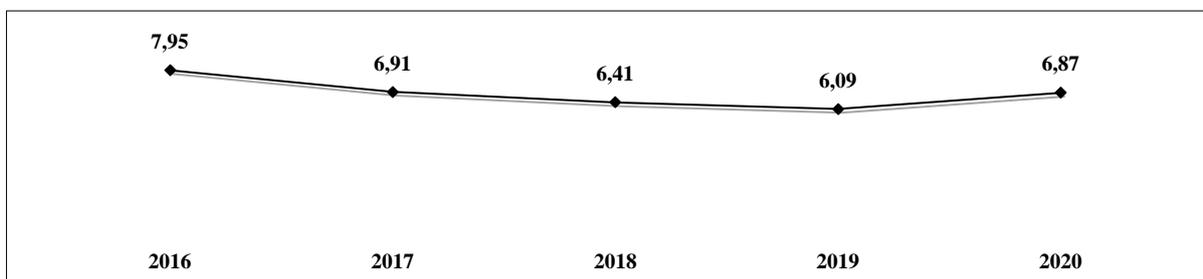
Seperti yang tergambar diatas bahwa Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan dan Jasa merupakan sektor yang menyerap jumlah kerja terbanyak untuk itu perlu peningkatan produktivitas tenaga kerja yang merupakan sasaran paling strategis karena mampu meningkatkan produktivitas faktor produksi lainnya seperti modal, bahan baku, energi dan lainnya.

Tabel II.51
 Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Perdagangan & Jasa
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)		Nilai PDRB ADHK (Juta Rp)		Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Perdagangan & Jasa (Juta Rp)
	Sektor Pertanian	Sektor Perdagangan & Jasa	Sektor Pertanian	Sektor Perdagangan & Jasa	(d+e)/(b+c)
a	b	c	d	e	f
2016	345.522	824.476	28.639.398	43.869.020	61,97
2017	328.448	590.465	30.261.400	46.507.456	83,54
2018	347.901	597.666	32.118.725	49.622.537	86,45
2019	319.764	640.269	33.364.448	51.976.061	88,89
2020	346.768	653.131	33.020.515	48.648.392	81,68

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari rasio antara PDRB Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan dan Jasa berdasarkan harga konstan dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada sektor tersebut. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan dan Jasa Provinsi Kalimantan Timur sempat mengalami penurunan di tahun 2016 dan



meningkat drastis pada tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga Rp 88,89 Juta pada tahun 2019. Membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan bahwa penggunaan tenaga kerja pada sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa makin efisien dan produktif karena tenaga kerja yang terlibat mampu menghasilkan nilai tambah atau output yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020 produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa mengalami penurunan menjadi Rp 81,68 Juta. Hal ini merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang menurunkan nilai PDRB Kalimantan Timur secara signifikan.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.52

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (persen)

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan.

Tabel II.52

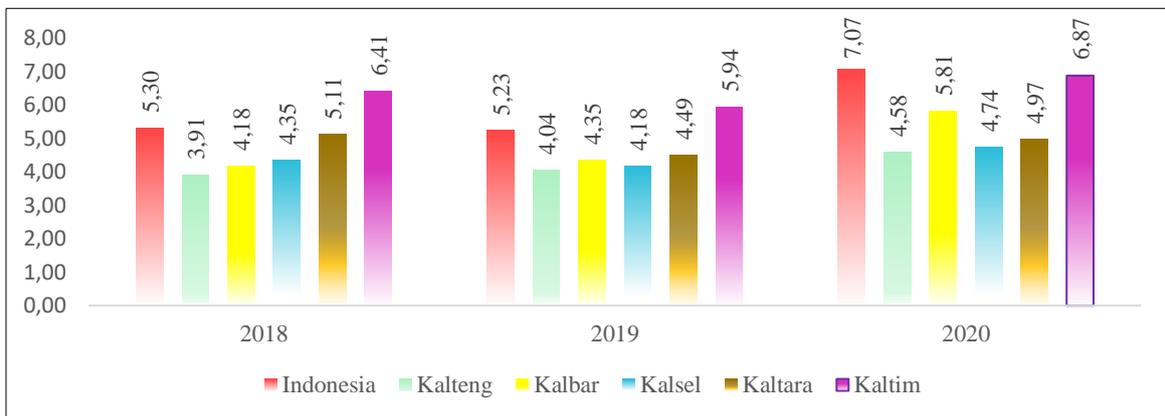
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2020 (persen)

No	KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020
1	Paser	5,54	5,00	4,55	4,52
2	KUBAR	5,87	4,86	5,08	4,97
3	KUKAR	5,72	5,96	5,98	5,70
4	KUTIM	4,61	5,93	5,53	5,45
5	Berau	6,45	5,62	5,08	5,08
6	PPU	4,75	4,76	6,26	6,22
7	MAHULU	9,05	4,17	3,69	3,49
8	Balikpapan	10,39	9,52	7,29	9,00

9	Samarinda	6,19	6,16	5,87	8,26
10	Bontang	12,44	9,61	9,19	9,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

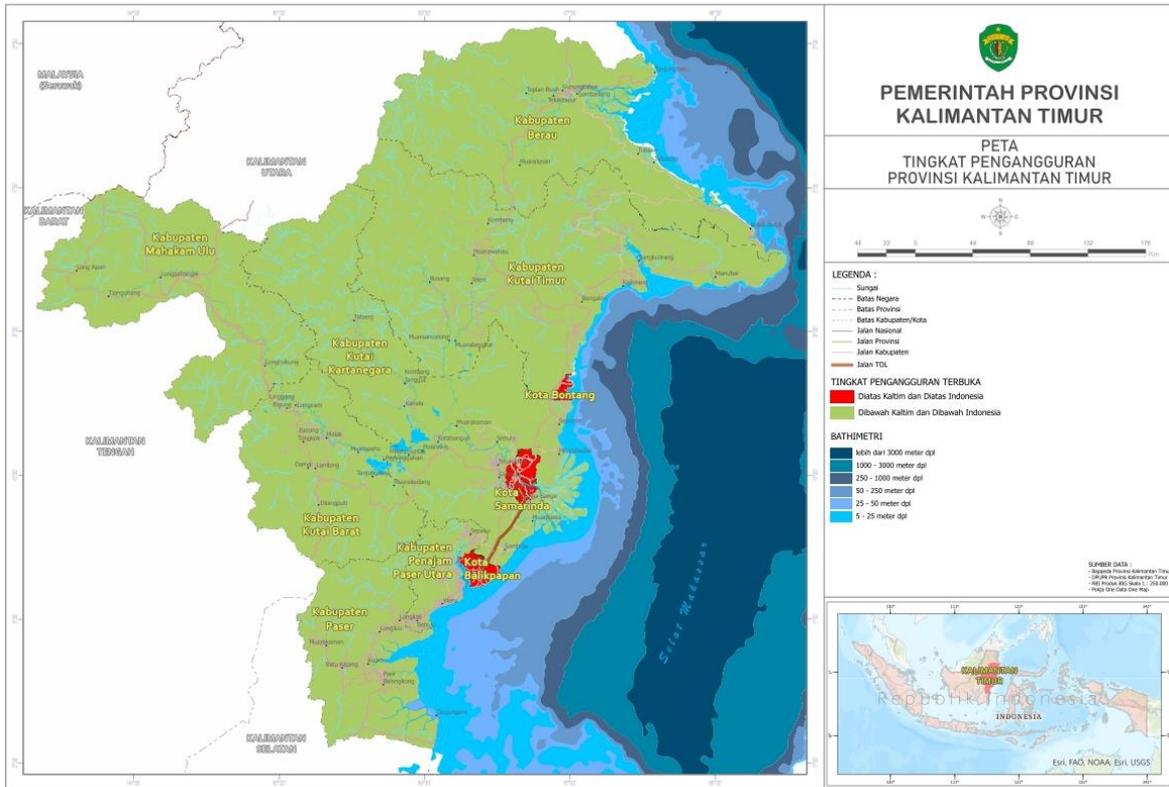
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 9,46 persen, Kota Balikpapan sebesar 9,00 persen, dan Kota Samarinda sebesar 8,26 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah kembali ditorehkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 3,49 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2020 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di bawah tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 6,87 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.53

Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia



Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.54

Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur Tahun 2020

Ketenagakerjaan juga merupakan salah satu aspek yang paling terdampak akibat Pandemi COVID-19. Pada tingkat global diperkirakan sekitar 195 juta orang akan kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Upaya mengatasi pengangguran melalui peningkatan kapasitas masyarakat terutama pada sektor-sektor yang dapat bertahan dan bahkan berkembang ditengah Pandemi COVID-19. Hal ini yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu Penganggur, Bukan Angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020, Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja dan Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Komponen ketiga dan keempat merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan komponen pertama dan kedua merupakan dampak pandemi COVID-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Tabel II.53

Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020
Provinsi Kalimantan Timur

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
Pengangguran ² Karena COVID-19	17.712	13.273	27.547	3.438	30.985
Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³ Karena COVID-19	4.772	9.567	11.792	2.547	14.339
Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19	15.496	5.706	17.078	4.124	21.202
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	220.306	124.525	245.182	99.669	344.851
Total	258.306	153.071	301.599	109.778	411.377
Persentase terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK)	17,81	11,55	16,18	12,04	14,82

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Keterangan:

1. Penghitungan dengan menggunakan pembimbing hasil proyeksi SUPAS 2015;
2. Pengangguran karena Covid-19 adalah penganggur yang berhenti bekerja keras Covid-19 selama bulan Februari 2020;
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan Angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 2,78 juta, terdapat 411 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau 14,82 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak COVID-19 lebih besar 1,6 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 16,18 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 12,04 persen.

Tabel II.54

Data Pekerja Dampak Pandemi COVID-19 Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Pekerja Ter-PHK		Pekerja Yang Dirumahkan		Total
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	
1	Paser	2	4	4	29	33
2	KUBAR	8	13	0	0	13
3	KUKAR	4	314	6	1.517	1.831
4	KUTIM	0	0	1	54	54
5	Berau	0	0	3	71	71
6	PPU	0	0	0	0	0
7	MAHULU	0	0	0	0	0
8	Balikpapan	19	1.091	60	5.698	6.789
9	Samarinda	12	420	21	892	1.312
10	Bontang	73	101	125	243	344
Jumlah		118	1.943	220	8.504	10.447

Sumber: DISNAKERTRANS Provinsi KALTIM, 2021

Jumlah tenaga kerja yang di PHK pada tahun 2020 sebanyak 1.943 orang dengan jumlah perusahaan 118 yang melakukan PHK terhadap pekerjanya dan Kota Balikpapan adalah dengan jumlah pekerja ter-phk tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Jumlah pekerja yang dirumahkan pada tahun 2020 sebanyak 8.504 pekerja dari 220 perusahaan yang merumahkan pekerjanya dan Kota Balikpapan dengan jumlah pekerja yang dirumahkan tertinggi sebanyak 5.698 pekerja.

Salah satu cara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan mendata para pencari kerja ke dalam *database* Disnaker, dengan cara para pencari kerja membuat Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu Kuning yang didalamnya tercantum nomor pencari kerja, nomor kartu identitas atau KTP dan legalisasi dari Disnaker setempat. Lamaran kerja serta berkas yang diserahkan pencari kerja ke Disnaker akan dimasukkan kedalam *database* pencari kerja. *Database* ini nantinya akan dikelompokkan menurut pendidikan dan keahlian. Perusahaan yang mencari pekerja ke Disnaker akan diberikan data pencari kerja sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja juga memiliki pusat informasi lowongan pekerjaan serta perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja melalui *database* kartu kuning masih rendah yaitu dibawah 30 persen, namun cenderung mengalami peningkatan hanya pada tahun 2016 mengalami penurunan mencapai 20,03 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 22,12 persen. Pada tahun 2020, persentase penempatan tenaga kerja mengalami penurunan hingga mencapai 18,03 persen dibanding tahun 2019 yang mencapai 29,41 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah hanya sebagian pencari kerja yang melaporkan kembali apabila telah diterima bekerja dan sebagian lagi tidak melapor.

Tabel II.55

Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (persen)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	29.86 3	45.83 4	49.55 2	26.14 8	30.71 9
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	5.982	10.36 5	11.26 6	7.690	5.538
3	Pencari Kerja yang Belum ditempatkan (orang)	19.51 5	31.87 9	26.96 9	36.15 8	22.81 9
4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	20,03	22,61	22,74	29,41	18,03

Sumber: DISNAKERTRANS Provinsi KALTIM, 2021

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2020 adalah Kota Samarinda mencapai 31,48 persen. Capaian yang cukup tinggi kemudian diikuti oleh Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 23,21 persen dan Kabupaten Kutai Timur mencapai 21,02 persen.

Tabel II.56

Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	1.908	65	3,41
2	KUBAR	2.244	183	8,16
3	KUKAR	4.812	578	12,01
4	KUTIM	1.161	244	21,02
5	Berau	4.249	699	16,45

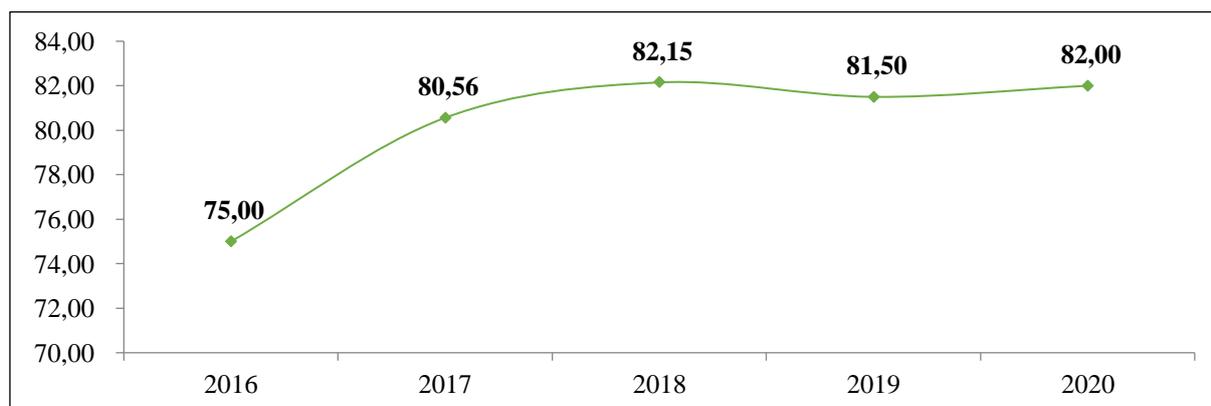
6	PPU	1.185	275	23,21
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	2.898	498	17,18
9	Samarinda	5.563	1.751	31,48
10	Bontang	6.699	1.245	18,58

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat di Kalimantan Timur pada tahun 2020 menurun di angka sementara 81,50 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,22. Hal ini mengindikasikan bahwa masih belum stabilnya kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM)

Gambar II.55
 Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2016-2020

2) Keuangan Daerah

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu

indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020 adalah 52,99 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel II.57

Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Total Pendapatan	DOF (Persen)
2016	4.031.514.706,41	7.987.877.780,77	50,47
2017	4.588.752.896,23	8.154.749.005,92	56,27
2018	5.800.270.286,00	10.669.542.802,00	54,36
2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68

2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
Rata-rata	5.018.592.816,33	9.470.146.587,54	52,99

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2021

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011 dan pada Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya, setelah sebelumnya opini WTP diraih pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Sempat terjadinya penurunan status opini BPK pada tahun 2013, hal ini menjadi “pekerjaan rumah” bagi pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap setiap penggunaan keuangan daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

3) Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan dengan baik. Opini BPK merupakan salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah.

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2019. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, pada tahun 2012 hanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 Kabupaten/Kota masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Mahakam Ulu masih belum mendapatkan status opini dari

BPK dan pada tahun 2019 seluruh Kabupaten Kota telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

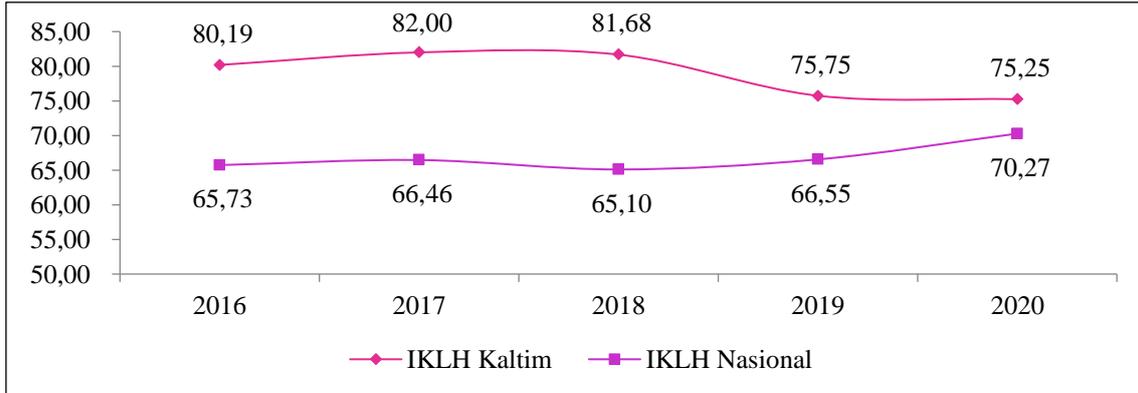
Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mendapat predikat BB dengan skor 76,60. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

Tugas dari Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPK adalah pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya. Untuk mengetahui kematangan penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah perlu adanya penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah. Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

G. Lingkungan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat

eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.56

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

IKLH Kaltim dari tahun 2016 - 2018 mendapat predikat sangat baik (IKLH > 80) yang dipengaruhi oleh capaian indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan yang juga meningkat. Namun, pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 81,68 di tahun 2018 menjadi 75,75 (predikat baik, $70 < \text{IKLH} \leq 80$) dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 75,25. Menurunnya IKLH tahun 2020 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai.

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel II.58

Angka Penurunan Emisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2020

Keterangan	2017	2018	2019	2020
------------	------	------	------	------

Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	54,12	42,14	34,65	24,41
--	-------	-------	-------	-------

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2021

H. Perhubungan

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan merefleksikan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang/jasa di suatu wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan.

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.487.397 Ton. Hal ini disebabkan karena beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut di akhir tahun 2019 dan berlanjut di tahun 2020 bahkan diperkirakan sampai dengan tahun 2021.



Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2020

Gambar II.57

Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang
Tahun 2016-2020

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang terletak di Kota Balikpapan, Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan pada periode 2013-2017, namun akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah penumpang pesawat udara tiba sebesar 15% selama periode 2013-2017, dan jumlah barang yang dibongkar muat meningkat lebih dari 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas orang/barang terus mengalami peningkatan pada periode 2013-2017.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1) Pertanian Tanaman Pangan

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama empat tahun terakhir dimana pada tahun 2017 mencapai 4,24 ton per hektar dan menurun hingga 3,57 ton/ha. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan. Jika dibandingkan dengan angka nasional, maka dari sisi produktivitas, Kalimantan Timur masih berada di bawah rata-rata produktivitas nasional yakni 5,11 ton/ha.

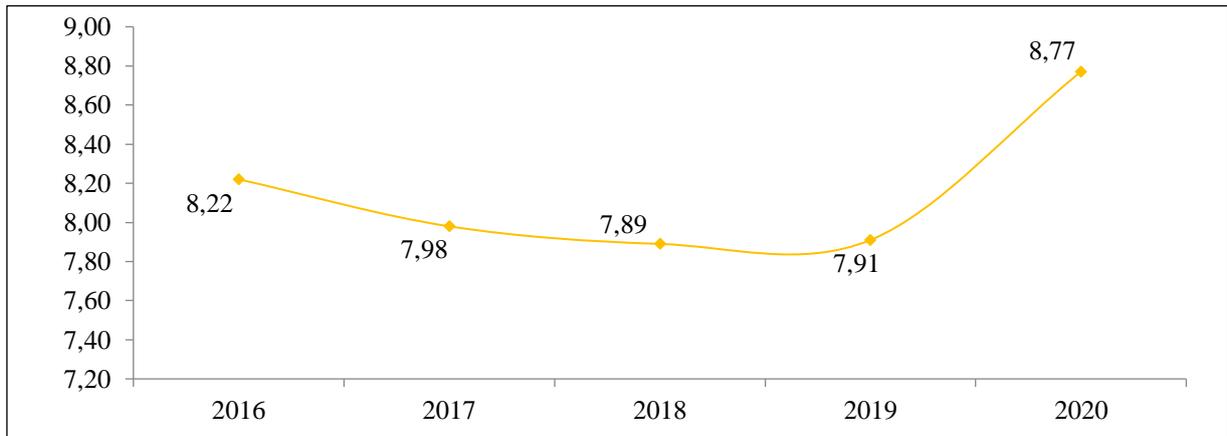
Tabel II.59

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2016	80.343	305.337	3,80
2017	94.394	400.102	4,24
2018	64.961	262.774	4,04
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.569	262.436	3,57

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2020, kontribusi pertanian mencapai 8,77 persen meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 7,91 persen. Peningkatan ini tentu saja karena terdampaknya penurunan Kategori unggulan lainnya seperti pertambangan dan penggalian akibat pandemi



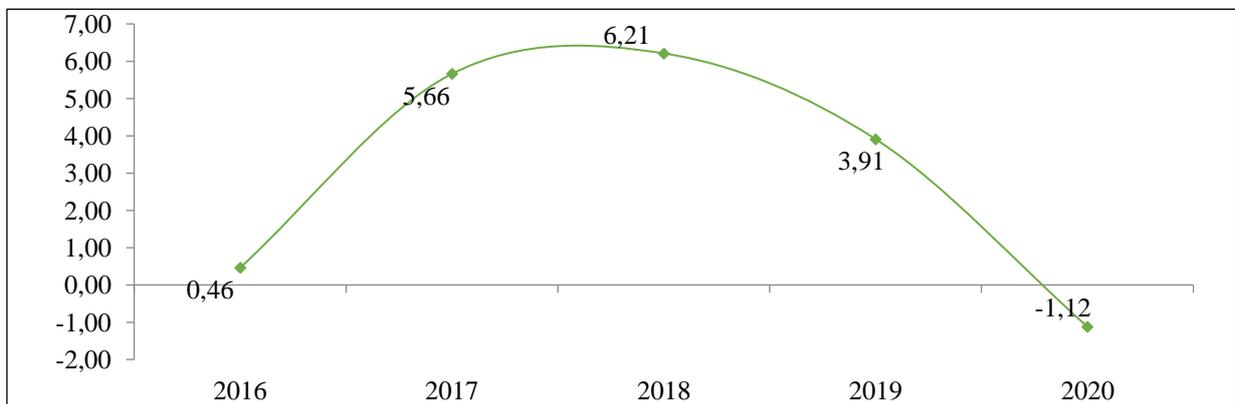
COVID-19. Sedangkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori yang minim terdampak dari dampak negatif pandemi COVID-19.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.58

Kontribusi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan di periode tahun 2016-2018, namun mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 3,91 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,12 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang terkontraksi lebih dalam di tahun 2020 menjadi -7,92 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.59

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investasi luar daerah adalah perkebunan kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,19 juta ha dan memiliki produksi mencapai 15,25 juta ton. Selain itu, komoditas karet juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian daerah dengan produksi karet yang cukup tinggi mencapai 55,97 ribu ton pada tahun 2020. Berikut produktivitas komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.60

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020*)

No.	Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	121.869	55.979	1,07
2.	Kelapa	20.711	11.280	0,68
3.	Kopi	2.306	212	0,24
4.	Lada	8.337	3.362	0,57
5.	Kakao	6.886	2.536	0,61
6.	Kelapa Sawit	1.194.849	15.259.383	17,59

*) angka sementara, Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2021

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dan Kabupaten Kutai Timur memiliki produksi terbanyak dengan jumlah produksi sebanyak 6,27 juta ton pada tahun 2020, Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet sebesar 27,9 Ribu Ton, sedangkan Kab Kutai Kartanegara menjadi kabupaten dengan produksi Kelapa dan lada terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi masing-masing komoditi sebesar 2.609 ton dan 1.690 ton.

Tabel II.61

Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di
Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2020*)

No	KAB/KOTA	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
1	Paser	1.987.340	1.019	7.399	110	3	12
2	KUBAR	888.486	202	27.922	27	19	5
3	KUKAR	3.136.905	2.609	13.135	9	30	1.690
4	KUTIM	6.274.515	1.055	956	47	1.410	123
5	Berau	2.415.122	3.483	135	14	226	174
6	PPU	497.390	2.053	3.194	2	-	611
7	MAHULU	48.214	5	-	-	282	-
8	Balikpapan	469	479	2.813	3	1	910
9	Samarinda	10.644	364	425	-	3	13
10	Bontang	298	11	-	-	-	-

*) angka sementara, Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2021

3) Kehutanan

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur mencapai 8,3 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA. Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu terus mengalami peningkatan dari 4,3 juta m³ pada tahun 2017 menjadi 5,2 juta m³ di tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi 4,8 juta m³. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami peningkatan yang signifikan yakni pada tahun 2017 sebesar 6,9 ton menjadi 1.428,65 ton di tahun 2019 dan menurun menjadi 864,9 ton di tahun 2020. Walaupun demikian, masih banyak ditemui lahan kritis di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2020 lahan kritis di Kalimantan Timur adalah sebesar 113.015 hektar dan lahan sangat kritis seluas 79.900 hektar. Oleh karena itu, upaya penurunan lahan kritis masih terus ditingkatkan melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

Tabel II.62

Data Lahan Kritis Menurut Tingkat Kekritisan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Fungsi Kawasan	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	Total
HPK	536,18	2.242,30	50.847,26	37.748,15	29.333,72	120.707,61

Fungsi Kawasan	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Potensial Kritis	Tidak Kritis	Total
HPT	2.536,14	7.338,38	2.076.115,67	540.395,72	197.048,22	2.823.434,13
HP	72.494,93	60.437,52	1.668.892,82	800.749,59	416.283,11	3.018.857,98
HL	2.566,30	11.785,67	1.266.122,80	382.467,60	109.383,93	1.772.326,30
KSA	1.767,01	31.211,76	137.432,09	200.894,32	65.687,88	436.993,06
TOTAL	79.900,55	113.015,64	5.199.410,65	1.962.255,39	817.736,85	8.172.319,08

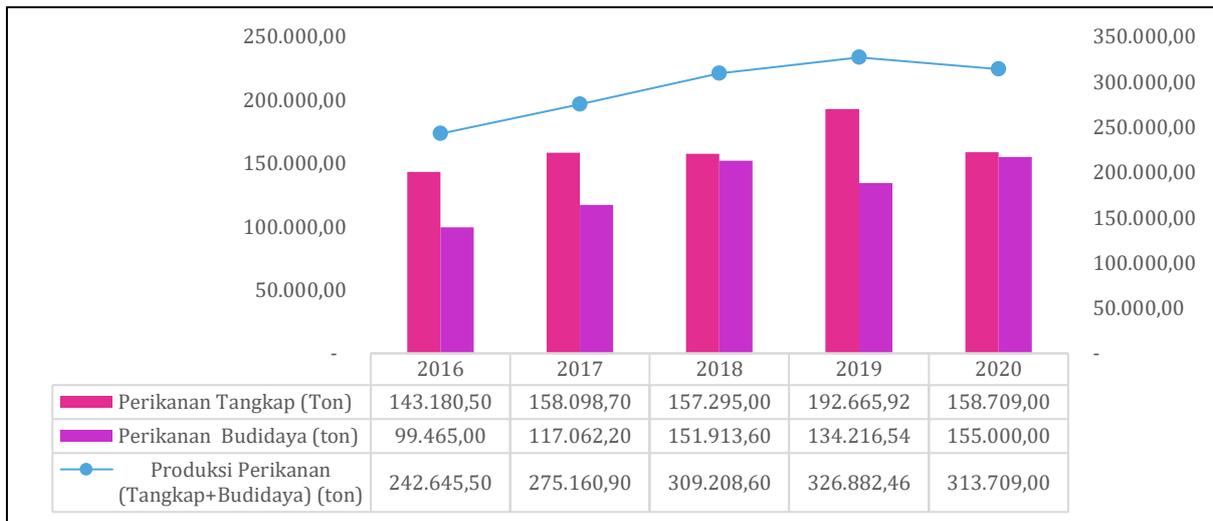
Sumber: BPN KANWIL KALTIM, 2021

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2020, perkembangan perhutanan sosial mencapai 74 unit dengan luas sebesar 189.974,75 hektar.

4) Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, dan sistem Pemasaran.



Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2020 (diolah)

Gambar II.60
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 – 2020

5) Peternakan

Peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal, populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 71,28 juta ekor, ayam kampung 4.59 juta ekor dan ayam ras petelur 896,38 ribu ekor. Disamping itu, terdapat populasi sapi potong sebanyak 123,07 ribu ekor dan babi sebanyak 85,02 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tabel II.63
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur (ekor), Tahun 2016-2020

No	Hewan	2016	2017	2018	2019	2020*)
----	-------	------	------	------	------	--------

1	Sapi Potong	118.712	119.123	117.504	119.485	123.069
2	Sapi Perah	97	107	110	91	92
3	Kambing	57.794	61.526	66.378	67.892	69.929
4	Domba	320	281	439	590	596
5	Babi	75.475	85.749	78.968	82.546	85.022
6	Kerbau	7.144	7.055	6.157	6.194	6.255
7	Kuda	101	91	97	102	103
8	Kelinci	13.063	15.005	14.189	8.859	9.302
9	Ayam Kampung	4.768.53 4	5.418.0 86	4.569.1 69	4.372.4 15	4.591.0 35
10	Ayam Ras Pedaging	60.747.4 55	66.268. 201	66.672. 445	67.886. 566	71.280. 894
11	Ayam Ras Petelur	842.176	822.533	1.055.4 32	853.693	896.378
12	Itik	192.505	219.149	248.978	254.683	267.418

*) Data Sementara, Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2021

Program pengembangan populasi sapi potong yang efisien dan berbasis sumber daya lokal sebagai upaya Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kebutuhan daging sapi dalam daerah dan menjadi lumbung ternak sapi nasional. Untuk mendukung dan mencapai upaya tersebut diperlukan suatu program yang dapat dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu pengembangan peternakan berbasis *Mini Ranch*. *Mini Ranch* adalah sebuah model pengelolaan budidaya sapi pedaging/potong yang dilakukan di lahan pengembalaan yang telah ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya melalui berbagai perlakuan ilmiah. Pola ini mereduksi biaya produksi sehingga produknya memiliki keunggulan komperatif. Sapi-sapi ternak bisa dilepas bebas di kawasan eks lahan tambang dan perkebunan. Dengan program *Mini Ranch* ini diharapkan dapat membuat produksi dari sektor peternakan menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membuat lahan-lahan bekas tambang menjadi lebih bermanfaat lagi. Adapun daftar *Mini Ranch* yang tersebar di Kabupaten tersaji pada tabel berikut:

Tabel II.64

Jumlah Miniranch di Provinsi Kalimantan Timur

No	KAB /KOTA	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Populasi Sapi		Panjang Pagar (m)	Luas Kandang (m ²)	Tahun
				Betina	Jantan			
1	KUBAR	KT. Benteng	Cornelius Untaq	57	36	4800	180	2019

No	KAB /KOTA	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Populasi Sapi		Panjang Pagar (m)	Luas Kandang (m ²)	Tahun
				Betina	Jantan			
		Perjuangan						
2	KUTIM	KT. Sumber Mulyo	Sudaryanto	50	10	800	30	2019
3	KUTIM	KT. Sumber Rejeki	Rustamaji	24	14	800	30	2019
4	PPU	KT. Sumber Rejeki	Sakka	49	5	4800	180	2019
5	Paser	KT. Gawi Bersama	Jumaring	130	130	5200	180	2019
6	Paser	KT. Meta Bolum	Abdul Syukur	29	11	800	67,5	2020
7	Paser	KT. Petani Pinang Tunggal	Arpansyah	87	26	800	67,5	2020
8	Berau	KT. Rawa Makmur	Jumadi	48	12	800	67,5	2020
9	KUBAR	KT. Bumi Prana Jaya	Rusmadi Yatin	8	2	800	67,5	2020
10	KUBAR	KT. Sapi Jaya	Yonatan	8	2	800	67,5	2020
11	KUKAR	KT. Rukun Abadi	H. Sayuti	45	15	800	67,5	2020
12	KUKAR	KT. Pelita	M. Saleng	100	300	800	67,5	2020
13	KUKAR	KT. Karya Mulya	Abdiansyah	-	-	800	67,5	2020
14	MAHULU	KT. Danum Paroy	Rudin	6	2	400	33	2020

No	KAB /KOTA	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Populasi Sapi		Panjang Pagar (m)	Luas Kandang (m ²)	Tahun
				Betina	Jantan			
15	MAHULU	KT. Harapan Masa	Rahmani	5	4	400	33	2020
16	PPU	KT. Sinar Abadi	Suriansyah	35	7	800	67,5	2020
17	PPU	KT. Semoga Jaya	M. Rifai	17	7	800	67,5	2020

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2021

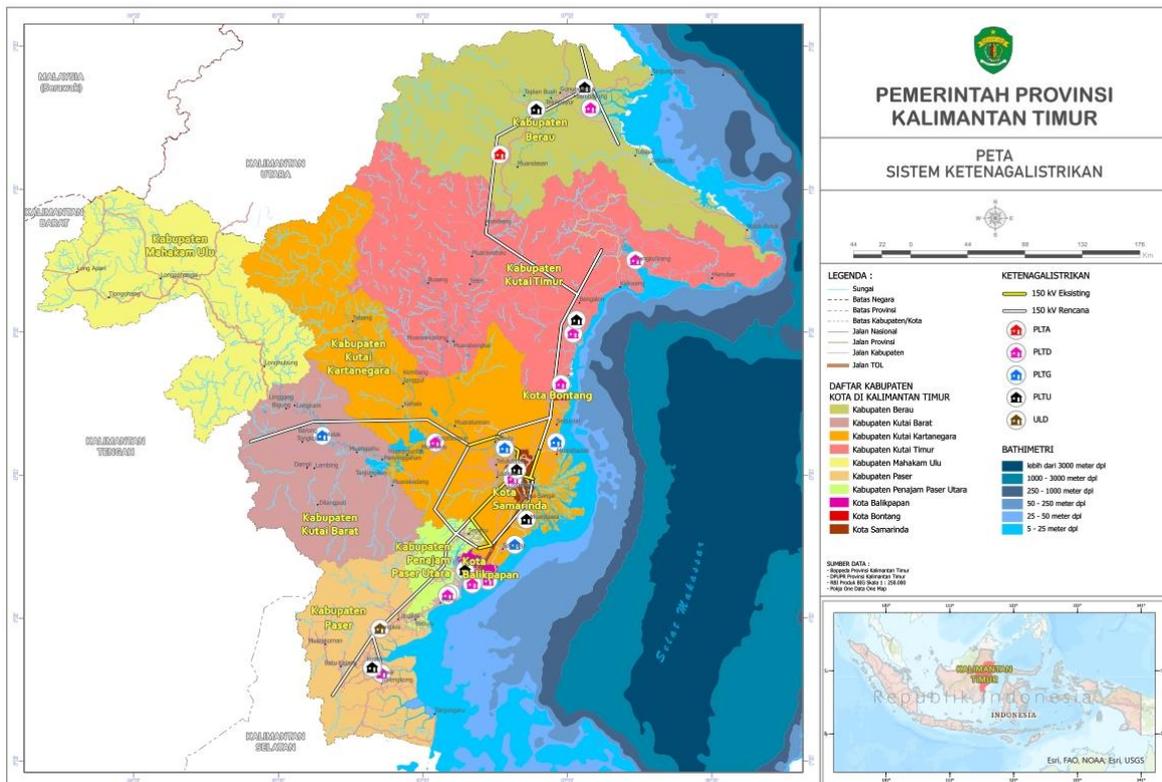
B. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal. Dari total 1,2 juta KK di Kalimantan Timur, 82,6 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 7,64 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN. Dan sampai dengan tahun 2020 masih terdapat 119.890 KK yang belum berlistrik. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 88,93 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 90,21 persen.

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam

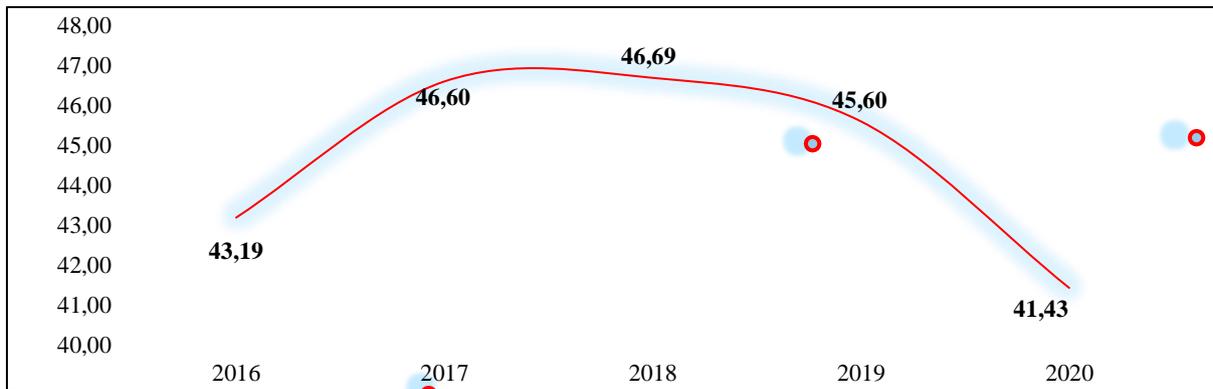
pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.61
Peta Sistem Ketenagalistrikan

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, kontribusinya turun menjadi sebesar 41,43 persen dari tahun sebelumnya sebesar 45,60 persen. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat maupun industri akibat pandemi COVID-19 yang juga diiringi oleh lemahnya permintaan batu bara dari negara tujuan utama menjadi penyebab penurunan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian. Meski demikian, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi pangsa utama perekonomian di Kalimantan Timur.

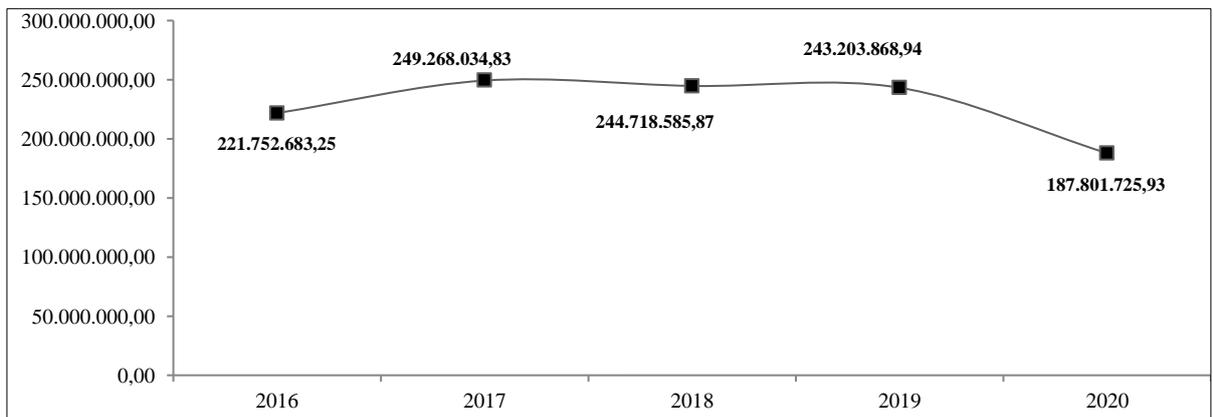


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.62

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (persen)

Produksi batubara tahun 2020 adalah sebesar 187 juta ton, yang menunjukkan penurunan sebesar 22,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang menurun dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat pandemi COVID-19 serta penurunan yang signifikan pada harga batubara global.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.63

Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020 (Ton)

Pada tahun 2020 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

Tabel II.65

Produksi Pertambangan Unggulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Batubara (Ton)	Minyak Bumi (Ribu Barrel)	Gas Bumi (Ribu MMBTU)
2016	221.752.683,25	34.323,80	568.588,50
2017	249,268,034.83	29.754,98	449.579,20
2018	244,718,585.87	23.717,95	296.832,49
2019	243,203,868.94	20.829,80	240.828,16
2020	187,801,725.93	14.381,23	156.294,54

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

C. Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel II.66

Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tahun	PMDN	PMA	Total
2016	243	471	714
2017	357	566	923
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702

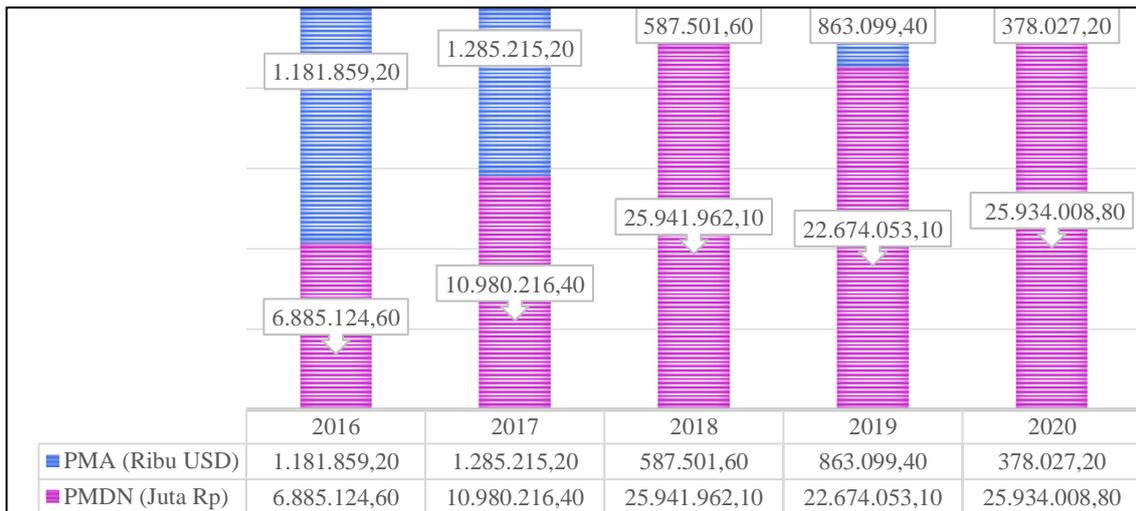
Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2021

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah proyek PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 4.702 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya sebanyak 3.130 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 1.707 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 390 proyek. Peningkatan

jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik.

D. Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp 22,67 triliun menjadi sebesar Rp 25,93 triliun. Sedangkan nilai realisasi investasi asing mengalami penurunan menjadi 378,03 juta USD. Jika dilihat menurut trennya, nilai investasi Kalimantan Timur sangat berfluktuasi. Berdasarkan rilis resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, total investasi di Kalimantan Timur pada tahun 2020 senilai Rp 31,38 triliun.



Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.64
Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

E. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2016-2020, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan *skill* tenaga kerja lokal

yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.67
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

No	Uraian	PMDN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	29.023	9.236	12.935	20.837	19.952
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	243	357	520	2.227	3.924
3	Rasio daya serap tenaga kerja	119,44	25,87	24,88	9,36	5,08
No	Uraian	PMA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	22.204	15.508	12.500	15.166	5.868
2	Jumlah proyek seluruh PMA	471	566	513	903	778
3	Rasio daya serap tenaga kerja	47,14	27,40	24,37	16,80	7,54

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2021

Berdasarkan sektor usahanya, tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2020 paling banyak diserap oleh sektor perdagangan sebesar 22,07 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 20,48 persen. Adapun lapangan usaha yang menciptakan nilai tambah terbesar untuk PDRB Kalimantan Timur yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian hanya mampu menyerap 7,27 persen tenaga kerja, sedangkan sektor industri pengolahan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6,23 persen.

Tabel II.68
Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Pelayanan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Persentase /Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	-	-	72	25	150
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	-	-	30	25	55
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, SMK, MAK, SMLB (%)	67,92	68,23	68,43	68,55	69,00
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	-	-	95	96	98
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	-	-	791	2.178	13.000
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	-	-	635	6.952	2.500
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	-	-	0	25	90
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	-	-	60	65	70

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Kesehatan					
2.1	Persentase Kab/Kota yang memiliki $\leq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan			34	45	55
2.2	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)			76	80	85
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	-	-	6	23,50	23,50
2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)			87,50	87,50	90
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Kapasitas Air Baku (L/detik)	8.322	8.622	7.922	7.922	7.922
3.2	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	51,70	51,50	54,30	54,59*	62,64*
3.3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	41.722	36.722	51.722	73.481	72.881
3.4	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	-	-	63,19	64,87	70,11
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat					
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	-	-	67,18	61,38	50
4.2	Persentase desa/kelurahan	50	55	60	60	61,33

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	tangguh bencana (%)					
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	-	-	85	75	80
5	Sosial					
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	-	-	300	385	405
B	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
1	Tenaga Kerja					
1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	-	-	50	29,41	-0,27
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	-	-	80	80	80
1.3	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	45,31	30	-	0,09	30
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,93	56,64	57,53	65,65	65,54
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	-	-	70	70	82
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	-	-	34	37	62
2.4	Rasio KDRT (%)	7,01	27,11	0,066	18,16	27,20
2.5	Kampung KB	160	175	154	160	175
3	Lingkungan Hidup					
3.1	Jumlah aksi mitigasi perubahan	600	640	670	592	679

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)					
3.2	Indeks Pencemaran Lingkungan	3,027 (Cemar Ringan)	2,700 (Cemar Ringan)	9,304 (Cemar Sedang)	5,299 (Cemar Sedang)	6,509 (Cemar Sedang)
3.3	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)			5,60	25,18	50,72
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
4.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	688	518	518	503	484
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	207	275	320	335	360
4.3	Meningkatkan jumlah desa dengan status berkembang (Desa)	140	140	289	304	323
4.4	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan (Desa)	30	35	323	368	363
4.5	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	30	35	323	338	363
4.6	Jumlah desa yang menjadi kampung iklim	-	-	-	-	40
5	Perhubungan					
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	9.043.826	9.452.932	10.392.536	10.721.656	3.570.750

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
5.2	Jumlah barang (ton)	2.322.4 71.391	2.399.8 01.887	325.05 1.663	341.52 9.897	294.47 8.397
5.3	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	82	82	83	83	84
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (kasus)	705	1.193	846	570	448
6	Komunikasi dan Informatika					
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	2,49	3,04	3,14
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
7.1	Jumlah UKM Naik Kelas (UKM)	-	-	-	200	250
8	Kepemudaan dan Olahraga					
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57,23	57,82	56,33	56,74	57,23
9	Kebudayaan	-	-	17	90	150
10	Perpustakaan					
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	-	-	137.84 1	145.73 1	77.884
C	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan					
1	Pariwisata					
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)			2	3	3
2	Pertanian					
2.1	Jumlah produksi padi (Ton)	305.33 7	356.68 0	262.77 3	253.82 0	262.43 0

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.2	Jumlah Miniranch yang teregister (unit)	-	-	-	5	12
2.3	Angka Kelahiran Sapi (%)	-	-	19,00	17,49	20,10
2.4	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	-	-	258.56 5	126.98 6	
2.5	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	11.499. 594	13.250. 778	13.478. 263	18.343. 852	13.450 .350
3	Kehutanan					
3.1	Realisasi penerimaan PNBK sektor kehutanan (Rp. Miliar)	-	-	219,63	172,14	109,00
3.2	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	-	-	-	0,77	1,75
3.3	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	-	-	-	5,66	13,98
3.4	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	-	-	118.00 0	31.368	32.000
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	-	-	3,13	4,40	4,80
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	817.34 3	905.82 1	945.60 7	1.032.4 75	1.105. 227
5	Perdagangan					
5.1	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)					
5.2	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	-	-	-	9	
6	Perindustrian					

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
6.1	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	5,46	3,47	0,52	0,19	-2,77
6.2	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)				2	1
7	Kelautan dan Perikanan					
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	107.02 7	173.62 2	151.91 8	148.19 7	155.00 0
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	143.28 7	159.34 5	149.03 9	176.04 9	158.70 9
7.3	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (Miliar ekor)	6,99	7,28	7,64	2,5	2,54
7.4	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	2	2	2	1	2
D	Fokus : Urusan Penunjang					
1	Perencanaan					
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)			82,30	89,42	87,00
2	Keuangan					
2.1	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	-	-	-	2	2
3	Pengawasan					
3.1	Hasil Penilaian Integritas	-	-	60	65	66,67

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.2	Level kapasitas APIP	2	2	2	3	3
4	Umum/Sekretariat					
4.1	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	71	71	71,05	73,68	74,00
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	-	-	86	84	87
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)			49	13,16	61
4.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)			52,63	60,53	60,53

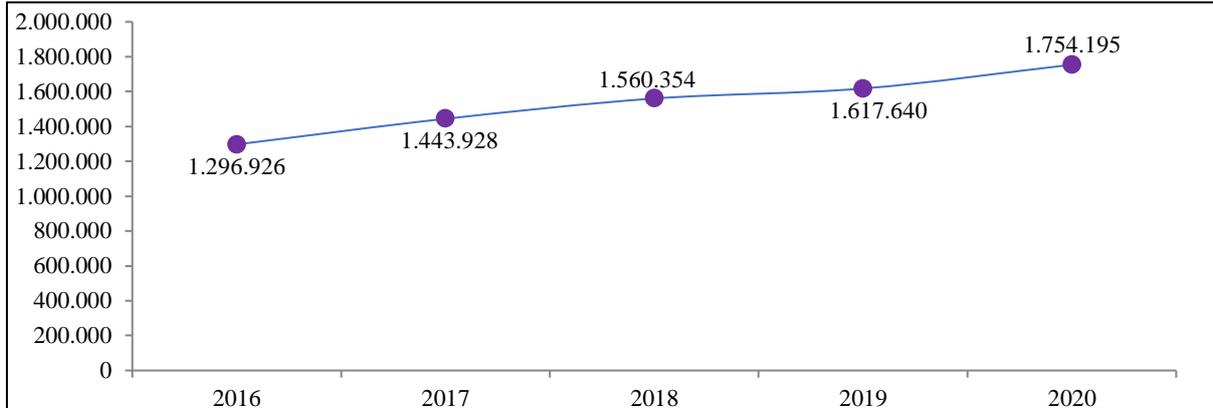
*) *Perubahan Asumsi rumusan perhitungan (cakupan layanan air minum teknis) menjadi perhitungan capaian akses air minum layak administratif*

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik dimana pada tahun 2020 mencapai Rp. 1.754.195,- per bulan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.65

Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Rupiah)

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

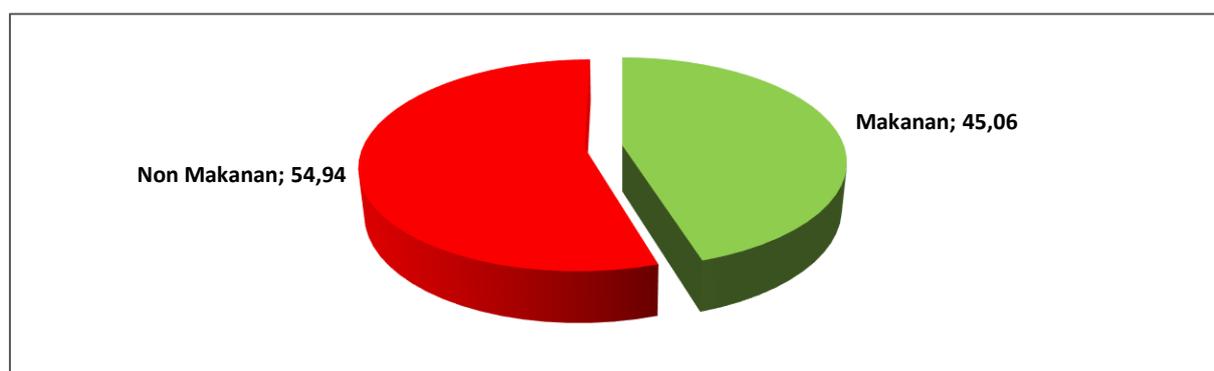
Tabel II.69

Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	709.006	780.443	857.449	893.217	963.725
2	Rata-rata Pengeluaran	1.296.926	1.443.928	1.560.354	1.617.640	1.754.195

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Per Kapita/Bulan (Rp)					
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,67	54,05	54,95	55,22	54,94

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.66

Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

C. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat daya beli petani di perdesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.70

Rata-rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (2012=100)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	120,03	121,96	123,77	107,91	116,96
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	122,31	125,54	128,75	102,41	104,76
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,14	97,15	96,14	105,38	111,65

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Peningkatan NTP tahun 2020 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan yang mengalami penurunan sebesar 0,97 persen yakni dari NTP 102,16 di tahun 2019 menjadi 101,18 di tahun 2020. NTP sub sektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan drastis sebesar 11,00 persen di tahun 2020 terhadap NTP pada tahun 2019. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Tabel II.71

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Subsektor Tahun 2019-2020 (2012=100)

No	Uraian	NTP		% Perubahan
		2019	2020	
	NTP Gabungan	105,38	111,65	5,62
1.	Tanaman Pangan	102,16	101,18	-0,97
2.	Hortikultura	104,59	105,27	0,65
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	110,45	124,10	11,00
4.	Peternakan	100,56	101,70	1,12
5.	Perikanan	100,90	102,69	1,74

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 101,65. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi sebesar 111,65, disusul Kalimantan Barat sebesar 108,46.

Tabel II.72

Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional
Menurut Subsektor Tahun 2020 (2012=100)

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara	Nasional
	NTP Gabungan	111,65	108,46	103,55	101,85	102,75	101,65
1.	Tanaman Pangan	101,18	96,91	99,08	101,85	100,09	101,28
2.	Hortikultura	105,27	99,04	98,88	97,73	95,43	101,28
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	124,10	114,67	106,18	100,64	114,38	104,32

4.	Peternakan	101,7 0	97,55	103,31	99,98	102,8 4	100,22
5.	Perikanan	102,6 9	102,2 3	101,91	99,86	102,6 1	100,35

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Luas Wilayah Produktif

Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan, maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.73

Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No	KAB/KOTA	Luas Wilayah Produktif (Ha)	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha)	Rasio (%)
1.	Paser	301.226	445.964	67,54
2.	KUBAR dan MAHULU	515.012	862.681	59,70
3.	KUKAR	420.324	936.710	44,87
4.	KUTIM	472.421	942.679	50,11
5.	Berau	370.716	536.320	62,12
6.	PPU	113.402	145.011	78,20
7.	Balikpapan	22.538	34.069	66,15
8.	Samarinda	13.320	68.888	19,34
9.	Bontang	5.643	10.002	56,42
J u m l a h		2.234.602	3.982.325	56,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

B. Infrastruktur Pembangunan

Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan yang meliputi: pembangunan jalan, jembatan, transportasi darat dan SDP, transportasi laut, transportasi udara, air baku dan air bersih, jaringan irigasi, serta perumahan dan permukiman.

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai 624,48 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 408,38 km, kondisi sedang mencapai 216,10 km, kondisi rusak ringan mencapai 101,48 km, dan kondisi rusak berat mencapai 169,13 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,90 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2020 mencapai 1.490,5 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 251,16 Km, kondisi sedang 1.144,83 Km, kondisi rusak ringan mencapai 249,72 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 65,19 Km.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km² (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km²) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal;
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor.

Tabel II.74

Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
----	--------	--------------	-------	---------	-------	---------

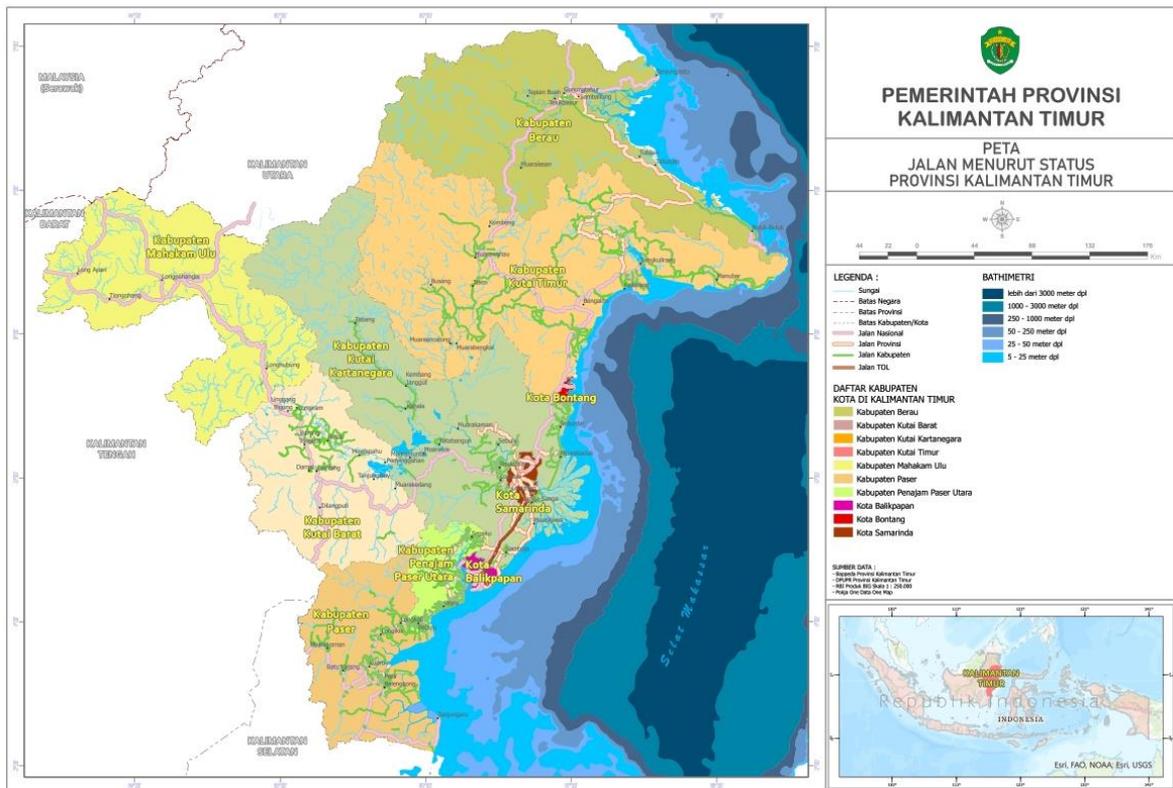
1	Nasional	1.710,90	1.490,50	0,00	4,31	216,10
2	Provinsi	895,09	529,65	132,49	28,42	204,53

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Tabel II.75
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	251,16	1.144,83	249,72	65,19
2	Provinsi	408,38	216,10	101,48	169,13
3	Kabupaten/Kot a	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.514,24	3.626,06	2.387,09	2.589,81

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

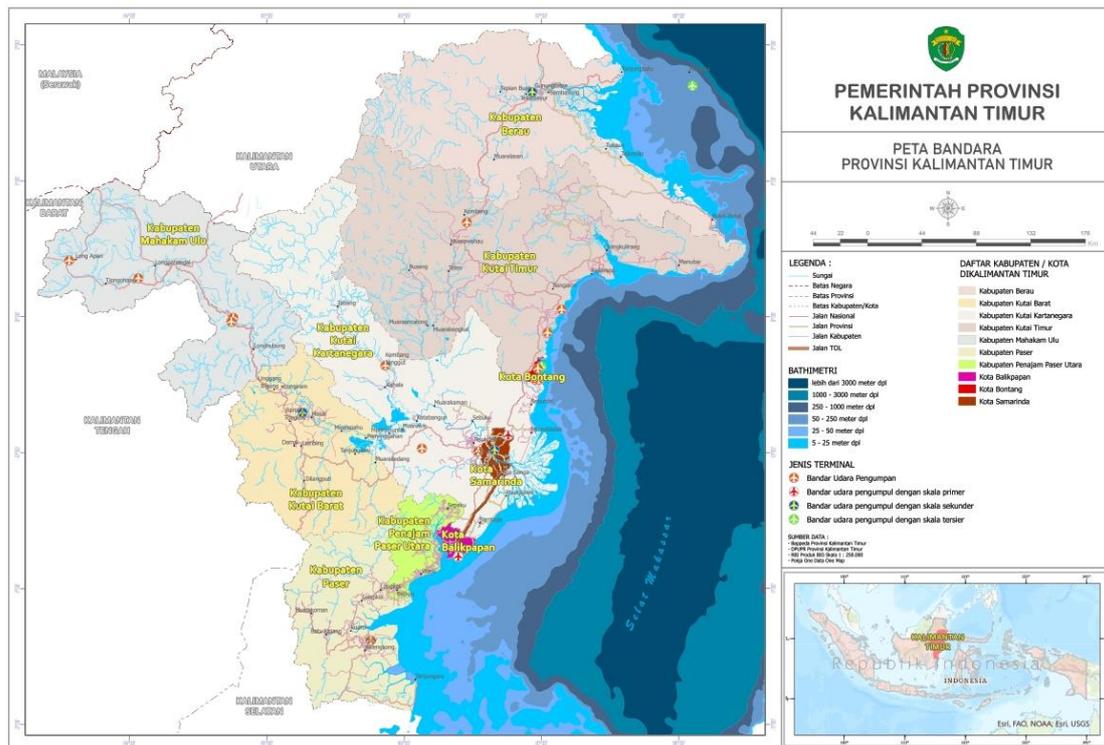


Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.67

Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur

Terkait penyelenggaraan layanan transportasi dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi dengan jumlah 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datah Dawai.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.68

Peta Bandara Kalimantan Timur

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (*reliable*) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hirarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional, dan tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.76

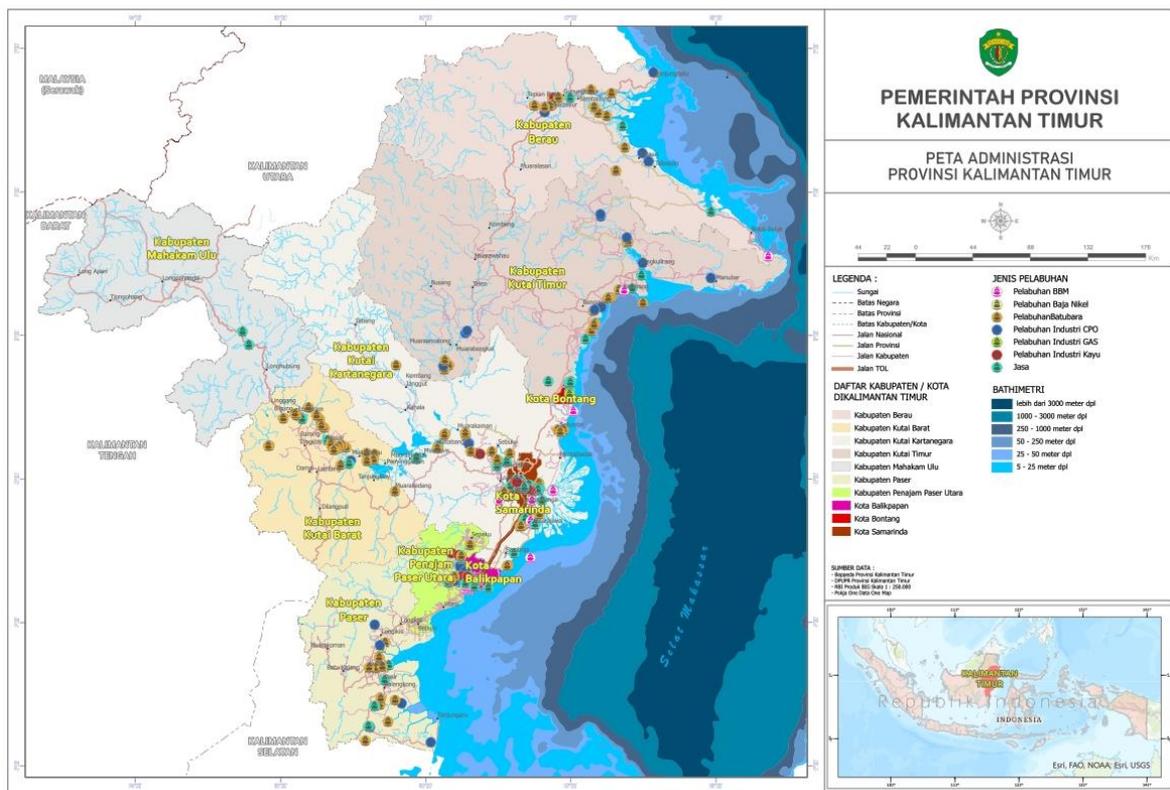
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	KAB/KOT A	No .	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP

312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkalirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM

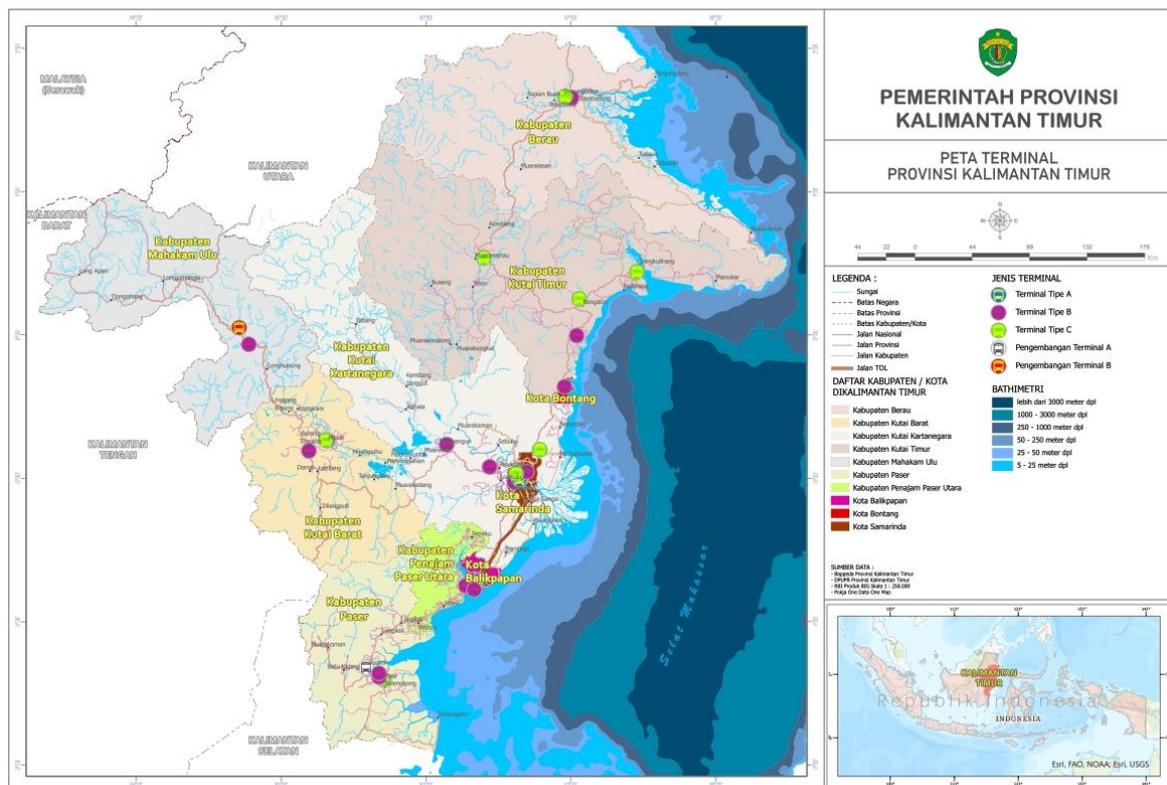
Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.69
Peta Pelabuhan Kalimantan Timur

Sedangkan untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang serta 7 Terminal Type B yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.70
Peta Terminal Kalimantan Timur

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 72.881 unit, mengalami kenaikan sebanyak 10.195 unit dari tahun sebelumnya. Masih tingginya ketidaklayakan rumah tersebut dikarenakan rendahnya segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah. Selain itu, penambahan jumlah RTLH disebabkan karena di updating data RTLH serta penambahan nilai susut bangunan di tahun yang bersangkutan.

Tabel II.77

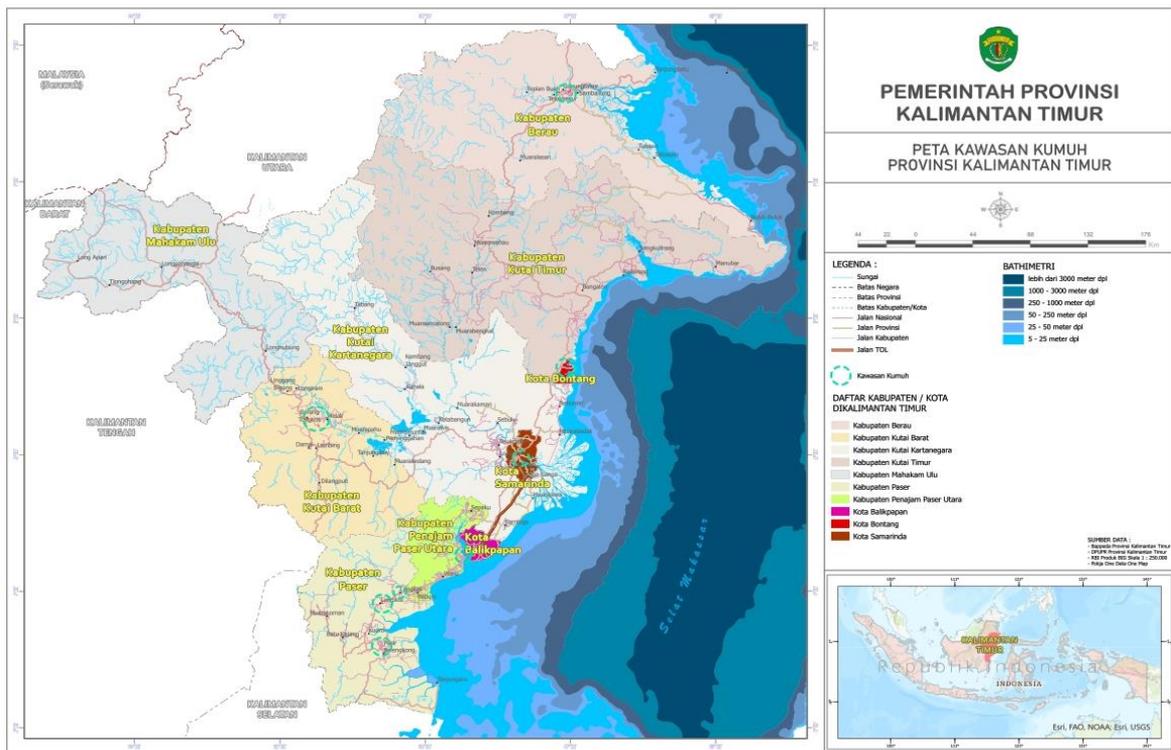
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Unit)	Sumber Data (Verifikasi Pemda)
1	Paser	9.676	Database DPKPP Kab. Paser, BPS 2020
2	KUBAR	0	DISPERKIM Kab. Kubar 2019
3	KUKAR	22.780	e-RTLH Kab. Kukar Th. 2020
4	KUTIM	8.531	DISPERKIM Verifikasi Disdukcapil Kab. Kutai Timur 2020
5	Berau	2.103	Database DISPERKIM Kab. Berau 2020
6	PPU	2.091	BDT & PEMDA Kab. PPU
7	MAHULU	1.603	FORM 1B Kab. Mahulu 2020
8	Balikpapan	382	FORM 1B Kota Balikpapan 2020
9	Samarinda	23.989	FORM 1B Kota Samarinda 2020
10	Bontang	1.726	e-RTLH Kota Bontang
Kalimantan Timur		72.881	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan permukiman yang didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur teridentifikasi sebagai

kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan kawasan.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.71
Peta Sebaran Kawasan Kumuh

Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pemutakhiran SK Bupati/Walikota 2015-2020, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah seluas 1.371,21 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.78

Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur

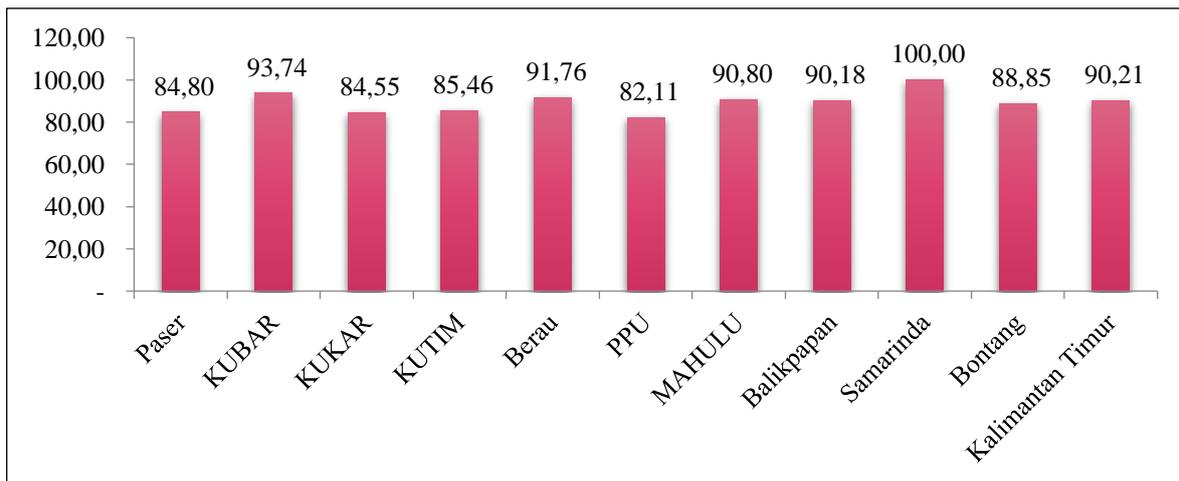
No.	KAB/KOTA	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
1	Paser	179,56	No. 653/KEP-332/2020
2	KUBAR	488,59	No. 413.2/K.719/2018
3	KUKAR	168,12	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	120,63	No. 050/K.661/2015
5	Berau	28,26	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	No. 593.33/270/2017

7	MAHULU	39,6	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	153,3	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	70,52	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	73,56	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		1.371,21	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Dengan adanya penanganan kawasan kumuh seluas 83,39 Ha yang dilaksanakan oleh Pusat dan Daerah, sehingga pada tahun 2020 luasan Kawasan kumuh Kalimantan Timur berkurang menjadi 1.287,82 Ha dari *baseline* data SK Kumuh Bupati/Walikota Tahun 2015-2020.

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 814 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 224 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 88,93 persen pada tahun 2019 menjadi 90,21 persen pada tahun 2020.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.72

Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Tabel II.79

Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	774.995	832.528	1.018.222	1.089.707	1.156.967
2	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.801.719.937	1.748.943.749	2.213.445.295	2.213.445.295	

Sumber: PT. PLN Wilayah KALTIMRA

Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, terutama masih rendahnya luas lahan sawah yang beririgasi teknis. Hingga tahun 2020, sawah yang mendapat layanan irigasi mencapai 61,37 persen atau sekitar 24.231,80 Ha. Lahan tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel II.80

Luas Lahan Sawah Yang Beririgasi Teknis di Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)			Sawah Non Irigasi (Ha)		Total Luas Sawah (Ha)
		1x Panen	2x Panen	3x Panen	1x Panen	2x Panen	
1	Paser	545,79	5.999,92	27,33	-	2,99	6.576,03
2	KUBAR	935,89	1.267,92	-	2,88	-	2.206,69
3	KUKAR	158,60	11.247,27	-	442,73	3.456,56	15.305,16
4	KUTIM	411,21	1.020,42	-	975,11	378,07	2.784,81
5	Berau	33,51	940,90	-	447,35	507,32	1.929,08
6	PPU	16,09	1.042,03	-	164,54	8.011,21	9.233,87

No	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)			Sawah Non Irigasi (Ha)		Total Luas Sawah (Ha)
		1x Panen	2x Panen	3x Panen	1x Panen	2x Panen	
7	MAHULU	-	79,42	-	-	-	79,42
8	Balikpapan	-	34,71	-	-	-	34,71
9	Samarinda	0,03	458,57	-	306,08	558,20	1.322,88
10	Bontang	-	12,18	-	-	-	12,18
TOTAL		2.101,12	22.103,35	27,33	2.338,69	12.914,35	39.484,84

Sumber: BPN KANWIL KALTIM, 2021

Bendungan-bendungan yang sudah terbangun belum sepenuhnya terhubung jaringan irigasi ke lahan pertanian, karena jaraknya yang sangat jauh dari lahan pertanian, dan bahkan banyak bendungan yang tidak berfungsi karena adanya alih fungsi lahan pertanian sekitarnya menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah rendahnya kualitas air baku untuk irigasi karena tingkat keasaman air yang tinggi dan adanya pencemaran limbah tambang batubara. Peningkatan jaringan irigasi disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku yang berkualitas pada bendungan atau waduk sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Selain sebagai sumber air irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, pengendali banjir dan sumber air minum. Selain permasalahan jaringan atau distribusi, masalah ketersediaan layanan air minum juga diakibatkan oleh kurangnya pasokan air baku maupun sarana pengolahannya, berikut tabel defisit sarana pengolahan air baku.

Tabel II.81

Defisit Sarana Pengolahan Air Baku

No	KAB/KOTA	Defisit Kebutuhan Air Baku (m ³ /Tahun)	
		2018	2023
1	Paser	(13.262.992,45)	(16.823.065,72)
2	KUBAR	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
3	KUKAR	(2.453.614,96)	(13.252.406,91)
4	KUTIM	(16.181.957,16)	(25.275.031,62)
5	Berau	(2.426.389,82)	(6.119.490,31)

No	KAB/KOTA	Defisit Kebutuhan Air Baku (m ³ /Tahun)	
		2018	2023
6	PPU	(8.472.603,46)	(9.696.067,38)
7	MAHULU	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
8	Balikpapan	(4.512.187,52)	(3.382.418,18)
9	Samarinda	(22.710.346,28)	(18.568.251,44)
10	Bontang	(3.124.422,15)	(5.796.593,97)

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel II.82
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	188
2	KUBAR	Sungai Mahakam	500
3	KUKAR	Sungai Mahakam	100
		Merdeka	200
4	KUTIM	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
5	Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	PPU	Sungai Tunan	20
7	MAHULU	Sungai Mahakam	500
8	Balikpapan	Sungai Ampal	82
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
9	Samarinda	Karangmumus	5
		Karangasam Besar	47
		Karangasam Kecil	22
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	28
		Keledang	5
		Sempaja	20
Bengkuring	15		

No.	KAB/KOTA	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
		Palaran	30
10	Bontang	Bontang	120
		Guntung	0

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain irigasi pertanian, permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya sistem penyediaan air minum kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Pelayanan air bersih perpipaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam sektor air minum, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih/air minum. Saat ini, terdapat 9 perusahaan daerah air minum tersebar di 9 kabupaten/kota dengan kapasitas desain produksi total terpasang pada tahun 2020 sebesar 8.395 l/dt dengan kapasitas sumber air yang diolah saat ini hanya mampu memproduksi air sebesar 87,51 persen untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Kalimantan Timur saat ini.

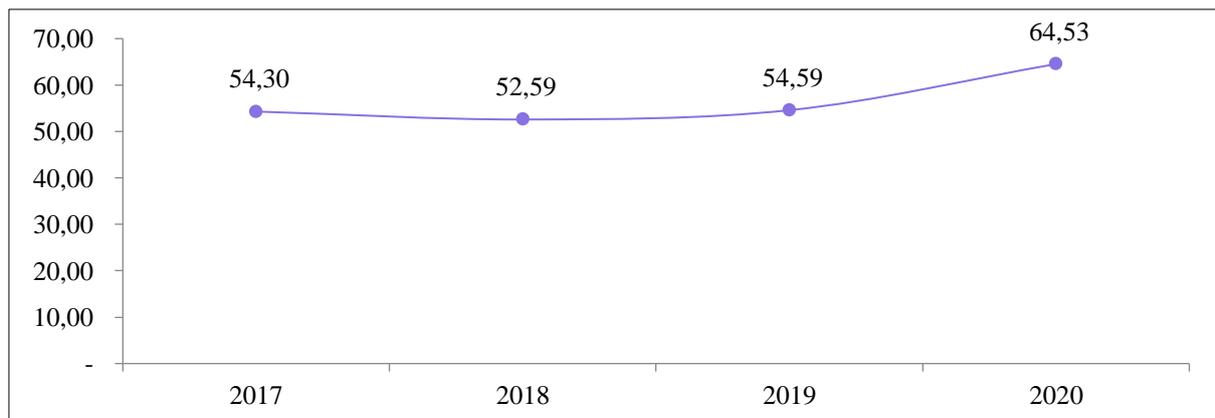
Tabel II.83

Indikator Kinerja Perusahaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perusahaan Air Minum	9	9	9	9	9
2.	Kapasitas Produksi Potensial (ltr/detik)	7.18 5	7.35 4	7.58 3	8.01 8	8.39 5
3.	Kapasitas Produksi Efektif (ltr/dtk)	6.44 5	6.74 3	6.91 9	7.20 1	7.34 7
4.	Efektivitas Produksi (%)	89,7 0	91,6 9	91,2 4	89,8 1	87,5 1

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Efektifitas produksi Instalasi Pengolahan Air yang masih <100% menyebabkan timbulnya *idle capacity* yang seringkali menjadi tantangan untuk penyelenggara air minum dalam pemanfaatannya. *Idle capacity* yang besar bila tidak dimanfaatkan segera, akan menyebabkan perluasan layanan SPAM menjadi terhambat. Belum lagi permasalahan tingkat kebocoran/NRW di SPAM yang setiap tahun meningkat, tanpa adanya upaya dalam penanganannya akan menyebabkan penyelenggaraan SPAM menjadi tidak efektif dan efisien. Semua itu kemudian berdampak pada hambatan dalam pemenuhan layanan air minum.



Sumber : BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.73

Rata-Rata Penduduk Terlayani Air Minum Layak
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2020

Tabel II.84

Penduduk Terlayani Air Minum Layak Tahun 2017-2020

No	KAB/KOTA	Penduduk Yang Terlayani Air Bersih (%)			
		2017	2018	2019	2020
1	Paser	38,29	45,45	37,16	48,56
2	KUBAR	34,35	22,01	34,24	31,04
3	KUKAR	63,39	45,07	58,68	51,54
4	KUTIM	33,13	42,76	15,43	40,11
5	Berau	44,70	45,46	81,59	56,87
6	PPU	15,87	16,98	34,79	32,14
7	MAHULU	-	-	-	24,51
8	Balikpapan	76,98	81,72	79,05	79,79
9	Samarinda	95,46	83,95	99,29	87,28
10	Bontang	87,05	89,06	51,10	99,96
Rata-Rata		54,3	52,59	54,59	64,53

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

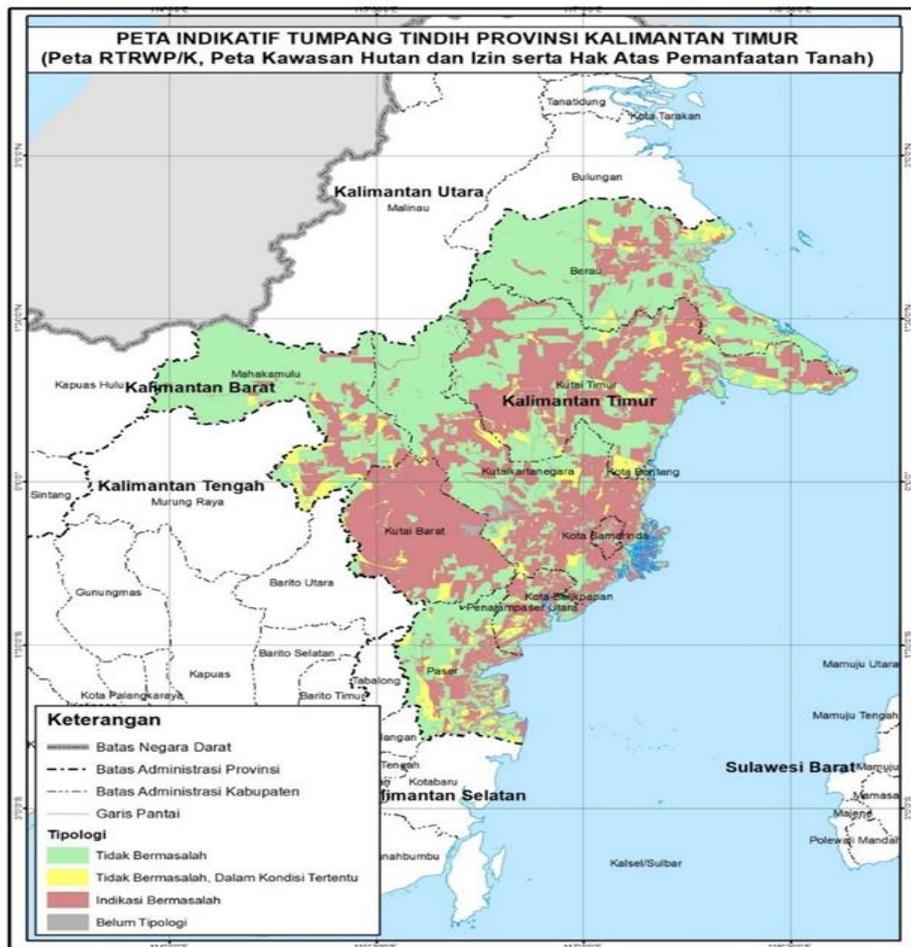
Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari *trend update* capaian per tahun masing-masing Kabupaten/Kota, maka terlihat inkonsistensi data capaian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan paradigma dan konsep perhitungan capaian air minum oleh masing-masing daerah dan Provinsi. Untuk capaian air minum yang terukur dengan baik, maka kedepan diperlukan penyamaan persepsi baseline data perhitungan capaian air minum, seperti penyepakatan jumlah jiwa dalam satuan Sambungan Rumah, keikutsertaan data sektor komersil dalam perhitungan capaian air minum, dan lain-lain sebagainya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Saat ini RTRWP Kalimantan Timur akan melakukan proses revisi yang sejalan dengan masa 5 tahun pertama RTRWP. Tahun 2020, Provinsi Kalimantan Timur mendapat bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN berupa penyusunan Materi Teknis serta mengikuti tahapan Peninjauan Kembali Revisi Perda, dan pada tahun 2021 dilanjutkan proses Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

Revisi RTRWP Kalimantan Timur memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang terjadi baik pada skala nasional maupun regional, penyesuaian terhadap turunan Undang-Undang Cipta Kerja, arah pengembangan pembangunan setelah ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara (IKN) baru, serta

pelaksanaan pemanfaatan ruang semenjak RTRW disahkan sampai dengan saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu memperhatikan indikasi program kegiatan pembangunan terhadap muatan RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang diselaraskan dengan Program Prioritas Gubernur untuk sinkronisasi dan harmonisasi Tata Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peran RTRWP sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi; juga sebagai pedoman perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor. Adanya dinamika dan arah pengembangan pembangunan memberikan dampak intensitas penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tinggi. Namun hal ini sering tidak melihat terhadap norma-norma aturan arahan zonasi peruntukan pemanfaatan ruang sehingga menyebabkan permasalahan pada kegiatan perizinan di Kalimantan Timur. Sebagai contoh pemanfaatan ruang, di sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan yang tumpang tindih. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah pada sektor kehutanan yakni seluas ±5,6 Juta Ha, kemudian sektor pertambangan batubara seluas ±4,8 Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas ±2,4 Juta Ha (belum termasuk pemanfaatan untuk sektor lainnya), sehingga jika ditotal luas izin sektoral melebihi total luas daratan Kalimantan Timur ±12 Juta Ha. Hal ini mengindikasikan adanya izin yang tidak sesuai atau izin bermasalah terhadap peruntukan pemanfaatannya dan akan berdampak terhadap konflik pemanfaatan ruang.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020

Gambar II.74

Peta Indikatif Tumpang Tindih Provinsi Kalimantan Timur

Dalam upaya pencegahan terhadap adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang baik berupa alih fungsi lahan dan konflik dalam pemanfaatan ruang, serta dalam upaya menjaga kualitas kawasan yang berfungsi lindung, maka dilakukan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan diantaranya adalah memberikan pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang, melakukan audit pemanfaatan ruang, serta melaksanakan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pemberian pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang merupakan salah satu upaya mengendalikan pemanfaatan ruang khususnya terhadap izin-izin sektoral pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan kegiatan lainnya yang memanfaatkan peruntukkan ruang. Pada tahun 2018 pertimbangan teknis yang telah dikeluarkan sebanyak 108, tahun 2019 sebanyak 133 dan tahun 2020 sebanyak 193 pertimbangan teknis kesesuaian rencana tata ruang. Selain memberikan pertimbangan teknis,

upaya lain dalam melakukan pengendalian adalah melakukan audit pemanfaatan ruang. Kegiatan audit memberikan gambaran indikasi perbedaan pemanfaatan ruang terhadap peruntukkan dan arahan zonasinya. Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kajian audit pada 5 (lima) kabupaten/kota. Namun saat ini belum dilaksanakan tindak lanjut audit serta fasilitasi penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Tabel II.85

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan Kajian Audit Pemanfaatan Ruang

No.	Kabupaten/Kota	Tahun
1.	Kutai Kartanegara	2014
2.	Balikpapan	2015
3.	Bontang	2016
4.	Paser	2020
5.	Penajam Paser Utara	2020

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Hasil audit diharapkan mampu menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang serta memberikan masukan terhadap review RTRW Kabupaten/Kota. Adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan serta menurunnya kualitas ruang pada Kawasan berfungsi lindung, maka kegiatan pengendalian dapat memberikan peran aktif agar setiap ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota maupun RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan konsistensi gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka

kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah.

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 87,25 persen, sedangkan pada tahun 2018 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 81,71 persen. Pada tahun 2020 persentase tindak kejahatan yang diselesaikan baru mencapai 38,83 persen dengan posisi data masih bersifat sementara ditahun 2020.

Tabel II.86

Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

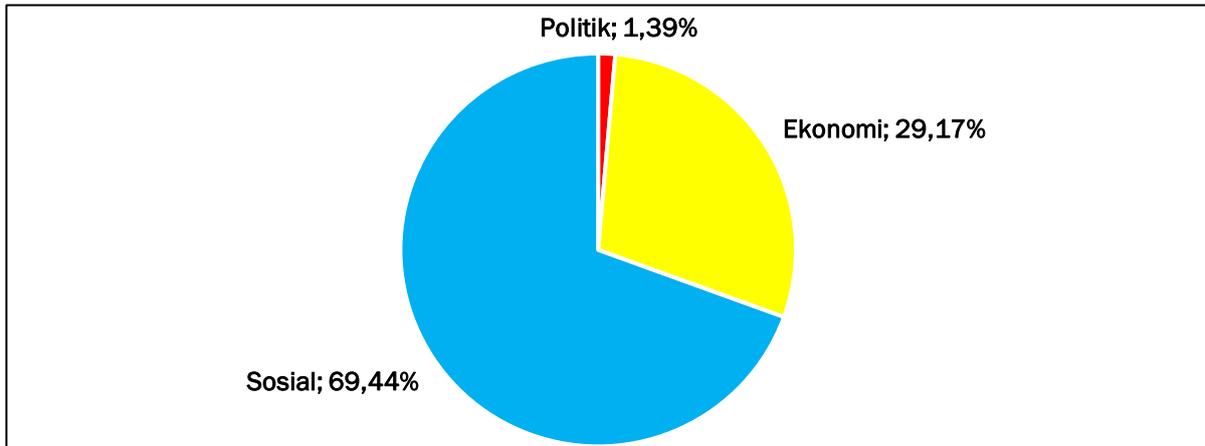
Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2016	12.620	3.482	9.138	72,41	36,67
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	33,39
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	18,90
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020*	4.368	506	1.696	38,83	6,01

*) Data Sementara; Sumber: POLDA KALTIM, 2021

B. Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi meningkat pada beberapa tahun ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2020, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 155 demonstrasi dimana sebanyak 29,17

persen (42 demonstrasi) merupakan demonstrasi terkait ekonomi; 69,44 persen (100 demonstrasi) terkait sosial dan 1,39 persen (2 demonstrasi) terkait politik.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.75

Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (persen)

Tabel II.87

Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

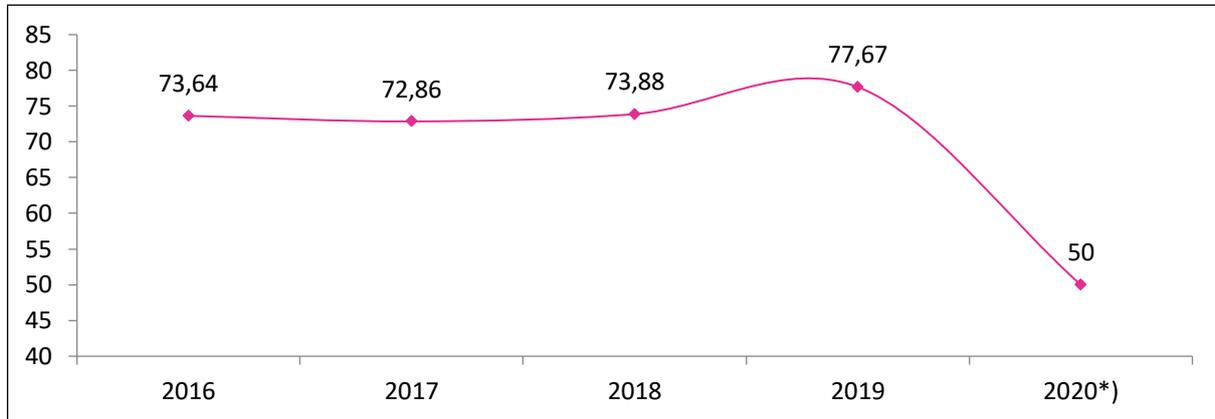
Tahun	Jenis Demo			Jumlah
	Politik	Ekonomi	Sosial	
2016	4	112	187	303
2017	12	121	201	334
2018	15	129	221	365
2019	57	83	185	325
2020	2	42	100	144

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

C. Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 77,67 persen pada tahun 2019. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur saat ini masih berada pada kategori “sedang”. Meskipun begitu, angka indeks ini masih cukup fluktuatif di setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah harus mempertahankan

prestasi demokrasi seperti masa sekarang ini. Namun pada tahun 2020 posisi data sementara Indeks Demokrasi Indonesia baru mencapai 50 persen.



*) Data Sementara; Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.76
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016-2020

D. Iklim Investasi Daerah

Pada tahun sebelumnya sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, tahun 2020 ini sektor usaha dengan nilai investasi terbesar adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi mencapai Rp 7.965,22 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 444,15 miliar diikuti sektor konstruksi dengan nilai investasi PMDN yang mencapai Rp 5.777,78 rupiah dan sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.738,08 miliar sedangkan sektor Pertambangan mengalami penurunan di tahun 2020.

Tabel II.88
 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan dan Perkebunan	2.496.175	2.886.876,90	3.747.269,70	4.278.114,90	4.738.083,60
2.	Peternakan	.	.	.	33,40	-
3.	Kehutanan	8.050,10	25.144,20	602.835,40	283.625	125.549,60
4.	Perikanan	3,00
5.	Pertambangan	599.560,60	4.714.508,50	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	1.847.135,70	551.959,10	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40
2.	Industri Tekstil	0
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0
4.	Industri Kayu	382.004,20	316.482	264.104,30	350.224	97.509,90
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	0
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	466.848,70	9.351,90	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	.	.	9.000	70,80
8.	Industri Mineral Non-Logam	8.893,30	748,30	17.919,90	292.133,10	95,00
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	27.566	.	.	5.000

No.	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	0
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	5.900	.	7.620	151.706,50	3.626,30
12.	Industri lainnya	78.643,40	248	.	509,50	70.348,60
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	324.544,20	2.297.726,20	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70
2.	Konstruksi	.	375,30	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90
3.	Perdagangan dan Reparasi	69.294,60	136.787,70	82.557,40	341.327,60	218.379,90
4.	Hotel dan Restoran	.	530	480	1.086.261,80	25.127
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	183.970,50	4.322,20	165.403,80	940.606,30	459.299,20
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	6.560,20	2.850	26.874,40	345.944,10	53.687,40
7.	Jasa Lainnya	407.544,10	4.740,10	1.015.135	1.623.524,70	419.150
Total		6.885.124,60	10.980.216,40	25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2021

Sektor usaha pertambangan yang mengalami peranan terbesar di Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai investasi PMA yang mencapai US\$ 167,86 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 306,46 Ribu sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan yaitu pada sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi yang mencapai US\$ 32.861,60 Ribu dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai US\$ 60 Ribu diikuti sektor industri makanan, sektor industri mineral non logam, industri instrumen kedokteran, presesi, optik dan jam.

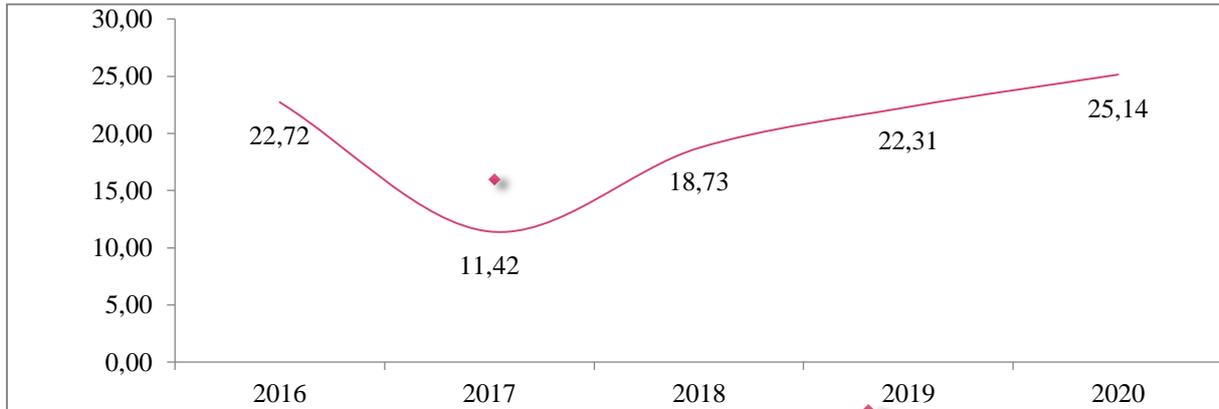
Tabel II.89
 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (US\$)

No	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan dan Perkebunan	344.588.200	159.353.800	63.157.800	185.796.300	67.781.500
2.	Peternakan	3.900	1.214.000	956.300	.	
3.	Kehutanan	9.304.600	82.734.000	657.100	2.751.700	2.071.400
4.	Perikanan	.	.	135.500	.	-
5.	Pertambangan	449.980	900.503.500	188.763.000	306.457.800	167.858.400
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	207.862.100	72.145.900	118.386.600	14.264.600	41.235.500
2.	Industri Tekstil	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-
4.	Industri Kayu	7.906.900	.	6.600	33.300	-
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	10.313.800	9.552.500	760.700	60.000	32.861.600
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	39.000	9.494.000	256.700	561.100	986.400
8.	Industri Mineral Non-Logam	27.487.300	16.586.100	.	15.809.600	24.840.000
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	75.719.600	3.607.700	22.600	1.879.400	276.400

No	Sektor Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	253.200	1.533.400	3.550.700
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	128.800	58.500	.	43.800	-
12.	Industri lainnya	555.900	.	526.100	134.600	-
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	26.542.700	21.413.400	53.012.000	280.607.900	278.800
2.	Konstruksi	.	.	5.093.100	.	-
3.	Perdagangan dan Reparasi	6.121.500	13.289.100	3.738.700	4.258.100	5.618.500
4.	Hotel dan Restoran	1.592.600	704.800	2.245.800	1.297.000	791.000
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	10.125.300	67.399.200	86.566.000	14.847.700	29.415.000
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	1.674.700	1.115.400	301.200	146.900	221.300
7.	Jasa Lainnya	1.911.800	503.900	62.662.600	32.616.200	240.700
	Total	1.181.859.200	1.285.215.200	587.501.600	863.099.400	378.027.200

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2021

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur pernah mengalami penurunan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai Rp 25,14 triliun pada tahun 2020.



Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2021

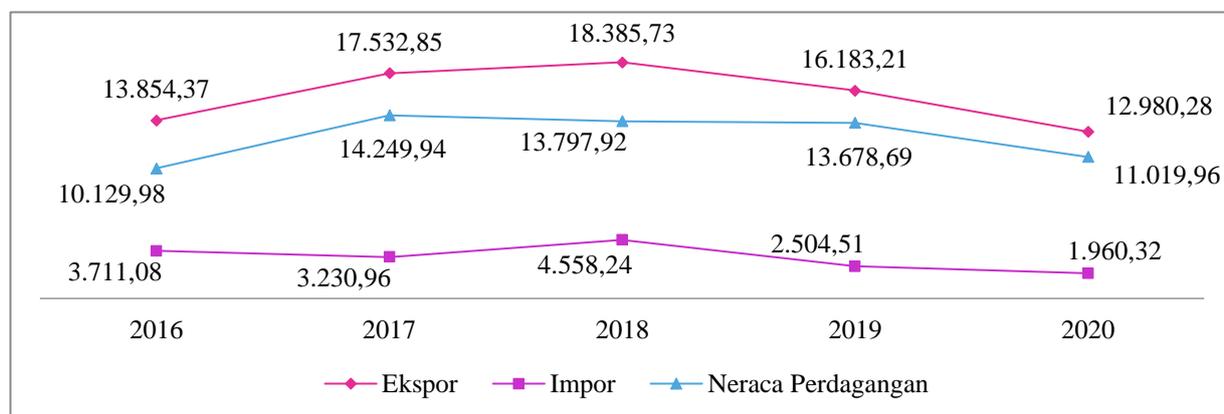
Gambar II.77

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Triliun Rp)

E. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2016-2020, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.78

Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,79 persen dibanding tahun 2019 yaitu dari US\$ 16,18 miliar menjadi US\$ 12,98 miliar. Penurunan ekspor tahun 2020 disebabkan oleh turunnya nilai ekspor barang migas maupun non migas, hanya komoditas hasil industri yang mengalami kenaikan. Ekspor barang migas tahun 2020 mencapai US\$ 1,15 miliar turun sebesar 39,59 persen dibanding tahun 2019. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 11,83 miliar turun sebesar 17,16 persen dibanding tahun 2019.

Tabel II.90

Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur,
Tahun 2016 – 2020 (Juta US\$)

No	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019	2020
Migas		3.781,67	4.302,83	3.356,38	2.068,20	1.148,29
1	Minyak Mentah	861,45	922,56	334,70	12,63	7,27
2	Hasil Minyak	138,23	188,97	12,97	224,05	108,64
3	Gas	2.781,99	3.140,97	2.977,57	1.831,52	1.032,38
Non Migas		10.072,71	13.230,03	15.029,36	14.113,59	11.831,99
1	Hasil Tambang	8.813,17	11.957,04	13.580,80	12.408	9.600,36
2	Hasil Industri	1.241,48	1.266,53	1.445,92	1.696,72	2.222,52
3	Hasil Pertanian	4,75	4,82	4,21	8,87	9,11
Total Ekspor		13.854,37	17.532,85	18.385,73	16.183,21	12.980,28

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Produk Mineral adalah golongan barang yang paling dominan diekspor dari Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 produk mineral nilai ekspornya mencapai US\$ 10,75 miliar atau sebesar 82,81 persen dari total nilai ekspor Kalimantan Timur menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 14,14 miliar. Golongan barang dengan nilai ekspor terbesar berikutnya adalah Lemak, Minyak, Malam Nabati dan Hewani sebesar US\$ 1,3 miliar (10%) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 0,89 Juta.

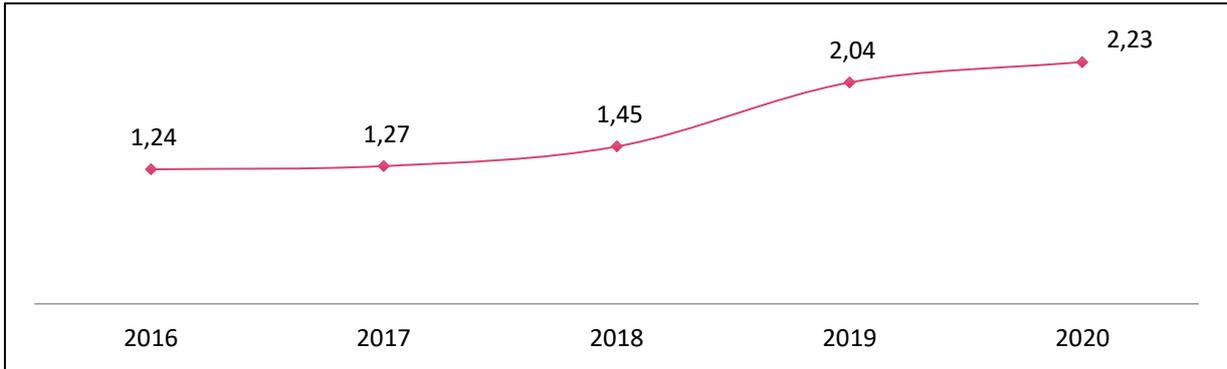
Tabel II.91

Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Menurut Golongan Barang Utama, Tahun 2016 – 2020 (Juta US\$)

No	Golongan Barang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produk Mineral	12.608,75	16.261,60	16.933,08	14.135,08	10.748,65
2	Lemak, Minyak, Malam Nabati dan Hewani	266,59	584,81	640,79	887,42	1.298,27
3	Produk Industri Kimia	620,61	479,71	672,22	746,82	692,61
4	Mesin, Perlengkapan Listrik, Elektronika	303,61	190,10	123,04	232,13	28,27
5	Binatang Hidup, Produk Hewani	29,28	5,67	7,71	83,13	60,24
6	Lainnya	25,55	10,96	8,89	98,63	61,99
	Total	13.854,37	17.532,85	18.385,73	16.183,21	12.980,28

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 2,23 miliar US\$ pada tahun 2020 mengalami peningkatan 9,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,04 miliar US\$.

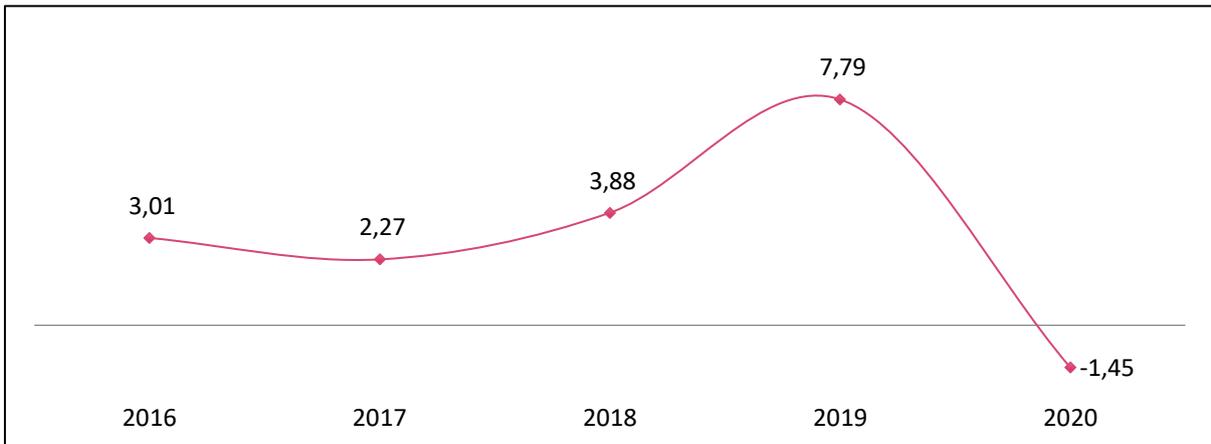


Sumber: DISPERINDAGKOP Prov KALTIM, 2021

Gambar II.79

Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (Miliar US\$)

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dan dimana tahun 2019 tumbuh tinggi hingga mencapai 7,79 persen akan tetapi pada tahun 2020 Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas dan batubara mengalami perlambatan yang cukup curam mencapai -1,45 persen.



Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2021

Gambar II.80

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah.

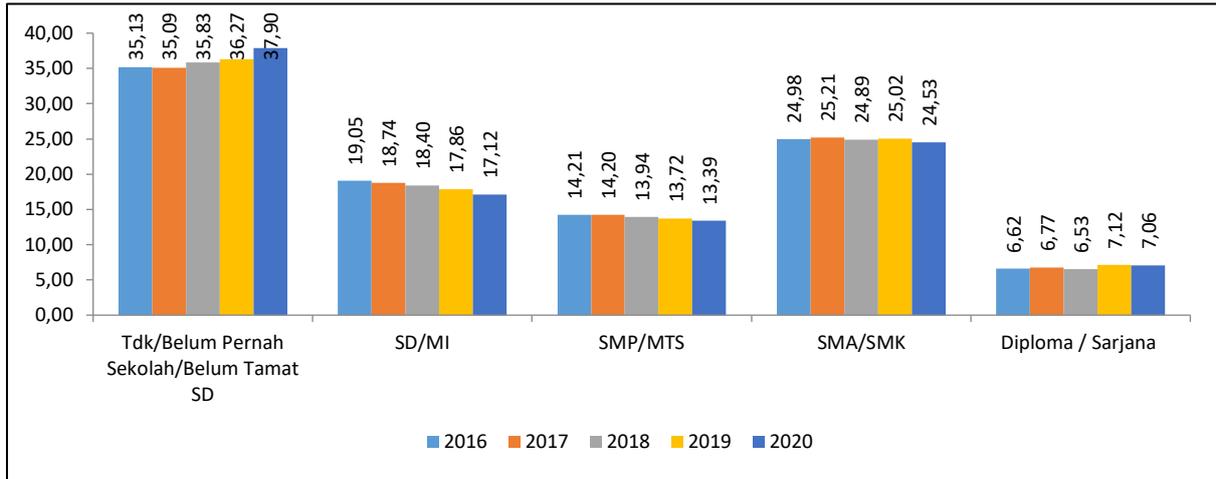
Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non produktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.

A. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2020 hanya sebesar 7,06 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (24,53 persen), SLTP/MTs (13,39 persen) dan SD/MI (17,12 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 37,90 persen, persentase ini meningkat dibandingkan presentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.81
Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

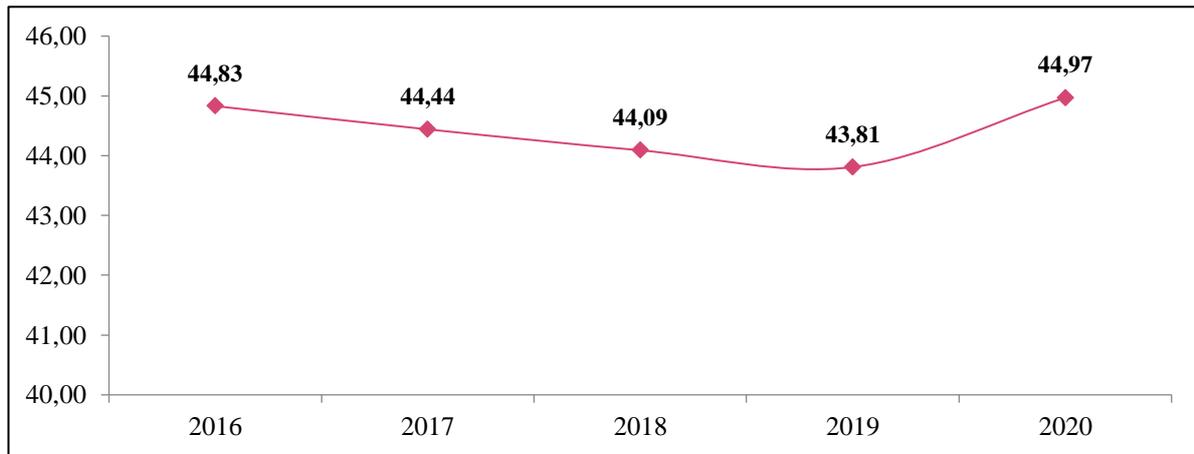
B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 44,97,

artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44-45 orang penduduk usia non produktif.

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2021

Gambar II.82



Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Tabel II.92

Capaian Kinerja Pembangunan Aspek Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	58,88	63,46	52,85	61,45	69,77
1.2	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	3	3	2	2	2
1.3	Capaian akses air minum layak (%)	75	77	71,83	56,84*	64,53*
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.808,50	15.558,50	13.618,50	13.728,50	13.878,50
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	-	-	730	641	477
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	533,56	459,59	673,42	1.525,47	1.287,82
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	69,01	75,09	73,18	66,46	66,46
1.10	Rasio elektrifikasi (%)	79,52	84,07	84,21	88,93	90,21
2	Fokus iklim berinvestasi					
2.1	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	33,08	34,73	25,53	35,62	31,38
2.2	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)					2,38
2.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	13	12	15	14	12
2.4	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26,89	27,75	7,2	25,18	50,72
2.5	Indeks Resiko Bencana	165	165	165	154,49	153,49
2.6	Indeks Demokrasi Indonesia	73,64	72,86	73,88	77,67	50
3	Fokus Sumber Daya Manusia					
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	71	71	76,55	76,55	76,60
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	81,56	82,22	81,50	82,00

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

**) Perubahan Asumsi rumusan perhitungan (cakupan layanan air minum teknis) menjadi perhitungan capaian akses air minum layak administratif; Perubahan baseline luas kawasan kumuh berdasarkan SK Kawasan Kumuh baru serta penanganan yang telah dilaksanakan oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.*

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2020 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel II.93

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2			3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9
	1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
	1	1		Pendidikan						
1	1	1	19	Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	70	76	108,57		Disdikbud
2	1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	98	95,25	97,19		Disdikbud
3	1	1	23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang)	13.000	20.282	156,01		Disdikbud

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	1	1	38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa)	2.500	2.831	113,24		Disdikbud
5	1	1	39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA	72	68,55	95,21		Disdikbud
6	1	1	40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK	72	68,55	95,21		Disdikbud
7	1	1	41	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB)	150	87	58		Disdikbud
8	1	1	42	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	55	45	81,82		Disdikbud

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
9	1	1	107	Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	90	90	100		Disdikbud
	1	2		Kesehatan						
10	1	2	17	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	90	90	100		Dinkes
11	1	2	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	43	23,53	55		Dinkes
12	1	2	56	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	70	74,8	107		Dinkes

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
13	1	3	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	58,88	64,35	109,29		DPUPR&PERA
14	1	3	16	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7.922	7.922	100		DPUPR&PERA
15	1	3	17	Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya	Cakupan layanan Air Minum Per pipa (%)	65,23	72,53	111,19		DPUPR&PERA
16	1	3	70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%)	75,34	70,11	93,06		DPUPR&PERA
	1	4		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
17	1	4	15	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	41.722	41.722	100		DPUPR&PERA

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	5								
	1	5		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
18	1	5	21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	69	68,1	98,7		Bakesbangpol *
19	1	5	49	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	60% atau 12 desa, atau 25	53,48	89,14		BPBD *
20	1	5	51	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan	88	75	85,23		BPBD
	1	6		Sosial						
21	1	6	18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Trauma yang mendapatkan Pembinaan	43,1	27	63,23		Dinsos *

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
22	1	6	23	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani	1.500	1.306	87,07		Dinsos *
	2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
	2	1		Tenaga Kerja						
23	2	1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80	79,41	99,26		Disnakertrans *
	2	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
24	2	2	20	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%)	40	36,47	91,17		DKP3A
25	2	2	21	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	82	78,61	95,86		DKP3A *

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
26	2	2	35	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak	0,054	0,038	70,37		DKP3A
	2	3		Pangan						
	2	4		Pertanahan						
	2	5		Lingkungan Hidup						
27	2	5	26	Program Tata Lingkungan	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	550	679	123,45		DLH
28	2	5	59	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan	Tercemar Sedang (8)	Tercemar Ringan (4,6)	100		DLH
	2	6		Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
	2	7		Pemberdayaan Masyarakat Desa						

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
29	2	7	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	25	19	76		DPMPD
30	2	7	28	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	103	25	24,27		DPMPD
31	2	7	29	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	Jumlah desa berkembang (Desa)	25	19	76		DPMPD
32	2	7	30	Program Kampung Iklim	Jumlah Kampung/Desa Iklim(Desa)	22	20	90,91		DPMPD
	2	8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	2	9		Perhubungan						
33	2	9	15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	598	392	65,55		Dishub

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
34	2	9	19	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)	100		Dishub
	2	10		Komunikasi dan Informatika						
35	2	10	15	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,8	3,14	108,57		Diskominfo
	2	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
36	2	11	20	Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM	Jumlah Koperasi yang berkualitas	100	78	78		Disperindagkop
					Jumlah UKM Naik Kelas	200	225	112,5		
	2	12		Penanaman Modal						
37	2	12	18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	13	No Data	0		DPMPPTSP *

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
38	2	12	27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru)	7	5	69,64		DPMPTSP *
	2	13		Kepemudaan dan Olah Raga						
39	2	13	33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	14,44	14,17	98,18		Dispora *
40	2	13	35	Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	0,15	0,14	98,6		Dispora *
	2	14		Statistik						
	2	15		Persandian						
	2	16		Kebudayaan						
41	2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal	150	85	56,67		Disdikbud

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPDP Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2	17		Perpustakaan						
42	2	17	23	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	205.700	174.927	85,04		DPKD *
	2	18		Kearsipan						
	3			Urusan Pilihan						
	3	1		Kelautan dan Perikanan						
43	3	1	25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	158.055	108.438	68,61		DKP
					Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	52	39	78		DKP *
44	3	1	21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	155.516	81.647	52,5		DKP
45	3	1	29	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah kawasan konservasi yang ditata	1	1	100		DKP

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)					
46	3	1	26	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (ekor)	2,7	1,95	72,23		DKP (UPTD. Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar) *
	3	2		Pariwisata						
47	3	2	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	2	3	150		Dispar
	3	3		Pertanian						
48	3	3	41	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	240.245	261.996	109,05		DPTPH

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
49	3	3	51	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah produksi padi (Ton)	423.000	214.535	50,72		DPTPH
50	3	3	58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Juta Ton)	16,81	14,56	86,62		Disbun
51	3	3	76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,08	6,03	147		Disbun
52	3	3	80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	8	22,85		Disbun
53	3	3	93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2	4	200		Disbun
54	3	3	34	Program Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Miniranch yang Teregister (unit)	35	10	28,57		Disnakkeswan *

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Nilai Tukar Usaha Peternakan	118,5	102,28	86,31		
55	3	3	90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi (%)	20	9,18	45,9		Disnakkeswan
					Calving Interval (Bulan)	18	18,55	103,05		
	3	4		Kehutanan						
56	3	4	16	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Realisasi penerimaan PNBK sektor kehutanan (Rp. Miliar)	165	128,47	77,86		Dishut
57	3	4	39	Program Perlindungan dan KSDAE	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	≤1,75	0,056	100		Dishut
58	3	4	41	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Persentase meningkatnya tutupan lahan	13,98	10,99	100		Dishut
59	3	4	42	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32.000	28.617	100		Dishut

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3	5		Energi dan Sumber Daya Mineral						
60	3	5	37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik (KK)	989.607	1.040.823	105,17		DESDM
61	3	5	47	Program Diversifikasi Energi	Persentase pemanfaatan EBT (%)	3,63	4,8	132,23		DESDM
	3	6		Perdagangan						
	3	7		Perindustrian						
62	3	7	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	1	0,63	63		Disperindagkop
	3	8		Transmigrasi						
	4			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
	4	1		Kesekretariatan Daerah						
63	4	1	42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat	61	56,91	93,3		Biro Organisasi *

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					(SKM) sesuai standar (%)					
64	4	1	60	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	75	78,38	104,51		Biro Organisasi
65	4	1	80	Program Penguatan Kelembagaan	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%)	90	87	97		Biro Organisasi
66	4	1	81	Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	68,42	68,42	100		Biro Organisasi
	4	2		Pengawasan						
67	4	2	21	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Hasil Penilaian Integritas	70	66,76	95,37		Inspektorat

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2020	Realisasi (%)	Status Realisasi Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
68	4	2	99	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level kapasitas APIP	3	3	100		Inspektorat
	4	3		Perencanaan						
69	4	3	48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran	85	85,13	100,15		Bappeda
	4	4		Keuangan						
70	4	4	30	Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	4	3	72,64		Bapenda *

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 70 program prioritas di Kalimantan Timur, terdapat 23 (dua puluh tiga) program prioritas yang pencapaian targetnya berada di bawah 80 persen. Program tersebut antara lain: Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma; Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak; Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; Program Pembangunan Desa dan Kawasan; Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan; Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM; Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan; Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi; Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan; Program pengembangan perikanan tangkap; Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan; Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan; Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan; Program Pengembangan Usaha Peternakan; Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan; Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan; Program Peningkatan dan Pengembangan Industri; dan Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah.

Dari total 70 (tujuh puluh) program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019 – 2023, terdapat sebanyak 74 (tujuh puluh empat) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator yang memiliki pencapaian melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, dan sebanyak 46 (empat puluh enam) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2020.

Terdapat pula 4 (empat) program prioritas yang memiliki target indikator lebih dari 1 (satu), yaitu Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM; Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan; Program Pengembangan Usaha Peternakan; Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam upaya pencapaian target disetiap program prioritas pembangunan yang telah dijalankan oleh Perangkat Daerah antara lain:

1. Terbatasnya tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (TU, laboran, arsiparis, satpam, dll) yang berstatus PNS.
2. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS tidak diimbangi dengan jumlah anggaran untuk keperluan pembayaran gaji.
3. Masih terbatasnya kompetensi guru serta jumlah guru yang dapat mengikuti sertifikasi dikarenakan belum memenuhi persyaratan.
4. Kurangnya ruang kelas baru (RKB) yang berakibat sekolah menolak peserta didik.
5. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah/lahan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data aset di sekolah-sekolah.
7. Kurangnya pembiayaan sekolah menyebabkan mutu dan kualitas siswa cenderung menurun.
8. Jarak sekolah dengan ibukota Provinsi yang jauh berakibat guru disekolah tersebut kesulitan dalam pengurusan kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, dan sebagainya.
9. Dana BOSNAS terlambat ditransfer oleh Pemerintah Pusat (kurang salur).
10. Ketersediaan jaringan komunikasi serta akses jalan yang belum optimal untuk menuju ke lokasi sekolah yang berada didaerah terpencil dan terdalam.
11. Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan hak anak.
12. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki database informasi tentang data anak seperti anak putus sekolah, pekerja anak, dan lain-lain
13. Belum optimalnya jangkauan promosi kegiatan perpustakaan daerah.
14. Belum optimalnya pembiayaan terkait penguatan upaya preventif & promotif, karena pembiayaan terbesar bidang kesehatan masih pada upaya kuratif (pengobatan).
15. Rendahnya kualitas hidup perempuan pada daerah terpencil sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya.
16. Belum tersampainya kepada masyarakat tentang informasi perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

17. Belum optimalnya pengintegrasian data dari seluruh sektor dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan.
18. Perlu perhatian khusus terhadap peningkatan sarana dan prasarana panti sosial yang lebih memadai.
19. Belum optimalnya ketersediaan serta minimnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga daerah untuk mendukung pembentukan atlet berprestasi.
20. Kompetensi pencari kerja sebagian besar belum memenuhi kriteria yang diperlukan perusahaan
21. Adanya pembatasan pembagian kewenangan urusan koperasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi hanya mencakup koperasi yang anggotanya lintas Kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil saja.
22. Kurang optimalnya kemampuan SDM koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha dan mengakses sumber-sumber pembiayaan.
23. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM baik dari segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
24. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
25. Tidak meratanya kemampuan SDM aparatur desa serta keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.
26. Kondisi geografis dan lokasi desa yang tidak mudah diakses.
27. Belum optimalnya kondisi jalan akses, upaya promosi, sarana prasarana pendukung pada daerah tujuan wisata.
28. Belum optimalnya pelayanan perizinan disisi teknologi informasi / berbasis online.
29. Masih lambannya penyelesaian kegiatan MoU yang ditandatangani karena dari proses penjajakan, perundingan, perumusan naskah sampai pada penandatanganan cukup memakan waktu.
30. Profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci Feasibility Study (FS) sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya.

31. Permasalahan ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan keterbatasan Infrastruktur pendukung menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.
32. Semakin berkurangnya luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan semakin berkurangnya luas tanam padi sawah.
33. Masih minimnya jalan pertanian dan jaringan irigasi pada lokasi sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura.
34. Semakin menurunnya jumlah keluarga petani dan minat dalam berusaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
35. Terbatasnya jumlah SDM Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan tenaga Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).
36. Harga karet yang tidak stabil. Selain itu, mutu karet dari petani juga rendah yang dapat mempengaruhi harga jual ke industri.
37. Amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuat pengawasan perikanan sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan budidaya air tawar sepenuhnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.
38. Permen KP No.2/2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Trawl dan Seine Net di seluruh perairan laut mengakibatkan terjadinya konflik sosial antar nelayan dan pemerintah.
39. Supply ketersediaan benih ikan/udang yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) atau UPTD Balai Benih Ikan dan Udang masih belum optimal.
40. Jaminan/agunan yang dimiliki petani seringkali tidak memenuhi persyaratan dari perbankan.
41. Terlambatnya penerbitan petunjuk teknis dari Kementerian LHK tentang pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lahan Dana Bagi Hasil -Dana Reboisasi (RHL DBH – DR).
42. Kesulitan dalam penentuan lokasi untuk rehabilitasi di luar kawasan hutan yang *clear and clean*.
43. Pembangunan infrastruktur terutama jalan di Kalimantan Timur belum berjalan optimal disebabkan masih terkendalanya pada mekanisme pengadaan barang jasa yang berjalan terlambat; status jalan yang akan dibangun (status lahan); kondisi geografis lahan (topografi dan struktur tanah); belum terintegrasinya perencanaan pembangunan dari tingkat

- pusat sampai ke daerah; serta minimnya pengawasan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur terutama jalan yang telah terbangun.
44. Dalam upaya pengendalian banjir, normalisasi sungai belum dapat dilakukan secara optimal akibat masih banyaknya permukiman serta aktivitas warga di atas badan sungai, dan permasalahan sosial dalam upaya pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan infrastruktur penyedia air baku.
 45. Pengembangan Desa berlistrik pada umumnya melalui perluasan jaringan listrik di pedesaan/perbatasan dengan penggunaan EBT skala kecil (PLTS Terpusat dan PLTMH) sering terkendala dengan akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta biaya pembangunannya cukup besar, sementara saat ini dana pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan EBT sangat terbatas.
 46. Terbatasnya jumlah dan minimnya pelatihan SDM pengawas lingkungan hidup baik jumlah maupun kompetensinya.
 47. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilah jenis sampah.
 48. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
 49. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di setiap Kabupaten/Kota.
 50. Belum optimalnya pendataan secara komprehensif dari Kabupaten/Kota terhadap daerah potensi rawan bencana.
 51. Rencana Rinci Tata Ruang pada skala Provinsi dan Kabupaten/Kota belum ditetapkan secara keseluruhan disebabkan keterbatasan sumber data berupa peta dasar pada skala rinci.
 52. Belum optimalnya keselarasan antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota disebabkan dan ditandai dengan sebanyak 8 Perda RTRW Kabupaten/Kota telah diperdakan lebih dahulu daripada RTRW Provinsi; serta koordinasi saat penyusunan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang belum optimal.
 53. Adanya inkonsistensi perencanaan dan eksisting disebabkan belum terlaksananya rencana pola ruang RTRW pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara optimal; dan masih terdapat indikasi program RTRW yang belum terlaksana.
 54. Belum optimalnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang disebabkan belum adanya Perda/Pergub Operasionalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi Peraturan Zonasi, Pemberian Insentif dan Disinsentif dan Pengenaan Sanksi.

55. Masih cukup banyak SOP perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
56. Belum tersosialisasinya dokumen pelayanan publik yang ada di setiap perangkat daerah.
57. Indikator program dan kegiatan di Perangkat Daerah belum inline dengan sasaran Renstra/RPJMD serta program perencanaan daerah yang disusun belum seluruhnya diselaraskan dengan program perencanaan berbasis Geospasial berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 dan Permendagri No.90 Tahun 2019.
58. Belum optimalnya pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat daerah dan masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
59. Belum optimalnya pengintegrasian seluruh sistem aplikasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah.
60. Keterbatasan jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan di Inspektorat.
61. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tabel II.94

Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian Triwulan IV Tahun 2020	Keterangan
TUJUAN 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKARAKTER BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	75,43	76,24	
Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	74,5	77,67*	
Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,50	9,77	
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,13	13,72	
Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,74	74,33	
TUJUAN 2 : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	TINGKAT KEMISKINAN (%)	5,94	6,10	
Sasaran 4: Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,71	65,54	
Sasaran 5: Meningkatkan kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	57,23	56,33*	
Sasaran 6: Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	0,52	18,03	
TUJUAN 3: MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	3,5±1	-2,85	

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian Triwulan IV Tahun 2020	Keterangan
Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Persentase Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB (%)	4,60	4*	
Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	478	484	
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,97	1,06	
TUJUAN 4: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI NON MIGAS DAN NON BATUBARA (%)	6±1	-0,50	
Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20	18,90	
Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	33,08	31,38	
Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,54	0,63	
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	67,41	40,33	
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,34	0,36	

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian Triwulan IV Tahun 2020	Keterangan
Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,4	4,94	
Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,5	1,67	
Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,05	1,13	
Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84	2,38	
TUJUAN 5 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR	INDEKS GINI	0,329	0,328	
Sasaran 18: Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	11.026.150	3.570.750	
	Jumlah barang (ton)	344.850.000	294.478.397	
Sasaran 19: Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	3	2	
Sasaran 20: Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	75,00	75,26	

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian Triwulan IV Tahun 2020	Keterangan
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	14.008,5	14.242,61	
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	575	477	
Sasaran 21: Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	533,56	468,89	
Sasaran 22: Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	87,50	90,21	
TUJUAN 6: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	75,85	75,25	
Sasaran 23: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26,89	50,72	
	Penurunan Emisi (juta ton CO ₂ eq)	12,94	24,41	
Sasaran 24: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	140	153,49	
Sasaran 25: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	69,01	66,46	
TUJUAN 7: MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	B (70,50)	B (70,50)	
Sasaran 26: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,00	76,60	

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian Triwulan IV Tahun 2020	Keterangan
Sasaran 27: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,50	82,00	
Sasaran 28: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3	

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Terdapat enam permasalahan utama pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2020, yaitu: lambannya transformasi ekonomi menuju sumber daya alam berkelanjutan, masih belum merata dan kuatnya daya saing sumber daya manusia, belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas, semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta belum tercapainya pelayanan publik yang optimal. Selain itu, terdapat permasalahan baru yang muncul dan berpengaruh besar terhadap pencapaian target prioritas dan sasaran pembangunan daerah di tahun 2020, yaitu adanya situasi bencana akibat pandemi COVID-19.

1. Belum Merata dan Kuatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Belum optimalnya daya saing SDM Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya serapan tenaga kerja, derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya peran pemuda, perempuan dan disabilitas dalam proses pembangunan, serta perlindungan sosial terutama untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum komprehensif. Faktor utama yang sangat mempengaruhi daya saing SDM adalah pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Sedangkan sektor-sektor lain yang juga menopang capaian daya saing antara lain berkaitan dengan keagamaan, sosial dan budaya.

Disamping itu, Provinsi Kalimantan Timur masih dihadapkan pada disparitas daya saing SDM antar kabupaten/kota. Maka dari itu, permasalahan daerah yang berkaitan dengan daya saing SDM di Kalimantan Timur lebih dititikberatkan pada disparitas daya saing antar daerah yang sangat tinggi. Terbatasnya lapangan usaha masyarakat yang berimplikasi pada fluktuasi pengangguran terbuka menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha perkebunan sawit dan pertambangan yang menjadi unggulan daerah belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum berhasil mengentaskan kemiskinan atau hidup pra-sejahtera.

Belum optimalnya integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja industri dan sektor ekonomi lainnya, menjadikan rendahnya penyerapan tenaga kerja produktif oleh dunia kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan gap kesejahteraan antar masyarakat, khususnya apabila dilihat dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Pembangunan yang tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh menimbulkan permasalahan baru di kantong-kantong wilayah miskin dan tertinggal. Kecepatan laju pembangunan di wilayah tertinggal akan semakin sulit dikejar karena pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan usaha ekonomi relatif terbatas.

Terkait dengan ketenagakerjaan bahwa perkembangan perluasan kesempatan kerja semakin kompleks dan dinamis, yang membutuhkan tenaga kerja bukan saja terlatih tetapi mampu bersaing di tingkat daerah, nasional dan internasional, maka diperlukan sertifikasi kompetensi bertaraf internasional yang mampu berkreasi untuk melakukan inovasi menghadapi tantangan dan mampu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi.

2. Lambannya Transformasi Ekonomi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Sampai saat ini sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang menopang perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan sektor industri hilir masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang lamban dan berdaya saing rendah, hal ini disebabkan karena proses hilirisasi memakan banyak waktu sehingga perekonomian Kalimantan Timur tidak bisa sertamerta beralih dari industri ekstraktif yaitu pertambangan dan penggalian.

Masih adanya kecenderungan investor kurang tertarik untuk membangun industri hilir salah satunya dipicu karena kebutuhan biaya produksi yang besar dan belum adanya kepastian hukum dari penerimanya menyebabkan transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Kalimantan Timur menjadi berjalan lamban.

Sementara dengan semakin berkurang dan habisnya pertambangan dan penggalian pada masa mendatang akan sangat beresiko terhadap kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Belum Meratanya Aksesibilitas dan Konektivitas dari dan ke Sentra Produksi

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas yang baik menuju pusat produksi dan pemasaran serta kawasan strategis provinsi. Hal ini disebabkan karena rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni serta ketenagalistrikan.

Dilihat dari kondisi jalan, tahun 2020 kondisi jalan mantap Provinsi hanya mencapai 69,77 persen. Kondisi yang hampir serupa terjadi di sektor transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang belum sepenuhnya memberikan dukungan untuk peningkatan layanan transportasi dalam mendukung mobilitas orang, barang dan jasa. Demikian pula pada transportasi darat yang masih memiliki fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang minim sehingga menyebabkan fatalitas kecelakaan semakin meningkat.

Rendahnya ketersediaan serta kualitas infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan, air bersih, sanitasi layak, perumahan dan permukiman yang layak huni dan tenaga listrik. Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan infrastruktur dasar adalah belum optimalnya akses air bersih masyarakat. Sementara itu, akses ketenagalistrikan juga belum memadai.

Persoalan mendasar pada perencanaan penataan ruang dikarenakan masih terdapatnya perbedaan pola ruang dan kurang harmonisnya dokumen perencanaan ruang antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota dan belum tersedianya rencana rinci tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota.

4. Semakin Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi

kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihimpun belum mampu menjadi acuan maupun rambu-rambu dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup jauh lebih mudah dilihat pada dampak yang diakibatkan, khususnya pada kesehatan masyarakat dan bencana hidrometeorologi yang terjadi. Selain itu, tutupan hutan dan lahan sebagai salah satu komponen dalam IKLH mengindikasikan bahwa apabila tutupan hutan semakin berkurang, maka wilayah tangkapan air akan menurun persoalan ini diikuti oleh tingginya kerentanan lahan. Tingginya erosi dan sedimentasi akibat perubahan tutupan hutan, berdampak pada pendangkalan pada alur perairan.

Tutupan lahan bervegetasi semakin berkurang disebabkan oleh semakin meluasnya kawasan galian tambang batu bara yang sebagian menimbulkan lubang-lubang bekas galian tambang, perluasan areal perkebunan dan perluasan kawasan permukiman.

5. Belum Tercapainya Pelayanan Publik yang Optimal

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari dua masalah pokok, yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; dan belum optimalnya kualitas demokratis daerah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa prinsip pokok *open government* yang belum berjalan optimal, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan integritas.

Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini menginginkan segala urusan lebih cepat, efektif, dan efisien. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan pelayanan publik dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk

berbenah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat. Tetapi, perubahan tersebut ternyata tidak dapat berubah seketika, diperlukan rentang waktu bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya faktor organisasi struktur organisasi, faktor aparat pelayan publik dan faktor sistem pelayan publik.

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

6. Belum Tercapainya Target Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 di Tahun 2020 Akibat Situasi Pandemi COVID-19

Situasi pandemi COVID-19 di tahun 2020 berdampak buruk terhadap perekonomian nasional dan daerah. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Kondisi ini direspon oleh pemerintah dengan menempuh kebijakan penyesuaian/rasionalisasi pada sebagian anggaran belanja daerah hingga 50%. Selain itu, juga dilakukan percepatan pengutamaan alokasi (*refocusing*) program/kegiatan yang diperuntukan bagi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Sebagai dampak dari pandemi dan usaha penanganannya, maka sebagian besar program/kegiatan prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 di tahun 2020 diperkirakan tidak mencapai target yang ditentukan.

Peristiwa Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak terhadap tatanan sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur. Pelemahan perekonomian, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan jumlah penduduk miskin dan peningkatan angka pengangguran menjadi permasalahan yang harus diantisipasi dalam program pembangunan daerah di tahun 2021. Terdapat sektor-sektor yang mampu bertahan dan bahkan mendapatkan peluang untuk berkembang pada masa pandemi ini seperti industri tekstil dan produk dari tekstil; kimia, farmasi dan alat kesehatan; makanan dan minuman;

elektronik; jasa telekomunikasi; dan jasa logistik. Sebaliknya terdapat pula sektor-sektor yang mengalami dampak buruk dari pandemi ini seperti pariwisata; konstruksi; transportasi darat, laut dan udara; pertambangan; keuangan dan otomotif.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema RKPD Kalimantan Timur tahun 2022.

Tabel II.95
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
01	Pendidikan	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Sekolah sebagai pelaksana program belum menerima pelimpahan wewenang secara formal (Surat keputusan penunjukan pelaksana program) untuk melaksanakan program tersebut;
			Diperlukan waktu untuk melakukan review APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam setiap pembayaran tahapan kegiatan;
			Rendahnya ketersediaan tenaga guru pengganti selama guru yang bersangkutan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi PTK;
			Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			yang dilakukan oleh Kemendikbud;
			Komitmen penentu kebijakan belum bersifat komprehensif, masih bersifat parsial, sehingga pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada Kabupaten Kota Layak Anak belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan;
			Penyalahgunaan pemanfaatan ruang terbuka hijau/taman oleh sebagian warga untuk kegiatan yang tidak relevan sehingga tidak mendukung penanaman nilai dan proses tumbuh kembang anak;
			Kasus perkawinan usia dini/anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kemiskinan sehingga menghambat program perlindungan dan pemenuhan hak anak;
			Akses (ketersediaan dan keterjangkauan) layanan perpustakaan masih terbatas karena berada di pusat kota dan jauh dari wilayah pedesaan. Di sisi lain, sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menjangkau layanan perpustakaan dalam jaringan (online) bagi masyarakat di

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			wilayah pedesaan juga belum tersedia secara memadai.
02	Kesehatan	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	<p>Indikator yang belum secara khusus mengarah pada jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya;</p> <p>Beberapa kegiatan bukan merupakan prioritas untuk mendukung pencapaian target program yang ingin dicapai;</p> <p>Realisasi program bergantung pada data dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial;</p> <p>Realisasi program menunggu Peraturan Gubernur terkait data sasaran masyarakat miskin dan kurang mampu yang menerima JKN.</p>
03	Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	<p>Jadwal pelaksanaan mengikuti agenda kegiatan dari institusi pusat sehingga institusi daerah hanya bersifat menunggu;</p> <p>Proses penetapan standarisasi infrastruktur olahraga belum selesai;</p> <p>Program dan kegiatan terkait peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda tidak terlaksana ditahun sebelumnya.</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
04	Tenaga Kerja	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	<p>Pendekatan pendidikan vokasional belum menjadi prioritas program untuk meningkatkan kompetensi SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja; kurikulum, modul belajar, sistem sertifikasi);</p> <p>Keterbatasan perangkat (keras/sarana dan prasarana) institusi penyelenggara pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.</p>
05	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	<p>Program dan kegiatan untuk pengembangan lembaga ekonomi pedesaan masih belum jelas peruntukan maupun penentuan lembaga ekonomi yang dibangun;</p> <p>Belum ada spesifikasi dan regulasi lembaga ekonomi yang dikembangkan sehingga kemungkinan salah sasaran menjadi lebih besar;</p> <p>Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian;</p> <p>Minimnya sarana dan prasarana sistem informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan;</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			<p>Program pembangunan desa dan kawasan masih terhambat oleh aksesibilitas;</p> <p>Cakupan luas geografi pedesaan dan kawasan di Kalimantan Timur masih sangat luas;</p> <p>Masih rendahnya SDM aparatur desa yang memahami administrasi pemerintahan sehingga menyulitkan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat di pelosok desa Kalimantan Timur;</p>
06	Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<p>Masih cukup banyak SOP perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>Belum tersosialisasinya dokumen pelayanan publik yang ada di setiap perangkat daerah;</p> <p>Beberapa perangkat daerah melakukan hosting lokasi yang berbeda-beda tidak dalam 1(satu) data center.</p> <p>Target untuk interkoneksi melebihi realisasi dapat terwujud dengan anggaran pemerintahan yang memadai</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			<p>Sistem Informasi di setiap perangkat daerah yang berbeda membutuhkan web service/API</p> <p>Pengintegrasian aplikasi masih menjumpai kendala berupa kurangnya SDM yang menguasai teknologi <i>framework</i>, bisnis proses yang belum matang, koordinasi dengan <i>stakeholder</i> mengenai penggunaan aplikasi serta terdapat ketidaksesuaian bahasa pemrograman dari aplikasi sebelumnya dan perlu dilakukan normalisasi terhadap basis data aplikasi. Disamping itu, masih terdapat instansi pemerintah yang menggunakan subdomain diluar subdomain kaltimprov.go.id</p>
07	Kesekretariat an	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	<p>Dari hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan hasilnya ke BPKP Pusat, yang menjadi permasalahan dalam menuju Level 3 adalah dari 5 unsur penilaian ada 3 unsur masih dalam level 2. Ketiga unsur tersebut 1) Peran Layanan, yaitu Audit Kinerja dan Jasa Konsultasi. 2) Pengelolaan SDM, yaitu Koodinasi SDM, Pegawai Yang Profesional dan Membangun Tim dan Kompetensinya. 3) Praktek</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			<p>Profesional, yaitu: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan KerangkaKerja Manajemen Kualitas.</p> <p>Belum terintegrasinya dalam satu sistem informasi proses pengawasan internal antara Inspektorat, PPNS dan Pimpinan Pemerintah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagai satu kesatuan pengawasan pegawai provinsi</p>
08	Koperasi dan UKM	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	<p>Daya saing produk yang masih rendah;</p> <p>Rendahnya akses pemasaran;</p> <p>Rendahnya akses keuangan;</p> <p>Rendahnya penguasaan teknologi informasi</p>
09	Pariwisata	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	<p>SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih belum terampil dan lengkap untuk mendukung pembentukan kawasan pariwisata andalan;</p> <p>Beberapa kegiatan aktraksi wisata di Kalimantan Timur masih belum terorganisasi secara professional untuk menarik daya wisatawan;</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			<p>Infrastruktur di beberapa destinasi pariwisata masih belum memadai menjadi obyek wisata serta belum optimalnya fasilitas keamanan bagi wisatawan yang berkunjung</p> <p>Aksesibilitas destinasi pariwisata di Kalimantan Timur masih kurang;</p> <p>Belum ada lembaga pengelola pariwisata di Kalimantan Timur yang profesional;</p> <p>Belum adanya regulasi dan kebijakan pengaturan dan pengelolaan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur (Rencana Induk Pariwisata Daerah);</p> <p>Belum adanya standar tarif keuangan terhadap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur.</p>
10	Perindustrian	Meningkatnya kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara	<p>Belum adanya sistem kendali produksi dan perdagangan sektor industri di Kalimantan Timur;</p> <p>Belum adanya pengembangan industri pengolahan berdasarkan ketersediaan produksi bahan baku sehingga industri di Kalimantan Timur bersifat industri bahan baku;</p> <p>Belum ada <i>mapping</i> dan <i>data base</i> produksi bahan baku yang menjadi suplai bagi industri;</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			<p>Belum adanya database SDM terampil dan terlatih yang siap diterima Dunia Usaha Dunia Industri di Kaltim;</p> <p>Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim;</p> <p>Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong dan kemudahan berinvestasi di Kalimantan Timur;</p> <p>Masih rendahnya dukungan terhadap pengembangan industri kreatif di Kalimantan Timur</p>
11	Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	<p>Disharmoni terhadap kebijakan dan regulasi investasi antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat;</p> <p>Infrastruktur pelabuhan ekspor masih belum lengkap;</p> <p>Masih cukup lamanya proses perizinan investasi sehingga mempengaruhi biaya perizinan investasi di daerah;</p> <p>Belum cukupnya ketersediaan energi untuk kebutuhan industri;</p> <p>Aksesibilitas antara sentra produksi dengan kawasan industri belum terkoneksi sehingga investor harus</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			mempersiapkan biaya pembangunan jalan produksi dan pengangkutan.
12	Pertanian	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	<p>Belum terkoneksi sentra produksi pertanian dengan kawasan industri pengolahan;</p> <p>Rendahnya kesesuaian lahan yang terdapat di RTRW;</p> <p>Ketersediaan infrastruktur irigasi yang belum terwakili di seluruh kawasan pertanian;</p> <p>Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga pertanian di Kalimantan Timur;</p> <p>Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di kawasan pertanian;</p> <p>Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produktivitas pertanian;</p>
13	Peternakan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	<p>Belum adanya penetapan kawasan peternakan di RTRW Kalimantan Timur;</p> <p>Rendahnya ketersediaan bibit dan bakalan ternak di Kalimantan Timur;</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			Belum ada program penguatan keterampilan kelembagaan peternak di Kaltim;
			Kemampuan permodalan peternak di Kaltim yang masih terbatas;
			Tingkat pengetahuan manajemen pemeliharaan ternak oleh peternak yang masih rendah;
			Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan keswan di Kaltim;
			Rendahnya penguasaan peternak terhadap teknologi pemanfaatan lahan peternakan sebagai kawasan pengembangan ternak;
			Masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan penguasaan teknologi terhadap peternak;
			Kurangnya jumlah aparatur peternakan seperti inseminator, paramedik veteriner dan petugas medik layanan keswan di Kaltim;
			Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan peternakan;
			Rendahnya populasi dan produktivitas ternak di kaltim menjadikan keterbatasan pemenuhan kebutuhan daging ternak (ruminansia).

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
14	Perkebunan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	<p>Rendahnya kesesuaian lahan perkebunan yang terdapat di RTRW;</p> <p>Masalah lahan bagi pengembangan kebun baru di perkebunan yang diakibatkan ketidaktuntasan kesesuaian RTRWP;</p> <p>Aksesibilitas kawasan perkebunan di Kaltim masih rendah;</p> <p>Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga perkebunan dan produk perkebunan di Kalimantan Timur;</p>
15	Perikanan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	<p>Belum diintegrasikannya Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (RZWP3K) ke dalam RTRW Provinsi sebagai kesatuan perencanaan tata ruang Kaltim;</p> <p>Belum optimalnya pengawasan UU <i>fishing</i> di wilayah kelautan yang menjadi hak pengelolaan suatu provinsi (0 – 12 mil);</p> <p>Belum optimalnya industri pengolahan perikanan di Kaltim sehingga hasil tangkapan perikanan dan kelautan langsung masuk di sistem perdagangan;</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			<p>Masih rendahnya pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi oleh nelayan-nelayan di Kaltim;</p> <p>Belum optimalnya pengawasan sistem kendali dan tata kelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kaltim;</p> <p>Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perikanan dan kelautan di Kaltim;</p> <p>Belum optimalnya program pemberdayaan nelayan-nelayan di Kaltim;</p> <p>Belum optimalnya peran UPTD Pembenihan dalam mendukung penyediaan benih dan produktivitas kawasan perikanan</p>
16	Kehutanan	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	<p>Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor kehutanan di Kaltim;</p> <p>Belum adanya regulasi dan kebijakan terhadap pengawasan dan pengendalian produksi dan perdagangan sumberdaya alam secara langsung dari perangkat daerah;</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			Aksesibilitas produksi dari kawasan produksi ke pusat pelayanan ekonomi belum terkoneksi dengan baik sehingga terjadi sistem perdagangan sumberdaya alam tidak keluar pada pusat pelayanan ekonomi yang telah ditetapkan
			Jumlah dan pengelolaan terminal produksi belum tertata dan terdokumentasi secara baik;
			Belum adanya sistem kendali bahan baku industri kehutanan untuk mendorong program hilirisasi industri kehutanan;
			Besarnya peran swasta dan masyarakat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi tanpa bisa diimbangi peran perangkat daerah dalam mendukung kegiatan tersebut;
			Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang dibuat perangkat daerah sebagai penanggung jawab kawasan;
			Perencanaan program kerja perangkat daerah belum berbasis geospasial, geoekonomi dan geososiokultur sehingga potensi dan pengelolaan kawasan belum optimal;
			Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			pengendalian sistem tata kelola produksi kawasan.
17	Keuangan	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	<p>Belum adanya regulasi dari perangkat daerah yang berbasis pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas ekonomi di kawasan produksi sehingga masih belum terdata potensi penerimaan daerah yang ada di Kaltim;</p> <p>Belum adanya <i>database</i> produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang menjadi potensi penerimaan daerah;</p> <p>Perencanaan program kerja perangkat daerah bidang pendapatan belum berbasis geospasial dan geoekonomi belum optimal dalam mengeksplorasi potensi pendapatan daerah;</p> <p>Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan daerah;</p> <p>Jumlah UPTD Pendapatan sebagai pelaksana teknis masih kurang optimal dari sisi kuantitas dan kualitas;</p> <p>Program kegiatan yang direncanakan hanya bersifat rutinitas sehingga inovasi untuk menemukan sumber pendapatan baru masih belum maksimal;</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			<p>Program menemukan sumber pendapatan baru tidak dilaksanakan pada tahun sebelumnya;</p> <p>Faktor kekurangan SDM di tingkat UPTD menyebabkan upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan retribusi dan pajak belum maksimal;</p> <p>Belum adanya revisi regulasi dan kebijakan tentang keterbaruan struktur pendapatan daerah Kalimantan Timur.</p>
18	Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahannya	<p>Disharmoni kebijakan antara pemerintah daerah dengan perusahaan negara yaitu PLN dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Kaltim;</p> <p>Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik masih agak sulit menembus di daerah pedalaman;</p> <p>Belum adanya regulasi baik di secara nasional maupin di daerah terhadap mendorong pemanfaatan energi terbarukan</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			khususnya pada sektor limbah perkebunan kelapa sawit.
19	Lingkungan Hidup	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	<p>Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>Masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas dalam pengelolaan sumber daya alam;</p> <p>Keterbatasan database serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terkait dengan minimnya anggaran.</p>
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahannya	<p>Kondisi geografi dan topografi Kaltim yang luas dan bervariasi;</p> <p>Masih kecilnya dana pembangunan (APBD) Kaltim sehingga belum optimalnya peningkatan aksesibilitas wilayah;</p> <p>Masih rendahnya pola kesesuaian ruang antara kawasan produksi dengan</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
			<p>kawasan lain di dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>Sarana dan prasarana pembangunan aksesibilitas daerah terkendala dengan harga bahan baku yang mengikuti keberadaan lokasi daerah pembangunan sehingga biaya pembangunan menjadi mahal;</p> <p>Disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan jalur transportasi misalnya pelabuhan dan bandara;</p>
		<p>Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahannya</p>	<p>Program dan kegiatan untuk konektivitas antar kawasan harus dapat disinkronkan dengan perangkat daerah yang lain sebagai pengelola kawasan produksi;</p> <p>Masih terdapat disharmoni regulasi kebijakan antar pengelola kawasan sentra produksi sehingga belum terbangun konektivitas;</p> <p>Aktivitas kawasan produksi yang relatif bergerak secara parsial;</p> <p>Topografi dan geografi Kaltim yang sangat luas;</p> <p>Belum optimalnya dukungan pembiayaan pembangunan antar kawasan dari Kabupaten/Kota di Kaltim</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
		<p>Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahannya</p>	<p>Pengimplementasian program menjadi ke arah penanganan banjir sehingga menjadi program kurang tepat sasaran;</p> <p>Disharmoni kebijakan antar perangkat daerah dalam upaya mengkonektivitaskan kawasan dalam upaya pengelolaan SDA salah satunya ketersediaan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi;</p> <p>Keterbatasan lahan pembangunan infrastruktur sumber daya air;</p> <p>Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penyedia air baku bagi masyarakat;</p> <p>Pelaksanaan operasi pemeliharaan yang belum optimal terhadap infrastruktur sumber daya air yang ada;</p> <p>Budaya masyarakat di Kaltim yang memanfaatkan air sungai, danau dan rawa secara langsung;</p>
		<p>Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata</p>	<p>Masih adanya ketidaksesuaian Perda RTRW antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama pada struktur dan pola ruang;</p> <p>Tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan yang terstruktur, akurat, dan cepat</p>

NO	URUSAN	SASARAN	MASALAH
		ruang/kewilayah an	<p>akibat dari tidak lengkapnya Rencana Rinci Tata Ruang KSP yang berkekuatan hukum;</p> <p>Masih tingginya perubahan alih fungsi lahan dan inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang;</p> <p>Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan penataan ruang masih rendah</p>
21	Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayah an	<p>Belum ada <i>mapping</i> dan <i>data base</i> penanganan dan penataan kawasan kumuh di beberapa kota di Kaltim;</p> <p>Belum adanya peran kesadaran masyarakat dalam menata pemukiman;</p> <p>Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong penataan pemukiman di kota agar tidak berubah menjadi kawasan kumuh;</p> <p>Pembangunan dan penataan kawasan pemukiman akan beriringan dengan tingkat ekonomi masyarakat.</p>

2.6.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur merupakan isu yang telah diangkat dalam RPJMD tahun 2019-2023 dan Hasil evaluasi RKPD 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia erat kaitannya dengan tingkat pendidikan. Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMP ke Bawah dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma/Universitas. Masih tingginya proporsi penduduk pada kelompok tamatan SMP ke bawah untuk usia bekerja perlu menjadi perhatian serius oleh Provinsi Kalimantan Timur dan hal tersebut mencerminkan bahwa daya saing sumber daya manusia di Kalimantan Timur perlu ditingkatkan.

Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah ini. Pada tahun 2020 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SMP ke bawah tercatat 44,99 persen meningkat dibanding tahun 2019 yang mencapai 43,67 persen. Sementara persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma/Universitas sekitar 17,02 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 16,67 persen. Adapun penduduk yang bekerja dengan modal ijazah SMA dan sederajat berkisar 37,99 persen di tahun 2020 menurun dari tahun 2019 yang mencapai 38,13 persen.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Hal utama yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan sarana pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, juga perlu dilakukan penurunan kesenjangan kualitas Lembaga pendidikan dan tenaga pendidik, baik melalui peningkatan jumlah maupun pemenuhan kualitas dan standar kompetensi tenaga pendidik.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia diutamakan untuk penyediaan tenaga-tenaga terampil. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama di Kalimantan Timur. Hal tersebut

dilakukan melalui pengembangan lembaga pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan tenaga sektor pertanian dalam arti luas dan industri hilir pengolahan. Tentunya hal ini tidak lepas dari besarnya penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian pada tahun 2020 sebesar 20,48 persen. Sedangkan untuk sektor industri pengolahan diharapkan menjadi salah satu sektor utama yang akan menjadi jalan bagi transformasi ekonomi di Kalimantan Timur melalui hilirisasi industri. Sampai saat ini kualifikasi sumber daya manusia untuk sektor ini masih terbatas.

Selain melalui pendidikan formal, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan melalui pendidikan non formal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja dengan orientasi industri pertanian dan hasil pertanian dalam arti luas, serta menumbuhkan kewirausahaan baru, menjadi bagian penting dalam menjawab lemahnya daya saing melalui pendidikan non formal.

Keadilan pendidikan ini juga disertai dengan keadilan kesehatan dan jaminan sosial, agar setiap warga Kalimantan Timur dapat memperoleh kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur, maka upaya pemenuhan SPM pada bidang kesehatan menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, pengintegrasian nilai keagamaan dan nilai budaya dalam Lembaga pendidikan juga menjadi agenda utama dalam memenuhi sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kelompok-kelompok khusus, seperti perempuan, disabilitas, warga miskin, serta pemuda, menjadi fokus perhatian dalam pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

2. Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan ke Sumber Daya Alam Terbarukan secara Vertikal maupun Horizontal

Produksi batubara, minyak bumi dan gas bumi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Produksi batubara yang semula sebesar 243,2 juta ton di tahun 2019 menjadi sebesar 187 juta ton pada tahun 2020, yang menunjukkan penurunan sebesar 22,78 persen. Produksi minyak bumi yang semula sebesar 20,83 juta barrel di

tahun 2019 menjadi sebesar 14,38 juta barrel pada tahun 2020. Produksi gas bumi yang semula 240,83 juta MMBTU di tahun 2019, menjadi sebesar 156,29 juta MMBTU di tahun 2020. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa Kalimantan Timur harus secara sungguh-sungguh melakukan transformasi dari sumber daya alam tak terbarukan menjadi sumber daya alam terbarukan.

Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbarukan dilakukan melalui optimasi produktivitas kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Pengembangan sentra perikanan modern dan pariwisata pada Kawasan danau Jempang, Semayang dan Melintang di Daerah Aliran Sungai Mahakam, dan kawasan sepanjang pesisir timur, dapat menjadi potensi yang besar dalam memberikan kontribusi perekonomian makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan maka peran UMKM harus terus ditingkatkan dalam perekonomian daerah. Hingga saat ini jumlah UMKM di Kalimantan Timur 279.721 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.080.181 orang. Permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian daerah antara lain daya saing produk yang masih rendah, rendahnya akses pemasaran, rendahnya akses keuangan, serta masih rendahnya penguasaan teknologi informasi. Berkaitan dengan itu, maka upaya-upaya untuk menyelesaikan hal diatas perlu untuk menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur wilayah

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap hanya mencapai 69,77 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan, kondisi baik mencapai 408,38 km, kondisi sedang mencapai 216,10 km, kondisi rusak ringan mencapai 101,48 km, dan kondisi rusak berat mencapai 169,13 km. Tingginya kondisi jalan rusak di atas mempengaruhi kuantitas angkutan barang dan manusia terutama aktifitas barang dan manusia dari pusat-pusat produksi ke outlet.

Berkaitan dengan infrastruktur ketenagalistrikan, Kalimantan Timur telah menjangkau sebanyak 1.040.823 KK berlistrik. Meskipun demikian, rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur masih sebesar 90,21 persen. Masyarakat yang belum terlayani jaringan ketenagalistrikan ini terutama pada wilayah-wilayah pedalaman. Untuk mengatasi hal ini maka penyediaan tenaga listrik dengan mengutamakan penyediaan sumber listrik berbasis tenaga surya menjadi fokus utama pemerintah.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Pengelolaan aktifitas perekonomian yang bersifat eksploitatif pada sumber daya alam tak terbarukan menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur pada tahun 2020, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 75,25.

Potensi hutan alam yang cukup luas di Kalimantan Timur merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Saat ini Kalimantan Timur telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan.

Pengembangan ekonomi produktif dari pertanian dalam arti luas difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, serta pada wilayah yang potensial dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah pertanian, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK.

Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada kondisi yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan nilai reformasi birokrasi dengan predikat B (69,50) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat BB (78,38%). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan, terkait optimalisasi akuntabilitas kinerja baik secara administratif maupun sosial.

Sebagai Provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot karena memiliki peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan kebocoran pendapatan daerah. Pemerintahan Daerah harus mengantisipasi adanya penyimpangan dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik, dan memperkuat profesionalitas pemerintahan.

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur juga perlu meningkatkan integritas diri dan integritas lembaga menuju pada wilayah/zona bebas korupsi. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan melihat berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi, pemerintahan yang profesional dan akuntabel menjadi isu penting untuk diprioritaskan.

6. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial

Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini ditandai pencapaian angka laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,27%. Perlambatan disebabkan kontraksi pada sektor pertambangan dan perlambatan kinerja pada sektor konstruksi. Hal ini tentunya akan berdampak pada penurunan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, hal ini perlu menjadi fokus utama pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi Kalimantan Timur pasca Pandemi COVID-19.

Dampak lainnya dari pandemi COVID-19 adalah peningkatan terhadap kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Timur. Dimana terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang mendukung industri pariwisata. Selain itu, pemutusan hubungan kerja juga dilakukan akibat menurunnya aktivitas perekonomian baik di Kalimantan Timur maupun wilayah atau negara tujuan utama ekspor Kalimantan Timur.

Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pola hubungan sosial masyarakat. Kebijakan pembatasan interaksi antara masyarakat diperkirakan akan terus berlangsung sampai akhir tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, menyediakan jaring pengaman sosial dan memfasilitasi aktivitas perekonomian yang tetap bisa produktif ditengah pandemi. Berkaitan dengan fasilitasi aktivitas perekonomian, maka upaya untuk menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, terutama untuk UMKM perlu untuk menjadi perhatian khusus.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, prediksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja makro ekonomi yang direncanakan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 masih memberikan guncangan yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Akibatnya perekonomian global dan nasional mengalami kontraksi yang cukup parah pada tahun 2020, dan hingga triwulan I tahun 2021 juga masih memberikan pengaruh yang sangat besar. Perekonomian negara berkembang diperkirakan masih tertahan akibat peningkatan beban kasus COVID-19, hambatan untuk vaksinasi, dan penarikan dukungan. Kondisi ini membuat *output* global diprediksi masih 2 persen di bawah proyeksi pra-pandemi. Sekitar dua pertiga dari ekonomi pasar negara berkembang juga masih belum menutupi kerugian pendapatan per kapita tahun lalu. Tekanan pandemi COVID-19 ini terutama paling terasa di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal.

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan I 2021 masih berada dalam tren perbaikan meskipun sedikit tertahan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan permintaan global yang kembali menurun di tengah harga berbagai komoditas utama yang masih tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I 2021 tercatat -2,96% (yoy), sedikit tertahan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -2,83% (yoy). Dari sisi global, permintaan terhadap batu bara berkontraksi di tengah harga yang masih tinggi. Sementara itu, permintaan terhadap komoditas berbasis kelapa sawit masih tumbuh meningkat dengan harga yang juga tinggi. Peningkatan harga berbagai komoditas utama Kaltim mendorong kuatnya kinerja PMTB terutama pada lapangan pertambangan dan industri pengolahan khususnya industri makanan.

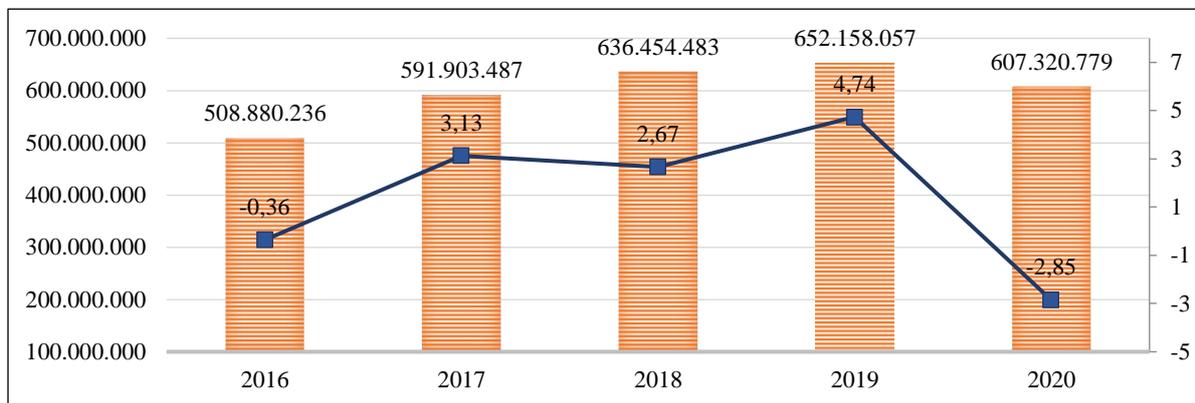
3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2022

A. Kinerja Ekonomi Daerah

1) Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi ekonomi Kalimantan Timur digambarkan melalui penciptaan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat kondisi lima tahun terakhir, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan. Tahun 2016 nilai PDRB Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp 508,88 triliun, nilai ini terus mengalami peningkatan dengan puncak tertinggi pada Tahun 2019 sebesar Rp 652,16 triliun, sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 607,32 triliun.

Demikian pula dengan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang mengalami kontraksi hingga 0,36 persen pada Tahun 2016, perlahan mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Pada Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 4,74 persen namun pada Tahun 2020 kembali mengalami kontraksi yang paling terendah dalam lima Tahun terakhir sebesar -2,85 persen yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia termasuk Kalimantan Timur.

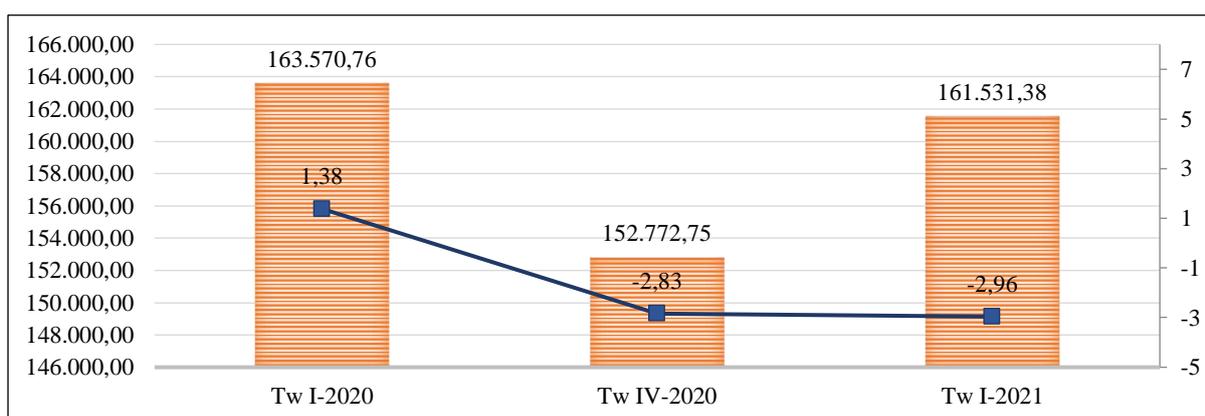


Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar III.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

Kondisi perekonomian Kalimantan Timur mengalami tren perbaikan perekonomian pada triwulan I 2021 bersumber dari perbaikan di sisi produksi dan sisi permintaan pada lapangan usaha utama yang memiliki *share* tinggi terhadap perekonomian. Lapangan usaha utama ekonomi Kalimantan Timur yakni pertambangan dan konstruksi mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya. Selain itu, lapangan usaha pendukung seperti perdagangan juga mencatat perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, tren perbaikan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja lapangan usaha utama lainnya yakni industri pengolahan dan pertanian yang mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan pangasanya, ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan I 2021 masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan.



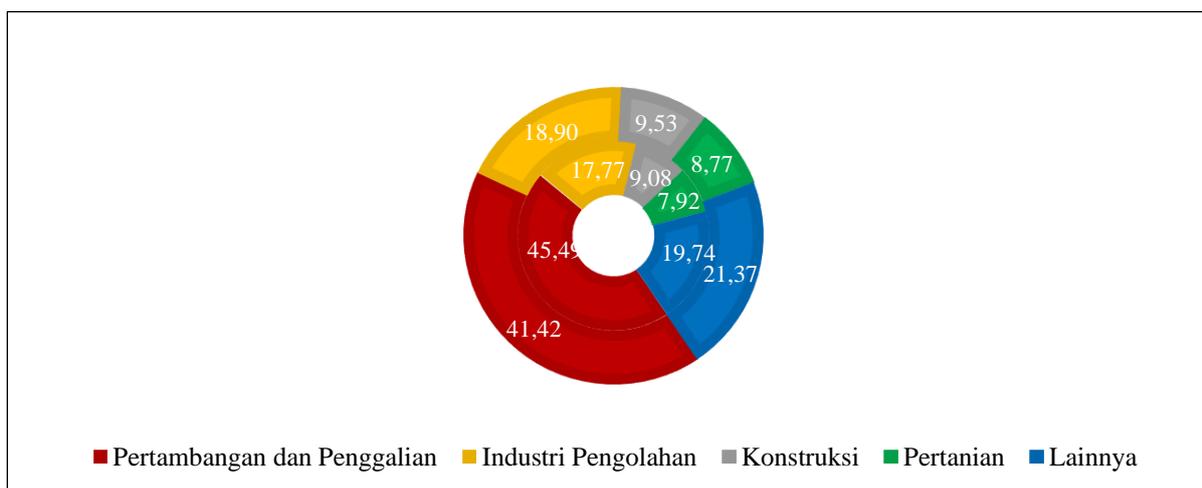
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar III.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2021 Terhadap Triwulan I-2020

2) Struktur PDRB

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 41,42 persen dan industri pengolahan sebesar 18,90 persen. Kemudian disusul sektor konstruksi yang kontribusinya meningkat menjadi sebesar 9,53 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian yang diharapkan mampu menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kalimantan Timur, hanya memberikan kontribusi sebesar 8,77 persen, namun kontribusinya meningkat dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 7,92 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar III.3

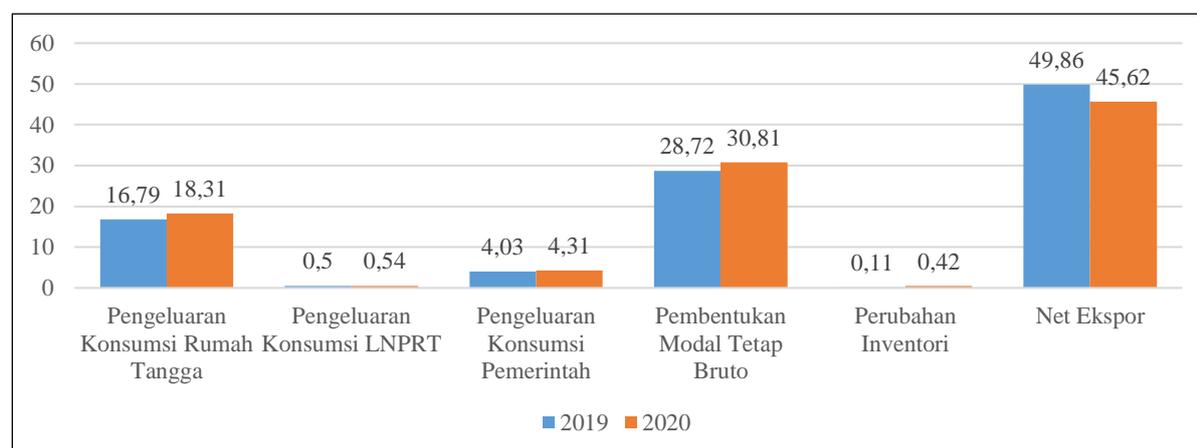
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020 (%)

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat dinamika struktur perekonomian Kalimantan Timur yang berada ditengah situasi pandemi COVID-19. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan oleh tren penurunan harga minyak dunia dan batubara, serta masih rendahnya permintaan hasil pertambangan dari negara tujuan ekspor Kalimantan Timur. Namun, lapangan usaha ini masih menjadi penyangga utama perekonomian Kalimantan Timur, kinerjanya tidak sepenuhnya buruk karena adanya peningkatan kinerja *lifting* migas di Kaltim yang bersumber baik dari produksi sumur-sumur eksisiting, hasil produksi sumur-sumur baru dan hasil *artificial lift*.

Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur. Kontribusinya pada

Tahun 2020 mencapai 18,90 persen, meningkat sebesar 1,10 persen jika dibandingkan kontribusi Tahun 2019. Perbaikan kinerja industri pengolahan bersumber dari aktivitas produksi kilang minyak Pertamina *Refinery Unit* (RU) V Balikpapan yang kembali beroperasi setelah mengalami *temporary shutdown* pada April-Mei 2020, serta perbaikan kinerja industri petrokimia (terutama industri metanol).

Sedangkan struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2021 masih relatif sama dengan struktur pada triwulan-triwulan sebelumnya. Pada Triwulan I-2021, terdapat empat lapangan usaha utama yang mendominasi yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan dengan peranan sebesar 43,02 persen, Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 18,57 persen, Konstruksi dengan peranan sebesar 9,29 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 8,77 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

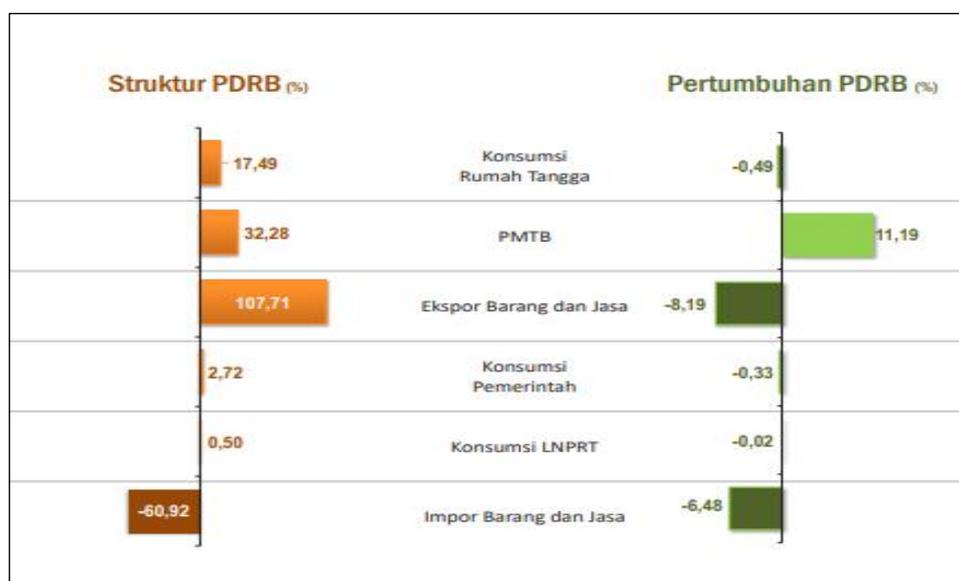
Gambar III.4

Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan 2020 (%)

Distribusi PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor dengan peranan sebesar 45,62 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,81 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 18,31 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,31 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga sebesar 0,53 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, menurunnya aktivitas perdagangan Kalimantan Timur menyebabkan penurunan porsi terhadap pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran, meskipun masih menjadi penyumbang terbesar sebesar 45,62 persen. Menurunnya permintaan negara

tujuan terhadap migas dan batubara mengakibatkan perubahan pada struktur perekonomian Kalimantan Timur.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2021 dibandingkan dengan Triwulan I-2020 mengalami kontraksi hingga mencapai 2,96 persen (yoy). Jika dilihat lebih rinci, sebagian besar komponen PDRB Menurut Pengeluaran mengalami kontraksi dibandingkan dengan periode waktu yang sama di tahun lalu (yoy). Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan satu-satunya komponen yang memberikan andil positif dan tumbuh sebesar 11,19 persen. Salah satu faktor penyebab kenaikan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah adanya kenaikan investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Namun, pertumbuhan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang kontribusinya sebesar 32,28 persen terhadap total PDRB belum mampu meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur Triwulan I-2021.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

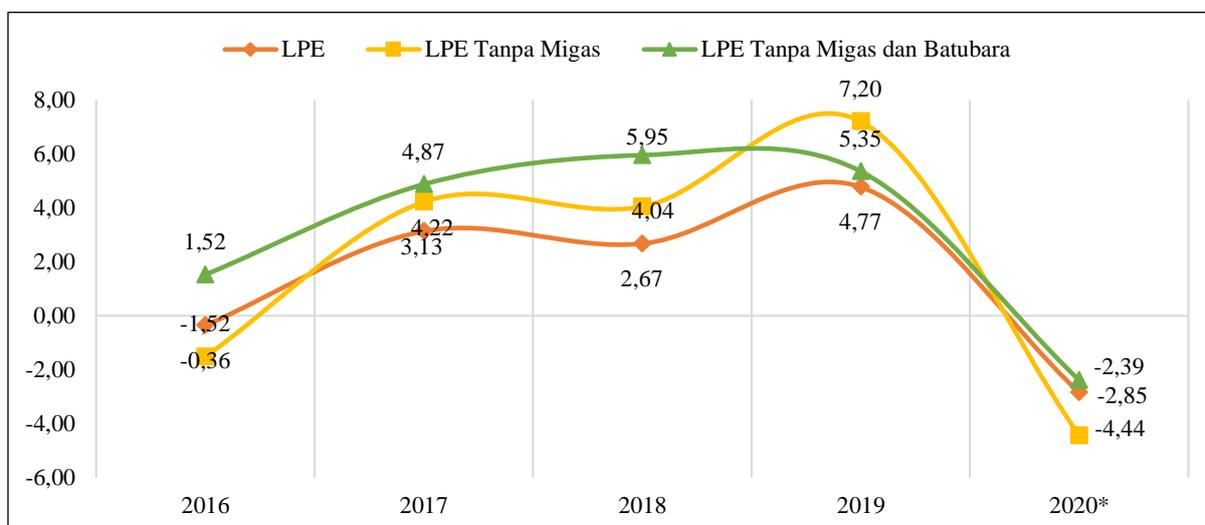
Gambar III.5

Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I - 2021 (%)

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tren pertumbuhan negatif di Kalimantan Timur pada Tahun 2015 dan 2016 akan terulang pada Tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia memicu kontraksi kinerja perekonomian Kalimantan Timur yang bersumber dari konsumsi masyarakat yang menurun seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat terutama pada awal merebaknya pandemi COVID-19. Selain itu, terbatasnya permintaan dari negara tujuan ekspor

utama yang mengalami *lockdown* serta penurunan harga komoditas utama ekspor Kalimantan Timur. Pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi di



Kalimantan Timur tercatat sebesar negatif 2,85 persen, turun tajam setelah sebelumnya di Tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 4,77 persen.

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar III.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,44 persen, menurun dibandingkan Tahun 2019. Adapun kinerja perekonomian tanpa migas dan batubara juga mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen di Tahun 2020, atau mengalami perlambatan dibandingkan Tahun 2019.

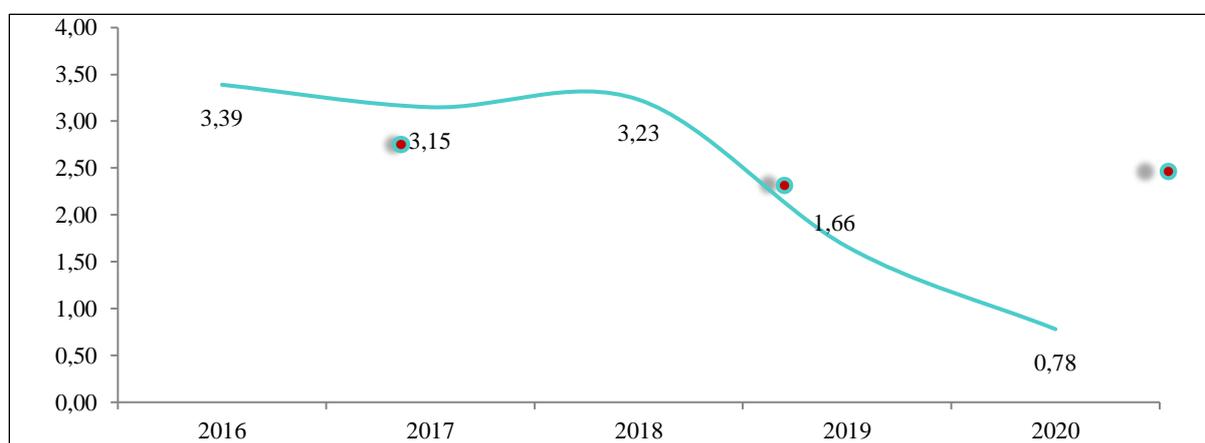
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2020 tercatat -2,96 persen, sedikit tertahan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -2,83 persen. Lapangan usaha utama seperti pertambangan, konstruksi, dan perdagangan menjadi sumber berlanjutnya tren perbaikan ekonomi Kalimantan Timur meskipun tertahan oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian yang mencatat kontraksi lebih dalam. Lapangan usaha pertambangan tercatat mengalami perbaikan yang didorong oleh produksi batu bara yang tumbuh meningkat, baik perusahaan PKP2B maupun IUP. Selain itu, faktor harga yang kian membaik juga menjadi salah satu faktor pendorong produksi tambang batu bara Kaltim terutama untuk tambang jenis IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang relatif lebih elastis terhadap pergerakan harga komoditas. Sementara itu, lapangan usaha konstruksi juga mengalami perbaikan yang didorong oleh kembali menggeliatnya aktivitas konstruksi terutama swasta. Perbaikan ekonomi

Kaltim juga turut ditopang oleh membaiknya kinerja lapangan usaha perdagangan sejalan dengan harga komoditas utama sebagai *source of income* yang masih berada pada level tinggi. Namun demikian, perbaikan lebih lanjut tertahan oleh kontraksi yang lebih dalam pada lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian.

4) Inflasi

Hidup berdampingan dengan Pandemi COVID-19, menjadikan konsumsi masyarakat lesu akibat perekonomian yang tidak stabil serta disebabkan menurunnya pendapatan. Tekanan inflasi Kalimantan Timur Tahun 2020 tercatat rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Tekanan inflasi Kalimantan Timur yang lebih rendah pada Tahun 2020 ini dipengaruhi terutama oleh deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi khususnya angkutan udara akibat pembatasan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan COVID-19.

Jika melihat dari tingkat inflasi kelompok pengeluaran, inflasi terjadi pada kelompok Perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,5 persen dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,82 persen. Secara andil inflasi, peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau utamanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan pada momen libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan seiring dengan preferensi masyarakat untuk memilih emas perhiasan sebagai instrumen investasi yang relatif stabil dan aman akibat masih berlanjutnya ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar III.7

Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (%)

5) Investasi

Nilai investasi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp 33,81 triliun menjadi Rp 35,62 triliun yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp 22,67 triliun dan Penanaman Modal Asing sebesar 12,95 triliun. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi tertinggi adalah pertambangan, tanaman pangan & perkebunan, serta listrik, gas dan air.

B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan 2022

1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur;
- b) Perang dagang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat-Republik Rakyat Tiongkok;
- c) Berakhirnya kontrak jangka panjang dengan *Western Buyer Extension* (WBX);
- d) Tren harga batubara dan CPO diperkirakan akan terus mengalami perlambatan;
- e) Tren penurunan harga minyak dunia masih berlanjut;
- f) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
- g) Kondisi pandemi/pasca pandemi COVID -19 (*Coronavirus Disease 19*).

2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2021 dan 2022 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a) Momentum dipilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di Kaltim serta inisiasi pembangunan sarana dan prasarana IKN baru;
- b) Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/*Refinery Development Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina)* dan beberapa proyek swasta lain;
- c) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya;
- d) Berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah yang sempat tertunda di Tahun 2020;
- e) Beroperasinya sumur migas baru akan mendorong kinerja industri pengolahan LNG dengan adanya peningkatan *supply* bahan baku;
- f) Berlanjutnya pengerjaan proyek strategis (RDMP RU V, Jembatan Pulau Balang);
- g) Pemberian insentif kepada perusahaan yang memberlakukan hilirisasi batubara;
- h) Optimalisasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik;
- i) Optimalisasi sumur-sumur migas baru dan optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- j) Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2022

Tema pembangunan Tahunan nasional pada RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. dengan fokus pembangunan pada pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan. Adapun sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel III.1 sebagai berikut.

Tabel III.1
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022

Uraian		Tahun 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 6,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 - 6,2
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0
4	Rasio Gini	0,376 - 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,44 - 73,48
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8 - 27,1
7	Nilai Tukar Petani	102 - 104
8	Nilai Tukar Nelayan	102 - 105

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2021

Sedangkan khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, dalam dokumen Rancangan RKP Tahun 2022, ditargetkan mencapai Laju Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 4,9-5,9 persen, tingkat kemiskinan 5,90 persen, dan tingkat pengangguran 6,00 persen.

3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2020 hingga triwulan I tahun 2021 masih mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sempat berada level tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 4,77 persen, sedangkan pada Tahun 2020 harus mengalami perlambatan sebesar 2,85 persen dan pada triwulan I tahun 2021 masih mengalami perlambatan 2,96 persen. Perlambatan disebabkan kontraksi pada sektor pertambangan dan perlambatan kinerja pada sektor konstruksi. Pada sektor pertambangan, disebabkan adanya kebijakan *lockdown* akibat pandemi COVID-19 di negara tujuan ekspor batubara (seperti Tiongkok dan India) memberikan dampak terhadap berkurangnya permintaan. Perlambatan lebih dalam tertahan oleh kinerja industri pengolahan yang meningkat (pupuk dan minyak).

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2021 dan 2022 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru.

A. Sasaran Ekonomi Makro

Pada Tahun 2022, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian		Target 2021	Target 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,00	3,5±1
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,75
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	6,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	76,75	77,25
5	Indeks Gini	0,328-0,327	0,308

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Pada Tahun 2021, masa pemulihan dari situasi pandemi, berbagai aktivitas ekonomi beberapa lapangan usaha seperti penyediaan akomodasi makan minum, transportasi, perdagangan, dan pertambangan penggalan diharapkan mulai menggeliat sehingga perekonomian Kalimantan Timur diharapkan dapat mengalami perbaikan dengan pertumbuh pada -1,00 persen. Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 3,5±1 persen.

Capaian tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur Tahun 2020 masih mencapai 6,10 persen atau berada dibawah rata-rata capaian nasional. Pada Tahun 2021 dan 2022 tingkat kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan,

terutama dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas angkatan kerja dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada Tahun 2020 mengalami penurunan setelah satu dekade menunjukkan tren meningkat. IPM Kalimantan Timur Tahun 2020 hanya sebesar 76,24 atau mengalami penurunan sebesar 0,37 poin dibanding Tahun 2019. Hal ini terutama dipicu oleh penurunan pengeluaran per-kapita/tahun disesuaikan sebesar 5,11 persen. Pada Tahun 2021 diharapkan IPM dapat meningkat menjadi 76,75 dan Tahun 2022 sebesar 77,25 dengan upaya peningkatan pada seluruh dimensi pembangunan manusia.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

1) Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 3,5±1 Persen

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Adapun target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat ditempuh melalui:

- a) Pengembangan kawasan-kawasan strategis, guna mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berbasis pada sektor-sektor unggulan masing-masing. Dimana dalam mendukung proses pengembangan sekaligus akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM (pendidikan vokasi dan menengah), kemudahan berusaha dan insentif investasi. Hal ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkualifikasi serta untuk mendorong investasi dalam negeri. Sehingga penciptaan nilai tambah dari kawasan strategis untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.
- b) Penguatan daya saing infrastruktur dasar, mencakup konektivitas, energi, dan air baku. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas sentra produksi Kawasan Industri dan Outlet serta penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan energi dan air baku sebagai bagian dari mendukung pengembangan kawasan strategis dalam beroperasional terutama untuk meningkatkan produktivitasnya.

2) Strategi Pemerataan

Mempercepat pengurangan kesenjangan (antar individu dan antar wilayah) melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan mendorong sektor-sektor berbasis ekonomi kerakyatan terutama di daerah 3T.

3) Strategi Stabilisasi Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19. Stabilisasi perekonomian daerah yang diperkirakan masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 juga menjadi fokus utama pembangunan daerah di Tahun 2022. Stabilisasi ekonomi Kalimantan Timur menjadi fokus perhatian dan diyakini dapat tercapai apabila didukung dengan strategi pembangunan ekonomi daerah yang tepat. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dari berbagai komponen permintaan yaitu:

- a) Optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga. Upaya untuk pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui pengendalian konsumsi rumah tangga agar tetap terjaga. Pola pembelanjaan konsumsi rumah tangga diarahkan lebih kepada produk-produk yang telah ada atau disediakan oleh penyedia barang/jasa yang berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentunya harus didukung oleh kemampuan penyedia barang/jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah dapat mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM, serta koperasi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dimaksud. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi daerah yang mampu menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke Kalimantan Timur.
- b) Menjaga arus investasi ke daerah. Pemberian insentif khusus bagi rencana investasi pada sektor-sektor usaha yang bersifat padat karya mampu menyerap banyak tenaga kerja (*labour intensive*). Hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen investor untuk memberikan peluang/kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat lokal.

Pemerintah perlu mendorong realisasi investasi pada sektor-sektor usaha dimaksud melalui perbaikan iklim investasi di daerah, khususnya dari sisi tata kelola perizinan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan kompetensi dari tenaga kerja lokal untuk dapat memenuhi kualifikasi kerja yang dibutuhkan.

- c) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Belanja pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah diarahkan untuk lebih banyak menggunakan produk yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur. Sebagian besar pekerjaan konstruksi dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur harus lebih mengutamakan pemanfaatan bahan baku yang telah disediakan oleh pasar lokal. Pemerintah perlu menjamin tersedianya bahan baku yang dibutuhkan melalui pengelolaan rantai suplai/pasok yang informatif dan berkualitas. Selain itu, dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal di daerah, maka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi dan seremonial berskala menengah dan besar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, akan lebih banyak dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur.
- d) Meningkatkan surplus perdagangan antar wilayah. Aktivitas perdagangan antar wilayah perlu ditingkatkan dengan mengutamakan pemasaran pada produk-produk lokal hasil olahan yang telah menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Beberapa komoditas unggulan, baik yang berasal dari sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan dan pertambangan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di daerah, diupayakan untuk tidak diekspor dalam bentuk mentah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan batasan impor terhadap produk-produk dari luar daerah yang menjadi kompetitor bagi produk-produk lokal, dengan tetap memperhatikan kebutuhan ketersediaan suplai barang di daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah pada Tahun 2022 dilakukan dengan asumsi sebagai berikut :

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU, DAK dan DID diasumsikan sama dengan Tahun 2021;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Kalimantan Timur, terus dilakukan pengembangan dan dilakukan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2022. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem informasi data mengenai objek wajib pajak, manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan dan *perluasan* obyek, intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan aset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan
- 5) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 pemerintah Kalimantan Timur terus memunculkan inovasi sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna meningkatkan PAD. Adapun beberapa kegiatan intensifikasi yang dilakukan, antara lain:

A. Bidang Pajak Daerah

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan:
 - a) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - b) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.

- c) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
 - d) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - e) Penyediaan layanan pembayaran PKB yang membarikan kemudahan pada wajib pajak tanpa harus ke kantor bersama Samsat melalui E-Samsat Kaltim Delivery dan E-Samsat Bhabinkamtibmas yang bekerjasama Polda Kalimantan Timur.
 - f) Menerbitkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB).
 - g) Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan di seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
- a) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang perekonomian khususnya fiskal terkait kendaraan bermotor dan suku cadang serta pembiayaan, sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli kendaraan baru.
 - b) Hasil evaluasi perkembangan potensi obyek pajak dan hasil evaluasi realisasi penerimaan Tahun sebelumnya dan tahun berjalan mengalami perbaikan.
 - c) Kecenderungan masyarakat Kaltim membeli kendaraan *Low Cost Green Car* (LCGC) baru yang harganya lebih terjangkau.
 - d) Mendorong perusahaan *leasing* lebih selektif memilih calon pembeli yang lebih produktif.
 - e) Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro pada Tahun 2022 diperkirakan akan stagnan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan di sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - f) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - g) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang merk termasuk badan *leasing*.
 - h) Melakukan kegiatan penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.

- i) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem *online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - j) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Bapenda.
 - k) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
- a) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2011.
 - b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - c) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - d) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - e) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - f) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala, termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan kebijakan:
- a) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - c) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.

B. Bidang Retribusi Daerah

- 1) Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.

- 2) Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.
- 3) Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- 5) Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- 6) Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan proyeksi tahun 2021 secara umum dapat dilihat pada tabel III.3. Pada kurun waktu dari tahun 2017 hingga 2020 rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 8,66 persen. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah hingga tahun 2021 masih mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 pendapatan daerah tahun 2021 ditetapkan mengalami penurunan sebesar 3,97 persen yang diakibatkan penetapan pendapatan transfer menurun sebesar 13,47 persen.

Tabel III.3
 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2017-2020 dan Penetapan Tahun 2021

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Penetapan Tahun 2021* (Rp)
4	Pendapatan Daerah	8.113.155.062.282	10.671.715.200.487	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199	9.590.400.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	4.558.751.727.469	5.802.442.683.947	6.555.853.195.408	5.143.521.676.422	5.396.942.567.871
4.1.01	Pajak Daerah	3.505.578.072.171	4.716.694.876.324	4.984.520.517.159	3.900.431.414.629	4.260.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	16.659.010.037	21.128.021.966	26.492.587.130	10.123.187.099	17.841.347.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	208.807.497.552	199.302.498.965	392.379.951.610	110.988.636.348	243.641.687.732
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	857.708.316.471	865.317.286.691	1.152.460.139.510	1.121.978.438.346	875.459.533.139

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Penetapan Tahun 2021* (Rp)
4.2	Pendapatan Transfer	3.540.509.585.8 13	4.829.780.659.37 2	5.186.147.690.79 2	4.831.865.557.7 77	4.180.730.432.1 29
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.540.509.585.8 13	4.829.780.659.37 2	5.186.147.690.79 2	4.831.865.557.7 77	4.180.730.432.1 29
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.533.009.585.8 13	4.829.780.659.37 2	5.176.264.298.79 2	4.759.526.731.7 77	4.143.276.121.1 29
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	1.710.695.086.8 21	2.991.231.124.96 1	3.207.168.795.64 2	3.544.638.973.6 37	2.620.455.460.1 29
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	714.906.576.00 0	767.682.423.000	815.693.641.000	831.404.756.00 0	856.333.359.00 0
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	265.936.938.37 3	233.880.877.259	221.093.462.036	212.147.502.14 0	318.456.830.00 0
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	841.470.984.61 9	836.986.234.152	932.308.400.114	171.335.500.00 0	348.030.472.00 0

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Penetapan Tahun 2021* (Rp)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000	-	9.883.392.000	72.338.826.000	37.454.311.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.893.749.000	39.491.857.169	33.085.950.000	11.998.645.000	12.727.000.000
4.03.01	Hibah	13.893.749.000	39.491.857.169	33.085.950.000	11.998.645.000	12.727.000.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2021

Tabel III.4
 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2017-2020 dan Penetapan Tahun 2021

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Penetapan Tahun 2021*
4	Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	56,19%	54,37%	55,68%	51,50%	56,27%
4.1.01	Pajak Daerah	76,90%	81,29%	76,03%	75,83%	78,93%
4.1.02	Retribusi Daerah	0,37%	0,36%	0,40%	0,20%	0,33%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	4,58%	3,43%	5,99%	2,16%	4,51%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18,81%	14,91%	17,58%	21,81%	16,22%
4.2	Pendapatan Transfer	43,64%	45,26%	44,04%	48,38%	43,59%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	99,79%	100,00%	99,81%	98,50%	99,10%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	48,32%	61,93%	61,84%	73,36%	62,68%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,19%	15,89%	15,73%	17,21%	20,48%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	7,51%	4,84%	4,26%	4,39%	7,62%

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Penetapan Tahun 2021*
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	23,77%	17,33%	17,98%	3,55%	8,32%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,21%	0,00%	0,19%	1,50%	0,90%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,17%	0,37%	0,28%	0,12%	0,13%
4.03.01	Hibah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2021

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2022 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2021 sebesar 15,15 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah yang meningkat sebesar 18,37 persen dan pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 32,97 persen. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 54,21 persen.

Tabel III.5
Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2022	
		Rp	%
4	Pendapatan Daerah	11.043.618.621.745	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	5.986.210.931.582	54,21%
4.1.01	Pajak Daerah	5.042.645.000.000	84,24%
4.1.02	Retribusi Daerah	20.961.945.240	0,35%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	149.177.986.342	2,49%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	773.426.000.000	12,92%
4.2	Pendapatan Transfer	5.044.808.890.162	45,68%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.044.808.890.162	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.007.354.579.162	99,26%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.484.533.918.162	69,07%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	856.333.359.000	16,97%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	318.456.830.000	6,31%

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2022	
		Rp	%
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	348.030.472.000	6,90%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.454.311.000,00	0,74%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.598.800.000	0,11%
4.03.01	Hibah	12.598.800.000	100,00%

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel III.6
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2022 (Rp)
A	BELANJA OPERASI	8.410.174.427.360
1	Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan dan TTP)	1.941.961.615.725
2	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	59.966.551.103
3	Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	2.607.571.500.000

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2022 (Rp)
4	Operasional Wajib Kantor	83.922.193.786
5	Insentif pemungut Pajak	151.279.350.000
6	Dana Alokasi Khusus (DAK)	666.487.302.000
7	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	196.941.606.585
8	Dana Insentif Daerah (DID)	37.454.311.000
9	Belanja pajak rokok	69.643.500.000
10	BLUD	651.500.000.000
11	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	2.381.863.838
12	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	800.000.000.000
13	Bantuan keuangan Ke Desa	42.500.000.000
14	Bantuan Keuangan Pengawasan	6.000.000.000
15	Bantuan Keuangan Penyuluh Pertanian	10.000.000.000
14	Belanja Tidak Terduga	251.933.363.342
15	Belanja Fungsi Pendidikan (diluar belanja mengikat)	642.368.664.868
16	Belanja Fungsi Kesehatan (diluar belanja mengikat)	120.142.760.683
17	Belanja Pengawasan (diluar belanja mengikat)	21.691.480.268
18	Belanja Peningkatan SDM ASN (diluar belanja mengikat)	20.254.888.772
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	236.621.946.400
1	Pembayaran Pokok Utang	0
2	Penyertaan modal	236.621.946.400
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		8.646.796.373.760

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021*

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai);

- b) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telpon, internet, dan pajak kendaraan;
- c) Insentif pemungut pajak, dianggap belanja mengikat karena peruntukannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 terkait pemberian insentif bagi pemungut pajak;
- d) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;
- e) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;
- f) Dana Insentif Daerah (DID), dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2020;
- g) Belanja pajak rokok, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur (Dinkes untuk JPKN, Satpol untuk Penegakan Perda) PMK Nomor 102/PMK.07/2015;
- h) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
- i) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;
- j) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;

- k) Bantuan Keuangan ke Desa, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin bagi 841 desa se-Kaltim;
- l) Belanja Bantuan Keuangan dianggap belanja mengikat karena merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan yang diberikan kepada kabupaten/kota;
- m) Belanja Bantuan Keuangan Penyuluh Pertanian dianggap belanja mengikat karena merupakan penunjang bagi penyuluh pertanian di kabupaten/kota;
- n) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi
- o) komponen Belanja Pendidikan, Kesehatan, Inspektorat, dan BPSDM nilainya

3.2.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2022 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan Tahun 2022 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, daerah, regional maupun lokal, serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian dan cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka Panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang

seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.7
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	URAIAN	TAHUN 2022
1	Pendapatan	11.043.618.621.745
2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-
Total Penerimaan		11.043.618.621.745
Dikurangi		
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat	8.646.796.373.760
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		2.396.822.247.985

Sumber: Bappeda Provinsi KALTIM, 2021

3.2.4 Belanja Daerah

Belanja daerah yang terdapat pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun pada pelaksanaan pada APBD tahun 2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Namun pada realisasi belanja daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;
- 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 samapi dengan tahun 2021 cenderung fluktuatif namun dengan rata-rata pertumbuhan 8,39 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dikarenakan terjadinya pelimpahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota dan nasional ke provinsi sebagai akibat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja tidak terduga melangalami peningkatan semenjak tahun 2020 dikarenakan pengalokasian belanja daerah disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Peningkatan alokasi belanja tidak terduga ini ditujukan untuk penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Peningkatan alokasi ini dilakukan dengan mengurangi belanja-belanja yang tidak prioritas dan diperkirakan tidak akan terlaksana dalam tahun berkenaan akibat situasi pandemi.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8
 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 Tahun 2017-2020 dan Penetapan Tahun 2021

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Penetapan Tahun 2021* (Rp)
5	BELANJA	8.834.897.375.000	10.128.810.000.000	12.900.000.000.000	10.683.921.000.001	11.616.186.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	4.984.215.317.185	4.945.611.450.933	5.940.390.533.458	5.356.491.717.806	5.435.615.961.300
5.01.01	Belanja Pegawai	1.942.639.178.111	1.956.294.636.510	2.276.292.750.006	2.246.712.057.549	2.331.962.318.109
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.001.134.625.074	1.905.863.134.023	2.839.199.050.718	2.870.659.107.195	2.812.706.329.353
5.01.05	Belanja Hibah	1.035.431.514.000	1.077.644.430.400	815.124.182.734	223.050.003.062	274.429.463.838
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	5.010.000.000	5.809.250.000	9.774.550.000	16.070.550.000	16.517.850.000
5.02	BELANJA MODAL	1.019.251.255.125	2.071.096.668.390	1.825.021.228.128	1.317.417.909.377	1.984.395.175.358
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.300.000.000	6.333.900.000	25.000.000.000	500.000.000.000	251.933.363.342
5.04	BELANJA TRANSFER	2.825.130.802.690	3.105.767.980.677	5.109.588.238.414	3.510.011.372.818	3.944.241.500.000

5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.104.010.195.500	2.411.414.151.000	3.087.791.772.893	1.911.308.336.000	2.240.000.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	721.120.607.190	694.353.829.677	2.021.796.465.521	1.598.703.036.818	1.704.241.500.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2021*

Tabel III.9
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2020 dan Penetapan Tahun 2021

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Penetapan Tahun 2021*
5	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	56,42%	48,83%	46,05%	50,14%	46,79%
5.01.01	Belanja Pegawai	38,98%	39,56%	38,32%	41,94%	42,90%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	40,15%	38,54%	47,79%	53,59%	51,75%
5.01.05	Belanja Hibah	20,77%	21,79%	13,72%	4,16%	5,05%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0,10%	0,12%	0,16%	0,30%	0,30%
5.02	BELANJA MODAL	11,54%	20,45%	14,15%	12,33%	17,08%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,07%	0,06%	0,19%	4,68%	2,17%
5.04	BELANJA TRANSFER	31,98%	30,66%	39,61%	32,85%	33,95%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	74,47%	77,64%	60,43%	54,45%	56,79%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	25,53%	22,36%	39,57%	45,55%	43,21%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2021

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2022 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan dapat berkontribusi sebesar 4,99 persen dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2022, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan ketahanan Kesehatan masyarakat, penguatan pelaku ekonomi kerakyatan, kegiatan produktif guna pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, dan infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi serta. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional (utamanya belanja barang) untuk meningkatkan ruang fiskal;
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial yang telah terdampak Pandemi COVID-19 terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- 4) Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan untuk lebih mendorong pergerakan ekonomi masyarakat lokal serta turut menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Perkuatan perekonomian utamanya pada sektor terdampak akibat pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga tahun 2021 seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
- 6) Pencapaian target, sasaran, *directive gubernur* dan program unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

- 7) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peninmgkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;
- 8) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun kedepan. Adapun proyeksi 2022 Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.10
Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Kode Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2022	
		Rp	%
5	BELANJA	10.806.996.675.345	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	5.455.989.649.862	50,49%
5.01.01	Belanja Pegawai	2.331.962.318.109	42,74%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.819.754.544.723	51,68%
5.01.05	Belanja Hibah	288.150.937.030	5,28%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.121.850.000	0,30%
5.02	BELANJA MODAL	1.720.052.686.483	15,92%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	223.202.839.000	2,07%
5.04	BELANJA TRANSFER	3.407.751.500.000	31,53%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.607.751.500.000	76,52%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	800.000.000.000	23,48%

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Selanjutnya untuk memenuhi belanja *mandatory* sesuai dengan peraturan perundang undangan pada proyeksi belanja daerah tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.11
Alokasi Belanja *Mandatory* Tahun 2022

No	Uraian	Pagu Indikatif	Persentase	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fungsi Pendidikan (Undang-Undang Nomor 20/2003)	2.260.261.588.386	20,47%	Persentase anggaran pendidikan dihitung dari total pagu indikatif sektor pendidikan, BOS, dan pagu belanja pelatihan, stimulan, dan semacanya yg sifatnya mengarah kepada peningkatan pendidikan/kapasitas SDM dengan sifat sasaran pada masyarakat/unsur selain ASN serta Hibah dan Bantuan Keuangan fungsi Pendidikan.
2	Fungsi Kesehatan (Undang-Undang Nomor 36/2009)	1.274.242.728.268	11,54%	Persentase anggaran kesehatan dihitung dari total pagu indikatif sektor kesehatan terhadap total Belanja Daerah
3	Pengawasan (Peraturan Presiden Nomor 54/2018)	39.000.000.000	0,35%	Persentase anggaran pengawasan dihitung dari pagu indikatif untuk pengawasan terhadap total Belanja Daerah
4	Kompetensi ASN (Peraturan Pemerintah Nomor 12/2017, Permendagri Nomor 85/2017, Permendagri Nomor 108/2017 dan Permendagri Nomor 11/2018)	34.568.030.000	0,31%	Persentase anggaran kompetensi ASN dihitung dari pagu indikatif peningkatan kompetensi ASN terhadap total Belanja Daerah

3.2.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel III.12
 APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019
A	Penerimaan Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	611.118.124.747	541.264.815.482	1.862.060.553.637
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	611.118.124.747	541.264.815.482	1.862.060.553.637
B	Pengeluaran Pembiayaan			
1	Penyertaan Modal	0	3.690.000.000	100.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	3.690.000.000	100.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto		611.118.124.747	537.574.815.482	1.762.060.553.637
No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Penetapan Tahun 2021*	Proyeksi Tahun 2022
A	Penerimaan Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	2.249.383.814.348	2.025.786.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.249.383.814.348	2.025.786.000.000	0
B	Pengeluaran Pembiayaan			
1	Penyertaan Modal	150.000.000.000	249.856.920.000	236.621.946.400
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000.000	249.856.920.000	236.621.946.400
Jumlah Pembiayaan Netto		2.099.394.164.475	1.775.929.080.000	236.621.946.400

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2021

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 tidak diproyeksikan meskipun memungkinkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2021 yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan dan Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, namun angkanya tidak diproyeksikan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022 dialokasikan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah akan diupayakan dengan cara mengoptimalisasi dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, swasta, maupun masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan di Tahun 2022 akan diarahkan pada:

- 1) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas;
- 2) Pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU;
- 3) Optimalisasi dan integrasi sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) untuk mendukung pencapaian target-target program prioritas Kalimantan Timur. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat.

Selain pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tabel III.13
Alokasi Dana Dekonsentrasi APBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

Kementerian / Lembaga / Skpd / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kementerian Dalam Negeri		758.755.000	670.556.000	206.770.000			
1	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	758.755.000	250.556.000	206.770.000			
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Timur		420.000.000				
3	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur				11.999.000		
Kementerian Pertanian		25.998.301.000	18.380.398.000	21.642.785.000	18.794.027.000	20.679.236.175	
4	Dinas Pangan. Tanaman Pangan. Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	25.290.766.000	13.074.868.000	19.840.605.000	18.228.447.000	20.125.607.675	
5	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	707.535.000	5.305.530.000	1.802.180.000	565.580.000	553.628.500	
Kementerian Perindustrian		1.960.000.000	1.671.000.000	2.117.760.000	1.545.357.000	949.472.000	
6	Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Provinsi	1.960.000.000	1.671.000.000	2.117.760.000	1.545.357.000	949.472.000	

Kementerian / Lembaga / Skpd / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Kalimantan Timur (Bidang Perindustrian)						
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan		7.795.204.000	6.805.810.000	6.238.512.000			
7	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	7.795.204.000	6.805.810.000	6.238.512.000			
Kementerian Kesehatan		24.786.005.000	26.955.894.000	25.558.493.000	7.281.122.000	28.806.928.720	
8	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	24.786.005.000	26.955.894.000	25.558.493.000	7.281.122.000	28.806.928.720	
Kementerian Ketenagakerjaan		5.727.209.000	5.070.470.000	9.261.834.000	3.979.870.000	4.183.766.000	
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	5.727.209.000	5.070.470.000	9.261.834.000	3.979.870.000	4.183.766.000	
Kementerian Sosial		12.447.049.000	13.830.078.000	14.072.092.000	6.096.879.000	4.888.161.960	
10	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	12.447.049.000	13.830.078.000	14.072.092.000	6.096.879.000	4.888.161.960	
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		1.345.400.000	2.233.543.000	825.500.000			
11	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	795.400.000	1.578.925.000	500.500.000			
12	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000	654.618.000	325.000.000			

Kementerian / Lembaga / Skpd / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kementerian Kelautan Dan Perikanan		2.374.397.000	3.115.918.000	2.734.233.000	1.758.723.000	2.759.653.232	
13	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	2.374.397.000	3.115.918.000	2.734.233.000	1.758.723.000	2.759.653.232	
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat			1.143.612.000				
14	Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur		1.143.612.000				
Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		1.357.000.000	2.459.497.000	1.686.572.000	50.244.000		
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	1.357.000.000	2.459.497.000	1.686.572.000	50.244.000		
Kementerian Negara Koperasi Dan UKM		2.270.653.000	2.488.466.000	2.541.927.000	1.973.897.000	1.822.107.000	
16	Dinas Perindag Koperasi Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Koperasi dan UMKM)	2.270.653.000	2.488.466.000	2.541.927.000	1.973.897.000	1.822.107.000	

Kementerian / Lembaga / Skpd / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		2.220.000.000	2.300.000.000	1.700.000.000	650.000.000		
17	Dinas Kependudukan. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.220.000.000	2.300.000.000	1.700.000.000	650.000.000		
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional		840.614.000	1.006.291.000	1.006.291.000	383.103.000	1.006.291.000	
18	Bappeda Prov. Kaltim	840.614.000	1.006.291.000	1.006.291.000	383.103.000	1.006.291.000	
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia		1.287.013.000	1.196.125.000	695.300.000	481.278.000	510.082.000	
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	1.287.013.000	1.196.125.000	695.300.000	481.278.000	510.082.000	
Badan Koordinasi Penanaman Modal		300.000.000	549.456.000	459.043.000	377.704.000	399.170.000	
20	Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur	300.000.000	549.456.000	459.043.000	377.704.000	399.170.000	
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi		23.133.055.000	35.171.462.000	30.825.282.000	21.152.239.000	1.697.500.000	

Kementerian / Lembaga / Skpd / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur	23.053.055.000	34.968.322.000	30.589.982.000	21.152.239.000	1.697.500.000	
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	80.000.000	203.140.000	235.300.000			
Arsip Nasional Republik Indonesia		307.286.000	137.846.000	341.560.000			
23	Badan Arsip Daerah Prop.Kal-Tim	307.286.000	137.846.000				
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur			341.560.000			
Kementerian Perdagangan		3.187.452.000	1.776.815.000	1.958.498.000	945.875.000	1.432.326.000	
25	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Perdagangan)	3.187.452.000	1.776.815.000	1.958.498.000	945.875.000	1.432.326.000	
Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga		3.113.389.000	3.494.278.000	2.256.600.000	2.139.118.000	2.198.439.000	

Kementerian / Lembaga / Skpd / Satker		Alokasi Dana Dekonsentrasi (Rp)					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
26	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur	3.113.389.000	3.494.278.000	2.256.600.000	2.139.118.000	2.198.439.000	
	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	123.076.000					
27	Sekretariat Prov.Kaltim	123.076.000					
Jumlah Total		121.331.858.000	130.457.515.000	126.129.052.000	67.621.435.000	71.333.133.087	

Tabel III.14

Alokasi Dana Tugas Pembantuan APBN Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2021

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
KEMENTERIAN PERTANIAN		145.115.000.000	98.783.559.000	64.358.592.000	49.820.433.000	48.949.215.095	
1	Dinas Pangan. Tanaman Pangan. Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	119.797.925.000	87.421.661.000	48.868.952.000	35.009.259.000	40.753.839.000	

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	7.168.872.000	6.809.357.000	7.367.763.000	8.215.875.000	2.932.998.870	
3	Dinas Perkebunan Kabupaten Berau			965.424.000	1.386.180.000		
4	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	8.332.948.000	4.552.541.000	7.156.453.000	4.133.774.000	5.262.377.225	
5	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau	6.184.740.000					
6	Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	3.630.515.000					
7	Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara				1.075.345.000		
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN			355.150.000	258.220.000			
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Paser		355.150.000	258.220.000			
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1.000.000.000					

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
9	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000.000					
KEMENTERIAN SOSIAL		2.396.080.000	2.676.844.000	5.848.040.000	3.859.836.000		
10	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	2.396.080.000	2.676.844.000	2.950.270.000	3.859.836.000		
11	Dinas Sosial Kabupaten Paser			2.897.770.000			
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		10.000					
12	Dinas Kehutanan Kab.Berau	10.000					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		550.000.000					
13	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	550.000.000					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		45.443.950.000	42.987.367.000		16.083.265.000	44.945.568.000	
Bina Marga							
14	Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang. Dan Perumahan Rakyat	45.443.950.000	42.987.367.000		16.083.265.000	44.945.568.000	

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Provinsi Kalimantan Timur						
KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM		950.000.000	1.450.000.000				
15	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kota Samarinda	950.000.000					
16	Dinas Perdagangan. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat		500.000.000				
17	Dinas Perdagangan. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kutai Barat		950.000.000				
KEMENTERIAN PERDAGANGAN		24.000.000.000		16.000.000.000	3.000.000.000		
18	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah Kab Paser	6.000.000.000		4.000.000.000			
19	Dinas Koperasi. Perindustrian Dan	6.000.000.000		4.000.000.000			

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Perdagangan Kabupaten Berau						
20	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur	6.000.000.000	18.000.000.000	4.000.000.000			
21	Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Bontang	6.000.000.000					
22	Dinas Koperasi. Ukm. Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Penajam Paser Utara		12.000.000.000	4.000.000.000			
23	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda		12.000.000.000				
24	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan				3.000.000.000		
KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI			13.598.879.000	7.137.425.000	2.933.620.000	9.018.607.750	
25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur		2.678.644.000	3.482.734.000	912.258.000	2.468.002.000	

KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / SATKER		Alokasi Dana Tugas Pembantuan					Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	
26	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Paser		7.790.006.000		1.456.376.000	3.617.813.000	
27	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur		3.130.229.000	3.654.691.000	564.986.000	2.932.792.750	
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Samarinda		12.000.000.000				
Jumlah Total		219.455.040.000	201.851.799.000	131.033.918.000	75.697.154.000	102.913.390.845	

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ke-4 (empat) dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Adapun Visi Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun sebagai berikut : (1) Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; (3) Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan; (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (5) Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2019-2023 dapat di lihat seperti pada Gambar IV.1 berikut.

Visi Pembangunan : <i>“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”</i>	
Fokus Utama	
I. SDM yang Berdaya Saing	II. Kemandirian Ekonomi
1. Pendidikan 2. Kesehatan	1. Pertumbuhan dan kestabilan Ekonomi 2. Perubahan Struktur Ekonomi
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu	
III. Daya Saing Infrastruktur	IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Fokus Pengarusutamaan Lingkungan Hidup	

Gambar IV.1

Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Berdasarkan misi di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1
 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
 “Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN”

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	
				P-RPJMD 2019-2023	RKPD 2022
Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	Tujuan 1 : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,25	77,25
	Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	14,02
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,04	10,04
	Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Presentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	%	0,85	0,85
	Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,60	74,60
	Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,64	65,64
		Tingkat Kemiskinan	%	6,00	6,00

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	
				P-RPJMD 2019-2023	RKPD 2022
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,75	6,75
	Sasaran 5 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6825	0,6825
	Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	35,00	35,00
Misi 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan	Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5 _± 1	3,5 _± 1
		PDRB per Kapita	Juta Rp	170	170
		LPE Non Migas dan Batubara	%	2,00	2,00
		Nilai Tukar Petani	Angka	113,00	113,00
	Sasaran 7 : Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah	Miliar Rp	11.038	11.038
	Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara	Miliar US\$	1,72	1,72
	Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB	%	9,64	9,64

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	
				P-RPJMD 2019-2023	RKPD 2022
	Sektor Industri Pengolahan Non Migas dan Batubara				
	Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	%	0,65	0,65
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	0,37	0,37
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	5,2	5,2
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,7	1,7
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,07	1,07
	Sasaran 11: Meningkatkan realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara	Triliun Rp	35,00	35,00

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	
				P-RPJMD 2019-2023	RKPD 2022
	Sasaran 12 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB	%	13,00	13,00
	Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	9,67	9,67
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB	%	15,23	15,23
Misi 3 : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan	Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks	0,313	0,313
	Sasaran 14 : Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	6.000.000	6.000.000
		Jumlah barang yang diangkut	Ton	337.000.000	337.000.000
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung	Kawasan	5	5
		Capaian akses air minum layak	%	68,53	68,53
		Luas lahan pertanian yang beririgasi	Ha	14.278,50	14.278,50
		Luas kawasan kumuh	Ha	1.187,82	1.187,82

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	
				P-RPJMD 2019-2023	RKPD 2022
		Luas genangan banjir perkotaan	Ha	374	374
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	76,74	76,74
		Rasio elektrifikasi	%	93,00	93,00
Misi 4 : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,05	76,05
	Sasaran 15 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU	%	28,50	28,50
	Sasaran 16 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	151,49	151,49
Misi 5 : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik	Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (71,50)	B (71,50)
	Sasaran 17 : Terwujudnya Birokrasi yang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,5	82,5
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)	Indeks	3,25	3,25

Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	
				P-RPJMD 2019-2023	RKPD 2022
	memiliki pelayanan publik berkualitas				
	Sasaran 18 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	77,0	77,0
	Sasaran 19 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level	Level 3	Level 3

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2022 meliputi aspek umum, bidang infrastruktur, dan kesehatan.

1) Umum

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat memformulasikan RKPD Kaltim Tahun 2022, yang akan meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan antara tuntutan, harapan, kepentingan rakyat dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan Musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga tercapai onsensus Bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan dan meminimalisir terjadinya in-efisiensi anggaran.

2) Infrastruktur

- a. Terdapat harapan besar dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan Infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Utara, Tengah dan Selatan Kalimantan Timur;
- b. Realitas aktual yang dialami oleh masyarakat Kalimantan Timur saat ini adalah kerusakan ruas jalan Tanah Datar yang merupakan Jalan Nasional atau Jalan Negara. Diperlukan perhatian yang besar dan segera dari segenap pihak agar fungsi Pelayanan Minimal dari ruas jalan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat.

3) Kesehatan

- a. Perlu langkah-langkah khusus dari pemerintah daerah terkait Tunjangan atau Insentif dari Pemerintah Pusat bagi tenaga kesehatan yang bekerja secara professional untuk melayani masyarakat, terutama dalam kondisi COVID-19 saat ini.

Tabel IV.2

Telaah terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Timur

No	Pokok Pikiran	Telaahan
1	<p>Umum:</p> <p>a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat memformulasikan RKPD Kaltim Tahun 2022, yang akan meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan antara tuntutan, harapan, kepentingan rakyat dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan Musrenbang diharapkan dapat menjadi wadah negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga tercapai konsensus Bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan dan meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran.</p>	<p>RKPD Kalimantan Timur telah disusun melalui proses yang cukup Panjang mulai dari <i>Kick-off Meeting</i>, Rakortekrenbang, Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, Pra-Musrenbang dan Musrenbang serta Fasilitasi Kemendagri. Melalui tahapan ini diharapkan bahwa RKPD Kalimantan Timur telah disusun berdasarkan prinsip teknokratis, <i>bottom-up</i>, <i>top-down</i> dan politis yang mengakomodir dan menjawab permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur.</p> <p>Pelaksanaan Musrenbang merupakan rangkaian akhir dalam proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi berbagai usulan pembangunan daerah. Berita acara kesepakatan yang disepakati berbagai <i>stakeholder</i> pembangunan menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD 2022.</p>
2	<p>Infrastruktur</p> <p>a. Terdapat harapan besar dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Utara, Tengah dan Selatan Kalimantan Timur.</p>	<p>Pada RKPD Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan dana sebesar Rp. 656 Miliar untuk penanganan Jalan dan Jembatan. Target yang ingin dicapai adalah peningkatan jalan mantap provinsi menjadi 76,15% pada Tahun 2022. Selain itu terdapat Pembangunan Jembatan Jembatan Bailey di Perbatasan dan Pemeliharaan Jalan dan</p>

No	Pokok Pikiran	Telaahan
	<p>b. Realitas aktual yang dialami oleh masyarakat Kalimantan Timur saat ini adalah kerusakan ruas jalan Tanah Datar yang merupakan Jalan Nasional atau Jalan Negara. Diperlukan perhatian yang besar dan segera dari segenap pihak agar fungsi Pelayanan Minimal dari ruas jalan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat.</p>	<p>Jembatan Ruas Jalan Provinsi melalui UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR-PERA.</p> <p>Terkait dengan kerusakan jalan di Tanah Datar, Pemerintah terus berupaya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR (BBJN Kaltim) melalui rapat-rapat koordinasi dan pengusulan usulan prioritas oleh Pemprov Kaltim pada Konreg PUPR Tahun 2021. Sebagai tambahan informasi, ruas jalan tanah datar akan menjadi Penanganan Prioritas oleh BBJN Kaltim pada Tahun 2021 dan 2022.</p>
3	<p>Kesehatan Perlu Langkah Langkah khusus dari pemerintah daerah terkait Tunjangan atau Insentif dari Pemerintah Pusat bagi tenaga Kesehatan yang bekerja secara professional untuk melayani masyarakat, terutama dalam kondisi COVID-19 saat ini</p>	<p>Terkait tunjangan atau insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja secara professional dalam kondisi COVID-19, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan SE Kemenkeu Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa TA 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19, maka Pemerintah melakukan relokasi dan <i>refocusing</i> DAU dan/atau DBH yang digunakan salah satunya untuk insentif tenaga kesehatan (Nakes). Sehingga tahun 2021 telah dianggarkan anggaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) tersebut melalui DAU Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit 8 persen yang dananya telah dikucurkan melalui fasilitas kesehatan milik Provinsi Kalimantan Timur.</p>

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam menyusun RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, disamping harus mempedomani dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2022 yang mengusung tema “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”, dengan fokus pembangunan pada pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Tema dan fokus pembangunan Nasional pada tahun 2022, dijabarkan dengan Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022 sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
- Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan akan didukung oleh pelaksanaan beberapa *major project* yang diperkuat dengan mekanisme *clearing house*. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pencapaian prioritas nasional seperti:

1. PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan Kawasan industri, energi terbarukan, peran UMKM, ketahanan pangan dan pariwisata,
2. PN 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui pelaksanaan *major project* di wilayah Papua dan Ibu Kota Negara Baru
3. PN 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing melalui reformasi system perlindungan social, Kesehatan nasional dan Pendidikan keterampilan,
4. PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar melalui pengembangan jaringan pelabuhan terpadu dan transformasi digital.

Sedangkan target sasaran nasional pada rancangan awal RKP tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel IV.3
Indikator Sasaran Pembangunan RKP 2022

No	Sasaran	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 6,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5-6,3
4	Rasio Gini (Indeks)	0,376-0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,41-73,46
6	Penurunan Emisi GRK (%)	26,87
7	Nilai Tukar Petani/NTP	102-104
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN	102-105

Sumber: Rancangan RKP 2022

Selanjutnya besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Target RKP Tahun 2022 di Kalimantan Timur

No	Sasaran	Target	
		2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,9-5,5	4,94-5,94
2	Tingkat Kemiskinan (%)	5,7	5,32
3	Tingkat Pengangguran (%)	8,3	5,33-6,20

Sumber: Rancangan RKP 2022

Penetapan target makro Kalimantan Timur dalam RKP 2022 sangatlah optimis, terutama didorong oleh adanya pengembangan komoditas unggulan seperti sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta perbaikan harga komoditas minyak, gas bumi serta batubara di pasar internasional. Selain itu pula, dorongan untuk melakukan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan pertambangan juga terus dilakukan dan ditambah lagi kaitannya dengan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur juga merupakan bagian dari faktor pendorong pencapaian target pembangunan yang ditetapkan.

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2022

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, arah kebijakan RKP tahun 2022 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2022, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah:

“Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN”

Dengan kata kunci pada tema tersebut adalah Reformasi Struktural, Daya Saing SDM, dan Ibu Kota Negara.

Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahunan yang dirumuskan pada Perubahan RPJMD dan merupakan strategi tahun keempat untuk mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Tema RKPD tahun 2022 merupakan arah kebijakan pembangunan yang merupakan tindak lanjut dari tema tahun sebelumnya, dimana berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun sebelumnya menunjukkan bahwa setelah Aspek Daya Saing Investasi dibenahi, maka pembangunan di fokuskan pada penumbuhan hilirisasi industri yang mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan berdampak pada ekonomi kawasan.

Pada RKPD Kalimantan Timur tahun 2022, daya saing daerah yang masih rendah menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan untuk pembangunan tahun ke-4 pada periode RPJMD. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan daya saing daerah adalah penguatan ekonomi

kerakyatan, peningkatan investasi dan disertai peningkatan sumberdaya manusia dan infrastruktur.

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan hakiki pembangunan selalu menjadi pertimbangan utama. Selain itu upaya untuk pemulihan sosial ekonomi akibat COVID-19 yang masih terjadi hingga tahun 2021 menjadi perhatian penting di setiap urusan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Alur Pikir dalam perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar IV.2
Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPD Kalimantan Timur
Tahun 2022

Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dan tujuan pembangunan jangka menengah pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Dengan memahami permasalahan pada rendahnya daya saing daerah di Kalimantan Timur, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM

Wabah pandemi COVID-19 diperkirakan belum berakhir di tahun 2022. Hal ini disebabkan “*Herd Immunity*” yang belum terbentuk karena cakupan vaksinasi yang belum memadai. Selain itu muncul juga varian COVID-19 baru yang mungkin tidak efektif ditangani dengan vaksin-vaksin yang ada saat ini. Pemerintah Daerah harus mengantisipasi hal ini sehingga dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat diminimalisir. Berkenaan dengan itu, kebijakan provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pelayanan akses dan mutu pelayanan kesehatan medis maupun non medis, khususnya pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular. Sejalan dengan itu diharapkan ruang isolasi penyakit menular di Rumah Sakit Umum Daerah Kanudjoso Djatiwibowo Balikpapan dapat beroperasi pada tahun 2022. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Dukungan peningkatan daya saing SDM juga dilakukan melalui reformasi sistem pendidikan, terutama pendidikan keterampilan. Penetapan IKN Baru oleh Presiden pada tanggal 26 Agustus 2019, menuntut pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan akselerasi peningkatan kualitas SDM. Hal ini dilakukan agar peluang kerja dan peluang ekonomi akibat penetapan IKN Baru dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat Kalimantan Timur. Upaya yang akan dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi yang diperlukan oleh IKN Baru. Selain itu, dalam rangka pemerataan pendidikan dan adaptasi terhadap Pandemi COVID-19, maka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh juga diperlukan. Selanjutnya untuk wilayah perbatasan dan pedalaman, perlu juga didorong pengembangan sekolah berasrama (*Boarding School*).

2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat

Indikator makro kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur mengalami dampak negatif akibat COVID-19. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi -2,85 persen, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 6,10 persen dan tingkat pengangguran mengalami peningkatan menjadi 6,87 persen. Kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penguatan pelaku dan kelembagaan ekonomi kerakyatan. Penguatan yang dilakukan diarahkan pada peningkatan produksi maupun kualitas produk. Selain itu penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas koperasi juga menjadi perhatian penting. Selanjutnya, dalam rangka memastikan agar produk dan layanan yang dihasilkan usaha kerakyatan dapat terserap pasar maka pengembangan platform pasar UKM berbasis digital juga akan dikembangkan.

Berbagai kebijakan yang dirumuskan untuk penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pelaku UKM sehingga daya beli masyarakat juga akan semakin meningkat. Pada akhirnya diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat, pengangguran mengalami penurunan dan tingkat kemiskinan dapat terus ditekan.

3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan

Transformasi ekonomi kepada sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dan industri pengolahan berbasis pertanian merupakan perjuangan panjang dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 41,43 persen dan industri pengolahan berbasis migas sebesar 18,9 persen. Sementara itu berkaitan dengan investasi, pada tahun 2020 investasi terbesar di Kalimantan Timur adalah pada sektor primer dan industri pengolahan berbasis migas.

Beberapa kebijakan yang disusun untuk mendorong investasi sektor pengelolaan sumberdaya terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan adalah penyediaan fasilitas/insentif daerah pada

investasi non migas dan non batubara. Selain itu dilakukan juga peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik, pemantauan komitmen perizinan dan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal.

4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN

Konektivitas memiliki peranan sangat penting dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan daerah. Konektivitas yang baik akan mendorong arus jasa dan orang dari pusat-pusat produksi ke outlet atau pasar secara efektif dan efisien. Sampai tahun 2020, rasio jalan mantap provinsi Kalimantan Timur adalah 69,77 persen. Rendahnya rasio jalan mantap ini tentunya akan mengganggu arus barang dan orang di Kalimantan Timur.

Rencana pemindahan dan pembangunan IKN baru merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur yang handal harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 adalah Pembangunan, Rekonstruksi dan Pemeliharaan Jalan dalam rangka peningkatan kemantapan jalan. Selain itu peningkatan fungsi dan layanan keselamatan perhubungan dan pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda perlu untuk menjadi perhatian pemerintah daerah.

5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Aparatur pemerintah memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan daerah. Pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, dinamisator dan katalisator pembangunan harus mampu memberikan pelayanan terbaik agar kesejahteraan dapat dinikmati secara berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka aparatur pemerintah harus didorong untuk terus melakukan peningkatan kapasitas dan kinerja. Selain itu integritas yang baik dari para aparatur juga harus terus ditingkatkan.

Ditengah maraknya kondisi COVID-19 dan tantangan kemajuan teknologi informasi, maka pelayan publik secara konvensional seharusnya terus dikurangi. Berkenaan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik

berbasis teknologi informasi. Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT dan pengembangan E-Gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan akses dan mutu Pendidikan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja, mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (*Boarding School*), peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh, Pengembangan perpustakaan berbasis IT;
 - b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis, peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya, penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat;
 - c. Peningkatan daya saing generasi muda melalui Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT, Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga;
 - d. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan;
 - e. Perluasan kesempatan kerja melalui Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja, Peningkatan keterampilan angkatan kerja.
- 2) Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, difokuskan pada:

- a. Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM melalui peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, pengembangan *platfom* pasar koperasi dan UKM berbasis digital, peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM, fasilitasi permodalan koperasi dan UKM;
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura melalui pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Peningkatan produksi pangan asal ternak melalui peningkatan produksi ternak berkualitas, dan pengembangan kawasan peternakan;
- d. Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas komoditi perkebunan unggulan, pengembangan komoditas unggulan perkebunan non sawit, peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir, peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani, pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha bidang perikanan, peningkatan sarana prasarana perbenihan dan produksi perikanan, perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan;
- f. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan melalui penguatan informasi potensi kawasan hutan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan, pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan;
- g. Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan melalui Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa, Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan;
- h. Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur melalui peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim, Peningkatan layanan

- pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim, Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim;
- i. Pengembangan ekonomi kreatif melalui Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim, Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim.
- 3) Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan, difokuskan pada:
- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Peningkatan Pendapatan, Pelayanan dan Pengawasan sumber – sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur;
 - b. Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara melalui Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara, Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektornik, Pemantauan komitmen perizinan, peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal;
 - c. Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional melalui penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah, pengembangan UKM berorientasi ekspor, peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor;
 - d. Pengembangan industri unggulan provinsi melalui Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi, Pengembangan industri hulu agro, aneka, dan pangan, Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM;
 - e. Peningkatan daya saing destinasi unggulan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM Pariwisata dan Usaha Jasa pariwisata, Peningkatan layanan amenities Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - f. Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan perubahan Iklim, peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- g. Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana.
- 4) Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN, difokuskan pada:
- a. Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan melalui peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan, Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi, Pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN melalui pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan;
 - c. Peningkatan infrastruktur sumber daya air melalui peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum, Peningkatan sarana dan prasarana air baku;
 - d. Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh melalui penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
 - e. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir melalui pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan subsistemnya;
 - f. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang melalui penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang selaras dengan kebutuhan ruang IKN, Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. Peningkatan akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal melalui Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi.
- 5) Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, difokuskan pada:
- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi melalui Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi melalui Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT, Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman;

- c. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan;
- d. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko melalui peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang dapat dilihat pada tabel IV.5.

Tabel IV.5
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja
		2. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
		3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
		4. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
		5. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
		6. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda	Peningkatan daya saing generasi muda	1. Pengembangan kewirausahaan pemuda dan difabel berbasis IT

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
dalam Pembangunan		2. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda berprestasi di bidang olahraga
Sasaran 3: Meningkatkan pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
		2. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		3. Peningkatan kualitas pengelolaan Fasyankes maupun fasilitasnya
		4. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
		5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
Sasaran 4: Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Optimalisasi pengarusutamaan gender	Penguatan dan pengembangan lembaga pemberdayaan perempuan
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran 5: Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemerataan pembangunan wilayah perdesaan	1. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa
		2. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan
Sasaran 6: Meningkatkan daya saing angkatan kerja	Perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja
		2. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
MISI 2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan		
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran 7: Meningkatkan pendanaan	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	1. Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pembangunan pemerintah		2. Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Peningkatan daya saing komoditas non migas dan batubara di pasar internasional	1. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah 2. Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor 3. Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor
Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Pengembangan industri unggulan provinsi	1. Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi 2. Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan 3. Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM
Sasaran 10: Meningkatnya Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
		2. Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura
		3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Peningkatan Produksi Pangan Asal Ternak	1. Peningkatan produksi ternak berkualitas
		2. Pengembangan Kawasan Peternakan
	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas sub sektor perkebunan secara berkelanjutan	
2. Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit		
3. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir		

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani 5. Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor perikanan secara berkelanjutan	1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan 2. Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan 3. Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan
	Peningkatan produksi dan produktivitas hasil hutan kayu dan non kayu yang berkelanjutan	1. Penguatan informasi potensi kawasan hutan 2. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu 3. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan 4. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan
Sasaran 11: Meningkatkan realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Non migas dan non batubara	1. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara 2. Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik 3. Pemantauan komitmen perizinan 4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal
Sasaran 12: Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	Revitalisasi pembinaan dan pengelolaan koperasi dan UKM	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM 2. Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital 3. Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM
Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Pengembangan Produk Wisata Kalimantan Timur	1. Peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim
		2. Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
		3. Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim
	Pengembangan ekonomi kreatif	1. Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim
		2. Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim
	MISI 3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan	
Tujuan 4: Meningkatkan Pemerataan dan Pengembangan Pelayanan Infrastruktur Dasar		
Sasaran 14: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan	1. Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan
		2. Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi
	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan
	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1. Peningkatan sarana dan prasarana air baku
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum
		3. Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional)
	Pembenahan infrastruktur kawasan kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan infrastruktur pengendali banjir	Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya
	Peningkatan Akses ketenagalistrikan dan penggunaan energi berbasis potensi lokal	Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1. Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN 2. Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
MISI 4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan		
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Peningkatan Kualitas Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Perubahan Iklim
		2. Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 16: Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
		2. Peningkatan kualitas wilayah siaga bencana
MISI 5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		
Tujuan 6: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		
Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pelayanan publik berkualitas		2. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		3. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman
Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur
		2. Penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan
Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis risiko	Peningkatan integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.6

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
PRIORITAS PEMBANGUNAN 1 Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan yang Mendukung Daya Saing SDM								1.115.059.137.488	
Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,25					
	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	82%	935.553.720.692	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,04	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Jangkauan dan	9%	2.366.889.475	Dinas Perpustakaan dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
						Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi			Kearsipan Daerah
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	%	0,85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1%	1.139.430.728	Dinas Pemuda dan Olah Raga
					Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan daya saing keolahragaan	70%	51.945.295.523	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,60	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100%	115.136.354.121	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan	60%	3.550.891.935	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kab/Kota yang melakukan PHBS	3 Kab/Kota	1.843.190.185	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,64	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Implementasi Kelembagaan PUG	1 Kebijakan	1.016.080.817	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	6,00					
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,75					
	Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	35,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	70%	204.132.915	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	31%	2.303.151.097	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2 Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat								324.846.091.678	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	6,00					
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,75					
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6825	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara Optimal	35 Desa	1.990.178.289	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA,	30 Desa	3.535.597.003	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Masyarakat Hukum Adat	KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan			
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5±1					
		PDRB per Kapita	Juta Rp	170					
		LPE Non Migas dan Batubara	%	2,00					
		Nilai Tukar Petani	Nilai	113,00					
	Meningkatnya Peran Sektor Pertanian	Kontribusi lapangan usaha sub	%	0,65	Program Penyediaan Dan	Jumlah Bangunan Yang	1 Unit	513.766.446	Dinas Pangan, Tanaman

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
	(dalam arti luas)	sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB			Pengembangan Prasarana Pertanian	Dibangun/ Dipelihara		4.716.890.000	Pangan dan Hortikultura
						Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi	80000 Ha		
						Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	7 Unit		
					Program Penyediaan Dan Pengembangan	Jumlah produksi padi	279681 Ton	25.533.110.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan
						Jumlah Produksi	283592 Ton		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					n Sarana Pertanian	Tanaman Hortikultura			dan Hortikultura
					Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang di bina	330 orang	3.693.331.700	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina		4 lembaga			
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB	%	0,37	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	49 Unit	10.087.388.200	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Program Penyediaan Dan	Angka Kelahiran Sapi	21%	7.387.968.000	Dinas Peternakan dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Pengembangan Sarana Pertanian				Kesehatan Hewan
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB	%	5,20	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,067 Juta Ton CO ₂ eq	1.120.000.000	Dinas Perkebunan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30 Kelompok	6.722.948.500	Dinas Perkebunan
						Luas Kebun yang dibangun	1.462.645 Ha		
					Program Penyediaan Dan	Produksi komoditas perkebunan	18.126.490, 20 ton	6.465.557.600	Dinas Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Pengembangan Sarana Pertanian				
					Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	3.734.806.900	Dinas Perkebunan
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	750.000.000	Dinas Perkebunan
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	1,70	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	297.805,90 Ha	4.057.100.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	19.425.875.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	5.306.947.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah olahan hasil perikanan yang dipasarkan	3 Jenis	1.463.750.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,07	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 ha	25.209.625.775	Dinas Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Bidang Kehutanan				
					Program Pengelolaan Hutan	Produksi Hasil Hutan Kayu	5.000.000/ton	179.984.157.525	Dinas Kehutanan
						Produksi Hasil Hutan Non Kayu	7,5 juta ton		
	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB	%	13,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	1%	946.405.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	10%	576.519.240	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
									Kecil Menengah
					Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	3%	1.226.724.100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	9,67	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di kembangkan	3 Destinasi	7.602.445.000	Dinas Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
		Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB	%	15,23	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	23,53%	2.794.999.500	Dinas Pariwisata
PRIORITAS PEMBANGUNAN 3 Peningkatan Kemudahan Berinvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan								32.427.153.764	
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5±1					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
		PDRB per Kapita	Juta Rp	170					
		LPE Non Migas dan Batubara	%	2,00					
		Nilai Tukar Petani	Nilai	113,00					
	Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah	Pendapatan Daerah	Miliar Rp	11.038	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya; Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	100 %; 108.243 Wajib Pajak	1.633.400.000	Badan Pendapatan Daerah
					Program Pengelolaan	Persentase tercapainya target	100%	11.471.100.000	Badan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Pendapatan Daerah	pendapatan asli daerah			
	Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara	Miliar US\$	1,72	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	5%	1.097.068.680	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB	%	9,64	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	2 industri	3.022.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya realisasi investasi sektor Non	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non	Triliun Rp	35,00	Program Pelayanan Penanaman Modal	Waktu penyelesaian proses perizinan	11 Hari	3.700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
	Migas dan non Batu Bara	Migas dan Batubara							Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	100%	1.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,05					
	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU	%	28,50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)	53,80	6.767.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
						Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,16		
						Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79,86		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
						Indeks kualitas air laut (IKAL)	83,61		
	Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	151,49	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	82,67%	3.235.585.084	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PRIORITAS PEMBANGUNAN 4 Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN								1.059.058.668.461	
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar		Indeks Gini	Indeks	0,313					
	Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang	Jumlah Penumpang yang terlayani	Orang	6.000.000	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	87%	5.005.777.515	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
	perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan								
		Jumlah barang yang diangkut	Ton	337.000.000	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	427 Kasus	18.601.404.483	Dinas Perhubungan
		Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung	Kawasan	5	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	76,15%	656.550.082.427	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Capaian akses air minum layak	%	68,53	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	66,64%	148.692.890.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
					Penyediaan Air Minum				Perumahan Rakyat
		Luas lahan pertanian yang beririgasi	Ha	14.278,50	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	70,50 %	85.936.542.880	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Luas kawasan kumuh	Ha	1.187,82	Program Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	70.781 unit	47.763.345.840	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Luas genangan banjir perkotaan	Ha	374	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	3020 meter	31.387.530.016	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
									Perumahan Rakyat
		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	76,74	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,91 indeks	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Rasio Elektrifikasi	%	93,00	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pemanfaatan EBT	7,34%	2.920.731.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah KK Berlistrik	1.165.000 KK	54.200.364.300	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PRIORITAS PEMBANGUNAN 5 Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik								18.863.177.452	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (71,50)					
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,10	5.136.725.291	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,25					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	77,00	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	79%	1.357.460.000	Sekretariat Daerah
						Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	79%	2.302.775.000	Sekretariat Daerah
	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar	90%	10.066.217.161	Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran (Rupiah)	PD Penanggung Jawab
						Akuntansi Pemerintah (SAP)			

Program prioritas Kalimantan Timur tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional RKP 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Program Pengembangan Ekspor
 - d. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - g. Program Penyuluhan Pertanian
 - h. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - i. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - k. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - l. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - m. Program Penyuluhan Pertanian
 - n. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - o. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - p. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - q. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - r. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - s. Program Pengelolaan Hutan
 - t. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
 - u. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - v. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - w. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
 - x. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
 - y. Program Pengembangan UMKM
 - z. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - aa. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka program prioritas daerah yang dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pembinaan Perpustakaan
 - c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 - d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - g. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - h. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - i. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - j. Program Penataan Desa
 - k. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - l. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - b. Program Pengelolaan Pelayanan
 - c. Program Penyelenggaraan Jalan
 - d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- e. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - f. Program Kawasan Permukiman
 - g. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - h. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - i. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Program Penanggulangan Bencana
7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penataan Organisasi
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 8 (delapan) direktif/arahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Direktif/arahan yang merupakan target kinerja dedikatif akhir masa jabatan Gubernur/Wakil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;
2. Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun;
3. 250.000 lapangan kerja;
4. Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;
5. Pembangunan 500 Km jalan produksi;
6. Penyaluran 100 Milyar modal usaha;
7. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera 25.000 unit;
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana pembangunan daerah tahun 2022 juga untuk mewujudkan implementasi Program Unggulan Kalimantan Timur yaitu :

1. Pengembangan nilai -nilai keagamaan dan budaya
2. Pengembangan Anjungan Kaltim di TMII sebagai etalase seni budaya Kalimantan Timur
3. Peningkatan Puskesmas Kecamatan menjadi Puskesmas terakreditasi minimal utama.
4. Pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu bertaraf internasional (Boarding School)
5. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas untuk percepatan pembangunan perdesaan
6. Peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/MA
7. Optimalisasi SMK dan BLK untuk mencetak tenaga kerja handal
8. Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan disabilitas
9. Peningkatan perlindungan anak
10. Optimalisasi sarana dan prasarana olahraga yang telah terbangun
11. Pemberian penghargaan bagi atlet dan pekerja seni yang berprestasi ditingkat nasional dan Internasional
12. Pembinaan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan
13. Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah
14. Peningkatan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
15. Pemberian bantuan rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera
16. Memperluas lapangan kerja baru dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal pada sektor industri hilir migas dan pertambangan
17. Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat
18. Pemberian kemudahan berinvestasi di sektor industri dan pertanian dalam arti luas
19. Pengembangan Sentra Perikanan laut dan perikanan darat
20. Penerapan tata niaga BBM yang mendukung stabilitas ketersediaan BBM di seluruh wilayah Kaltim
21. Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal
22. Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa
23. Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda
24. Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang
25. Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur

26. Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor
27. Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang
28. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis
29. Penerapan regulasi eksploitasi Sumber Daya Alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat
30. Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata
31. Rehabilitasi hutan lindung dan pencegahan kerusakan dan kebakaran hutan
32. Pengendalian lingkungan dalam rangka penurunan pencemaran tanah, air dan udara
33. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
34. Harmonisasi dan sinkronisasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terutama dalam urusan-urusan strategis
35. Peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN)
36. Peningkatan PAD melalui peningkatan hasil usaha daerah
37. Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan
38. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

4.2.4 Kebijakan Pemulihan Dampak Pandemi COVID-19

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 yang lalu dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang luar biasa memberikan dampak besar terhadap pencapaian target-target pembangunan termasuk pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *refocusing* anggaran sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2021 saat ini telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap kepada masyarakat, namun dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022 pelaksanaan vaksinasi terus dilanjutkan untuk mencapai *herd immunity*. Provinsi Kalimantan Timur menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 2.571.659 orang yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini capaian cakupan vaksinasi dosis 1 (pertama) sebanyak 365.960 orang

(14,23%) dan cakupan vaksinasi dosis 2 (kedua) sebanyak 242.279 orang (9,42%). Cakupan vaksinasi COVID-19 pada kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.7
Cakupan Vaksinasi COVID-19 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Dosis 1 (%)	Dosis 2 (%)
1	Berau	17,41	9,95
2	Kutai Barat	18,18	14,31
3	Kutai Kartanegara	12,26	9,20
4	Kutai Timur	8,45	5,63
5	Mahakam Ulu	28,17	21,03
6	Paser	9,70	6,61
7	Penajam Paser Utara	13,04	8,60
8	Balikpapan	16,69	10,12
9	Bontang	18,71	15,52
10	Samarinda	15,33	9,13

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, Update 11 Juli 2021

Kondisi perekonomian daerah akibat pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi cukup besar pada perekonomian Kalimantan Timur, seperti pertambangan dan penggalian (-4,58%), industri pengolahan (-2,77%), dan konstruksi (-1,27%). Turunnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang menopang perekonomian di Kalimantan Timur di masa pandemi ini, sebagian besar juga dipengaruhi akibat turunnya ekspor sebesar -2,66 persen. Kondisi pandemi ini juga berdampak pada terhambatnya realisasi investasi di Kalimantan Timur yang juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi ini diprediksikan akan mengakibatkan munculnya penduduk miskin baru. Selain itu, melambatnya roda perekonomian juga akan berdampak pada pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk ini ditandai dengan meningkatnya angka kemiskinan menjadi 6,10 persen dan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 6,87 persen.

Dalam rangka mengatasi dampak yang besar akibat COVID-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu merumuskan kebijakan yang tepat. Kebijakan pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19 difokuskan pada pemulihan kondisi perekonomian daerah dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Selain itu, pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi COVID-19 ini seperti pelaku UMKM, penduduk miskin, dan pengangguran yang muncul akibat PHK. Kebijakan ini tetap didukung dengan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, penguatan akses layanan infrastruktur dasar, memperkuat ketahanan bencana, memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, serta menjaga kondusivitas wilayah.

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan kondisi perekonomian daerah antara lain mendorong peningkatan pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang menjadi basis ekonomi daerah di Kalimantan Timur seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, serta pertanian. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kembali daya saing investasi Kalimantan Timur dengan memberikan insentif kepada investor, serta melakukan pemberdayaan ekonomi terutama bagi pelaku UKM/IKM, dengan tetap melakukan mengendalikan laju inflasi. Perekonomian daerah diyakini juga akan tumbuh seiring dengan pembangunan infrastruktur pendukung dalam upaya meningkatkan aksesibilitas distribusi barang dan jasa. Program pemulihan ekonomi dan sosial sangat dibutuhkan terutama untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah agar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dapat terserap kembali dan menggerakkan usaha-usaha yang sempat terhenti akibat pandemi. Adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran untuk mendukung pemulihan dampak pandemi COVID-19 dapat dilihat pada tabel IV.9.

Tabel IV.8

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	281.250.365.207	Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah menengah atas dan kejuruan terdiri dari pemberian Beasiswa dengan berbagai kriteria kepada Mahasiswa dan pelajar serta pemberian BOS dan BOSDA SMA	Dinas Pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	3.000.000.000	Penyediaan 2.000 orang calon Wirausaha Muda	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Upaya Pemenuhan Kesehatan	Penyediaan Pelayanan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan,	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi	220.596.260	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak dan terpapar Covid	Dinas Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	759.410.750	Pemberian informasi pentingnya asupan gizi dalam pemenuhan imun	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	305.600.000	Pentingnya hidup bersih dan sehat (Germas)	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.235.484.500	Pelayanan kepada penduduk terkait dengan penyakit menular	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka promotif, preventif tingkat daerah provinsi	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	504.923.350	Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)	Dinas Kesehatan
Program Upaya Pemenuhan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Srana,	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman	3.202.363.432	Pengadaan Alat Pelengkap Diri (APD) dan obat COVID-19	RSUD. A. Wahab Sjahranie

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prasarana dan alat kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi	serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.150.257.868	Pelatihan bagi pencari kerja yang di PHK dan dirumahkan yang dikarenakan dampak COVID-19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	149.625.000	Pemberian informasi bagi pencari kerja yang terdampak COVID-19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Job Fair/Bursa Kerja	120.934.060	Pemberian informasi bagi pencari kerja yang terdampak COVID-19	
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	402.259.320	Pembinaan dan pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan terhadap	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				protokol kesehatan selama Pandemi COVID-19	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	1.375.000.000	Pembinaan dan Pengawasan BUMDes dalam memperkuat dan menjalankan Pemerintahan dan perekonomian Desa secara optimal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.200.000.000	Kegiatan Fasilitasi dan Penyuluhan kepada Tim Penggerak PKK terkait pembinaan kesejahteraan keluarga dan penanganan COVID-19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.172.304.800	Pemberian Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin Mandiri	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	271.143.400	Pendampingan Pengembangan UKM. Yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah sektor UMKM sehingga menjadi kunci pemulihan ekonomi di tengah pandemi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Perencanaan Dan	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	2.440.000.000	Fasilitasi Gelar Produk Kerajinan dan Industri Kaltim, Pendampingan IKM olahan Nira	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Pembangunan Industri	Pembangunan Industri Provinsi	dan Peran Serta Masyarakat		Aren dan Rumput Laut Yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah sektor UMKM sehingga menjadi kunci pemulihan ekonomi di tengah pandemi	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.688.920.492	Pelatihan bagi Koperasi dan UKM sebanyak 1200 orang (Kegiatan Dinas dan UPTD). Yang paling terdampak pandemi COVID-19 adalah sektor UMKM sehingga menjadi kunci pemulihan ekonomi di tengah pandemi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	375.000.000	Pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat di desa wisata, salah satunya adalah yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi (7 Desa Wisata). Untuk mengembalikan	Dinas Pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				kepercayaan pengunjung wisata bahwa daerah tersebut sudah menerapkan protocol kesehatan	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	6.465.557.600	Bantuan Sarana Produksi Perkebunan berupa herbisida, benih, Pupuk NPK dalam rangka upaya peremajaan Intensifikasi, Rehabilitasi Komoditi Perkebunan Unggulan Provinsi Kaltim (Kelapa Sawit, Kakao, Aren, Lada, Karet, Kelapa Dalam). Hal ini dilakukan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi rakyat saat pandemi COVID-19	Dinas Perkebunan
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.993.215.458	Perbanyak Benih Tanaman Perkebunan sebanyak 5.000 benih dengan melibatkan masyarakat secara padat karya sekitar UPTD Produsen Benih	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Tanaman Perkebunan dalam rangka pemeliharaan bahan tanaman perkebunan semusim dan rempah serta pengisian dan pengaturan Polybag dalam Bedengan ±175 orang	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	6.722.948.500	Bantuan Sarana Produksi Perkebunan berupa herbisida, benih, Pupuk NPK dalam rangka Perluasan Areal Komoditi Perkebunan Unggulan Provinsi Kaltim (Kakao, Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Lada, Pala). Hal ini dilakukan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi rakyat saat pandemi COVID-19	Dinas Perkebunan
Program Pengendalian Dan Penanggulangan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	1.252.428.400	Pembinaan bagi Lembaga Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) sebanyak 2 lembaga agar tidak	Dinas Perkebunan

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Bencana Pertanian		Hortikultura, dan Perkebunan		terjadi kerugian akibat hama dan penyakit tumbuhan	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	750.000.000	Pembinaan Kemitraan antara Lembaga Pekebun dan Perusahaan Perkebunan (45 lembaga pekebun) guna meningkatkan pendapatan dan kepastian pasar bagi pekebun rakyat utamanya di masa Pandemi COVID-19	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.093.750.000	Promosi dan pembinaan pemasaran terhadap produk unggulan perkebunan (9 Produk) dalam rangka peningkatan pendapatan pekebun terutama di masa pandemi COVID-19	
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	533.825.000	Bimtek dan Bina Kelompok bagi Pekebun dalam rangka mekanisme perluasan/pengembangan	Dinas Perkebunan

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Tanaman Perkebunan sebanyak 20 Kali Pertemuan	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	552.475.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pekebun (28 Lembaga)	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	739.718.000	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya bagi 5 pelaku usaha • Pembentukan dan pembinaan bagi Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama (UPPB) komoditas perkebunan sebanyak 5 unit 	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	236.460.000	Pemberian Pelatihan Sekolah Lapang Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman (SL-PHT) sebanyak 1 pertemuan guna	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				memurangi kerugian pekebun akibat hama	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	654.600.000	Pengelolaan kawasan konservasi yang secara efektif dan berkelanjutan sebanyak 2 kawasan (Berau dan Bontang). Khususnya Kab. Berau dilakukan Pengembangan Model Usaha Ekowisata Pulau Kakaban di KKP3K KDPS Berau. Sehingga diharapkan dari kegiatan menciptakan sumber perekonomian terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	255.000.000	Pertemuan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi sebanyak 2	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Pertemuan. Adapun pertemuan tersebut berupa Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Wisata Bahari dan Wisata Pantai di Kab. Kutai Timur dan Penajam Paser Utara. Diharapkan dari kegiatan tersebut dapat menjadi perekonomian alternatif bagi masyarakat pesisir	
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	385.000.000	Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional sebanyak 4 Fasilitasi. Fasilitasi ini berupa Fasilitasi Perizinan Berusaha di Kab. Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Bontang.	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Diharapkan dengan fasilitasi ini menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baik secara kewilyah dan kerakyatan bagi masyarakat pesisir	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	240.606.918	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebanyak 2 kegiatan. khususnya bagi Kelompok Wanita Pesisir terhadap Pengolahan Hasil Perikanan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	384.614.200	Pendampingan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bagi 2 Lembaga. Kegiatan berupa diseminasi Pembentukan Kelompok Wanita Nelayan.	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	217.500.000	Fasilitasi akses kemitraan masyarakat dalam pengawasan KKP menuju Pengelolaan dan pemanfaatan KKP yang berkelanjutan sebanyak 6 kali Fasilitasi. Dimana diantaranya adalah Pelatihan Produk Olahan Turunan Mangrove dan Pemberian Sarana Prasarana Olahan Mangrove	
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	760.000.000	Pertemuan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan dan Pelatihan sebanyak 5 kali pertemuan. Pertemuan tersebut diantaranya berupa bimbingan dan pelatihan Teknis Pengolahan Garam di Kab. Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, Diharapkan dengan	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				pelatihan tersebut dapat meningkatkan hasil produksi garam kaltim dan berdampak pada pemulihan ekonomi bagi masyarakat pesisir	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.786.305.000	Pemberian Bantuan Sarana Usaha Perairan Laut yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 64 KUB. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan peningkatan kesejahteraan nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	705.932.000	Pemberian Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 4 KUB. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			peningkatan kesejahteraan nelayan	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	66.369.300.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana berupa Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan pada 1 Unit yakni Pembangunan Dermaga PPI Tanjung Limau Bontang. Diharapkan dengan pembangunan dermaga ini dapat meningkatkan perekonomian dan produksi sektor perikanan tangkap di Kaltim khususnya pada masa Pandemi COVID-19	
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	800.000.000	Penyediaan Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan sebanyak 6 PPI. Diharapkan dengan pemenuhan operasional	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				PPI ini dapat meningkatkan perekonomian dan kebutuhan pangan (ikan) di Kaltim	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.263.984.000	Penyediaan Prasarana Operasional Balai Percontohan Budidaya Perikanan bagi 3 Unit Teknis Balai Pembenihan Ikan, serta Penyediaan Prasarana Perikanan Budidaya Air Laut bagi 10 Unit Teknis. Diharapkan dengan pemenuhan prasarana ini dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan benih ikan bernilai ekonomi tinggi di Kaltim yang berdampak pada peningkatan produksi budidaya ikan laut dan peningkatan perekonomian sektor perikanan dalam rangka pemulihan ekonomi pada/pasca pandemi COVID-19	Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		<p>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	922.960.000	<p>Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar yg disediakan sebanyak 7 unit, serta Penyediaan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar (BIOFLOG) sebanyak 5 unit. Diharapkan dengan pemenuhan prasarana ini dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan benih ikan lokal bernilai ekonomi tinggi di Kaltim yang berdampak pada peningkatan produksi budidaya ikan laut dan peningkatan perekonomian sektor perikanan dalam rangka pemulihan ekonomi pada/pasca pandemi COVID-19</p>	
		<p>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</p>	192.880.000	<p>Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya bagi 1 Pokdakan. Adapun sarana budidaya yang diberikan berupa Benih Karapu dan pakan di Kabupaten Berau. Diharapkan dengan pemenuhan</p>	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		<p>Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	1.383.173.000	<p>prasarana ini dapat meningkatkan peningkatan produksi budidaya ikan laut dan peningkatan perekonomian sektor perikanan dalam rangka pemulihan ekonomi pada/pasca pandemi COVID-19</p> <p>Penyediaan Benih Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar sebanyak 1.000.000 benih, dan Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya Air Payau dan Air Tawar bagi 19 Pokdakan. Selain itu pada sub kegiatan ini dilakukan pula Pengembangan Pembenihan Ikan Lokal Air Tawar Kaltim bekerjasama Universitas Mulawarman. Diharapkan dari kerjasama tersebut menghasilkan teknologi</p>	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				budidaya yang tepat dan sesuai dalam rangka budidaya ikan lokal bernilai ekonomi tinggi khususnya di areal 3 Danau (Jempang-Semayang-Melintang)	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	920.254.000	<p>Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan yang Ditangani sebanyak 2 kasus.</p> <p>Selain penanganan kasus, pada sub kegiatan ini pula terdapat pengadaan Benih Ikan Laut Ekonomis Penting (KJA) bagi Eks Nelayan Destructive Fishing di Bontang dan Pengadaan Pembuatan KJA sebagai Mata Pencaharian Alternatif bagi Eks Nelayan Destructive Fishing di Bontang sebanyak 2 Unit.</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				Diharapkan dengan pengadaan benih dan pembuatan KJA tersebut dapat meningkatkan perekonomian nelayan pada masa COVID-19	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	545.450.000	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 20 sertifikat. Sebelum dilakukan penerbitan SKP, maka dilakukan kegiatan pembekalan SKP bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menjamin produk olahan perikanan dan dapat meningkatkan omset/pendapatan bagi UPI dan UMKM	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap	534.825.000	Pendampingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		hasil perikanan sebanyak 2 kegiatan. Diharapkan dengan adanya sub kegiatan ini produk-produk olahan hasil perikanan Kaltim memiliki daya saing tinggi serta memicu pertumbuhan ekonomi	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	2.145.711.754	Bantuan yg diserahkan ke masyarakat: Sapi Bali 122 ekor dan obat-obatan pendukung	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	683.500.000	13 Sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	
	Penataan Prasarana Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	10.023.538.200	49 unit <i>mini ranch</i> diserahkan ke masyarakat	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	506.400.000	6.000 Stek/Pols bibit HPT yang diproduksi	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	694.325.000	200.000 Stek/Pols bibit HPT yang disediakan	
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	530.400.000	3 kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	600.000.000	Pemeriksaan kesehatan hewan target 900 ekor	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	364.550.000	Vaksinasi hewan di 5 kab/kota	
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	304.200.000	30 kelompok ternak yang dibina/dilatih	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	360.000.000	4 buku yg disusun; Buku Statistik Peternakan, Buku Neraca Bahan Makanan, Buku Data Fungsi Peternakan, Buku <i>Database</i> Peternakan	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	24.093.110.000	Bantuan yang diserahkan ke masyarakat: alsintan hortikultura 15 Unit; alsintan tanaman pangan 25 Unit; benih hortikultura 40.000 batang; benih padi 200.000 Kg; herbisida hortikultura 750 Liter; hormon hortikultura 1.000 Kg; pupuk tanaman pangan 400.000 Kg	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	794.550.000	Obat-obatan dan Benih Buah dan tanaman	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan	860.000.000	Obat-obatan dan Demplot	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peredaran Benih Tanaman	Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			
Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.028.800.000	210 petani yang dilatih agar menerapkan teknologi pertanian	Uptd Balai Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	523.933.000	Koordinasi pengumpulan dan analisa data ketersediaan dan neraca pangan Provinsi dan Kab/Kota untuk penanganan kerawanan pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	600.884.266	40 orang yang dilatih untuk penguatan kelembagaan pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Program Peningkatan	Pengelolaan dan Keseimbangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan	757.436.000	310 Ton beras untuk cadangan pangan pemerintah	Dinas Pangan, Tanaman

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			Pangan Dan Hortikultura
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	449.999.564	2 buku yang disusun; Buku Informasi harga pangan, Buku Neraca Bahan Makanan	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	559.999.540	3 Unit Usaha Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	947.956.300	12 Produk pangan lokal yang dikembangkan dan di promosikan	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Berbasis Sumber Daya Lokal			
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	636.043.700	6 pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.000.000.000	15 Kali Gerakan Pengendalian OPT	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan	1.821.875.350	Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat berupa Alat Masak - oven kompor dan memberikan upah kerja pembibitan kayu	Dinas Kehutanan

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		laban, pengelolaan jasa lingkungan wisata alam serta pengolahan arang aktif. masyarakat terlibat dalam pemeliharaan HHBK	
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	27.983.199.720	Memberikan bahan kimia cair, padat, pupuk untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan rakyat serta pemberian bibit sengon, jahe putih/jahe gajah, kemiri, kayu, jagung putih, trembesi, tanaman MPTS Generatif dan MPTS Vegetatif. memberikan upah kerja kepada masyarakat dalam pemeliharaan tanaman. memberikan cangkul	
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	7.261.244.100	Memberikan bibit tanaman pertanian MPTS vegetatif dan generatif. memberikan bahan		

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				kimia untuk pembuatan kebun bibit semai. Memberikan Bantuan Upah Tenaga Kerja dalam pemeliharaan Bibit	
		Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	1.398.785.750	Memberikan bantuan berupa Alat Angkut Roda 4 Quick Truck Qt-14e starter elektrik untuk angkutan kayu. memberikan bibit porang dan MPTS vegetatif kakao.	
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2.841.798.650	Memberikan Bantuan Upah Tenaga Kerja dalam pemeliharaan Bibit. Memberikan Upah kerja Pengolahan HHBK Sereh Wangi, Budidaya Tanaman Porang. memberikan bibit Rotan dan MPTS Generatif. memberikan upah kerja dan peralatan kerja dalam penyiapan jalur dan penanaman bibit.	

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	752.489.000	Memberikan bibit tanaman pertanian dan pelatihan perbenihan tanaman hutan.	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	758.239.600	Memberikan bahan kimia untuk produksi bibit dan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa gerobak pasir, pompa air beserta pelengkap, upah kerja.	Dinas Kehutanan
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Provinsi	600.000.000	Pemulihan terhadap dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat baik dari sisi psikologi, kesehatan maupun sosialnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengelolaan Informasi Dan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Pelayanan Informasi Publik	4.100.000.000	Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 agar	Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Komunikasi Publik	Publik Pemerintah Daerah Provinsi			masyarakat lebih waspada terhadap penularan COVID-19 sehingga memiliki kesadaran sendiri untuk menghindari penularan yang lebih luas	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	83.251.500	Menyampaikan informasi atau mensosialisasikan tentang penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat agar dapat memahami tentang penegakan Perda	Satpol PP
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	62.068.500	Melakukan pengawasan kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 yang lebih meluas	Satpol PP
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	126.130.000	Untuk mencegah kerumunan di tengah masyarakat dalam rangka mengurangi dan mencegah dampak penularan	Satpol PP

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU SUBKEGIATAN	OUTPUT DAN PENJELASAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
				covid-19 di masyarakat yang lebih luas	

4.2.5 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2022

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2023), mendukung prioritas pembangunan Nasional tahun 2022, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah terutama berkaitan dengan isu pemulihan dampak pandemi COVID-19. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel IV.9
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
<p>Sekolah sebagai pelaksana program belum menerima pelimpahan wewenang secara formal (Surat keputusan penunjukan pelaksana program) untuk melaksanakan program tersebut;</p> <p>Rendahnya ketersediaan tenaga guru pengganti selama guru yang bersangkutan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi PTK;</p> <p>Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan yang dilakukan oleh Kemendikbud;</p> <p>Komitmen penentu kebijakan belum bersifat komprehensif, masih bersifat parsial, sehingga pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada Kabupaten Kota Layak Anak belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan;</p> <p>Penyalahgunaan pemanfaatan ruang terbuka hijau/taman oleh sebagian warga untuk kegiatan yang tidak relevan sehingga tidak mendukung penanaman nilai dan proses tumbuh kembang anak;</p> <p>Kasus perkawinan usia dini/anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kemiskinan sehingga menghambat program perlindungan dan pemenuhan hak anak;</p>	<p>Belum Merata dan Kautnya Daya Saing Sumber Daya Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 2. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial 	<p>PP 1 : Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan yang Mendukung Daya Saing SDM</p>

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
<p>Akses (ketersediaan dan keterjangkauan) layanan perpustakaan masih terbatas karena berada di pusat kota dan jauh dari wilayah pedesaan. Di sisi lain, sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menjangkau layanan perpustakaan dalam jaringan (online) bagi masyarakat di wilayah pedesaan juga belum tersedia secara memadai.</p>			
<p>Indikator yang belum secara khusus mengarah pada jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya;</p>			
<p>Beberapa kegiatan bukan merupakan prioritas untuk mendukung pencapaian target program yang ingin dicapai;</p>			
<p>Realisasi program bergantung pada data dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial;</p>			
<p>Realisasi program menunggu Peraturan Gubernur terkait data sasaran masyarakat miskin dan kurang mampu yang menerima JKN.</p>			
<p>Jadwal pelaksanaan mengikuti agenda kegiatan dari institusi pusat sehingga institusi daerah hanya bersifat menunggu;</p>			
<p>Proses penetapan standarisasi infrastruktur olahraga belum selesai;</p>			
<p>Program dan kegiatan terkait peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda tidak terlaksana ditahun sebelumnya.</p>			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Pendekatan pendidikan vokasional belum menjadi prioritas program untuk meningkatkan kompetensi SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja; kurikulum, modul belajar, sistem sertifikasi);			
Keterbatasan perangkat (keras/sarana dan prasarana) institusi penyelenggara pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.			
Program dan kegiatan untuk pengembangan lembaga ekonomi pedesaan masih belum jelas peruntukan maupun penentuan lembaga ekonomi yang dibangun;			
Belum ada spesifikasi dan regulasi lembaga ekonomi yang dikembangkan sehingga kemungkinan salah sasaran menjadi lebih besar;			
Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian;			
Minimnya sarana dan prasarana sistem informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan;			
Program pembangunan desa dan kawasan masih terhambat oleh aksesibilitas;			
Cakupan luas geografi pedesaan dan kawasan di Kalimantan Timur masih sangat luas;			
Masih rendahnya SDM aparatur desa yang memahami administrasi pemerintahan sehingga menyulitkan			
PP 2 : Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;			
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat di pelosok desa Kalimantan Timur;			
SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih belum terampil dan lengkap untuk mendukung pembentukan kawasan pariwisata andalan;	Lambannya Transportasi Ekonomi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	1. Percepatan Transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal 2. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	
Beberapa kegiatan aktraksi wisata di Kalimantan Timur masih belum terorganisasi secara professional untuk menarik daya wisatawan;			
Infrastruktur di beberapa destinasi pariwisata masih belum memadai menjadi obyek wisata serta belum optimalnya fasilitas keamanan bagi wisatawan yang berkunjung			
Aksesibilitas destinasi pariwisata di Kalimantan Timur masih kurang;			
Belum ada lembaga pengelola pariwisata di Kalimantan Timur yang professional;			
Belum adanya regulasi dan kebijakan pengaturan dan pengelolaan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur (Rencana Induk Pariwisata Daerah);			
Belum adanya standar tarif keuangan terhadap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur.			
Daya saing produk yang masih rendah;			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Rendahnya akses pemasaran;			
Rendahnya akses keuangan;			
Rendahnya penguasaan teknologi informasi			
Belum adanya sistem kendali produksi dan perdagangan sektor industri di Kalimantan Timur;			
Belum ada <i>mapping</i> dan <i>data base</i> produksi bahan baku yang menjadi suplai bagi industri;			
Belum adanya database SDM terampil dan terlatih yang siap diterima Dunia Usaha Dunia Industri di Kaltim;			
Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim;			
Masih rendahnya dukungan terhadap pengembangan industri kreatif di Kalimantan Timur			
Belum terkonektivitasnya sentra produksi pertanian dengan kawasan industri pengolahan;			
Rendahnya kesesuaian lahan yang terdapat di RTRW;			
Ketersediaan infrastruktur irigasi yang belum terwakili di seluruh kawasan pertanian;			
Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga pertanian di Kalimantan Timur;			
Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di kawasan pertanian;			
Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produktivitas pertanian;			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Belum adanya Optimalisasi lahan yang sudah ditetapkan di RTRWP Kaltim;			
Lemahnya peran UPTD dalam mendorong peningkatan ketersediaan benih dan produktivitas padi dan tanaman hortikultura;			
Belum adanya optimalisasi terhadap peran pertanian sistem berladang (padi ladang) padahal sistem ini merupakan unsur kearifan lokal di Kalimantan Timur.			
Belum adanya penetapan kawasan peternakan di RTRW Kalimantan Timur;			
Rendahnya ketersediaan bibit dan bakalan ternak di Kalimantan Timur;			
Penggunaan pola peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sistem pengadaan dan mendatangkan ternak dari daerah lain;			
Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga peternakan dan produk asal hewan di Kalimantan Timur;			
Belum ada program penguatan keterampilan kelembagaan peternak di Kaltim;			
Kemampuan permodalan peternak di Kaltim yang masih terbatas;			
Belum adanya industri peternakan besar yang bergerak sisi hulu sampai hilir produk ternak di Kaltim; dan Belum adanya industri pakan ternak di Kaltim;			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Tingkat pengetahuan manajemen pemeliharaan ternak oleh peternak yang masih rendah;			
Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan keswan di Kaltim;			
Rendahnya penguasaan peternak terhadap teknologi pemanfaatan lahan peternakan sebagai kawasan pengembangan ternak;			
Masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan penguasaan teknologi terhadap peternak;			
Kurangnya jumlah aparatur peternakan seperti inseminator, paramedik veteriner dan petugas medik layanan keswan di Kaltim;			
Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan peternakan;			
Rendahnya populasi dan produktivitas ternak di kaltim menjadikan keterbatasan pemenuhan kebutuhan daging ternak (ruminansia).			
Belum terkoneksi sentra produksi perkebunan dengan kawasan industri pengolahan;			
Rendahnya kesesuaian lahan perkebunan yang terdapat di RTRW;			
Masalah lahan bagi pengembangan kebun baru di perkebunan yang diakibatkan ketidaktuntasan kesesuaian RTRWP;			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Belum adanya industri hilir (hilirisasi industri) sektor perkebunan			
Aksesibilitas kawasan perkebunan di kaltim masih rendah;			
Program pengembangan sektor perkebunan lebih memfokuskan kepada komoditi kelapa sawit padahal terdapat komoditi yang lain sebagai potensi unggulan;			
Belum ada <i>database</i> produksi sektor perkebunan sehingga perhitungan berdasarkan laporan perusahaan;			
Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga perkebunan dan produk perkebunan di Kalimantan Timur;			
Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perkebunan di Kaltim;			
Masih kurangnya SDM di perangkat daerah sektor perkebunan dalam melakukan kontrol dan evaluasi produksi industri perkebunan			
Belum ditetapkannya Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai bagaian penataan ruang wilayah pesisir dan kelauatan Kaltim;			
Belum optimalnya pengawasan UU <i>fishing</i> di wilayah kelautan yang menjadi hak pengelolaan suatu provinsi (0 – 12 mil);			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Belum optimalnya peningkatan kapasitas perangkat daerah SDM kelautan dan perikanan terutama dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan perikanan dan kelautan;			
Belum optimalnya industri pengolahan perikanan di Kaltim sehingga hasil tangkapan perikanan dan kelautan langsung masuk di sistem perdagangan;			
Masih rendahnya pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi oleh nelayan-nelayan di Kaltim;			
Belum optimalnya pengawasan sistem kendali dan tata kelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kaltim;			
Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perikanan dan kelautan di Kaltim;			
Masih rendahnya program pemberdayaan nelayan-nelayan di Kaltim;			
Belum optimalnya peran UPTD Pembenihan dalam mendukung penyediaan benih dan produktivitas kawasan perikanan			
Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor kehutanan di Kaltim;			
Belum adanya regulasi dan kebijakan terhadap pengawasan dan pengendalian produksi dan			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
perdagangan sumberdaya alam secara langsung dari perangkat daerah;			
Aksesibilitas produksi dari kawasan produksi ke pusat pelayanan ekonomi belum terkoneksi dengan baik sehingga terjadi sistem perdagangan sumberdaya alam tidak keluar pada pusat pelayanan ekonomi yang telah ditetapkan			
Jumlah dan pengelolaan terminal produksi belum tertata dan terdokumentasi secara baik;			
Belum adanya sistem kendali bahan baku industri kehutanan untuk mendorong program hilirisasi industri kehutanan;			
Besarnya peran swasta dan masyarakat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi tanpa bisa diimbangi peran perangkat daerah dalam mendukung kegiatan tersebut;			
Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang dibuat perangkat daerah sebagai penanggung jawab kawasan;			
Perencanaan program kerja perangkat daerah belum berbasis geospasial, geoekonomi dan geososiokultur sehingga potensi dan pengelolaan kawasan belum optimal;			
Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sistem tata kelola produksi kawasan.			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Belum adanya regulasi dari perangkat daerah yang berbasis pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas ekonomi di kawasan produksi sehingga masih belum terdata potensi penerimaan daerah yang ada di Kaltim;			PP 3 : Peningkatan Kemudahan Berinvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan
Belum adanya <i>database</i> produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang menjadi potensi penerimaan daerah;			
Perencanaan program kerja perangkat daerah bidang pendapatan belum berbasis geospasial dan geoekonomi belum optimal dalam mengeksplorasi potensi pendapatan daerah;			
Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan daerah;			
Jumlah UPTD Pendapatan sebagai pelaksana teknis masih kurang optimal dari sisi kuantitas dan kualitas;			
Program kegiatan yang direncanakan hanya bersifat rutinitas sehingga inovasi untuk menemukan sumber pendapatan baru masih belum maksimal;			
Program menemukan sumber pendapatan baru tidak dilaksanakan pada tahun sebelumnya;			
Faktor kekurangan SDM di tingkat UPTD menyebabkan upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan retribusi dan pajak belum maksimal;			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Belum adanya revisi regulasi dan kebijakan tentang keterbaruan struktur pendapatan daerah Kalimantan Timur.			
Disharmoni terhadap kebijakan dan regulasi investasi antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat;			
Infrastruktur pelabuhan ekspor masih belum lengkap;			
Masih cukup lamanya proses perizinan investasi sehingga mempengaruhi biaya perizinan investasi di daerah;			
Belum cukupnya ketersediaan energi untuk kebutuhan industri;			
Aksesibilitas antara sentra produksi dengan kawasan industri belum terkoneksi sehingga investor harus mempersiapkan biaya pembangunan jalan produksi dan pengangkutan.			
Belum adanya pengembangan industri pengolahan berdasarkan ketersediaan produksi bahan baku sehingga industri di Kalimantan Timur bersifat industri bahan baku;			
Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong dan kemudahan berinvestasi di Kalimantan Timur;			
Masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas dalam pengelolaan sumber daya alam;	Belum Meratanya Aksesibilitas dan	Peningkatan aksesibilitas dan	

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Kondisi geografi dan topografi Kaltim yang luas dan bervariasi;	Konektivitas dari dan ke Sentra Produksi	penguatan konektivitas infrastruktur wilayah	PP 4 : Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN
Masih kecilnya dana pembangunan (APBD) Kaltim sehingga belum optimalnya peningkatan aksesibilitas wilayah;			
Masih rendahnya pola kesesuaian ruang antara kawasan produksi dengan kawasan lain di dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;			
Sarana dan prasarana pembangunan aksesibilitas daerah terkendala dengan harga bahan baku yang mengikuti keberadaan lokasi daerah pembangunan sehingga biaya pembangunan menjadi mahal;			
Disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan jalur transportasi misalnya pelabuhan dan bandara;			
Program dan kegiatan untuk konektivitas antar kawasan harus dapat disinkronkan dengan perangkat daerah yang lain sebagai pengelola kawasan produksi;			
Masih terdapat disharmoni regulasi kebijakan antar pengelola kawasan sentra produksi sehingga belum terbangun konektivitas;			
Aktivitas kawasan produksi yang relatif bergerak secara parsial;			
Topografi dan geografi Kaltim yang sangat luas;			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
Belum optimalnya dukungan pembiayaan pembangunan antar kawasan dari Kabupaten/Kota di Kaltim			
Pengimplementasian program menjadi ke arah penanganan banjir sehingga menjadi program kurang tepat sasaran;			
Disharmoni kebijakan antar perangkat daerah dalam upaya mengkonektivitas kawasan dalam upaya pengelolaan SDA salah satunya ketersediaan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi;			
Keterbatasan lahan pembangunan infrastruktur sumber daya air;			
Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penyedia air baku bagi masyarakat;			
Pelaksanaan operasi pemeliharaan yang belum optimal terhadap infrastruktur sumber daya air yang ada;			
Budaya masyarakat di Kaltim yang memanfaatkan air sungai, danau dan rawa secara langsung;			
Masih adanya ketidaksesuaian Perda RTRW antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama pada struktur dan pola ruang;			
Tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan yang terstruktur, akurat, dan cepat akibat dari tidak lengkapnya Rencana Rinci Tata Ruang KSP yang berkekuatan hukum;			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
<p>Masih tingginya perubahan alih fungsi lahan dan inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang;</p> <p>Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan penataan ruang masih rendah</p> <p>Belum ada <i>mapping</i> dan <i>data base</i> penanganan dan penataan kawasan kumuh di beberapa kota di Kaltim;</p> <p>Belum adanya peran kesadaran masyarakat dalam menata pemukiman;</p> <p>Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong penataan pemukiman di kota agar tidak berubah menjadi kawasan kumuh;</p> <p>Pembangunan dan penataan kawasan pemukiman akan beriringan dengan tingkat ekonomi masyarakat.</p> <p>Disharmoni kebijakan antara pemerintah daerah dengan perusahaan negara yaitu PLN dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Kaltim;</p> <p>Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik masih agak sulit menembus di daerah pedalaman;</p> <p>Belum adanya regulasi baik di secara nasional maupin di daerah terhadap mendorong pemanfaatan energi terbarukan khususnya pada sektor limbah perkebunan kelapa sawit.</p>			
<p>Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;</p>		<p>Percepatan Transformasi ekonomi</p>	

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
<p>Masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas dalam pengelolaan sumber daya alam;</p> <p>Keterbatasan database serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terkait dengan minimnya anggaran.</p>	<p>Semakin Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>berbasis sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan secara vertikal maupun horizontal</p>	
<p>Masih cukup banyak SOP perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>Belum tersosialisasinya dokumen pelayanan publik yang ada di setiap perangkat daerah;</p> <p>Beberapa perangkat daerah melakukan hosting lokasi yang berbeda-beda tidak dalam 1(satu) data center.</p> <p>Target untuk interkoneksi melebihi realisasi dapat terwujud dengan anggaran pemerintahan yang memadai</p> <p>Sistem Informasi di setiap perangkat daerah yang berbeda membutuhkan web service/API</p>	<p>Belum Tercapainya Pelayanan Publik yang Optima</p>	<p>Pemerintahan yang profesional dan akuntabel</p>	<p>PP.6 : Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>
<p>Pengintegrasian aplikasi masih menjumpai kendala berupa kurangnya SDM yang menguasai teknologi <i>framework</i>, bisnis proses yang belum matang, koordinasi dengan <i>stakeholder</i> mengenai penggunaan aplikasi serta terdapat ketidaksesuaian bahasa pemrograman dari aplikasi sebelumnya dan perlu dilakukan normalisasi terhadap basis data aplikasi. Disamping itu, masih terdapat instansi pemerintah yang</p>			

Permasalahan Berdasarkan Urusan	Permasalahan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2022
menggunakan subdomain diluar subdomain kaltimprov.go.id			
Dari hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan hasilnya ke BPKP Pusat, yang menjadi permasalahan dalam menuju Level 3 adalah dari 5 unsur penilaian ada 3 unsur masih dalam level 2. Ketiga unsur tersebut 1) Peran Layanan, yaitu Audit Kinerja dan Jasa Konsultasi. 2) Pengelolaan SDM, yaitu Koodinasi SDM, Pegawai Yang Profesional dan Membangun Tim dan Kompetensinya. 3) Praktek Profesional, yaitu: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan KerangkaKerja Manajemen Kualitas.			
Belum terintegrasinya dalam satu sistem informasi proses pengawasan internal antara Inspektorat, PPNS dan Pimpinan Pemerintah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagai satu kesatuan pengawasan pegawai provinsi			

Tabel IV.10
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2019-2023

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023
1.	Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM	Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (<i>Boarding School</i>) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh Pengembangan perpustakaan berbasis IT Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen Fasyankes maupun fasilitasnya Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
2.	Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa Penguatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan Peningkatan pengembangan Kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja Peningkatan keterampilan angkatan kerja Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM Pengembangan platform pasar koperasi dan UKM berbasis digital Peningkatan kualitas produk koperasi dan UKM Fasilitasi permodalan koperasi dan UKM Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Peningkatan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura

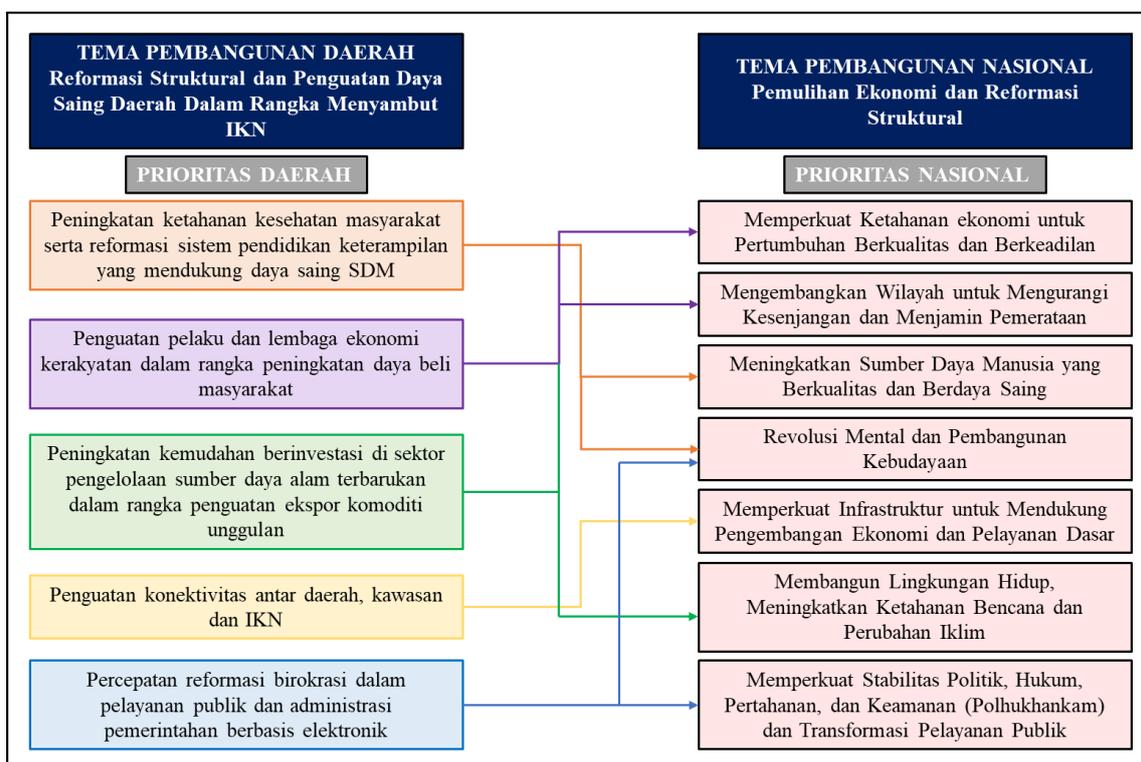
No	Prioritas Pembangunan RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023
		<p>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura</p> <p>Peningkatan produksi ternak berkualitas</p> <p>Pengembangan Kawasan Peternakan</p> <p>Peningkatan produktivitas Komoditas unggulan perkebunan</p> <p>Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Non Sawit</p> <p>Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir</p> <p>Peningkatan nilai tambah dan stabilitas harga di tingkat petani</p> <p>Pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Bidang Perikanan</p> <p>Peningkatan Sarana Prasarana Perbenihan dan Produksi Perikanan</p> <p>Perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan</p> <p>Penguatan informasi potensi kawasan hutan</p> <p>Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu</p> <p>Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan</p> <p>Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan</p> <p>Peningkatan layanan amenities produk wisata Kaltim</p> <p>Peningkatan layanan pemasaran produk wisata dan sub sektor ekonomi kreatif Kaltim</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM pemangku produk wisata Kaltim</p> <p>Implementasi peta jalan pengembangan sub sektor Ekonomi Kreatif Kaltim</p> <p>Penguatan daya saing produk sub sektor ekonomi kreatif Kaltim</p>
3.	Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam	<p>Peningkatan pendapatan, pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah</p> <p>Penambahan atas potensi penerimaan daerah yang bersumber dari usaha/ badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Timur</p>

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023
	rangka penguatan ekspor komoditi unggulan	Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor Peningkatan efisiensi pelayanan, pengamanan dan perlindungan ekspor Pengembangan kawasan industri prioritas provinsi Pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan Pengembangan sumber daya manusia pelaku IKM Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investasi industri non migas dan non batubara Peningkatan kualitas pelayanan terpadu pelaksanaan investasi berbasis elektronik Pemantauan komitmen perizinan Peningkatan pengawasan pelaksanaan perizinan penanaman modal
4.	Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN	Peningkatan fungsi layanan dan keselamatan perhubungan Pembenahan manajemen transportasi, khususnya konektivitas antar moda transportasi Pembangunan, Rekonstruksi dan pemeliharaan jalan Peningkatan sarana dan prasarana air baku Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan serta jaringan distribusi air minum Penyelenggaraan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (Regional) Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) dan sub sistemnya Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta Energi Baru Terbarukan (EBT) Penyesuaian tata ruang tingkat provinsi dan kabupaten/Kota yang selaras untuk mendukung IKN Menjadikan dokumen tata ruang sebagai rujukan dalam pemanfaatan ruang Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023
5.	Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik
		Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
		Pengembangan E-Gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan salah satu acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan prioritas pembangunan nasional disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar IV.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP Tahun 2022



Keterkaitan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan sasaran pembangunan nasional RKP Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.11

Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2022 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Sasaran PN 1	
Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Sasaran 7: Meningkatkan pendanaan pembangunan pemerintah
	Sasaran 9: Meningkatkan kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
	Sasaran 10: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)
	Sasaran 12: Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM
	Sasaran 13: Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Sasaran 6: Meningkatkan daya saing angkatan kerja
	Sasaran 8: Meningkatkan Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara
	Sasaran 11: Meningkatkan realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara
Sasaran PN 2	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	
Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	Sasaran 5: Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan
	Sasaran 6: Meningkatkan daya saing angkatan kerja
	Sasaran 7: Meningkatkan pendanaan pembangunan pemerintah
	Sasaran 8: Meningkatkan Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara
	Sasaran 9: Meningkatkan kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara
	Sasaran 10: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)

Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
	Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara
	Sasaran 12: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM
	Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
Sasaran PN 3	
Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	
Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat
	Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat
Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Sasaran 2: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
	Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	
Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Sasaran 6: Meningkatnya daya saing angkatan kerja
Sasaran PN 4	
Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	Sasaran 18: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
	Sasaran 19: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Meningkatnya pemajuan kebudayaan	
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat
	Sasaran 3: Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat
Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan	

Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	
Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	
Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Sasaran 1: Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat
Sasaran PN 5	
Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Sasaran 14: Meningkatkan konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
Meningkatnya konektivitas	
Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	
Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	
Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	
Sasaran PN 6	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	Sasaran 16: Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana
Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK	Sasaran 15: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Sasaran PN 7	
Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	
Optimalnya kebijakan luar negeri	
Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Sasaran 17: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Terjaganya stabilitas keamanan nasional	

Tabel IV.12

Keselarasan Target Sasaran Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Sasaran	Target Sasaran Kalimantan Timur	Target Sasaran Nasional di Kalimantan Timur*)	Target Sasaran Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	4,94–5,94	5,4 – 6,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,32	8,5 – 9,0
3	Tingkat Pengangguran (%)	6.75	5,33–6,20	5,5 – 6,2

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: *) Assessment sementara Kementerian PPN/Bappenas

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2022 agar target-target pada indikator TPB/SDGs baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan TPB/SDGs:

Tabel IV.13

Persandingan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2022 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
<p>Goal 1 Tanpa Kemiskinan</p> <p>Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</p> <p>Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</p> <p>Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Rehabilitasi Sosial • Program Pemberdayaan Sosial • Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro</p> <p>Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p>	
<p>Goal 2 Tanpa Kelaparan</p> <p>Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p> <p>Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p> <p>Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makananskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.</p> <p>Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> <p>Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian</p>	
<p>Goal 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p> <p>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <p>Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>Target 3.8 Pada tahun 2030, mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</p> <p>Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</p>	
<p>Goal 4 Pendidikan Berkualitas</p> <p>Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <p>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</p> <p>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p> <p>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p>	
<p>Goal 5 Kesetaraan Gender</p> <p>Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</p> <p>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p> <p>Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p> <p>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak • Program Perlindungan Khusus Anak

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</p> <p>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</p> <p>Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</p> <p>Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
<p>Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau</p> <p>Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</p> <p>Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.</p> <p>Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Energi Terbarukan (EBT) • Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
<p>Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</p> <p>Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> <p>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan</p> <p>Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</p> <p>Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</p> <p>Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengawasan Ketenagakerjaan • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
<p>Goal 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur</p> <p>Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p> <p>Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengelolaan Pelayanan • Program Pengelolaan Perkeretaapian • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>berkembang. Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.</p>	
<p>Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penataan Desa • Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa
<p>Goal 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengembangan Perumahan • Program Kawasan Pemukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi • Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan</p> <p>Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p>	
<p>Goal 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab</p> <p>Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.</p> <p>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pengelolaan Persampahan
<p>Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim</p> <p>Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</p> <p>Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanggulangan Bencana • Program Penanganan Bencana • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
<p>Goal 14 Ekosistem Lautan</p> <p>Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.</p> <p>Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</p> <p>Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
<p>Goal 15 Ekosistem Daratan</p> <p>Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</p> <p>Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Hutan • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
<p>penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</p> <p>Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Target 15.9 Pada tahun 2021, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</p> <p>Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.</p>	
<p>Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</p> <p>Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p> <p>Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum • Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum • Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
<p>Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</p> <p>Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Ekspor • Program Perekonomian dan Pembangunan • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengarusutamaan (Mainstreaming)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2021
pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	

4.3 Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon adalah *platform* baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Fokus perencanaan pembangunan rendah karbon adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon) (Bappenas, 2018). Pembangunan rendah karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial dan mendukung pencapaian target TPB nasional dan daerah.

Dari 17 tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- 2) Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 4) Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
- 5) Tujuan 8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

- 6) Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- 7) Tujuan 11 Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 8) Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 9) Tujuan 13 Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 10) Tujuan 14 Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; dan
- 11) Tujuan 15 Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti Perpres tersebut melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2010-2020 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Gubernur No.39 Tahun 2014 yang mengeluarkan wilayah Kalimantan Utara (KALTARA) di dalam dokumen rencana penurunan emisi ini. Melalui Peraturan tersebut, Kalimantan Timur berkomitmen menurunkan emisi GRK 19,07 persen dibanding tanpa aksi mitigasi (*Business As Usual/BAU*) pada tahun 2020. Target penurunan emisi diresmikan melalui Peraturan Daerah Kalimantan Timur No.7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) dalam bentuk penurunan intensitas emisi dari 1.500 menjadi 1.250 tCO₂E/US\$ juta PDRB. Dokumen RAD-GRK harus sejalan dan terinternalisasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan Kalimantan Timur.

Upaya pembangunan rendah karbon Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada sektor: (1) Kehutanan; (2) Perkebunan (3) Energi; dan (4) Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung upaya pembangunan rendah karbon, sektor kehutanan memiliki kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung dengan sub kegiatan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan; kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara dengan sub kegiatan pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, sub kegiatan pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara dan sub kegiatan pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan; kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya; kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun dengan sub kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun.

Semua kegiatan di atas dilakukan dengan metode inventarisasi, perencanaan dan pengawasan yang terkoordinasi dengan baik. Hal ini demi menjaga kelestarian sumber daya hutan yang pemanfaatannya perlu dikendalikan agar kegunaannya dapat berlangsung lama dan berkelanjutan (*Sustainable Development Act*). Dalam mendukung upaya pembangunan rendah karbon, sektor perkebunan juga mengambil peranan penting yang diimplementasikan melalui berbagai upaya-upaya diantaranya :

- 1) Mensosialisasikan dan menjamin Perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur untuk menerapkan standarisasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dalam Pengembangan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur;
- 2) Mempertahankan Kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value*);
- 3) Mengembangkan Energi Baru Terbarukan melalui Limbah Olahan Kelapa Sawit/ *Palm Oil Mill Effluent* (POME) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (PLTBm).

Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam dokumen RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 melalui Program Penanggulangan Bencana Pertanian.

Sektor energi memberikan sumbangsih dalam pembangunan rendah karbon dengan memiliki Program Energi Baru Terbarukan dengan kegiatan

Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dan Kegiatan penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sektor energi juga memiliki Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan sambungan listrik kepada kartu keluarga (KK) di Kalimantan Timur yang belum memiliki sambungan listrik yang capaian indikator jumlah kartu keluarga (KK) berlistrik sebesar 1.165.000 kartu keluarga (KK).

Disisi lain, sektor kelautan dan perikanan juga turut andil dalam hal pembangunan rendah karbon di Kalimantan Timur, yang diimplementasikan melalui upaya diantaranya :

- 1) Pelatihan pengelolaan hutan bakau berkelanjutan sebagai ekowisata, *silvofishery*, dan sebagainya;
- 2) Memfasilitasi masyarakat dalam menyiapkan pembudidayaan ikan air laut/tawar dengan pola Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB).

Upaya-upaya tersebut dituangkan juga pada dokumen RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 melalui Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

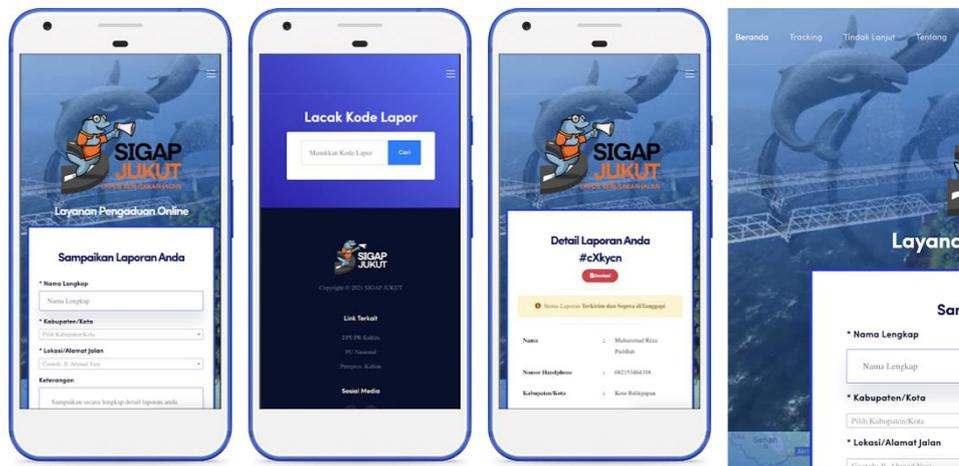
4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi, Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut:

4.4.1 Sigap Lapor Kerusakan Jalan Dan Jembatan Untuk Kaltim Berdaulat (SIGAP JUKUT)

Sigap Lapor Kerusakan Jalan dan Jembatan Untuk Kaltim Berdaulat atau disingkat Sigap Jukut adalah Aplikasi Layanan Pengaduan (*Hotline*) Kerusakan Jalan Dan Jembatan Dari Masyarakat. Aplikasi ini merupakan kanal resmi yang berfungsi menampung informasi keluhan, pengaduan dan pelaporan kerusakan jalan dan jembatan dari masyarakat secara akurat dan realtime.

Aplikasi ini dapat diakses secara online oleh masyarakat/pengguna yang telah menginstal melalui *Google Play Store*. Dalam Aplikasi ini Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur bertindak sebagai *user* pengelola. Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam percepatan penanganan jalan/jembatan yang rusak pada suatu wilayah tertentu secara mudah dapat memberikan informasi kepada pengelola. Laporan yang disampaikan menyertakan foto jalan/jembatan yang mengalami kerusakan. Dalam rangka memastikan validitas laporan yang disampaikan maka pelapor wajib menyampaikan identitas yang memadai.



Gambar IV.4
Tampilan Aplikasi SIGAP JUKUT



Gambar IV.5
Alur Penggunaan Aplikasi SIGAP JUKUT

Setelah laporan masuk ke aplikasi secara otomatis terpilah dan dinotifikasikan langsung secara *realtime* ke *stakeholder* berdasarkan kewenangan penanganan jalan/jembatan. Pada jalan/jembatan kewenangan provinsi akan segera ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Informasi lainnya akan disampaikan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan kabupaten/kota sesuai kewenangan. Keberhasilan aplikasi ini memiliki ketergantungan yang besar terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kerusakan jalan/jembatan.

4.4.2 Sinergi ETAM - TJSL Rumah Layak Huni

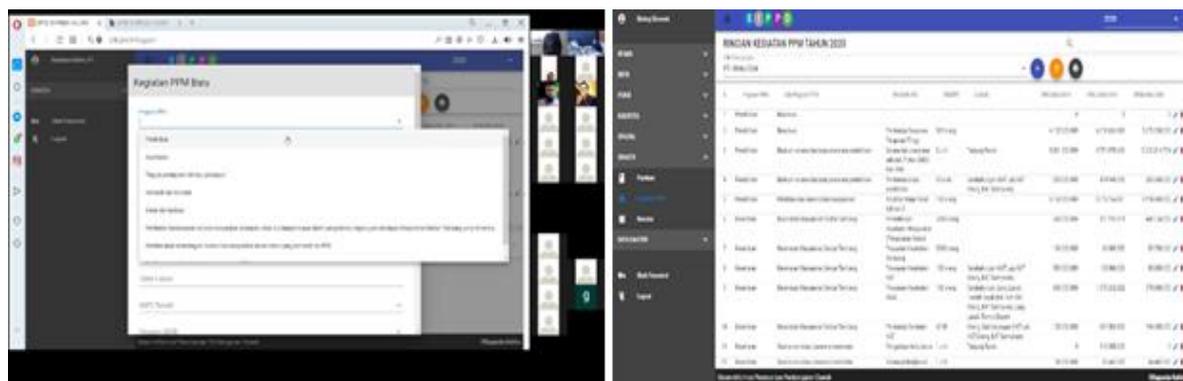
Peningkatan Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pembangunan Daerah atau yang disebut dengan Sinergi ETAM yang merupakan terobosan dalam mengatasi keterbatasan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendanai Program Pembangunan Daerah. Terobosan yang dilakukan adalah melalui kerjasama dengan Badan Usaha. Keterlibatan Badan usaha dalam pembangunan tidak selalu didasarkan pada pertimbangan komersial, namun juga dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip berusaha yang baik, melalui program tanggung jawab sosial maupun program pemberdayaan masyarakat.

Sinergi ETAM didesain menjadi inovasi penyelesaian permasalahan data program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang belum disinergikan secara baik dengan proses penyusunan program/kegiatan pembangunan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun alat bantu yang digunakan untuk mewujudkan Sinergi ETAM adalah Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Melalui aplikasi ini diharapkan program pembangunan yang direncanakan/dilaksanakan oleh pemerintah provinsi



dan badan usaha dapat bersinergi dan menghindari overlapping serta diperolehnya data peran badan usaha dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Gambar IV.6
Koordinasi Bappeda Provinsi Kaltim dengan Perusahaan
Pertambangan Batubara



Gambar IV.7

Tampilan Input Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pertambangan Batubara pada Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Sinergi ETAM akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, sebagai bentuk dorongan dilakukannya peningkatan sinergi pemerintah provinsi dan badan usaha dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur yang juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Di dalam Peraturan Gubernur ini, salah satunya bertujuan untuk mendorong peran serta perusahaan/perseorangan/pihak lainnya, dalam meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui program prioritas yang terarah dan terpadu serta bersinergi dengan program pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun program prioritas yang dimaksud berupa Program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan.

Program prioritas ini akan diintegrasikan dalam program perusahaan tanpa mengurangi program lainnya yang merupakan kewajiban perusahaan.

Program Rumah Layak Huni bertujuan untuk mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya serta mengedepankan aspek lingkungan. Sedangkan Program Pangan untuk Penghijauan bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memantapkan produksi pangan secara berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan di Daerah. Program ini dilaksanakan pada lahan kritis, lahan terbuka dan/atau lahan bekas kebakaran hutan dan lahan yang berada di luar kawasan hutan yang tidak dibebani perijinan.

4.4.3 50.000 Sambungan Listrik Gratis

Dalam mewujudkan salah satu Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur “Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan” khususnya berdaulat energi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggagas sebuah program kolaborasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan swasta dan perusahaan BUMN untuk melakukan penyambungan instalasi listrik gratis bagi masyarakat yang belum teraliri listrik di sekitar jaringan listrik PLN yang didanai melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan pertambangan. Program ini dinamai 50.000 Sambungan Listrik Gratis bagi masyarakat yang merupakan hasil kolaborasi antara pihak pemerintah (Dinas ESDM), perusahaan swasta (perusahaan tambang), dan BUMN (PT. PLN Persero IUW wilayah Kaltimra). Program ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke 75 tanggal 27 Oktober 2020 di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam mewujudkan salah satu Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur “Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan” khususnya berdaulat energi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggagas sebuah program kolaborasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan swasta dan perusahaan BUMN untuk melakukan penyambungan instalasi listrik gratis bagi masyarakat yang belum teraliri listrik di sekitar jaringan listrik PLN yang didanai melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan

pertambahan. Program ini dinamai 50.000 Sambungan Listrik Gratis bagi masyarakat yang merupakan hasil kolaborasi antara pihak pemerintah



(Dinas ESDM), perusahaan swasta (perusahaan tambang), dan BUMN (PT. PLN Persero IUW wilayah Kaltimra). Program ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke 75 tanggal 27 Oktober 2020 di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar IV.8
Peresmian Program 50.000 Sambungan Listrik Gratis

Kegiatan pemasangan sambungan listrik PLN gratis diawali dengan penyambungan instalasi listrik ke masyarakat di Desa Batuah dengan jumlah penerima 64 rumah tangga, Desa Loa Duri Ulu 46 rumah tangga dan Desa Bakungan 29 rumah tangga dengan kapasitas daya listrik yang terpasang 900 Watt sistem voucher yang didanai oleh perusahaan tambang batubara PT Karya Putra Borneo dan diresmikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur.

Dengan dilaksanakannya penganjangan 50.000 rumah tangga berlistrik tersebut, merupakan sebagai titik nol atau awal perjalanan bersejarah program pemasangan 50.000 sambungan listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik PLN yang akan menyebar ke seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Harapan kedepannya dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Timur yang di tahun 2020 baru mencapai 90,21 persen.

Selanjutnya, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur melakukan survey ke desa-desa untuk mendata rumah-rumah belum berlistrik PLN yang berjarak kurang dari 50 meter jaringan listrik PLN, kemudian data akan diserahkan ke pihak PLN Persero IUW wilayah KALTIMRA untuk dilakukan verifikasi selanjutnya. Dari data tersebut, akan diusulkan pendanaan

penyambungan instalasi listrik rumah ke perusahaan pertambangan terdekat yang berada dalam wilayah binaan CSR.

4.4.4 OJOL BERLIAN - Ojek Online Bersama Lindungi Anak

Ojek *Online* Bersama Lindungi Anak atau disingkat Ojol Berlian adalah mekanisme pencegahan kekerasan terhadap anak, perempuan dan disabilitas pada jasa layanan transportasi online. Inovasi ini diinisiasi oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur pada awal tahun 2019 dan *launching* pada tanggal 02 Mei 2019. Inovasi ini masuk dalam kategori responsif gender dan didasari oleh adanya beberapa temuan di masyarakat terkait dengan anak, perempuan dan disabilitas. Latar belakanginya munculnya inovasi ini adalah :

- 1) Perempuan dan anak-anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan akan tindakan kriminal pada sistem transportasi kota saat ini, termasuk juga rentan sebagai korban kekerasan seksual,
- 2) Data kekerasan perempuan dan anak di Kota Samarinda tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir.
- 3) Sebagian masyarakat belum teredukasi dengan baik terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.



Gambar IV.9
Launching Ojek Online Berlian

Ojol Berlian diawali dengan Peningkatan Kapasitas SDM pada rider/driver ojek *online* melalui pembekalan tentang materi perlindungan perempuan dan anak, materi lalu lintas, materi aturan berkendara dengan tujuan agar menjadikan *rider/driver* ojek online sebagai agen 2P (pelopor dan pelapor) pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, perempuan dan disabilitas yang ada disekitarnya.

Konsep yang diterapkan dalam inovasi Ojol Berlian adalah 3A, yaitu Aku Tahu (mengetahui informasi yang benar tentang kekerasan terhadap

anak), Aku Mau (termotivasi untuk mengambil peran dalam mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak), Aku Bisa (melakukan aksi nyata untuk mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak).

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai inisiator inovasi ini telah membangun komitmen bersama dengan para *rider/driver* antara lain:

- 1) Mengajak anak membaca doa saat kendaraan berangkat dan tiba di tempat,
- 2) Mewajibkan anak memakai helm,
- 3) Tidak berkata kasar kepada penumpang termasuk penumpang anak,
- 4) Tidak merokok saat membawa penumpang anak-anak dan dewasa,
- 5) Tidak kebut-kebutan, dan
- 6) Setiap pengemudi ojek wajib membantu anak-anak yang akan menyeberang jalan.

Selain itu, *rider/driver* Ojol Berlian juga harus memegang komitmen untuk tidak melakukan segala bentuk kekerasan pada anak, perempuan, dan disabilitas, tidak melakukan tindakan yang menjurus maupun tergolong dalam kekerasan seksual, menjaga sopan santun saat di pangkalan maupun saat berkendara, tidak mengonsumsi NAPZA, dan tidak memindahtangankan akun.



Gambar IV.10

Pusat Informasi dan Edukasi Ojek *Online* Bersama Lindungi Anak
(Pusidu Ojol Berlian)

Inovasi Ojol Berlian didukung oleh 24 *stakeholders* yang terlibat mendukung, bersinergi dan berkomunikasi efektif dalam implementasi program ini. Hal ini juga telah mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan operator aplikasi sehingga dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan yang terjadi.

Bulan November 2020 Inovasi Ojol Berlian yang digarap oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur lolos dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Kategori Responsif Gender, dan Gubernur Kalimantan Timur yang menerima langsung penghargaan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya pada tahun 2021 melalui Dana Insentif Daerah, Program Ojol Berlian akan melanjutkan kegiatan pengembangan inovasi, penyebaran informasi dan peningkatan kapasitas bagi pengembangan inovasi lanjutan melalui beberapa program kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bagi *Rider/Driver* Ojek *Online* di 3 Kabupaten/ Kota;
2. Pelatihan Keterampilan Bagi Anggota Keluarga Ojek Online Berlian;
3. Pemberian Bantuan Mobil Edukasi ke 3 Kabupaten/ Kota;
4. Pemberian Bantuan Uang Pendidikan Bagi Anggota Keluarga Ojek Online Berlian;
5. Penyediaan Aplikasi dan *Website* untuk publikasi kegiatan ojek online berlian;
6. Ojek Online Berlian *Award* untuk pemberian agen ojol berlian sebagai Pelopor dan Pelapor;
7. Penyiapan Mobil Operasional Pusat Informasi dan Edukasi (PUSIDU).

4.4.5 Samsat Kaltim *Delivery* dan E-Samsat Bhabinkamtibmas

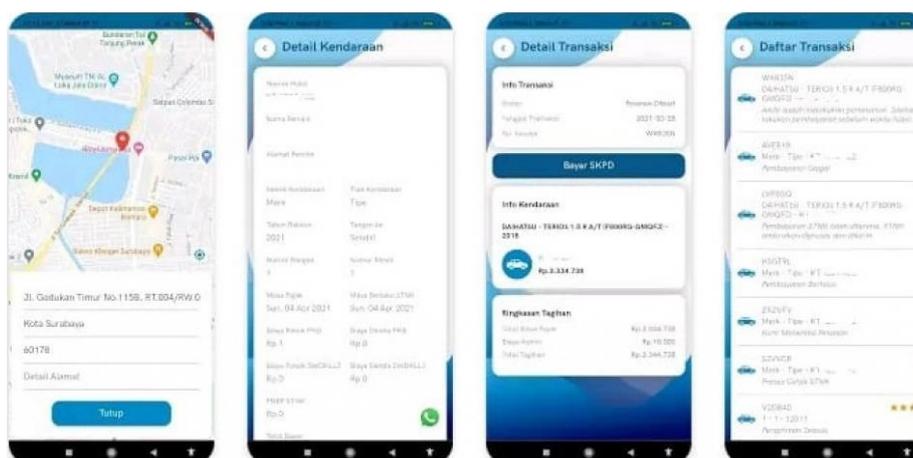
Samsat Kaltim *Delivery* ini merupakan penyempurnaan inovasi yang telah ada. Sebelumnya wajib pajak walaupun telah melakukan pembayaran melalui *Chanel Online* E-Samsat, namun sesuai ketentuan tetap harus ke kantor samsat untuk melakukan pengesahan STNK dan mendapatkan SKPD asli sebagai bukti bayar.



Gambar IV.11
Launching Samsat Kaltim Delivery oleh Gubernur Kaltim

Aplikasi Samsat Kaltim *Delivery* ini merupakan yang pertama di Indonesia karena menggunakan aplikasi penuh dari proses pendaftaran, pembayaran sampai dengan permintaan antar jemput STNK yang sudah disahkan dan SKPD asli oleh petugas kurir. Sehingga wajib pajak tidak perlu ke kantor samsat lagi untuk pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Samsat Kaltim *Delivery* ini dibangun oleh pihak ketiga yakni PT Bina Nusantara Priority dengan bekerjasama dengan PT BPD Kaltimtura sebagai *payment aggregator* Pemerintah Daerah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur. Masyarakat bisa mengunduh aplikasi Samsat Kaltim *Delivery* di *Playstore*.



Gambar IV.12
Tampilan Aplikasi Samsat Kaltim Delivery

Untuk e-Bhabinkamtibmas, merupakan hasil kerja sama dengan petugas Bhabinkamtibmas untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor

dan SWDKLLJ. Sebelumnya inovasi ini dilaksanakan di Kukar sebagai proyek percontohan dengan penerimaan periode 1 November 2020 sd 30 April 2021 sebesar Rp. 670.682.858,- atau 808 unit transaksi. Setelah sukses, maka diluncurkanlah layanan ini untuk seluruh wilayah Kaltim.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ melalui E Dalam Genggaman Bhabin menggunakan aplikasi DG Bankaltimtara. Nantinya pihak Bankaltimtara akan membukakan tabungan dan pengisian saldo awal kepada 395 anggota Bhabinkamtibmas se-Kaltim diluar Polres Kukar.

Bhabinkamtibmas ini merupakan mitra strategis, karena sangat mengetahui kondisi di wilayahnya sehingga ke depan selain Kerjasama melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan pula dapat melakukan pendataan terhadap tunggakan pajak kendaraan yang terdaftar di Wilayah kerjanya untuk mengetahui status kendaraannya apakah masih ada, telah dijual, hilang atau rusak berat serta memberikan sosialisasi kepada warganya yang memiliki kendaraan Plat Luar Daerah untuk dapat memutasikan ke Wilayah Provinsi Kaltim.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Kaltim *Delivery* dan e-Samsat Bhabinkamtibmas ini dilakukan secara Non Tunai dalam rangka mendukung Pemerintah dalam pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah (ETP), dengan menggunakan *Payment Gateway* Bankaltimtara.

4.4.6 Pahala Untuk Kaltim – Program Produk Pangan Halal

Program PAHALA untuk KALTIM (Pangan Halal untuk Kalimantan Timur) merupakan program yang tercetus guna memberi rasa aman bagi masyarakat terhadap produk pangan yang halal dan higienis di Kalimantan Timur. Program ini merupakan besutan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur serta UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmas Veteriner, yang mana program ini telah terakreditasi sejak 25 November 2014 dengan nomor LP 862 IDN serta telah lolos dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 garapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).



Gambar IV.13
Penandatanganan Komitmen dan Sosialisasi
Program Pahala untuk Provinsi Kalimantan Timur

Tercetusnya Program Pahala untuk Kaltim ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya jumlah produk bersertifikat halal, belum terdapatnya laboratorium terakreditasi pada ruang lingkup uji halal di Kaltim, mahalnya biaya uji, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal dan belum adanya pengawasan produk halal secara terpadu. Sedangkan, paradigma produk layak untuk dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen adalah mengacu pada keamanan dan kehalalan, terutama bagi umat beragama Islam.

Bahkan dalam hal ini Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan suatu produk. Hal tersebut telah tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dan sesuai SK14/Dir/LPPOM MUI/IX/18 bahwa produk di Indonesia wajib bersertifikat halal. Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2019 sebagai penjelasan dari UU Nomor 33 Tahun 2014, bahwa Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) wajib memiliki kesepakatan kerjasama dengan laboratorium terakreditasi.

Dengan adanya inovasi Pahala untuk Kaltim ini, saat ini Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki laboratorium terakreditasi dalam ruang lingkup uji halal yang menggunakan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan *Rapid Immunochromatographic* untuk mendeteksi unsur babi di dalam suatu produk. Dimana sebelumnya di Kalimantan Timur belum ada laboratorium terakreditasi ruang lingkup halal, sehingga pengujian halal harus dilakukan ke laboratorium di luar daerah.

Diharapkan selain dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat akan status kehalalan produk pangan berbasis laboratorium, program ini juga mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah bagi Provinsi Kalimantan Timur dengan permintaan sertifikasi halal yang semakin meningkat. Selain itu pelaku usaha pangan sebagai kelompok sasaran yang memanfaatkan inovasi ini juga mendapatkan peningkatan omzet karena adanya jaminan halal pada produk yang diproduksi.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, setelah dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan penindakan pada tahun 2018 kejadian pemalsuan produk pangan menurun secara signifikan bahkan mencapai 0 persen di Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang yang sebelumnya tertinggi dalam kasus pemalsuan produk pangan dengan babi.

Untuk keberlanjutan inovasi Pahala Untuk Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan beberapa kerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, pemangku kebijakan, dan *stakeholders* terkait untuk mengikat komitmen dalam penataan dan pengawasan produk halal.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

5.1.1 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2020 dilakukan terhadap capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2022.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2020 dibandingkan capaian tahun 2019, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel V.1
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan Progress Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

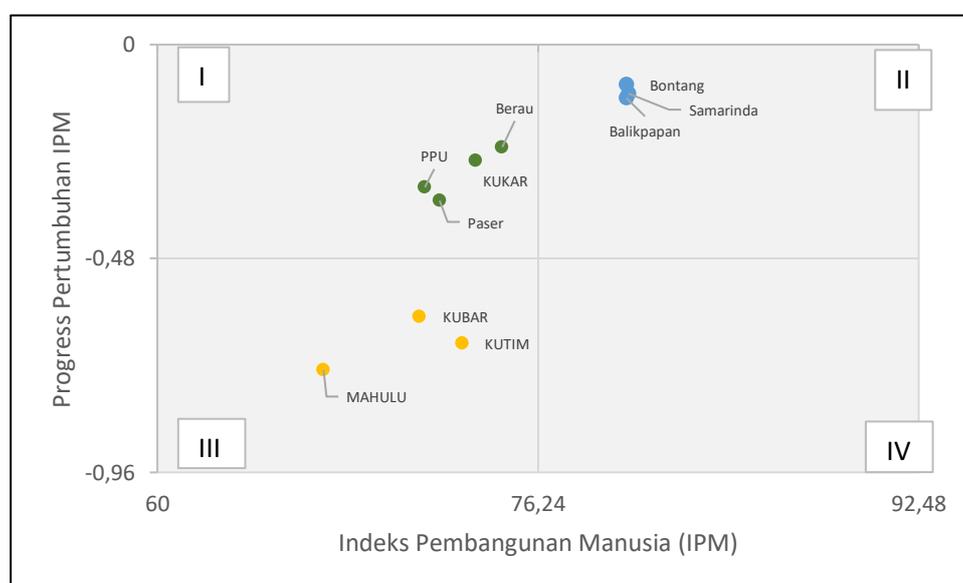
Sumber: Diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan progress pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian IPM dan progress pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian IPM dan progress pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kuadran IV. Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan progress pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi.



Sumber: Diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.1

Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progress Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2020

Pada tahun 2020, pembangunan manusia di Kalimantan Timur terkendala oleh adanya penurunan kinerja ekonomi masyarakat. Namun, secara umum, capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi bahkan merupakan yang tertinggi untuk Kawasan timur

Indonesia. Penurunan angka IPM terjadi di seluruh kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh menurunnya dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh angka pengeluaran per kapita di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun terdapat peningkatan untuk dimensi umur Panjang dan hidup yang sehat (UHH) serta dimensi pengetahuan (HLS dan RLS), namun setelah diagregasikan angka IPM di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Menurunnya angka pengeluaran per kapita tidak terlepas dari efek pandemik COVID-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian secara global. Perekonomian Indonesia, bahkan Kalimantan Timur juga terdampak oleh pandemic COVID-19 ini. Kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kalimantan Timur, serta menurunnya permintaan batubara dari negara ekspor tujuan utama (India dan Tiongkok) mengakibatkan banyaknya perusahaan yang harus melakukan efisiensi produksi, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja (sementara maupun permanen) bahkan sampai ada yang berhenti beroperasi/tutup. Bahkan untuk pegawai negeri sipil, terdapat perubahan pada komponen gaji ke-13 dan THR, dimana periode sebelumnya turut mencantumkan tunjangan kinerja, namun untuk tahun 2020 ini komponen tersebut tidak termasuk. Pandemi ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pendapatan masyarakat, yang juga mengakibatkan turunnya pengeluaran masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat untuk mendongkrak pengeluaran perkapita yang disesuaikan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena efek dari pandemik COVID-19.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Batubara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Laju pertumbuhan ekonomi non batubara menggambarkan pertumbuhan

ekonomi diluar dari hasil batubara untuk melihat hasil dari transformasi ekonomi yang telah dijalankan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE non batubara kabupaten/kota tahun 2020 dibandingkan capaian tahun 2019, maka capaian LPE non batubara kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana table di bawah ini.

Tabel V.2

Kategori Capaian LPE Non Batubara Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE Non Batubara LEBIH RENDAH dan Rata-rata LPE Non Batubara LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE Non Batubara dan Rata-rata LPE Non Batubara LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE Non Batubara dan Rata-rata LPE Non Batubara LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE Non Batubara LEBIH TINGGI dan Rata-rata LPE Non Batubara LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

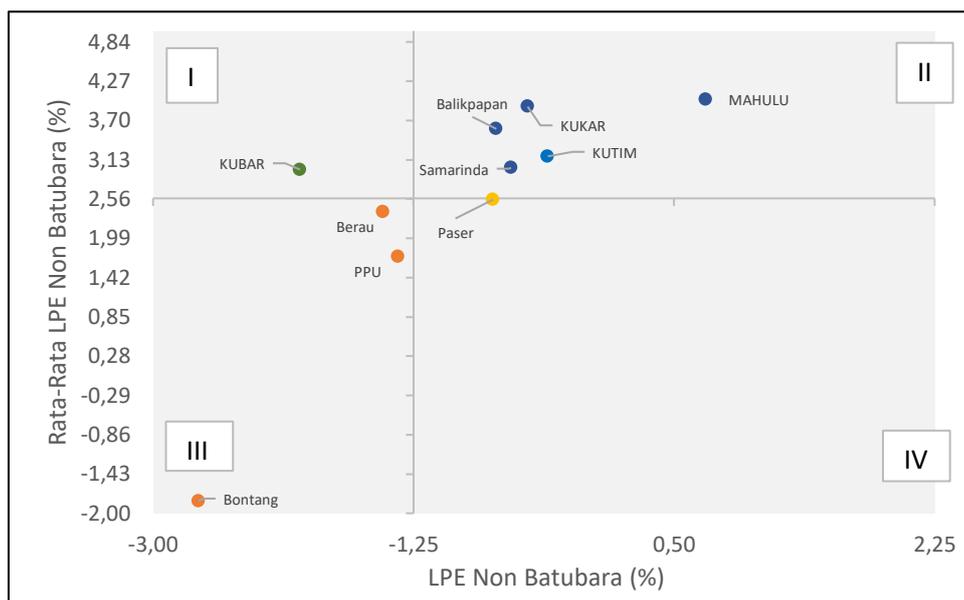
Sumber: Diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian LPE non batubara lebih rendah dan rata-rata LPE non batubara lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE non batubara dan rata-rata LPE non batubara lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian LPE non batubara dan rata-rata LPE non batubara lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bontang, Kabupaten Berau dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian LPE non batubara lebih tinggi dan rata-rata LPE non batubara lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser.



Sumber: Diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.2
Analisis Kuadran Capaian dan Rata-Rata LPE Non BatuBara
Kabupaten/Kota Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi non batubara Kalimantan Timur tahun 2020 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi non batubara kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Perlambatan pertumbuhan ekonomi non batubara Kalimantan Timur tahun 2020 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi non batubara kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Perlambatan pertumbuhan ekonomi non batubara yang terjadi di Kalimantan Timur menggambarkan pula melambatnya kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur.

Dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terdapat 9 kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi non batubara dibandingkan tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan ekonomi non batubara tertinggi terjadi di Kota Balikpapan, dari 4,9 persen menjadi negatif

0,7 persen. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi non batubara yang tumbuh positif dengan capaian 0,70 persen.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi non batubara diwilayah Kalimantan Timur adalah dengan memacu dari sektor lapangan usaha diluar sektor pertambangan dan penggalian.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2020 dibandingkan capaian tahun 2019, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel V.3
Kategori Capaian LPE Non Batubara Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT LEBIH TINGGI dan Progress pertumbuhan TPT LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Kuadran I. Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dan progress pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian TPT dan progress pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian TPT dan progress pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dan progress pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser.



Sumber: Diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.3

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2020

Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan

lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

d. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2020 dibandingkan capaian tahun 2019, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.4

Kategori Capaian LPE Non Batubara Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin LEBIH RENDAH dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin LEBIH

		TINGGI dan Progress pertumbuhan angka miskin LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
--	--	--

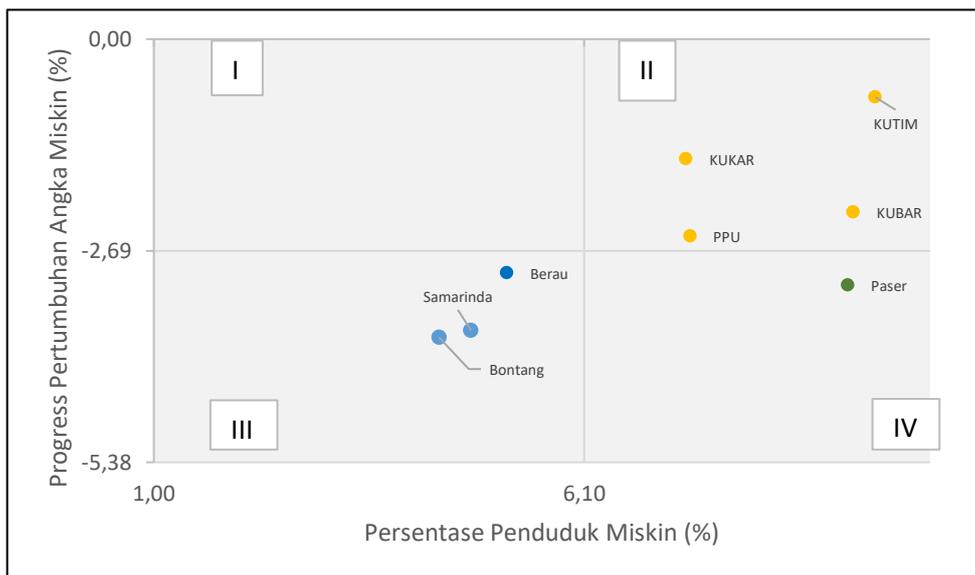
Sumber: Diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Kuadran I. Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah dan progress pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan progress pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan progress pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dan progress pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser.



Sumber: Diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.4

Analisis Kuadran Capaian dan Progress Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2020

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Kenaikan ini terjadi merupakan efek dari pandemi COVID-19 yang masuk ke Kalimantan Timur. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2020 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022.

5.1.2 Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja perekonomian diseluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang menurun akibat kondisi Pandemi COVID-19 diharapkan mulai membaik di tahun 2021. Untuk menjaga stabilitas perbaikan kinerja perekonomian tersebut, di tahun 2022 strategi dan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Kalimantan Timur diarahkan lebih kepada peningkatan dan penguatan daya saing di masing-masing daerah, terutama dalam menyambut Ibu Kota Negara. Strategi dan arah kebijakan dimaksud disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2016-2036, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, dan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2022 melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan pendampingan pada proses persetujuan susbtansi teknis Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2022, yaitu “*Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam rangka menyambut IKN*”, strategi yang dilakukan untuk mendukung pembangunan wilayah di kabupaten/kota, antara lain : (1) Penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi dan pemerataan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu di seluruh wilayah; (2) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah; (3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta; (4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Sedangkan kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2022 difokuskan pada: (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan pelaku usaha sesuai dengan sektor terkait komoditi unggulan; (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM melalui penggunaan teknologi informasi; (3) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan kemudahan berinvestasi; (4) Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan, dan IKN; (5) Optimalisasi promosi dan investasi komoditi unggulan non-migas dan non-tambang, dan; (6) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah.

Fokus pembangunan kabupaten/kota tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam dan bencana non-alam. Adapun arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan, target-target sasaran pembangunan daerah, serta sektor/lapangan usaha potensial di masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.5

Target Makro dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1.	Paser	LPE : 1,32% Tk. Kemiskinan : 8,00% TPT : 3,45% IPM : 73,03	1) Peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
			2) Peningkatan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya 3) Pengembangan kawasan peternakan 4) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan 5) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan 6) Pendistribusian tenaga kesehatan secara merata 7) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 8) Peningkatan kualitas kawasan kumuh; 9) Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan 10) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 11) Peningkatan Ekonomi Desa
2.	KUBAR	LPE : 5,37% Tk. Kemiskinan : 8,50% TPT : 4,35% IPM : 73,30	1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 2) Peningkatan Produktivitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan 3) Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya 4) Pengembangan Kawasan Peternakan 5) Peningkatan Nilai Tambah komoditi Unggulan 6) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan 7) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan 8) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 9) Penyediaan infrastruktur air bersih;

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
			10) Pengembangan industri pariwisata 11) pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan 12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 13) Peningkatan Ekonomi Desa
3.	KUKAR	LPE : 1,06% Tk. Kemiskinan : 6,90% TPT : 4,94% IPM : 75,34	1) Peningkatan Produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2) Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya 3) Pengembangan Kawasan Peternakan 4) Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan Pasar komoditi Unggulan 5) Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah 6) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan 7) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan 8) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 9) Peningkatan sarana dan prasarana air baku 10) Penyediaan infrastruktur air bersih; 11) Peningkatan kualitas kawasan kumuh; 12) Pengembangan industri pariwisata 13) Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan 14) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 15) Peningkatan Ekonomi Desa 16) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
4.	KUTIM	LPE : 7,84% Tk. Kemiskinan : 8,95% TPT : 5,38% IPM : 75,76	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan hutan yang ramah lingkungan; 2) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Komoditas Unggulan Daerah 3) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan 4) Peningkatan Produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 5) Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya 6) Pengembangan Kawasan Peternakan 7) Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan Pasar komoditi Unggulan 8) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 9) Penyediaan infrastruktur air bersih; 10) Pengembangan kawasan industri 11) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12) Peningkatan Ekonomi Desa 13) Normalisasi / Restorasi sungai

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
5.	Berau	LPE : 3,5±1% Tk. Kemiskinan : 5,07% TPT : 4,84% IPM : 75,10	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan 2) Peningkatan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya 3) Pengembangan kawasan peternakan 4) Peningkatan Nilai Tambah dan Pengembangan pasar Komoditi unggulan 5) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan 6) Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan 7) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas 8) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 9) Peningkatan kualitas pengendalian emisi gas rumah kaca 10) Peningkatan kualitas kawasan kumuh; 11) Pengembangan industri pariwisata 12) Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan 13) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 14) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.	PPU	LPE : 3,52% Tk. Kemiskinan : 6,92% TPT : 4,52% IPM : 73,36	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2) Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya 3) Pengembangan kawasan peternakan 4) Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan 5) Pengembangan-agro industri 6) Meningkatkan komitmen, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pertanian dalam arti luas 7) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 8) Meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. 9) Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan 10) Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7.	MAHULU	LPE : 6,30% Tk. Kemiskinan : 10,02% TPT : 4,60% IPM : 69,60	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh 2) Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 3) Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa 4) Peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan 5) Pengembangan kawasan peternakan 6) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan

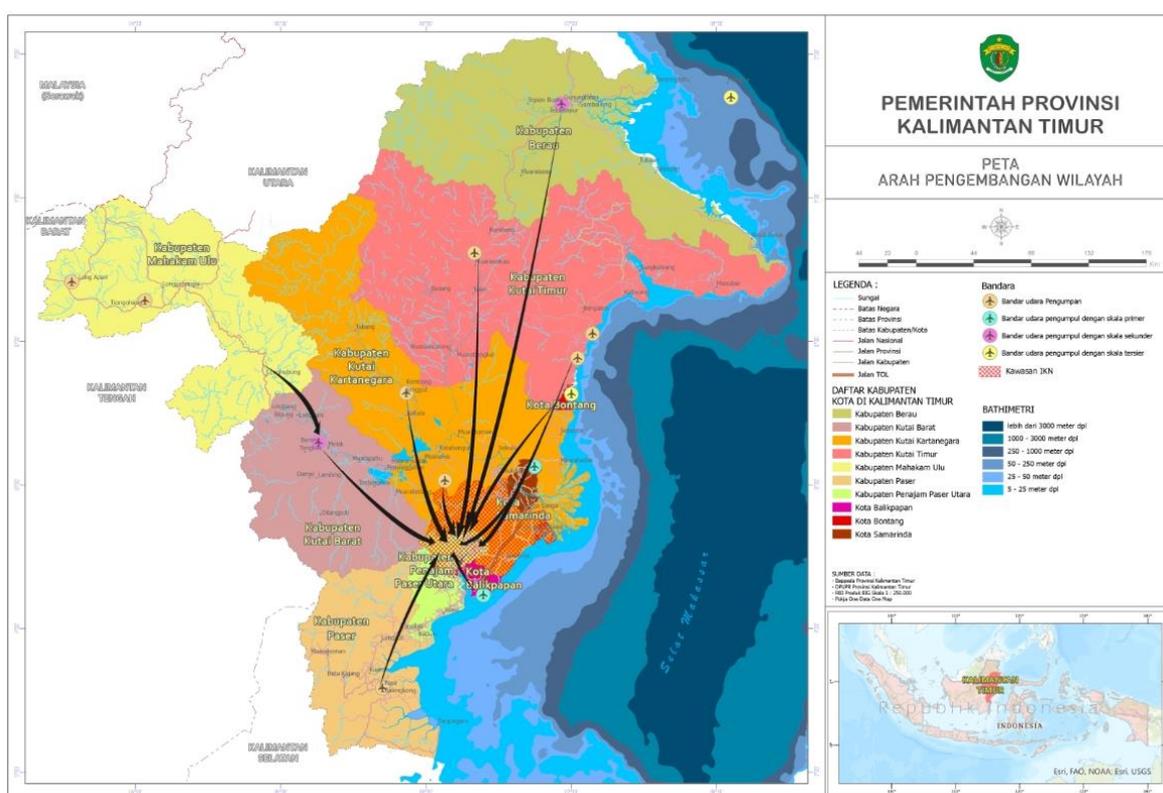
NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
			7) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 8) Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan 9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 10) Peningkatan Ekonomi Desa
8.	Balikpapan	LPE : 5,00% Tk. Kemiskinan : 2,3-2,5% TPT : 8,70% IPM : 80,00	1) Peningkatan produktivitas pertanian hortikultura 2) Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya 3) Pengembangan kawasan peternakan 4) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 5) Menyediakan regulasi dan kebijakan yang mempermudah investasi 6) Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 7) Meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan 8) Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan 9) Peningkatan prasarana pengendali banjir. 10) Penyediaan infrastruktur air bersih; 11) Peningkatan kualitas kawasan kumuh; 12) Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan pusat kegiatan ekonomi 13) Pengembangan kawasan industry 14) Peningkatan Pelayanan Kesehatan
9.	Samarinda	LPE : 5,00% Tk. Kemiskinan : 4,75% TPT : 5,85% IPM : 80,20	1) Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura 2) Pengembangan kawasan peternakan

NO	KAB/KOTA	TARGET MAKRO PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
			<ul style="list-style-type: none"> 3) Peningkatan prasarana pengendali banjir. 4) Penanganan Prasarana Jalan dan Jembatan. 5) Peningkatan kualitas, produktivitas serta kesempatan kerja 6) Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan kesehatan 7) Peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan paska bencana 8) Penyediaan infrastruktur air bersih; 9) Peningkatan kualitas kawasan kumuh; 10) Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan 11) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa 12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan
10.	Bontang	LPE : 2,50% Tk. Kemiskinan : 4,03% TPT : 8,70% IPM : 81,00	<ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan produktivitas perikanan budidaya perikanan 2) Pengembangan kawasan peternakan 3) Pengembangan jaringan pembinaan tenaga kerja terampil 4) Peningkatan produktivitas perikanan tangkap 5) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang 6) Peningkatan kualitas kawasan kumuh; 7) Pengembangan kawasan industri 8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota

Pengembangan wilayah kabupaten/kota diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat situasi pandemi COVID-19 serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah. Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru merupakan peluang daerah untuk mewujudkan hal tersebut karena adanya potensi besar tambahan bangkitan ekonomi di Kalimantan Timur dan sekitarnya akibat pembangunan IKN. Selain itu, kebijakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur diyakini juga akan memacu percepatan proses transformasi ekonomi di daerah menuju kepada sektor-sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan pendekatan geospasial melalui strategi: (1) Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan strategis sekitar kawasan IKN; (2) Penguatan peran kabupaten/kota sebagai hinterland/sub pusat pelayanan bagi kawasan IKN; (3) Percepatan realisasi investasi pada kawasan strategis; (4) Pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan penanganan bencana untuk menjamin daya dukung lingkungan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2016-2036 serta Perubahan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan mempertimbangkan posisi strategis wilayah,



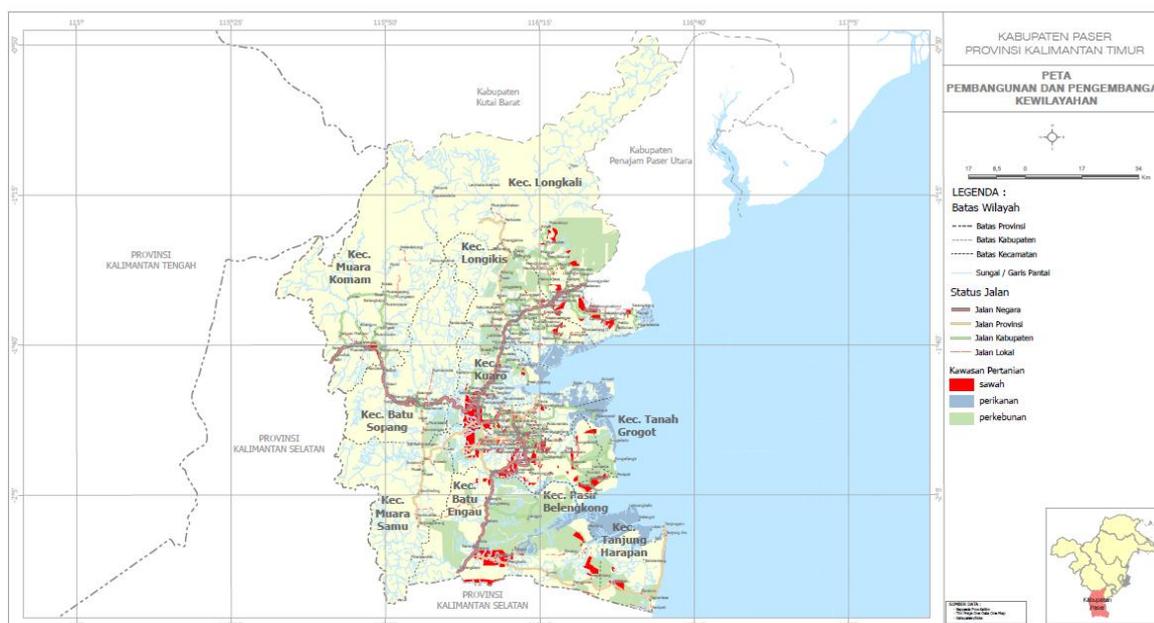
permasalahan utama pembangunan, target-target sasaran pembangunan daerah, serta sektor/lapangan usaha potensial di masing-masing kabupaten/kota.

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.5
Peta Wilayah Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur

5.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Paser

Kabupaten Paser memiliki lahan pertanian potensial yang cukup luas yang diharapkan dapat menjadi salah satu lumbung pangan daerah. Selain pertanian tanaman pangan, komoditas perkebunan, perikanan, peternakan, serta hasil hutan non kayu juga menjadi unggulan Kabupaten Paser. Sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, pengembangan wilayah Kabupaten Paser diarahkan sebagai kawasan industri pertanian, yang dilakukan melalui strategi peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan, peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan, peningkatan



pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi, serta pengembangan kawasan peternakan.

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.6
Areal Pengembangan Kawasan Pertanian di Kabupaten Paser

Fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Paser di tahun 2022 adalah :

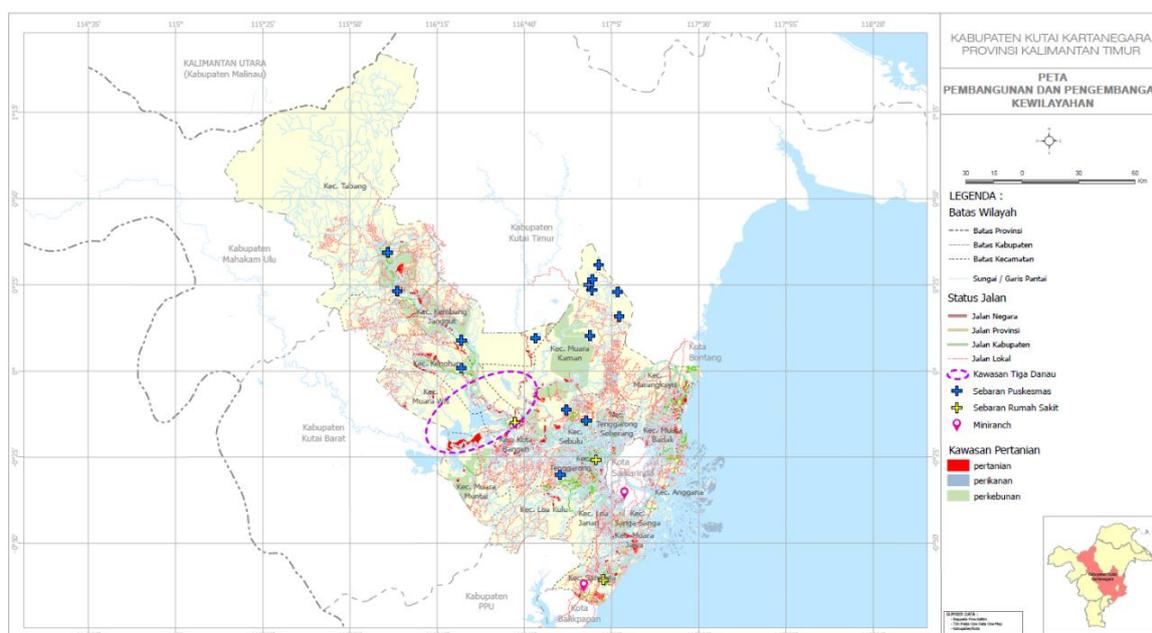
1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja melalui pendistribusian tenaga kesehatan dan fasilitasi kewirausahaan bagi pemuda dan difabel;
2. Peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan melalui intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan produktif yang berdekatan pada areal konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui kemitraan, pengembangan perkebunan rakyat pada komoditas unggulan;
3. Peningkatan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
4. Pengembangan kawasan peternakan melalui pengembangan *mini ranch* dengan pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya;
5. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
6. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid*;
7. Penanganan prasarana jalan dan jembatan;
8. Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan melalui pengembangan industri hulu agro dan pangan;
9. Pengendalian kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh (rumah tidak layak huni);
10. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akreditasi puskesmas dengan fasilitas kesehatan yang siap akreditasi minimal utama;
11. Peningkatan Ekonomi Desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan analisa kelayakan usaha Bumdes, Pelatihan Pengelolaan keuangan BUMDes, kegiatan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes, bantuan peralatan listrik desa/kampung, dan Lomba penilaian BUMDes.

Sebagai *hinterland*/sub pusat pelayanan bagi kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kabupaten Paser diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi

dan produktifitas pertanian, sehingga pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan pangan daerah serta menjadikan sektor pertanian dalam arti luas sebagai lokomotif perekonomian baru bagi Kalimantan Timur.

5.2.2 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai salah satu lokasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini membuat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peluang dan tantangan dalam upaya percepatan peningkatan layanan infrastruktur dan pengembangan ekonomi kawasan di wilayah tersebut dalam rangka menyambut IKN. Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui perlu dilakukan mengingat masih tingginya ketergantungan perekonomian Kutai Kartanegara pada sektor migas dan batubara. Sesuai dengan Kebijakan



RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan sebagai kawasan industri pertanian, yang dilakukan melalui strategi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan peningkatan produktivitas perikanan. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara juga diarahkan untuk mengembangkan potensi industri pariwisata yang ada di wilayahnya.

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.7

Areal Kawasan 3 (tiga) Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara

Fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2022 adalah :

1. Pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar pendidikan dan penurunan angka kemiskinan;
2. Penguatan peran Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai sub pusat pelayanan bagi kawasan IKN, melalui pengembangan 3 (tiga) danau, yaitu Danau Melintang dan Danau Semayang melalui pengembangan budidaya ikan lokal yang bernilai ekonomi tinggi dan penguatan daya saing produk perikanan;
3. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan jaringan distribusi dan pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid*;
4. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
5. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, melalui:
 - a. Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan dan hortikultura produktif;
 - b. Pengembangan perkebunan rakyat pada komoditas unggulan melalui pola kemitraan;
6. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, utamanya di Kawasan 3 (tiga) danau;
7. Pengembangan kawasan peternakan, melalui pengembangan *mini ranch* melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya;
8. Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan, melalui:
 - a. Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat;
 - b. Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan;
9. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah;
10. Penanganan prasarana jalan dan jembatan;

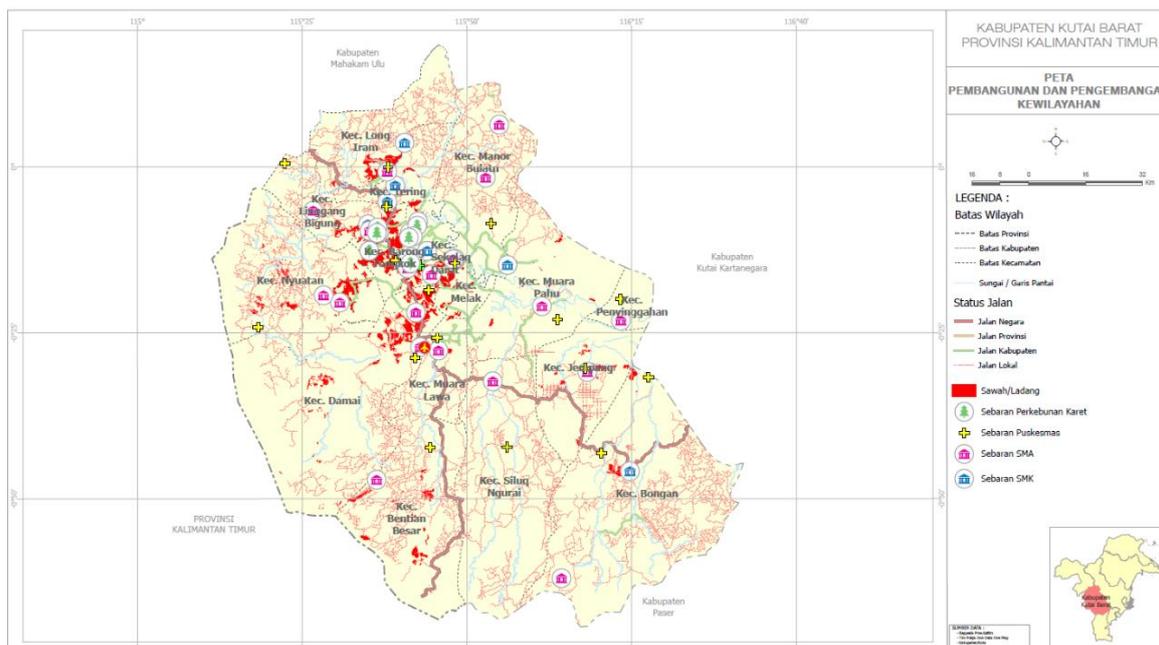
11. Peningkatan sarana dan prasarana air baku;
12. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
13. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
14. Peningkatan kualitas kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
15. Pengembangan industri pariwisata melalui penyediaan sarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ekowisata kawasan 3 (tiga) danau, yaitu Danau Melintang dan Danau Semayang;
16. Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan melalui pengembangan industri hulu agro dan aneka;
17. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akreditasi puskesmas dengan fasilitas kesehatan yang siap akreditasi minimal utama;
18. Peningkatan Ekonomi Desa melalui pengembangan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan analisa kelayakan usaha Bumdes, Pelatihan Pengelolaan keuangan BUMDes, kegiatan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes, bantuan peralatan listrik desa/kampung, dan Lomba penilaian BUMDes.

Fokus pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah, dan meningkatkan peran Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga (*hinterland*) IKN.

5.2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat memiliki potensi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan air tawar, dan kehutanan yang belum dikembangkan secara optimal. Terdapat kendala dalam upaya pengembangan sentra pertanian di Kutai Barat, diantaranya keterbatasan infrastruktur jalan guna menjamin konektivitas antara sentra-sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran hasil pertanian. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Kutai Barat masih perlu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam upaya penyetaraan

pendidikan. Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Barat diarahkan pada pengembangan kawasan industri pertanian.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.8
Areal Pengembangan Kawasan Perkebunan Karet di Kutai Barat

Adapun fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

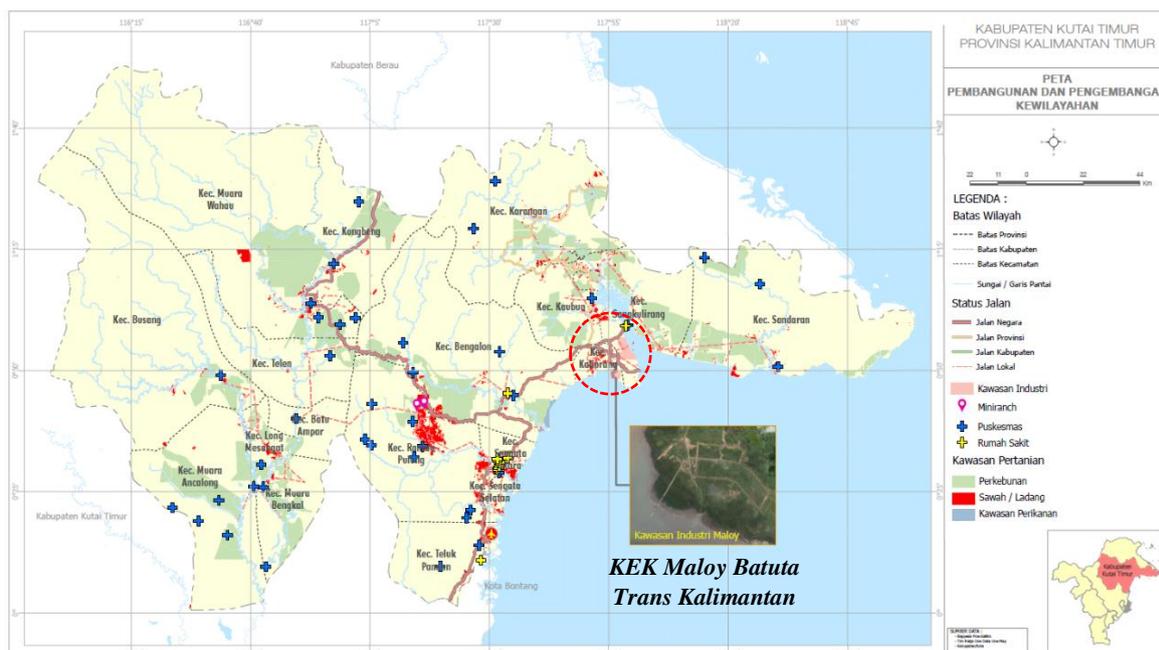
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan baik pada lembaga formal maupun lembaga non formal di tingkat negeri maupun di tingkat swasta;
2. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, melalui:
 - a. Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan dan hortikultura produktif;
 - b. Pengembangan perkebunan rakyat pada komoditas unggulan melalui pola kemitraan;
3. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya, utamanya di kawasan 3 (tiga) danau;

4. Pengembangan Kawasan Peternakan, melalui pengembangan *mini ranch* melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya;
5. Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan, melalui peningkatan nilai tambah produk perkebunan karet rakyat;
6. Peningkatan kapasitas produksi peternakan, peningkatan kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi pemasaran, sarana produksi, dan permodalan;
7. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
8. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan jaringan distribusi dan pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid*;
9. Penanganan prasarana jalan dan jembatan;
10. Pengembangan industri pariwisata melalui penyediaan sarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ekowisata kawasan 3 (tiga) danau, yaitu Danau Jempang;
11. Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan melalui pengembangan industri hulu agro dan aneka;
12. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik dari sisi unit air baku, unit produksi, serta unit distribusinya;
13. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akreditasi puskesmas dengan fasilitas kesehatan yang siap akreditasi minimal utama;
14. Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan analisa kelayakan usaha Bumdes, Pelatihan Pengelolaan keuangan BUMDes, kegiatan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes, bantuan peralatan listrik desa/kampung, dan Lomba penilaian BUMDes.

Melalui fokus pengembangan kewilayahan, Kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah dalam rangka pemenuhan bahan baku industri serta kebutuhan pangan daerah.

5.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi pengelolaan sumber daya alam yang cukup besar. Pemanfaatan sumber daya alam ini harus pula diikuti dengan komitmen pelestarian lingkungan. Potensi lahan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi yang bersifat berkelanjutan, seperti pertanian dan kehutanan. Kabupaten Kutai Timur juga memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas dan telah didukung oleh ketersediaan pabrik kelapa sawit guna mendukung hilirisasi. Namun produk turunan dari komoditas perkebunan ini baru sampai pada produk CPO dan belum diolah menjadi produk turunan lanjutan yang bernilai tambah tinggi. Salah satu upaya untuk mempercepat proses transformasi ekonomi di Kutai Timur adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 sebagai kawasan industri berbasis CPO. Hal ini juga telah selaras dengan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi di Kutai Timur berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, yang diperkuat dengan arah kebijakan kewilayahan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.9
Posisi Geostrategis KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan

Adapun fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan kualifikasi tenaga pendidik;
2. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
3. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, melalui:
 - a. Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan dan hortikultura produktif;
 - b. Pengembangan perkebunan rakyat pada komoditas unggulan melalui pola kemitraan;
4. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya, melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
5. Pengembangan kawasan peternakan, melalui pengembangan mini ranch melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya;
6. Penanganan prasarana jalan dan jembatan;
7. Normalisasi/restorasi sungai;
8. Pengembangan kawasan industri melalui pengembangan kawasan industri Maloy sebagai kawasan industri hulu agro, industri berbasis *oleochemical* dan pengolahan hasil tambang serta industri aneka;
9. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik dari sisi unit air baku, unit produksi, serta unit distribusinya;
10. Pengendalian kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh (rumah tidak layak huni);
11. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akreditasi puskesmas dengan fasilitas kesehatan yang siap akreditasi minimal utama;
12. Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan analisa kelayakan usaha Bumdes, pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes, kegiatan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes, bantuan peralatan listrik desa/kampung, dan Lomba penilaian BUMDes.

5.2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Berau

Kabupaten Berau merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan pariwisata yang sangat besar, terutama untuk jenis wisata bahari yang terletak di wilayah Kepulauan Derawan. Selaras dengan hal tersebut, Kepulauan Derawan saat ini juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selain sektor pariwisata, potensi pengembangan ekonomi di Kabupaten Berau juga terletak pada pengembangan sektor agribisnis, terutama untuk pengolahan sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, hasil hutan, dan perkebunan (terutama untuk komoditas kelapa sawit, kakao, karet dan kelapa).



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.10
Pengembangan Kawasan Pariwisata di Maratua, Derawan dan Sekitarnya
di Kabupaten Berau

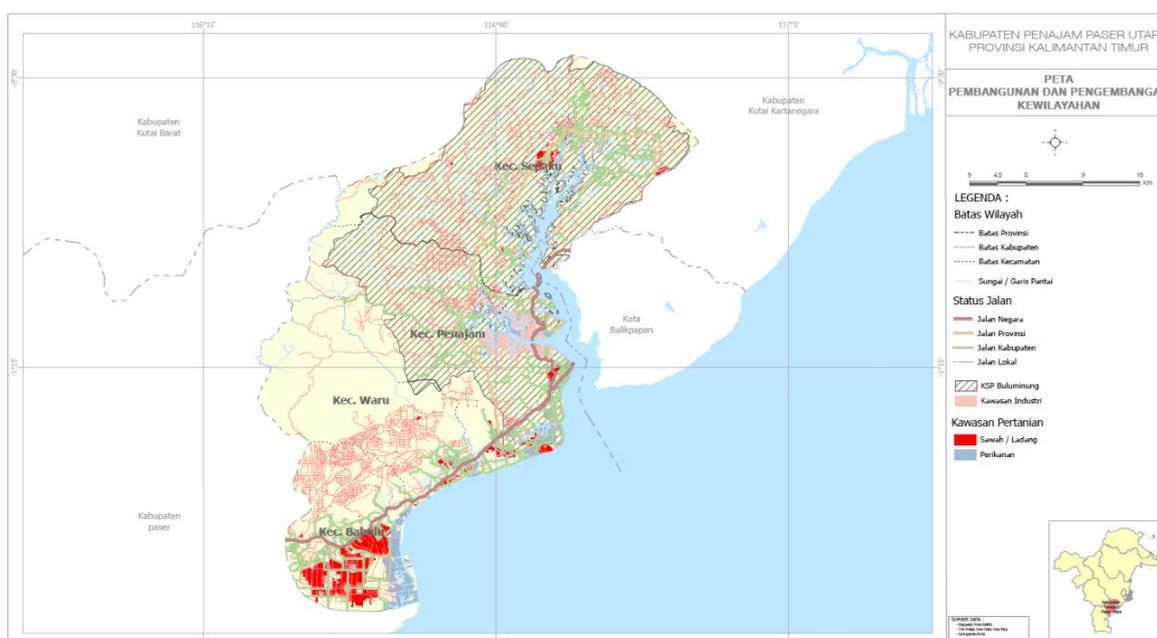
Konsep pengembangan wilayah ini juga telah selaras dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dimana pengembangan wilayah Kabupaten Berau diarahkan pada pengembangan kawasan pariwisata pesisir dan laut Kepulauan Derawan dan kawasan sentra produksi pangan. Untuk mendukung prioritas provinsi tersebut, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Berau tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana pendidikan baik kualitas maupun kuantitas;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas untuk masyarakat;
3. Peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan melalui intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura produktif, pengembangan perkebunan rakyat pada komoditas unggulan melalui pola kemitraan;
4. Peningkatan produktifitas perikanan tangkap dan budidaya melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
5. Pengembangan kawasan peternakan melalui pengembangan *mini ranch* dengan pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya;
6. Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan, melalui:
 - a. Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat;
 - b. Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan;
7. Pengembangan industri pariwisata melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusia, utamanya untuk mendukung pengembangan industri pariwisata Kepulauan Derawan;
8. Penanganan prasarana jalan dan jembatan;
9. pengendalian kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh (rumah tidak layak huni);
10. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder;
11. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
12. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan PLTS Terpusat *Off Grid*;
13. Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan melalui pengembangan industri hulu agro;

14. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akreditasi puskesmas dengan fasilitas kesehatan yang siap akreditasi minimal utama.

5.2.6 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara juga merupakan salah satu daerah potensial pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, baik untuk perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, maupun hasil hutan. Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah dicanangkan menjadi kasawan Ibu Kota Negara. Hal tersebut meningkatkan posisi strategis Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi inti dan pengembangan utama IKN. Penunjukan IKN juga memberikan peluang yang besar bagi Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memacu percepatan pembangunan di daerahnya, terutama dari sisi infrastruktur dan ekonomi.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.11
Areal Pengembangan Kawasan Industri Buluminung
di Kabupaten Penajam Paser Utara

Sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan sebagai

kawasan industri pertanian melalui strategi peningkatan nilai tambah, pengembangan pasar komoditi unggulan, dan pengembangan agroindustri. Untuk mendukung prioritas provinsi, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2022 adalah :

1. Pengembangan produksi bidang agribisnis dan agro industri;
2. Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan dan hortikultura produktif;
3. Pengembangan perkebunan rakyat pada komoditas unggulan melalui pola kemitraan;
4. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
5. Pengembangan *mini ranch* melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya seperti pagar dan *shelter*;
6. Meningkatkan komitmen, keterampilan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dalam arti luas;
7. Meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan lahan;
8. Penanganan prasarana jalan dan jembatan;
9. Pengembangan agroindustri yang difokuskan pada Kawasan Industri Buluminung sebagai salah satu *supporting* pengembangan IKN, yaitu sebagai pusat industri pengolahan produk pertanian, yang juga sebagai pengembangan industri hulu agro, aneka dan pangan.

5.2.7 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten termuda (pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat) yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung. Kabupaten Mahakam Ulu berada di wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia dan memiliki potensi lahan yang belum dikelola secara optimal. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah otonom yang relatif baru, Kabupaten Mahakam Ulu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan

infrastruktur dasar yaitu minimnya akses jalan, jembatan, air bersih, energi, jaringan komunikasi, dan pelayanan kesehatan.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.12

Peningkatan Aksesibilitas Jalan di Kawasan Perbatasan Mahakam Ulu

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan memperlancar arus barang dan jasa yang dapat mendorong perekonomian masyarakat, dan air bersih akan mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pengembangan jaringan komunikasi akan memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang dapat menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan sebagai sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh.

Pembangunan infrastruktur transportasi dan energi listrik ini diharapkan dapat membuka aksesibilitas pergerakan orang, barang dan jasa, dan pemenuhan pemerataan pelayanan kesehatan serta pendidikan yang pada akhirnya mampu mendorong kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu. Selain itu Kabupaten Mahakam Ulu dihadapkan dengan prasarana pendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi sektor dominan bagi mata pencaharian masyarakat Mahakam Ulu.

Selain itu jika dilihat struktur antar desa pada Kabupaten Mahakam Ulu yang belum memiliki akses transportasi yang layak maka pembinaan dan pengembangan desa sangat diperlukan dalam menghadapi segala kondisi

dengan keterbatasan akses. Pengembangan berbagai sektor potensial di Kabupaten Mahakam Ulu belum dapat optimal jika aksesibilitas transportasi belum tersedia dengan memadai. Akses darat menuju Ujoh Bilang (ibukota kabupaten) hanya dapat ditempuh dari Kutai Barat melalui akses sungai dan akses darat dengan medan yang sangat sulit. Oleh karena itu, fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akreditasi puskesmas dengan fasilitas kesehatan yang siap akreditasi minimal utama;
2. Peningkatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dengan melakukan pelatihan analisa kelayakan usaha Bumdes, pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes, kegiatan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDes, bantuan peralatan listrik desa/kampung, dan lomba penilaian BUMDes;
3. Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan melalui pengembangan industri aneka;
4. Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan melalui Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif;
5. Pengembangan kawasan peternakan melalui pengembangan *mini ranch* melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya;
6. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
7. Penanganan prasarana jalan dan jembatan.

5.2.8 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Samarinda

Permasalahan bencana banjir merupakan salah satu permasalahan utama Kota Samarinda yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengganggu arus distribusi barang/jasa serta menurunkan daya saing investasi. Selain itu, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur juga perlu terus dilakukan mengingat posisi geostrategis Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi. Sebagai salah satu kota penyangga IKN, arah kebijakan pembangunan di Kota Samarinda harus memperhatikan aspek peningkatan daya saing sumber daya manusia seperti peningkatan kualitas, produktivitas serta kesempatan kerja melalui pengembangan sekolah vokasi

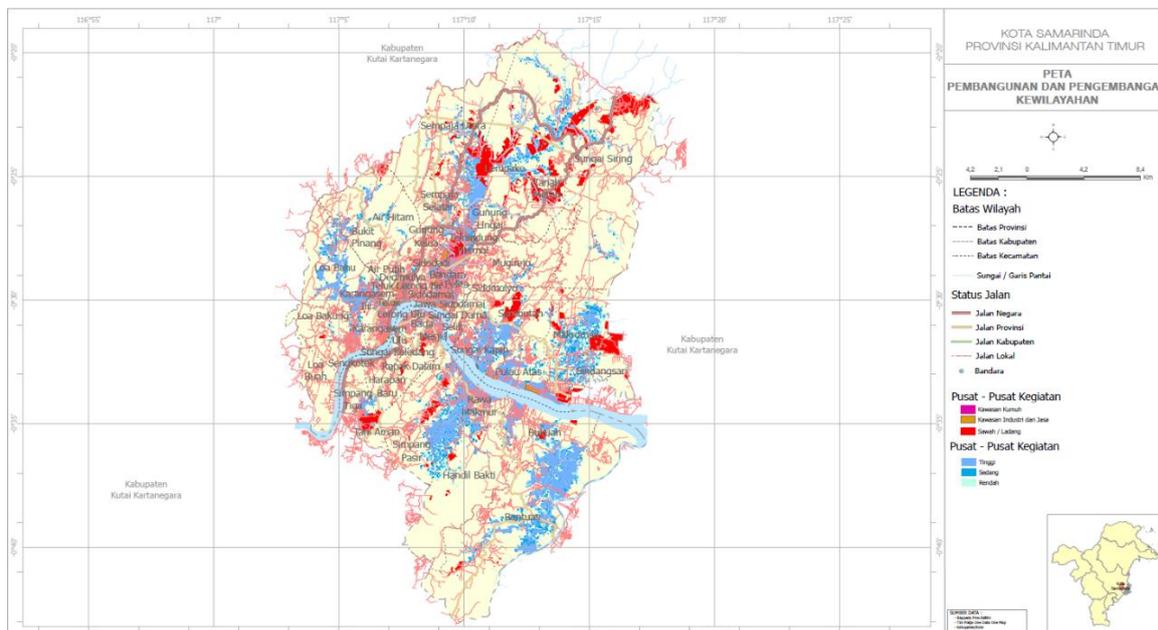
dan pelatihan tenaga kerja yang diarahkan pada kebutuhan di sektor industri, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan dan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM, serta membangun perekonomian berkelanjutan di Kota Samarinda, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, proyeksi pertumbuhan penduduk akibat pemindahan IKN juga perlu diiringi dengan upaya pemenuhan ketahanan pangan, mengingat semakin berkurangnya lahan produktif pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan permukiman dan pertambangan.

Sektor kesehatan menjadi perhatian khusus, terlebih dengan masih adanya pandemi COVID-19 ini. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan. Selain rumah sakit, fokus peningkatan layanan kesehatan juga diarahkan pada sarana Puskesmas, salah satunya dengan membina dan melatih seluruh tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas agar kompetensi SDM Kesehatan yang ada meningkat dan terwujudnya Puskesmas Terakreditasi minimal Utama. Kota Samarinda memiliki 4 (empat) Puskesmas dengan status terakreditasi Utama, yaitu Puskesmas Segiri, Puskesmas Sungai Siring, Puskesmas Baqa, dan Puskesmas Wonorejo yang dilakukan melalui peningkatan fasilitas kesehatan yang siap akreditasi (minimal utama).

Adapun fokus pengembangan wilayah di Kota Samarinda pada Tahun 2022:

1. Pengendalian banjir melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan perbaikan sistem drainase kota; kerjasama dengan perusahaan pertambangan dan kabupaten/kota sekitarnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang di hulu DAS serta rehabilitasi DAS dan lahan kritis. Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang berkualitas, hal lain yang perlu dipersiapkan adalah peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat dan koordinasi penanganan pasca bencana;
2. Pengembangan pasar (dalam dan luar negeri) serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional;

3. Pengembangan produksi dan kualitas industri unggulan yang difokuskan pada pengembangan industri hulu agro, aneka, kimia dasar dan pangan;
4. Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan dan hortikultura produktif salah satunya melalui pengembangan budidaya tanaman buah-buahan;
5. Pengembangan *mini ranch* melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya;
6. Penguatan peran Kota Samarinda sebagai *hinterland*/sub pusat pelayanan bagi kawasan IKN, melalui:
 - a. Peningkatan konektivitas transportasi jalan antar wilayah dari IKN, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan sekitarnya menuju Bandara APT Pranoto berupa pembangunan jalan akses baru sepanjang 11,4 km pada ruas jalan kawasan Sempaja menuju Batu Cermin dan Batu Besaung, hingga tembus Bandara APT Pranoto dan jalan akses jalur *ringroad* selatan dan utara. Jalan ini merupakan jalan alternatif untuk menuju/dari Bandara APT Pranoto ke kota/kabupaten yang lain karena jalan eksisting saat ini tidak memadai dalam mengakomodir kendaraan-kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut. Pada tahun 2022 difokuskan pada rencana pembebasan lahan seluas 90,4 Ha;
 - b. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik dari sisi unit air baku, unit produksi, serta unit distribusinya;
 - c. Pengendalian kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.13
Rencana Jalan Akses Menuju Bandara APT Pranoto

5.2.9 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Balikpapan

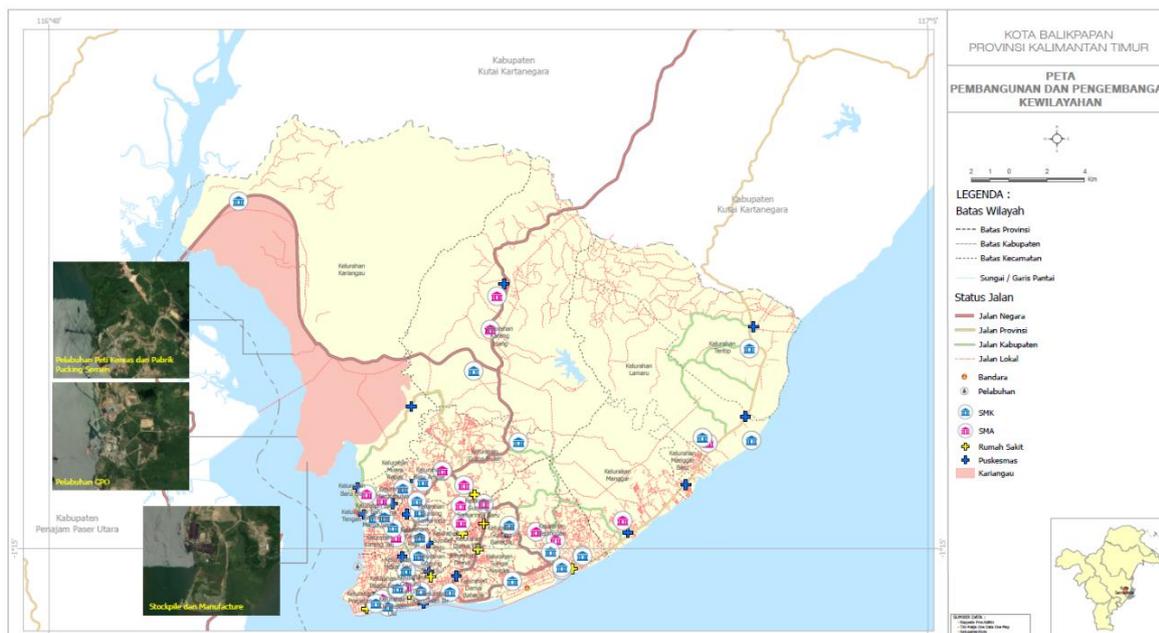
Kota Balikpapan merupakan kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berbatasan dengan Kota Balikpapan, juga menempatkan posisi strategis Balikpapan sebagai pintu gerbang keluar-masuk menuju IKN. Penguatan pemenuhan layanan infrastruktur dasar seperti air bersih, sarana prasarana kesehatan, dan peningkatan kualitas kawasan kumuh, serta upaya pengendalian banjir perlu untuk terus dilakukan mengingat Kota Balikpapan juga dipersiapkan sebagai salah satu kota penyangga IKN. Selain itu, penyiapan ketahanan pangan juga perlu dipersiapkan guna mengantisipasi pertambahan penduduk akibat pemindahan IKN.

Sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, kebijakan pengembangan wilayah Kota Balikpapan diarahkan untuk fokus pada pengembangan Kawasan Industri Kariangau. Kawasan ini memiliki luas 2.721 hektar dan terletak pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Kawasan Industri Kariangau memiliki peran yang sangat strategis bagi pertumbuhan industri dan upaya transformasi ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, dimana saat ini kegiatan industrinya telah berjalan

dengan cukup baik. Adapun fokus pengembangan wilayah Kota Balikpapan di tahun 2022 adalah:

1. Penguatan peran Kota Balikpapan sebagai *hinterland*/sub pusat pelayanan bagi kawasan IKN, melalui :
 - a. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau, yang difokuskan pada optimalisasi Pelabuhan Kariangau sebagai outlet maupun inlet pemasaran produk-produk perdagangan dari dan menuju Kalimantan Timur maupun IKN;
 - b. Pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai kawasan industri pengolahan multi produk, terutama industri hilir yang dapat langsung dipasarkan keluar wilayah;
 - c. Peningkatan cakupan layanan air minum melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik dari sisi unit air baku, unit produksi, serta unit distribusinya;
 - d. Pengendalian kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh (rumah tidak layak huni);
2. Pengamanan Kota Balikpapan dari bencana banjir, melalui kerjasama dengan Provinsi dalam hal pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan perbaikan sistem drainase kota;
3. Peningkatan kapasitas SDM melalui penguatan pendidikan-pendidikan vokasi dan balai latihan kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas SDM dengan ketersediaan tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai standar pasar kerja;
4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, seperti pembangunan Ruang Isolasi Khusus (*airborne*) RSKD Balikpapan, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas, serta membina dan melatih seluruh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dalam rangka mewujudkan akreditasi utama;
5. Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
6. Intensifikasi dan pengamanan kawasan hortikultura yang tersebar di tiga titik wilayah Kota Balikpapan;

7. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya diantaranya yaitu membangun dan mengelola Pelabuhan Perikanan Provinsi di Kota Balikpapan;
8. Pengembangan *mini ranch* melalui pola kemitraan dan penyediaan sarana pendukungnya seperti pagar dan *shelter*.



Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Gambar V.14
Areal Pengembangan Kawasan Industri Kariangau

5.2.10 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Kota Bontang

Kota Bontang memiliki posisi geostrategis yang cukup baik untuk pengembangan wilayah karena berada di jalur penghubung utama antara wilayah selatan dan wilayah utara Kalimantan Timur. Sesuai dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, kebijakan pengembangan wilayah Kota Bontang diarahkan pada pengembangan kawasan industri petrokimia berbasis gas dan kondensat. Hal ini telah selaras dengan kondisi eksisting saat ini, dimana terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di sektor industri petrokimia, yakni PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak LNG. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan *major project* pembangunan Kilang Minyak Kota Bontang yang telah tertuang di dalam RKP Tahun 2022. Rencana pembangunan kilang minyak ini telah diakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor

13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2019 – 2039.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan penguatan konektivitas infrastruktur kewilayahan, terdapat permasalahan yaitu belum meratanya aksesibilitas dan konektivitas ke sentra produksi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jalan kewenangan Provinsi di wilayah Kota Bontang.

Sektor maritim dapat menjadi sektor unggulan potensial di tengah ketergantungan perekonomian Kota Bontang pada sektor industri berbasis petrokimia. Kota Bontang yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan laut memiliki potensi perikanan yang cukup besar yang perlu dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung Bontang sebagai kawasan industri potensial berskala nasional, fokus pengembangan wilayah Kota Bontang juga perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kualitas SDM yang memenuhi standar kebutuhan pasar industri. Adapun fokus pengembangan wilayah Kota Bontang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi;
2. Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan, melalui:
 - a. Peningkatan nilai tambah produk perikanan;
 - b. Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil perikanan;
3. Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan;

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2022 adalah “*Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam rangka mendukung IKN*”.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, rencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholder* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merujuk pada program prioritas dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-

2023 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2022, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Penyesuaian terhadap belanja Pemerintah merupakan tindak lanjut dari asumsi dasar ekonomi makro dan/atau pokok-pokok kebijakan fiskal dapat dilakukan dalam bentuk penambahan pada beberapa komponen belanja maupun pengurangan pada komponen belanja yang lainnya. Dalam rangka penyesuaian belanja tersebut, Pemerintah menyampaikan anggaran belanja menurut organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran belanja Pemerintah dalam RKPD tahun 2022 sebesar Rp 11.043.618.621.744,- dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel VI.1
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.053.771.612.000
2	Dinas Kesehatan	181.166.616.190
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	584.016.637.000
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	370.230.242.743
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	78.829.232.335
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	1.407.086.737.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	20.444.175.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.829.418.000
9	Dinas Sosial	69.253.581.905
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.709.813.072

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.571.853.574
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	113.414.042.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	38.714.900.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	23.300.000.000
15	Dinas Perhubungan	56.700.000.000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	59.400.000.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.417.141.000
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	75.668.413.765
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	28.566.473.000
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	134.332.356.000
20	Dinas Pariwisata	34.500.000.000
21	Dinas Perkebunan	50.000.000.000
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	54.679.547.000
23	Dinas Kehutanan	426.973.920.000
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	84.668.560.000
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53.052.588.000
26	Sekretariat Daerah	277.033.316.970
	Biro Umum	181.000.000.000
	Biro Administrasi Pimpinan	11.047.466.970
	Biro Hukum	6.000.000.000
	Biro Organisasi	7.000.000.000
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6.000.000.000
	Biro Kesejahteraan Rakyat	45.485.850.000
	Biro Perekonomian	4.500.000.000
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.086.875.412
	Biro Administrasi Pembangunan	7.913.124.588
27	Sekretariat DPRD	170.801.405.000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.653.150.000
29	Badan Pendapatan Daerah	231.439.372.000
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.768.392.352.190
31	Badan Kepegawaian Daerah	48.976.216.000
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.568.030.000
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.000.000.000
34	Badan Penghubung Provinsi	15.000.000.000
35	Inspektorat	39.000.000.000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.834.973.600
	Jumlah	10.806.996.675.344
	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal BUMD)	236.621.946.400
	JUMLAH BELANJA	11.043.618.621.744

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2022 dijabarkan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan).

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas; pengelolaan Pendidikan sekolah menengah kejuruan; pengelolaan Pendidikan khusus melalui pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa hingga pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sebesar 82%.

2. Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi di 10 kabupaten/kota; penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat di 3 kabupaten/kota.

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat provinsi di 10 kabupaten/kota melalui pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di DTPK (pelayanan kesehatan bergerak, gugus pulau, pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine*; pengadaan alat kesehatan atau alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan serta pengadaan barang penunjang rumah sakit; pengembangan unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/*maintenance centre*; pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kesehatan gizi masyarakat. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada penurunan persentase stunting menjadi 26%; jumlah kematian ibu menjadi 75 jiwa; dan jumlah kematian bayi menjadi 509 jiwa.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi melalui peningkatan sumberdaya kompetensi dan kualifikasi sumber daya kesehatan yang memiliki 9 (5 tenaga *promotive* dan *preventif*, 4 tenaga kuratif). Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase kabupaten/kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sebesar 60%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan target Panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2022 sepanjang 681,61 km melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan ruas di jalan Batu Besaung-Sungai Siring sebagai akses alternatif menuju Bandara APT Pranoto; pembangunan jalan yang diprioritaskan pada pembangunan jalan akses menuju Bandara APT Pranoto untuk memberikan pilihan alternatif jalan; rekonstruksi jalan pada Jalan Tj. Redeb – Talisayan, Jalan Sp 4 Kaliorang – Talisayan, Jalan Patung Lembuswana – Sebulu dan Jalan Perbatasan; pembangunan jembatan Bailey di perbatasan; pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan; rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan fasilitas Pelabuhan laut dan SDP sebesar 87%.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang akan dilakukan pembangunan jaringan pipa distribusi utama (JDU) SPAM di Kabupaten Kutim, Kukar, Kubar, Kota Balikpapan dan Samarinda dengan target total

panjang pipa yang terbangun sepanjang 63.700 meter; Pembangunan dan pengembangan unit produksi SPAM Cendana III kapasitas 200 liter/detik, Sanga-Sanga 50 liter/detik dan SPAM Loa Janan 50 liter/detik. Untuk mendukung pemenuhan air bersih lintas kab/kota di Provinsi Kalimantan Timur, juga akan dilakukan penyusunan dokumen Feasibility Study SPAM Regional Sistem Sepaku Semoi (Penajam Paser Utara-Balikpapan) dan Feasibility Study SPAM Regional Sistem Long Kali (Paser-Penajam Paser Utara). Pencapaian indikator program ini diarahkan pada cakupan akses air minum layak perpipaan sebesar 66,64%.

c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 sistem sungai yang ditangani melalui beberapa aksi yakni Normalisasi Sungai Karangmumus Kota Samarinda dan Sungai Sangatta; Pembangunan Pos Hidrologi & Perangkat Early Warning System Kalimantan Timur; Pembangunan kanal banjir pada sistem sungai Karang Mumus, Karang Asam Besar dan Loa Ipuh Kutai Kartanegara; Pembangunan pengamanan pantai Biduk-biduk; Percepatan Penyiapan Lahan Bendungan Marangkayu. Kegiatan selanjutnya adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar 336 meter jaringan irigasi dalam kondisi baik melalui Pembangunan Bendung Sungai Buluh; Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sebuntal D.I Marangkayu; Pembangunan Gardu Pandang dan Landscaping Bendungan Marangkayu; Pembangunan Jalan Akses Bendungan Marangkayu dan Review Design Daerah Irigasi (Biatan, Merancang dan Semurut Buyung-buyung). Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan persentase capaian layanan SDA sebesar 76%.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi yang akan

mengurangi genangan banjir seluas 12,65 Ha dengan pekerjaan pokok berupa Lanjutan Pembangunan Drainase DI Panjaitan Kota Samarinda (Sistem Sungai Karang Mumus) dan Balikpapan Baru Kota Balikpapan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada panjang saluran drainase yang berfungsi baik sepanjang 3.020 meter.

e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi dengan pelaksanaan Revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan indeks penyelenggaraan penataan ruang sebesar 87%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan provinsi dengan luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha yang difokuskan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh; Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) sebanyak 1.000 unit yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 5 Ha (Kelurahan Loa Kulu dan Kelurahan Jembayan); penyusunan DED Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Samarinda (Kelurahan Karang Mumus II dan Kelurahan Sungai Kapih) dan Kabupaten Berau (Kelurahan Sambaliung dan Kelurahan Teluk Bayur). Pencapaian indikator program ini diarahkan pada pengurangan jumlah rumah tidak layak huni menjadi 70.781 unit.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan kluster kompetensi; pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja melalui proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi di 10 kabupaten/kota dengan jumlah pencari yang ditingkatkan keterampilannya sebanyak 160 orang; koordinasi lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga pelatihan kerja dengan jumlah instruktur yang ditingkat kompetensinya sebanyak 10 orang. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan akreditasi Lembaga pelatihan kerja melalui survey dan penilaian akreditasi pada Lembaga pelatihan kerja di 10 kabupaten/kota. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan di BLKI Balikpapan sebesar 85%; persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan di BLKI Bontang sebesar 85%; dan persentase lulusan pelatihan yang terserap di pasar kerja sebesar 70%.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota melalui penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja dengan target 40 orang pencari kerja yang terlatih; pelayanan antar kerja dengan 1.500 orang jumlah pencari kerja yang terdata; pembinaan operasionalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal); Pengelolaan Informasi Pasar Kerja melalui pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online* dengan ketersediaan layanan informasi 75%; *Job Fair*/bursa kerja dengan 75% pencari kerja yang

ditempatkan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase penempatan tenaga kerja sebesar 31%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarustamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi; Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan provinsi dengan melakukan pendampingan dan advokasi sebanyak 75 peserta; Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan provinsi dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan kebijakan PUG; kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi melalui peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan provinsi dengan melakukan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan sebanyak 190 peserta; Advokasi kebijakan dan pendampingan penempatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan melakukan pendampingan dan advokasi sebanyak 120 peserta; kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi melalui advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi dengan melakukan advokasi dan pendampingan sebanyak 200 peserta; Peningkatan kapasitas sumberdaya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi dengan melakukan peningkatan kapasitas Lembaga layanan sebanyak 500 peserta; Pengembangan komunikasi informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada pengimplementasian kelembagaan PUG sebanyak 1 kebijakan PUG.

3. Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut dengan melakukan pembinaan izin lingkungan/persetujuan lingkungan/perizinan berusaha/persetujuan pemerintah pada 10 pelaku usaha dan penerbitan rekomendasi izin lingkungan/persetujuan lingkungan/perizinan berusaha/persetujuan pemerintah sebanyak 25 dokumen; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di 10 kabupaten/kota dan melakukan bimtek/diklat pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penyelenggaraan sistem MRV. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) sebesar 53,80; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,16; Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 79,86; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 83,61.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah Desa Tertinggal dan

Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan sebanyak 30 desa.

5. Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dengan target peningkatan perlengkapan jalan di jalan provinsi sebesar 80% melalui pemeliharaan perlengkapan jalan dan penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan yaitu LPJU Konvensional di Jalan Provinsi. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas menjadi 427 kasus.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dengan target peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan regional sebesar 97% melalui sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional yang akan dilakukan pembangunan saluran drainase di Pelabuhan Maloy dan Penyusunan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP sebesar 87%.

6. Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan implementasi *e-government* sebesar

3,10 indeks pada 26 Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi.

7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi bagi 100 Koperasi yang dilakukan pengawasan, dengan sub kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel dengan dilaksanakan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan sebanyak 106 kegiatan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target Koperasi sehat sebesar 10%.

b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan bagi 10 wirausaha pemula, dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan bagi 175 UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran, Sertifikasi Halal, Gebyar UKM. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target UKM naik kelas sebesar 1%.

c. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

bagi 1 wirausaha mandiri, dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi melalui Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM sebanyak 60 kegiatan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan *platform* pasar berbasis digital sebesar 3%.

8. Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangn Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi melalui penyelesaian penerbitan 1400 izin/non izin, dengan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui kegiatan pelatihan tentang pelatihan pelayanan yang prima sebanyak 2 kegiatan; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal bagi 7000 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan melalui pencapaian persentase pengaduan yang diselesaikan sebesar 100%; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah sebanyak 10 laporan koordinasi dan sinkronisasi. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada percepatan penyelesaian proses perizinan menjadi 11 hari.

b. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi bagi 7 perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri, melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal pada 7 LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (*online*);

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi 7 perusahaan yang dibina; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi 7 perusahaan yang diawasi. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM sebesar 100%.

9. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi melalui pada Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha; kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 2 Aplikasi/Web Data Keolahragaan dan 1 Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI); kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga melalui Standardisasi 65 Organisasi Keolahragaan, Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait, Pengembangan Organisasi Keolahragaan yang melibatkan 1500 orang Masyarakat dan 500 orang Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional; dan kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga melalui *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Provinsi dengan target 2000 orang Atlet dan Pelatih. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pengembangan daya saing keolahragaan sebesar 70%.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi dengan melakukan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi sebanyak 150 orang; Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi melalui 230 orang Pemuda yang dikader Iptek, 42 orang Pemuda yang

difasilitasi dalam Kreativitas Kepemudaan, 2000 orang calon Wirausahawan muda yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan sebesar 1%.

10. Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi melalui Pemberian 9 Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca kepada Perpustakaan dan Pemustaka serta pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi melalui Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik di 5 perpustakaan, Pengembangan 20 Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi, Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi dengan jumlah 30 keping pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alihmedia, Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan keluaran 10 perpustakaan yang terdapat pada SMA dan SMK yang terakreditasi; Peningkatan Kapasitas 30 Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada Prosentase Peningkatan jangkauan dan kapasitas perpustakaan yang terakreditasi sebesar 9%.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi (1 kawasan) dengan sub – sub kegiatan yaitu pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat guna dengan target 2 kawasan; rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan target 5 kawasan; mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan target 1 kawasan wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif seluas 297.805,90 Ha.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil (2 kegiatan) melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap sebanyak 64 KUB penerima bantuan sarana penangkapan perairan laut; pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (4 kegiatan) melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap sebanyak 4 KUB penerima bantuan sarana penangkapan perairan umum daratan; penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (200 pertek/rekomendasi); penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan perikanan provinsi (3 lokasi) melalui sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan dengan target 1 unit sarana dan prasarana berupa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang di Pangkalan Pendaratan Ikan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 162.593 ton.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut (3 lokasi) melalui penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut dengan target 3 unit teknis prasarana operasional balai percontohan budidaya perikanan dan 10 unit teknis prasarana

perikanan budidaya air laut yang disediakan; penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dengan target 7 unit prasarana perikanan budidaya air payau dan air tawar yang disediakan dan 5 unit prasarana perikanan budidaya air tawar (BIOFLOK); penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut dengan target 1 pokdakan penerima bantuan sarana perikanan budidaya; dan penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dengan target 1.000.000 benih dan 19 pokdakan penerima bantuan sarana perikanan budidaya air payau dan air tawar. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya 164.441 ton.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar (20 UMKM) melalui pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar sebanyak 20 sertifikat; dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan target 4 promosi pendukung pemasaran produksi perikanan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan sebanyak 3 jenis.

2. Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi melalui perancangan dan perencanaan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi dan pengembangan daya tarik wisata unggulan provinsi dengan 1 dokumen perencanaan dan 3 unit produk wisata unggulan; pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi melalui Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dengan 1 sarpras yang diadakan dan 30 orang yang diberdayakan; pengelolaan destinasi pariwisata provinsi melalui 10 kali monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata provinsi dan 50 orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui pengelolaan investasi pariwisata, pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata, dengan pelaksanaan 1 forum investasi, 10 usaha pariwisata yang dibina dan 5 fasilitasi standarisasi dan usaha pariwisata. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah destinasi dalam kawasan provinsi yang dikembangkan sebanyak 3 destinasi.

b. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, dengan 1 sarpras kota kreatif yang disiapkan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif sebanyak 2 kegiatan; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi kekayaan intelektual dengan 1 kekayaan intelektual yang dibatasi dan 5 kali pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem kreatif. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan sebesar 23,53%.

3. Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan target 3.7 Ton Peningkatan produksi dan 283.592 Ton Produktivitas Tanaman Hortikultura, melalui Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian dengan target 40.000 Benih Hortikultura, 200.000 Benih Padi, 750 Liter Herbisida, 1.000 Kg Hormon, 400.000 Kg Pupuk, 10 unit sarana pertanian hortikultura yang diawasi, dan 15 unit sarana pertanian tanaman pangan yang diawasi. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada meningkatkan jumlah produksi padi dengan target 279.581 ton dan jumlah produksi tanaman hortikultura dengan target 283.592 ton.

Perkebunan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan target Produktivitas Komoditas Strategis sebesar 19,3 Ton/Ha melalui Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian dengan target 1 Dokumen dan Produktivitas pada masing-masing Komoditas Perkebunan yakni Kelapa Sawit 21 Ton/Ha; Karet 1,45 Ton/Ha; Kelapa 0,85 Ton/Ha; Kakao 0,8 Ton/Ha; dan Lada 1,19 Ton/Ha. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada produksi komoditas perkebunan sebesar 18.126.490,20 ton.

Peternakan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan target 10 kelompok peternak melalui Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan target 92 ekor. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan angka kelahiran sapi sebesar 21%.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan prasarana pertanian dengan target 226 kelompok tani yang menerima bantuan tanaman pangan dan 7 unit prasarana pertanian hortikultura, melalui sub kegiatan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian seluas 110 Ha kawasan pertanian hortikultura dan 8.000 Ha luas tanam tanaman pangan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada luas lahan kelompok tani tanaman pangan yang difasilitasi seluas 8.000 ha; jumlah fasilitas pengembangan sarana pertanian hortikultura sebanyak 7; dan Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara sebanyak 1 unit.

Perkebunan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan target 595 Ha luas kebun yang di perluas melalui Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan sebanyak 30 kelompok dan luas kebun yang dibangun seluas 1.462.645 ha.

Peternakan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penataan Prasarana Pertanian melalui Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan fasilitasi sarana dan prasarana *Mini Ranch* ini diharapkan dapat meningkatkan rata-rata kepemilikan ternak sapi 20 – 30 ekor per peternak. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah *mini ranch* yang teregister sebanyak 49 unit.

c. Program Penyuluhan Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan melalui Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dengan target 120 penyuluh yang dibina; Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dengan target 210 petani yang dibina; Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi

Petani Berbasis Kawasan melalui Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani dengan target 5 kali. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah aparatur, non aparatur yang dibina sebanyak 330 orang dan jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina sebanyak 4 lembaga.

Perkebunan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan melalui Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani dengan target 5 unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama Komoditas Perkebunan yang dibentuk dan dibina serta 5 Pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya; Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, dengan target 25 orang SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan; Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian melalui Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan target 5 Produk olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan dan 9 produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk sebanyak 1 lembaga.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan target 135 Pelaku Usaha yang pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan dan seluas 195 Ha Lahan yang dikendalikan, melalui Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan pada 1 Perusahaan Minyak Sawit (PMS) dan Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi sebesar 102.500 Ha; dan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dengan target 15 Kelompok

Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina serta 5 Konflik perkebunan yang ditangani. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan target 4,067 Juta Ton Co2Eq.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 97 Perusahaan/Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina dan dimitrakan, melalui Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dan diharapkan Jumlah Kelembagaan yang dimitrakan sebanyak 45 lembaga dan Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina 52 Perusahaan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) sebanyak 35 perusahaan.

4. Kehutanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan melalui penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan dengan KTH/KUPS Teregistrasi (KTH) sebanyak 124 KTH. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat seluas 32.000 ha.

b. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung dengan sub kegiatan pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan; kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara dengan sub kegiatan pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara dan pengembangan

perbenihan untuk rehabilitasi lahan; kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya; kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun dengan sub kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada produksi hasil hutan kayu sebesar 5.000.000 m³ dan produksi hasil hutan non kayu sebesar 7,5 ton.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi dengan target Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air melalui pembangunan instalasi biogas sebanyak 40 unit, upaya efisiensi listrik di 10 instansi, 50 penyalur BBM dan 50 penyalur LPG; penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada pemanfaatan EBT sebesar 7,34%.

b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan pada kegiatan penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi dengan target jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) sebanyak 15 perusahaan melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi dengan target jumlah usaha ketenagalistrikan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan

sebesar 140 objek pembangkit; dan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, daerah terpencil dan perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan berupa pembangunan PLTS di 6 lokasi yakni Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Paser, serta pembangunan jaringan distribusi listrik di 2 lokasi yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah KK berlistrik sebanyak 1.165.000 KK.

6. Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi bagi 2 orang calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor, dengan sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan bagi 2 orang Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang dan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor bagi 4 orang Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bimtek. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara sebesar 5%.

7. Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi sebanyak 5 dokumen rencana pembangunan industri provinsi, dengan sub

kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri melalui penyusunan kebijakan sebanyak 3 dokumen; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri melalui pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri sebanyak 1 dokumen; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat melalui pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat sebanyak 5 dokumen; dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri sebanyak 1 dokumen. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada jumlah industri pengolahan non migas dan non batubara di kawasan peruntukan industri sebanyak 2 industri.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja melalui Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada peningkatan persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 79% dan persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIPnya memperoleh Predikat Minimal (BAIK) sebesar 79%.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sebanyak 4 dokumen strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain, dengan sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebanyak 4 dokumen strategi kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan lain-lain. Dan diarahkan pada kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan hasil 4 dokumen pengelolaan dana transfer, dengan sub kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi sebanyak 4 dokumen pengelolaan dana transfer. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya sebesar 100% dan Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim sebanyak 108.243 wajib pajak.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui sub kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah melalui perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah sebanyak 2 dokumen/aplikasi; Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 5 layanan sarana dan prasarana layanan pembayaran Pajak Daerah; Penetapan Wajib Pajak Daerah sebanyak 2 dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah; dan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan hasil 9 laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase tercapainya target pendapatan asli daerah sebesar 100%.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal melalui sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Reviu Laporan Keuangan; Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota; Kerjasama Pengawasan Internal; dan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Pencapaian indikator program ini diarahkan pada persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 90%.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan

dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2022. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VII.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	Target 2021	Target 2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,75	77,25
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	6,00
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,75
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,00	0,00
5.	PDRB per Kapita (Juta Rp)	167.5	170
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Batubara (%)	1,5	2
7	Nilai Tukar Petani	112	113
8	Indeks Gini	0,313	0,313
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.95	76,05
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)	B (72,50)

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta

4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah di sajikan tabel VII.2 berikut:

Tabel VII.2
Penetapan Target Indikator
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4.50	4.70
1.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,06	9,67
1.3	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	-	15.23
1.4	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	8.24	9.64
1.5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,63	0,65
1.6	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,36	0,37
1.7	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,94	5,2
1.8	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,67	1,7
1.9	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1.13	1.07
1.1 0	Jumlah Penduduk Miskin	230.260	231.213
1.1 1	Indeks Williamson	0,594	0,472
2	Fokus Kesejahteraan Sosial		
2.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.77	9.70
2.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.72	14.73
2.3	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74.33	73.78
2.4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	11.728	12.028

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		
3.1	Persentase /Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal (%)	150	233
3.2	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	35	55
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
a	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
1.1	Persentase /Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	150	233
1.2	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	55	86
1.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA. SMK. MAK. SMLB (%)	73	82
1.4	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	98	100
1.5	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	13000	26000
1.6	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	2500	2500
1.7	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	90	97
1.8	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	70	80
2	Kesehatan		
2.1	Persentase Kab/Kota yang memiliki $\leq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan	55	85
2.2	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	85	95
2.3	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	23.50	91
2.4	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	90	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3.1	Kapasitas Air Baku (L/detik)	-	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
3.2	Persentase Capaian Layanan SDA	-	76.00
3.3	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	62,64	66,64
3.4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	72.881	70.781
3.5	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	75.34	-
3.6	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	87%
4	Ketentraman. Ketertiban Umum. Dan Perlindungan Masyarakat		
4.1	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	50	71
4.2	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	61.33	90.67
4.3	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	80	90
5	Sosial		
5.1	jumlah PMKS yang tertangani (PMKS)	405	3000
b	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja		
1.1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	-0,27	35,00
1.2	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	80	80
1.3	Persentase Wirausahawan Baru dari Pencari Kerja (%)	30	40
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65.65	65,64
2.2	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	82	90
2.3	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	62	87
2.4	Rasio KDRT	27.2	0.042
2.5	Kampung KB	175	185
3	Lingkungan Hidup		
3.1	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	50.72	28.5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
3.2	Indeks Kualitas Air Sungai	53.7	58.13
3.3	Indeks Kualitas Udara	89.06	83.76
3.4	Indeks Kualitas Air Laut	83.51	83.71
3.5	Indeks Kualitas Lahan	79.76	79.86
3.6	Indeks Risiko Bencana	153.49	151.49
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
4.1	Jumlah desa tertinggal (desa)	132	28
4.2	Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes)	393	35
4.3	Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa)	456	35
4.4	Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	393	35
4.5	Jumlah kampung/desa Iklim +	22	27
5	Perhubungan		
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	3.570.750	6.000.000
5.2	Jumlah barang (ton)	294.478.39 7	337.000.00 0
5.3	Peningkatan Fasilitas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (84%)	11 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (87%)
5.4	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	448 Kasus	427 Kasus
6	Komunikasi dan Informatika		
6.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.14	3.25
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
7.1	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	-	1
7.2	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	-	10
7.3	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	-	3
8	Kepemudaan dan Olahraga		
8.1	Indeks Pembangunan Pemuda	57.23	58.27

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kebudayaan	150	0
10	Perpustakaan		
10.1	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang)	77.884	639.3
c	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan		
1	Pariwisata		
1.1	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	3	3
1.2	Persentase tercapainya target jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi (%)	-	95
2	Pertanian		
2.1	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi	-	8.100 Ha
2.2	Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Tanaman Hortikultura	-	7 unit
2.3	Jumlah produksi padi	262430 ton	279.681 ton
2.4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	-	283.592 ton
2.5	Jumlah Aparatur. Non Aparatur yang dibina	-	330 Orang
2.6	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang dibina	-	4 Lembaga
2.7	Jumlah <i>Mini ranch</i> yang teregister	12 unit	49 unit
2.8	Angka Kelahiran Sapi	20.10%	21.00%
2.1	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	2,916 juta ton CO ₂ eq	4,067 Juta Ton CO ₂ eq
2.1	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	-	30 Kelompok Tani
2.1	Luas Kebun yang dibangun	1.389.078 Ha	1.462.645 Ha
2.1	Produksi komoditas perkebunan (ton)	16.809.560 ton	18.126.490, 20 ton
2.1	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	-	1 Lembaga
2.1	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	18 Perusahaan	35 Perusahaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kehutanan		
3.1	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	32000	32000
3.2	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	4808965.74	5000000
3.3	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	864.9	7.5
4	Energi dan Sumber Daya Mineral		
4.1	Persentase pemanfaatan EBT (%)	4.80	7.34
4.2	Jumlah KK Berlistrik (KK)	1,105,227	1,165,000
5	Perdagangan		
5.1	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	12.877	1.72
5.2	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	-	5
6	Perindustrian		
6.1	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	-	2
7	Kelautan dan Perikanan		
7.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	155.000	164.441
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	158.709	162,593
7.3	Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	-	297.805,90 Ha
7.4	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	-	20 UMKM
7.5	Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)	-	30 IUP
d	Fokus : Urusan Penunjang		
1	Perencanaan		
1.1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	87	94
2	Keuangan		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	10,132	11,001
2.2	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	-	100
2.3	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)	-	100
2.4	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	-	108,243
3	Pengawasan		
3.1	Hasil Penilaian Integritas	66.67	80
4	Umum/Sekretariat		
4.1	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%)	74	79
4.2	Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma. Standar prosedur dan kriteria (%)	87	95
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%)	61	79
4.4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	60.53	89.47
C	ASPEK DAYA SAING		
1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur		
1.1	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	58,88	76,15
1.2	Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubung (Kawasan)	2	5
1.3	Capaian akses Air Minum Layak (%)	64,53	68,53
1.4	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13,878.50	14,278.50
1.5	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	477	374
1.6	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1.287,82	1.187,82
1.7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66.46	76.74
1.8	Rasio elektrifikasi (%)	90.21	93.00
2	Fokus iklim berinvestasi		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	24,77	35,00
2.3	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	12	11
2.4	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	-	100
3	Fokus Sumber Daya Manusia		
3.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76.60	77
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82.50
3.3	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 3

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, pada tabel VII.3 dibawah ini:

Tabel VII.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Urusan Pendidikan					
1	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	53%	47,24%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	26,5%	25,56%	
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	98%	99.07%	
		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	90%	98.17%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	99%	100%	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan khusus	88%	100%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
3	Terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah SMK yang terevitalisasi	219 Unit	900 Unit	
2. Urusan Kesehatan					
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,388194444	1:1000 Rasio Penduduk	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	100%	90%	
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	100%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%		
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	75	205/ 100.000	
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	0	15%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	0	91%	
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	28,52%	18,4%	
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	0	7,5	
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	145	231/ 100.000	
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0	0,19	
		Temuan menggunakan indikator SPM 100% (terduga TB)	0	90%	
		<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	0	90%	
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	75%	71%	
		Persentase Kabupaten/kota dengan Puskesmas yang 9	59%	59%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		jenis tenaga kesehatan sesuai standar			
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1 kab/kota	365 kab/kota	
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	21,9%	8,9%	
		Jumlah kabupaten/kota dengan $\geq 40\%$ FKTP yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	0	40%	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	0	90%	
		Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota	0	60 kab/kota	
4	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha	100%	80%	
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang	100%	90%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
	Kecil Obat Tradisional (UKOT).	memenuhi ketentuan perizinan			
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan perizinan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) dan Usaha Mikro Obat Tradisional sesuai standar	0	49%	
3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah beririgasi	59,3%	54%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	650 Ha	34.125 Ha	
		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	180 Ha	143.826,2 Ha	2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	0	25 Km	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
2	Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	68,53%	95,9%	
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	66,64%	27,1%	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	50,33%	10%	
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	100%	83,6%	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	84,53%	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	15,01%	2,98%	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang	69,74%	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		terkelola dengan baik di perkotaan			
3	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	76,15%	72%/62%	
		Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	41 Km	50 Km	
4	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	6 Materi Teknis	394 Materi Teknis	
		Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	11 Persetujuan Substansi	1122 Persetujuan Substansi	
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	-	125 Materi Teknis	
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	0	1153 Materi Teknis	
5	Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ,	0	2 DAS	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)			
		Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	0	2 DAS	
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	100%	
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	10 Ha	5779 Ha	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
3	Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Presentase permukiman yang sudah dilengkapi	0	100%	
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	0	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	0	75%	
2	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana	0	100 %	
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	0	100 %	
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	0	100 %	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	100 %	
3	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	0	100 %	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	0	50%	
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	0	50%	
6. Urusan Sosial					
1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	9%	60 %	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	772 orang	3000 orang	
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	103 orang	7230 orang	
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	10%	100 %	
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	8 Badan Usaha	150 Badan Usaha	
		Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	200 KPM	7000 KPM	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	66850 KPM	10,000,000 KPM	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	326 orang	150 orang	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	326 orang	8000 orang	
		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	5 lembaga	4000 lembaga	
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	200 orang	18000 orang	
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	2000 jiwa	350,000 jiwa	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	1000 jiwa	250,000 jiwa	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	1000 kelompok masyarakat	358 kelompok masyarakat	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	10 kelompok masyarakat	375 kelompok masyarakat	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	1118 orang	120.000 orang	
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	50 orang	1,200 orang	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0	3,60 %	
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	4%	24 %	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1,4%	0,53 %	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi	0	20.51 %	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		kebutuhan dasarnya di dalam panti			
7. Urusan Tenaga Kerja					
1	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	20%	19-20%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	688 Orang	17.800 Orang	
3	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	0	1.189.550 Orang	
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	748 Orang	12.000 Orang	
4	Meningkatnya kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online	60%	60%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
	keselamatan dan kesehatan kerja				
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	50%	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2020	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	70%	85%	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,73	Meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020	
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	0	Meningkat minimal 3% dari kondisi 2020	
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	75%	70%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
9. Urusan Pangan					
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	7%	10%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase daerah rentan rawan pangan	11%	14%	
		Skor Pola Pangan Harapan	0	92,8%	
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	92%	85%	
10. Urusan Pertanahan					
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	0	129523 Kepala Keluarga	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	0	423421 bidang	
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	0	42422 Hektar	2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
11. Urusan Lingkungan Hidup					
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,05 Poin	69.22 Poin	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	1700 Lembaga %	Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	98%	97 %	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	100 %	
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	100 %	
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian	100%	100 %	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		pada semua individu yang perceraianya dilaporkan			
		Pemanfaatan data kependudukan	26%	80 %	
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	0	13.494 Orang	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	0	2500 lembaga	
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	0	2500 Sistem pelayanan	
2	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	0	3944 Desa	
		Jumlah Desa Berkembang	0	56791 Desa	
		Jumlah Desa Tertinggal	0	14402 Desa	
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	0	7500 Bumdes	
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,3 Index	57.00 Index	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,04%	62.54%	Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,04%	62.54%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	7,92%	8.00%	
15. Urusan Perhubungan					
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80	85.00 (Nilai)	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	80%	78.44 %	
2	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0,841 Rasio	0.695 Rasio	
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100 ribu Keberangkatan	0	28.85 Rasio	
16. Urusan Komunikasi dan Informatika					
1	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan	40%	80%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		terhubung dengan jaringan intra pemerintah			Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	30%	65%	
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	0	65%	
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	0	30%	
		Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	0	100%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
4	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200 orang	200 orang	
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	0	200%	
5	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	0	70%	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses	0	70%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah			
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	0	70%	
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	0	75%	
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	12%	50%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	0,31%	50%	Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
18. Urusan Penanaman Modal					
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	27.36 Triliun	Rp. 968400000000 000	Daerah
19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					
1	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,25%	6.69% (Persen)	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,15%	0.55% (Persen)	
3	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	0,25	12 (Medali emas)	
20. Urusan Statistik					
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	0	100 %	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		perencanaan pembangunan daerah			kemampuan keuangan Daerah
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	0	100 %	
21. Urusan Persandian					
1	Menguatnya kemandirian siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	0	100 Orang	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	0	5 Daerah	
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	0	100 Orang	
22. Urusan Kebudayaan					
1	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	27%	36 %	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		pelaku/pendukung pertunjukan seni			dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	3900 Unit	4,156 Unit	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	30%	36 %	
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	350Unit	460 Unit	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	27%	1.96 %	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	10%	12 %	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan,	100Unit	400 Unit	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		pemeringkatan, penghapusan)			
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	75Unit	113 Unit	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	38 Orang	50 Orang	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	34 Orang	50 Orang	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	30%	36%	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	10%	12%	
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan	0,25%	0.31%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)			
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	27%	1.96%	
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	19%	22.33%	
23. Urusan Perpustakaan					
1	Literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12	13 (Index)	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65	63,3 (Nilai)	
24. Urusan Kearsipan					
1	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	2500 Arsip	148. 880 Arsip	Daerah menyesuaikan besaran Target

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	300 Orang	170.362 Orang	dengan hasil
25. Urusan Kelautan dan Perikanan					
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)	297.805,90 Ha	17.500.000 Ha	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K	0	34 dokumen	
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	162593 ton	8.320.000 ton	
		Produksi Perikanan Budidaya	164441 ton	20.540.000 ton	
		Produksi Garam	40 ton	3.200.000 ton	
		Konsumsi ikan	56 kg/kap/th	59,53 kg/kap/th	
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	100%	93%	
		Operasi kapal pengawas/speedboat	36 hari	180 hari operasi	
26. Urusan Pariwisata					

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	3.925.000.000	1.398.000.000.000	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	2.000.000	260.000.000-280.000.000)	
		Kontribusi PDB Pariwisata	1,01%	4.3%	
27. Urusan Pertanian					
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	0,5%	2,00%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	0,98%	1,20%	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	3,9%	3,28%	
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	2%	1,20%	
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Tanaman Pangan = 76% Hortikultura = 55% Perkebunan = 61%	Tanaman Pangan = 95% Hortikultura = 90-95% Perkebunan = 80%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	21,42%	80,5%	
28. Urusan Kehutanan					
1	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	3918 Ha	100000 Ha	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	32000 Ha	250000 Ha	
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)	100%	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	7,34%	15.7%	
3	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi	93%	100%	
30. Urusan Perdagangan					

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	1%	5,96% - 7.86%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	70%	55% – 75%	
3	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	42%	
4	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	85%	90%	
5	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	31,91%	50-75%	
6	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	70%	91%	
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	17%	5.9%	

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
8	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan bergejolak	1%	3%-5%	
31. Urusan Perindustrian					
1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	4,17%	6.8%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	9,64%	18.3%	
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	12,55	151.9 (Nilai)	
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	94916 orang	20.6 juta	
5	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	27,6 Triliun	425.3 Triliun	
32. Urusan Transmigrasi					

No	Kinerja	Indikator Provinsi	Target Provinsi 2022	Target Nasional	Keterangan
1	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	4	53.12 (Index)	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	4	42.03 (Index)	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Tema Pembangunan RKPD tahun 2022 adalah “*Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN*”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2022 yaitu menguatkan daya saing daerah seperti SDM, infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi yang berbasis IT.

Penyusunan RKPD tahun 2022, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan RKPD tahun 2022 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD tahun 2022 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2022 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RKPD Tahun 2022 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;
3. RKPD tahun 2022 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022;

4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan mempedomani RKPD Tahun 2022 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2022 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2022;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun 2022 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Tahun 2022;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD tahun 2022;
8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil evaluasi akhir tahun pelaksanaan RKPD tahun 2022 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023;
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007